BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang ...

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan . . .

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 08);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan . . .

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG Kabupaten Serang adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Serang
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2021-2026.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.
15. Program adalah sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh perangkat daerah.

16. Kegiatan . . .

Dipindai dengan CamScanner

16. Kegiatan adalah bagian dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang atau jasa.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan.
18. Keluaran adalah keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk.
19. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran.

BAB II

MUATAN DAN RENCANA KERJA-PD

Pasal 2

Renja-PD memuat:

a. Program dan kegiatan
b. Lokasi kegiatan
c. Kelompok sasaran; dan
d. Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra-PD dan Renja-PD.

Pasal 3

(1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

(2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atai tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa dan Kecamatan.

(3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat yang rentan termaginalkan.

(4) Indikator . . .

Dipindai dengan CamScanner

(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terderi dari;

a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan

b. Indikator Kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

BAB III

PENYUSUNAN RENJA-PD

Bagian Kesatu

Tahapan Penyusunan Renja-PD

Pasal 4

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Persiapan Penyusunan Renja-PD;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD;
c. Penyusunan Rancangan Renja-PD;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD;
f. Penetapan Renja-PD.

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Renja-PD

Pasal 5

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja-PD;
b. Orientasi mengenai Renja-PD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Desember.

(2) Penyusunan . . .

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Berpedoman pada Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD.

(2) Berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renja-PD sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup:

a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
b. Hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu.

Pasal 9

Hasil perumusan rancangan awal Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat;

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.

Pasal 10

(1) Rancangan awal Renja-PD disempunakan berdasarkan Surat Edaran Bupati.

(2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok saasran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

(3) Rumusan . . .

Dipindai dengan CamScanner

(3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG dalam Forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Renja-PD

Pasal 11

(1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan proses peyempurnaan rancangan awal Renja perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Rancangan renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Preangkat Daerah.

(3) Rancangan renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

(1) Rancangan Renja-PD sabagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikai dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

(2) Rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret

Pasal 13

(1) BAPPEDALITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada Perangkat Daerah.

(4) Berdasarkan . . .

Dipindai dengan CamScanner

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja-PD.

(5) Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah ke pada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 14

Verifikasi rancangan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDALITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD

Pasal 15

(1) Perumusan rancangan akhir Renja-PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renja-PD

(2) Perumusan rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

(3) Rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keenam

Penetapan Renja-PD

Pasal 16

(1) Rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 17 . . .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja-PD lainnya.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerahmenyempurnakan rancangan akhir Renja-PD.

(4) Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

Pasal 18

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

(1) BAPPEDALITBANG menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Serang untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Penetapan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 20

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalammenyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN2024 NOMOR 54

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panancangan Baru No. 36 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang

e-mail : disdikbud@serangkab.go.id , website : https://dindikbud.serangkab.go.id/

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 050/Kep. 1110.1 /Disdikbud/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025;

b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pemerintah
Kabupaten Serang

RENJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dindikbud.serangkab.go.id disdikbud@serangkab.go.id

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya penyusunan **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025. Kami berharap dokumen RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat bermanfaat.

Kami ucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh puhak dalam seluruh proses penyusunan dokumen RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Serang, 03 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 serta Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7

2.2 Analis Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 42

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 44

2.5 Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 57

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **60**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 60

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 61

3.3 Program dan Kegiatan 63

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **93**

BAB V PENUTUP **103**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja 7

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang Periode 2021-2026 15

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang 38

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 45

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Serang..... 57

Tabel 3.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran Renstra 2022- 2026..... 61

Tabel 3.3.1 Sinkronisasi Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) 64

Tabel 3.3.2 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)..... 71

Tabel 3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 79

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan penjabaran Target Pembangunan Tahun ke-4 dari RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan pendidikan pada tahun 2022 dan 2023. Permasalahan yang akan ditangani di Tahun 2025 adalah Pengembangan layanan Pendidikan demi meratanya kualitas pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Serang dengan memfokuskan pada standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan dan untuk urusan kebudayaan masalah yang akan diselesaikan adalah pengembangan dan peletarian seni budaya, sejarah tradisi dan perlindungan situs cagar budaya.

Rancangan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 memuat arah kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat atau Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan Kegiatan yang disusun terkadang

merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Proses penyusunan RENJA perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan RENJA perangkat daerah dapat dikerjakan secara pararel dengan penyusunan Rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan RENJA Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Perangkat daerah, selanjutnya kepala perangkat daerah menetapkan RENJA Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan renja meliputi :
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ; dan
   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Serang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

   Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 TAHUN 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang TA 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
16. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Penyusuna Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
17. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 500.14.2.1/1/Bappedalitbang/Setda/2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.
18. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Rancangan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Serang dalam mencapai indkator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi Bupati.

2. Tujuan

Adapun tujuan Rancangan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

a. Mengatur strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2022-2026.

b. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada hasil.

c. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Serang dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya.

Bab II, Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu (tahun -3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2), dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran RENJA SKPD dan Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

a) Rumusan Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan;

b) Pelaksanaan rencana Program dan Kegiatan;

c) Hasil dari rencana Program dan Kegiatan.

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik bersifat rutin maupun pembangunan. Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 9 program, 19 kegiatan dan 114 sub kegiatan. Realisasi Penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dari total anggaran sebesar Rp. 1.148.305.554.400,- dan terserap sebesar Rp 1.110.490.861.107,- atau **96,71%** yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal. Tabel evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah ini:

TABEL 2.1.1

CAPAIAN KINERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

TAHUN ANGGARAN 2023

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**727.219.191.003**	**696.592.665.242**			**95,79%**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.975.400**	**40.813.000**			**74,24%**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.434.000	20.793.000		100%	97,01%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.645.000	4.940.000		100%	57,14%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.860.000	3.770.000		100%	77,57%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.233.400	4.125.000		100%	50,10%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.803.000	7.185.000		100%	60,87%
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**726.166.055.818**	**695.685.097.451**			**95,80%**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	725.539.426.018	695.081.777.451		100%	95,80%
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	619.489.800,00	603.320.000		100%	97,39%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.140.000,00	-		100%	0,00%
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.041.000**	**3.827.000**			94,70%
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.041.000	3.827.000		100%	94,70%
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**			**100,00%**
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000		100%	100,00%
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**249.508.347**	**237.821.163**			**95,32%**
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.200.300		100%	72,00%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	103.000.000		100%	98,10%
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.382.847	27.216.875		100%	81,53%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000		100%	100,00%
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.805.500	12.755.700		100%	99,61%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.820.000	80.148.288		100%	99,17%
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**567.447.138**	**480.323.928**			**84,65%**
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.092.520	206.157.130		100%	74,13%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.354.618	274.166.798		100%	94,75%
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**167.163.300**	**134.782.700**			80,63%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	87.847.100	58.456.200		21,74%	66,54%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.759.000	22.202.000		100%	89,67%
21	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.557.200	34.124.500		100%	98,75%

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000		100%	100,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
B	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**395.726.294.897**	**388.701.568.615**			**98,22%**
VIII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**203.703.305.911**	**198.227.987.351**			**97,31%**
23	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.000.000	1.880.000			94,00%
24	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.791.306.640	1.665.202.702	100%		92,96%
25	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	428.158.000	411.640.637	100%		96,14%
26	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	829.760.000	705.479.070	100%		85,02%
27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	263.396.000	219.280.160	100%		83,25%
28	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.930.132.000	1.739.354.359	100%		90,12%
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.867.549.500	8.955.284.923	100%		90,75%
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	148.565.000	142.771.706	100%		96,10%
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	38.153.000	36.242.173	100%		94,99%
32	Pengadaan Mebel Sekolah	26.858.220.500	23.962.249.800	100%		89,22%
33	Pengadaan Perlengkapan Siswa	75.000.000	71.930.400	100%		95,91%
34	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.430.000.000	1.429.200.000		100%	99,94%
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.547.902.179	1.118.220.000		100%	72,24%
36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	272.070.600	267.522.000		100%	98,33%
37	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	108.488.800	101.836.900		100%	93,87%
38	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	921.143.192	787.365.159		100%	85,48%
39	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.000.000	4.361.000		100%	87,22%
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0	-			
41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	154.672.912.500	154.123.206.516		100%	99,64%

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	47.088.000	46.750.000		100%	99,28%
43	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.986.210.000	1.970.871.846	100%		99,23%
44	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2.000.000	1.900.000		100%	95,00%
45	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.000.000	1.998.000		100%	99,90%
46	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000	2.000.000		100%	100,00%
47	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	474.250.000	461.440.000		100%	97,30%
IX	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**107.390.088.481**	**106.352.981.210**			**99,03%**
48	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.000.000	-		100%	0,00%
49	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
50	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.053.128.000	1.004.902.704	100%		95,42%
51	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	361.365.400	343.461.679	100%		95,05%
52	Pembangunan Laboratorium	1.040.417.300	989.672.881	100%		95,12%
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.384.060.000	3.226.532.591	100%		95,35%
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.705.277.281	10.076.532.954	100%		94,13%
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2.498.746.000	2.369.014.314	100%		94,81%
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	450.610.000	437.118.872	100%		97,01%
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.532.849.000	1.447.615.948	100%		94,44%
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.599.629.050	2.462.702.308	100%		94,73%
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.099.042.000	1.061.099.990	100%		96,55%
60	Pengadaan Mebel Sekolah	18.238.021.750	18.227.456.588	100%		99,94%
61	Pengadaan Perlengkapan Siswa	50.000.000	47.630.100	100%		95,26%
62	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.011.500.000	1.007.346.600		100%	99,59%
63	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	134.194.200	114.000.000	100%		84,95%

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
64	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.143.900.000	1.115.441.093		100%	97,51%
65	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	157.280.000	148.227.025		100%	94,24%
66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.000.000	1.904.550		100%	95,23%
67	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.205.000.000	1.204.776.602		100%	99,98%
68	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	352.500.000	352.000.000		100%	99,86%
69	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	58.478.687.500	58.922.501.639		100%	100,76%
70	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.000.000	36.000.000		100%	81,82%
71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	993.922.000	945.523.637	100%		95,13%
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	594.709.000	562.869.135	100%		94,65%
73	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2.000.000	-		100%	0,00%
74	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.000.000	-		100%	0,00%
75	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000	-		100%	0,00%
76	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	249.250.000	246.700.000		100%	98,98%
X	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**28.114.651.500**	**28.052.778.032**			**99,78%**
77	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	478.302.500	461.745.485	100%		96,54%
78	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	1.104.649.000	1.065.041.247	100%		96,41%
79	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
80	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
81	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
82	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
83	Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000	150.000.000	100%		100,00%
84	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	50.000.000	49.926.400	100%		99,85%
85	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.000.000	2.000.000		100%	100,00%
86	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud	150.000.000	149.226.000	100%		99,48%
87	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.000.000	1.840.000		100%	92,00%
88	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.855.000.000	1.853.800.000		100%	99,94%

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
89	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	155.500.000	153.361.800		100%	98,62%
90	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.115.200.000	24.114.108.000		100%	100,00%
91	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.000.000	1.950.000		100%	97,50%
92	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000	2.000.000		100%	100,00%
93	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40.000.000	39.979.100		100%	99,95%
XI	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**56.518.249.005**	**56.067.822.022**			**99,20%**
94	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	4.984.181.505	4.764.156.128	100%		95,59%
95	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	894.679.500	853.509.994	100%		95,40%
96	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	450.300.000	427.785.000	100%		95,00%
97	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	156.060.000	155.860.000	100%		99,87%
98	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.502.000.000	1.344.293.200	100%		89,50%
99	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	151.306.000	150.638.000	100%		99,56%
100	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	31.364.722.000	31.356.579.700		100%	99,97%
101	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.015.000.000	17.015.000.000		100%	100,00%
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**13.968.500**	**10.520.000**			**75,31%**
XII	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**13.968.500**	**10.520.000,00**			**75,31%**
102	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	13.968.500	10.520.000		100%	75,31%
D	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**23.766.100.000**	**23.620.568.750**			**99,39%**
XIII	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**23.766.100.000**	**23.620.568.750**			**99,39%**
104	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000	4.950.000		100%	99,00%
105	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	23.761.100.000	23.615.618.750		98%	99,39%
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**15.000.000**	14.400.000			**96,00%**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	REALISASI OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN (%)
				Fisik	Non Fisik	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
XIV	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**15.000.000**	14.400.000			**96,00%**
106	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.000.000	14.400.000		100%	96,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-			
F	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.176.418.000**	**1.167.315.000**			**99,23%**
XV	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.116.418.000**	**1.107.715.000**			**99,22%**
108	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	740.000.000	686.975.000		100%	92,83%
109	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuaidengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	376.418.000	420.740.000		100%	111,77%
XVI	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**60.000.000**	**59.600.000**			**99,33%**
110	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	60.000.000	59.600.000		100%	99,33%
G	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**95.000.000**	**92.800.000**			**97,68%**
XVII	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**95.000.000**	**92.800.000**			**97,68%**
111	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	95.000.000	92.800.000		100%	97,68%
H	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**73.582.000**	**71.921.000**			**97,74%**
XVIII	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**73.582.000**	**71.921.000**			**97,74%**
112	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	73.582.000	71.921.000		100%	97,74%
I	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**220.000.000**	**219.102.500**			**99,59%**
XIX	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**220.000.000,00**	**219.102.500**			**99,59%**
113	Pelindungan Cagar Budaya	190.000.000	189.800.000		100%	99,89%
114	Pengembangan Cagar Budaya	30.000.000	29.302.500		100%	97,68%
	JUMLAH	**1.148.305.554.400**	**1.110.490.861.107**	**99,21%**		**96,71%**

Dari beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab kewenangannya dimana sebagian besar program/kegiatan sudah mencapai kinerja

yang diharapkan walaupun belum maksimal. Untuk capaian kinerja pada setiap kegiatan baik fisik maupun Non fisik di Tahun 2023 mencapai **99,21**%**.** Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 yaitu **98,81%** dapat diartikan terdapat ekskalasi pada capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Kenaikan tersebut disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang bisa tetap dilaksanakan walaupun tanpa anggaran.

Terkait dengan realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar **96,71%** jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan Tahun 2022 **94,53%** terdapat kenaikan capaian realisasi anggaran hal ini dikarenakan kondisi keuangan Daerah mulai membaik setelah terjadi defisit pada masa Covid-19.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

TABEL 2.1.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN S/D TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG PERIODE 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	8	3	1	1	100	1	5	62,50
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	6	2	1	**1**	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Lap	18	6	3	3	100	3	12	66,67
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	6	2	1	1		1	4	66,67
x.xx.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	Bulan	35.433	10.765	6.594	6594	100	6.327	23.686	66,85
x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	3.000	800	550	550	100	550	1.900	63,33
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
x.xx.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	9000	3.001	1.500	1500	100	1500	6.001	66,68
x.xx.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100	1	3	50,00
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjangan urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	6	2	1	1	100	1	4	66,67
x.xx.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1242	414	207	45	21,74	207	666	53,62
x.xx.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	270	90	45	45	100,0	45	180	66,67
x.xx.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	300	100	5	5	100,0	5	110	36,67
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	4	2	2	100,0	2	8	66,67
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Capaian SPM Bidang Pendidikan**	**%**	**100**	**91,37**	**100**	**90,61**	**90,61**	**100**	**100**	**100**
		APM SD	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100**
		APM SMP	**%**	**100**	**99,76**	100	**99,79**	**99,79**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
		APK PAUD	**%**	**93**	**77,71**	88,5	**105,62**	**119,34**	**90**	**90**	**96,8**
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	**%**	**100**	**100**	**100**	**95,59**	**95,59**	**100**	**100**	**100**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.02.2.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	-	-	-		1	1	100,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang	74	-	8	8	100	10	18	24,32
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	30	1	2	2	100	5	8	26,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	44	9	8	8	100	8	25	56,82
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	45	17	1	1	100	8	26	57,78
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	49	5	14	14	100	8	27	55,10
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	396	132	65	65	100	52	249	62,88

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	46	5	1	1	100	10	16	34,78
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	15	-	1	1	100	3	4	26,67
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	308	18	348	348	100	45	411	133,44
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	3540	-	1288	1288	100	750	2.038	57,57
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	8400	2.800	1400	1400	100	1.400	5.600	66,67
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	56	68	13	13	100	5	86	153,57
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	4408	1470	735	735	100	735	2.940	66,70

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	7750	500	1450	1450	100	1.450	3.400	43,87
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	408	-	102	102	100	102	204	50,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	525	189	40	40	100	40	269	51,24
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	4408	735				735	1.470	33,35
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	4408	1.468	734	734	100	735	2.937	66,63

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	4403	1.467	734	734	100	735	2.936	66,68
1.01.02.2.01.21	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	3	-	10	10	100	1	11	366,67
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	120	-	50	50	100	30	80	66,67
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok	4	-	1	1	100	1	2	50,00
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dok	8	-	1	1	100	2	3	37,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1140	-	250	250	100	285	535	46,93
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	-	-			0	-	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	55	-				16	16	29,09
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	4	-	4	4	100	1	5	125,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	8	-	1	1	100	2	3	37,50
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	-	3	3	100	1	4	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30	-	20	20	100	5	25	83,33
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	298	87	56	56	100	40	183	61,41
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	15	5	8	8	100	2	15	100,00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	36	1	6	6	100	7	14	38,89
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	11	3	6	6	100	2	11	100,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	18	8	9	9	100	2	19	105,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	35	9	14	14	100	6	29	82,86
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	280	14	276	276	100	40	330	117,86
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	2200	-	1226	1226	100	500	1.726	78,45
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	8617	2.837	1400	1400	100	1.445	5.682	65,94
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	98	16	5	5	100	20	41	41,84
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	30804	10.268	5134	5134	100	5.134	20.536	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	12300	4.100	2050	2050	100	2.050	8.200	66,67
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	195	-	150	150	100	39	189	96,92
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	213	-	180	180	100	20	200	93,90
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1242	161	207	207	100	207	575	46,30
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1242	414	201	201	100	207	822	66,18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1242	207	207	207	100	207	621	50,00
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	3	5	5	100	2	10	20,41
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	81	3	7	7	100	2	12	14,81
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Oramg	120	-	-			30	30	25,00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok	4	-	1	1	100	1	2	50,00
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dok	8	-	2	2	100	2	4	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Oramg	600		331	331	100	150	481	80,17
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terlaksananya Pengelolaan PAUD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Unit	98	3	1	1	100	16	20	20,41
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	99	4	7	7	100	16	27	27,27
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	109	13	-			20	33	30,28
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	120	6				20	26	21,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	120	-	-			20	20	16,67
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	120	-	-			20	20	16,67
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	600	-	4	4	100	100	104	17,33
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	Paket	297	-	464	464	100	49	513	172,73
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3000	-	-			1000	1.000	33,33
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	549	5	4	4	100	83	92	16,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	488	-	120	120	100	120	240	49,18
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2242	-	368	368	100	371	739	32,96
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6468	-	1076	1076	100	1079	2.155	33,32
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6.426	2.110	1076	1076	100	1.079	4.265	66,37
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok	4	-	1	1	100	1	2	50,00
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dok	8	-	2	2	100	2	4	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	240	-	60	60	100	60	120	50,00
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	98	-	20	20	100	23	43	43,88
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	30	4	3	3	100	5	12	40,00
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	18	6	3	3	100	3	12	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	134	6	4	4	100	**10**	20	14,93
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	276	92	55	55	100	51	198	71,74
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	60	1	3	3	100	10	14	23,33
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	54743	13.945	7.925	7925	100	8.551	30.421	55,57
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	400	123	71	71	100	68	262	65,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	235		175	175	100	47	222	94,47
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel**	**%**	**93,21**	**128,59**	**84,21**	**84,22**	**100**	**87,21**	**87,21**	**93,56**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dok	24	8	4	4	100	4	16	66,67
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Lap	24	8	4	4	100	4	16	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terlaksananya Penerbitan izin pendidikan dasar, yang diselenggarakan Masyarakat**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dok	10		2	2	100,00	2	4	40,00
02.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan kelompok budaya yang dibina**	%	**72,5**	**17,5**	**42,5**	**87,99**	**207**	**57,5**	**57,5**	**79,31**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Kabupaten Serang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek	120		8	8	100,00	23	31	25,83
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuaidengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	89	1	1	0	-	21	22	24,72

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Serang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	14	2	4	4	100,00	3	9	64,29
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan kelompok kesenian yang dibina**	%	**72,5**	**17,5**	**42,5**	**87,99**	**207**	**57,5**	**57,5**	**79,31**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Kesenian di Kabupaten Serang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	Orang	2337	147	60	60	100,00	500	707	30,25
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan**	**%**	**31,32**	**3,23**	**12,49**	**82,61**	**661**	**18,73**	**100**	**319,28**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanaya Pembinaan Sejarah lokal di Kabupaten Serang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	Dok	5		1	1	100,00	1	2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator (output)	satuan	Kinerja		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*100*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11= (10/4)*
2.22.05.2.02	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**%**	**100**	**38,46**	**51,28**	**100**	**195**	**64,1**	**64,1**	**64,10**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Serang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL) (15 orang x 12 bln)	Objek	113	30	15	15	100,00	20	65	57,52
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	30		3	3		7	10	33,33

2.2. Analis Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menyelenggarakan dua urusan yaitu : urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari **Tabel 2.2.1** dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dalam tahun terakhir dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan**		-	**48,72**	**49,31**	**49,91**	**50,51**	**49,98**	**49,91**	**50,51**	**51,11**	
1	APM SD	APM SD	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
2	APM SMP	APM SMP	APM SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	99,79	100,00	100,00	100	
3	APK PAUD	APK PAUD	APK PAUD	87	88,5	90	91,5	78,65	90	91,5	93	
4	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	95,59	100,00	100,00	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Capaian SPM Bidang Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	88,07	100,00	100,00	100	
6	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
7	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel		-	81,21	84,21	87,21	90,21	84,22	87,21	90,21	93,21	
8	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
B	**Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional**		-	**48,28**	**58,62**	**79,31**	**93,10**	**60,00**	**79,31**	**93,10**	**100**	
9	Cakupan kelompok budaya yang dibina		-	35,00	42,50	57,50	67,50	87,99	57,50	67,50	72,50	
10	Cakupan kelompok kesenian yang dibina		-	35,00	42,50	57,50	67,50	87,99	57,50	67,50	72,5	
11	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan		-	9,36	12,49	18,73	28,09	82,61	18,73	28,09	31,32	
12	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		-	38,46	51,28	64,10	84,62	100,00	64,10	84,62	100	
C	**Nilai SAKIP Disdikbud**		-	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	
13	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	

Sumber data : LKIP Disdikbud Tahun 2023

Dari tabel yang tersaji di atas, maka dapat disusun analisis Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

a. Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan

Indikator pendidikan dasar yang ditamatkan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah. Khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten sebatas sampai dengan jenjang SLTP/SMP, formula pengukuran Angka Pendidika Dasar yang ditamatkan adalah Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan dasar (SMP) pada tahun N dibagi Jumlah penduduk pada Tahun N dikali 100.

Sesuai data yang bersumber dari Disdukcapil Kabupaten serang pada tahun 2023 Capaian Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan di Kabupaten Serang adalah 49,98%. dari target 49.31%. Dari capaian tersebut terlihat bahwa Kabupaten Serang mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Akan tetapi, dari pencapaian tersebut masih perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari instansi Pemerintah atau *stakeholder* untuk terus membantu meningkatkan capaian realisasi indikator tersebut.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Jika APK digunakan unt`uk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2023 mencapai 100,00 dari target 100% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP pada tahun 2023 mencapai 99,79% dari target 100%. Hal ini menunjukan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu di Kabupaten Serang. Faktor penyebab APM SMP tidak mencapai target karena masih ada anak yang berdomisili di Kabupaten Serang akan tetapi bersekolah diluar Kabupaten Serang.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikann di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Realisasi angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada tahun 2023 mencapai 105,62% dari target 88.5%. Jika dilihat dari pencapaian Tahun 2022 sebesar 77,71% terdapat kenaikan yang cukup signifikan.

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdiri dari tiga jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Pendidikan Dasar, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasa.
2. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan
3. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD

Realisasi Capapain Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2023 sebesar 90,61 dari Target 100%. Dari capaian tersebut terlihat bahwa pencapaian Standar Pelayanan Minimal masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut diantaranya dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum optimal untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

e. Prosentase Penerapan Muatan Lokal di Sekolah

Indikator ini menghitung jumlah Sekolah yang melaksanakan pembelajaran kurikulum muatan Lokal. Pada Tahun 2023 seluruh Sekolah baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama telah melaksanakan pembelajaran kurikulum muatan lokal seperti Mata pelajaran Bahasa Jawa Serang. Sehingga realisasi Prosentase Penerapan Muatan Lokal di Sekolah mencapai 100% dari Target 100%.

d. Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel

Indikator ini menghitung kebutuhan Guru untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) di Sekolah baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini maupun Pendidikan Dasar. Jika dilihat dari pencapaian rasio jumlah Guru terhadap Rombongan Belajar ditahun 2023 mencapai 84.22% dari Target sebesar 84.21%.

e. Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat

Prosentase izin Pendidikan adalah bentuk pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Masyarakat yang akan menyelenggarakan proses izin operasional Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berperan untuk menerbitkan surat rekomendasi kelayakan opersional Pendidikan. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan izin Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Tahun 2023 capaian Prosentase izin Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mencapai 100%. Artinya setiap Masyarakat yang mengusulkan izin operasional Pendidikan semua terlayani dengan baik.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan memperhatikan indikator – indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

a. Masih Kurangnya sarana prasarana Satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan non Formal dan Pendidikan Dasar baik dari segi kuantitas maupun kualitas (ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang Guru, Meubelair, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, kantin sekolah, mushola, halaman sekolah dan media pembelajaran;
b. Belum memadainya kuantitas, kualitas dan distribusi (pemerataan) tenaga pendidik dan kependidikan;
c. Penganggaran pada kegiatan pendukung SPM masih rendah;
d. Belum memadainya penyediaan alat kesenian untuk setiap seni budaya yang dibina;
e. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana sanggar seni budaya;
f. Kurangnya pembinaan terhadap potensi budaya lokal dan pelestarian cagar-cagar budaya.

Dari permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan di atas, maka akan berdampak pada indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan terhadap capaian program nasional/internasional. Dampak yang akan terjadi sebagai berikut :

a. Capaian SPM Pendidikan tidak mencapai target;
b. Pencapaian nilai rapor Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2022-2023 tergolong masih rendah;
c. Peningkatan kearifan dan kelestasian seni budaya lokal terhadap generasi muda akan terhambat karena kurangnya sarana dan prasaran yang memadai.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah:

1. Upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
2. Upaya peningkatan pelestarian tradisi, sejarah, seni dan Budaya di Kabupaten Serang.

Isu – isu penting di atas, jika tidak segera diantisipasi dalam proses perencanaan pembangunan maka akan berdampak pada pencapaian visi misi

Kepala Daerah, serta berdampak pada capaian program nasional pada bidang pendidikan. Berdasarkan analisis permasalahan pada bidang pendidikan dan kebudayaan dapat diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan pelestarian kebudayaan. Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

- Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
- Meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah;
- Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk mendukung capaian literasi dan Numerasi Siswa;
- Meningkatkan antusias generasi muda untuk melestarikan seni budaya lokal.

b. Peluang

- Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi Urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kerjasama Pemerintah Kab/Kota dan *Stakeholder* terkait bidang Pendidikan.
- Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- Masyarakat masih berperan aktif dalam pelestarian seni budaya lokal di Kabupaten Serang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas guna mencapai target renstra tahun berjalan. RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD kabupaten Serang untuk mendukung Program dan kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu :

a. Program Pengelolaan Pendidikan
   1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
   2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
   3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
b. Program Pengembangan Kurikulum
   1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
   2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   1. Kegiatan Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   2. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
e. Program Pengembangan Kebudayaan
   1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
g. Program Pembinaan Sejarah
   1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
h. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
   2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Serang

OPD :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
A	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**		**Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**751.464.095.730**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**		**Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**751.464.095.730**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**235.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**235.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	75.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	80.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Serang	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Serang	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	35.000.000	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**748.089.518.330**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**748.089.518.330**	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	6025 org/bln	748.000.735.730	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	6025 org/bln	748.000.735.730	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 dokumen	63.782.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 dokumen	63.782.600	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**22.170.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**22.170.000**	
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	22.170.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	22.170.000	
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**65.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**65.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1500 dokumen	20.000.000	
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	35.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	35.000.000	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	10.000.000	
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**812.275.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**812.275.000**	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	58.275.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	58.275.000	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	250.000.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	199.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	199.000.000	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	15.000.000	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	45.000.000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	215.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	215.000.000	
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**1.550.804.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**1.550.804.000**	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	587.444.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	587.444.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	963.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	963.360.000	Tambahan Non ASN
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**689.328.400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100%**	**689.328.400**	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Serang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	207 Unit	204.328.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Serang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	207 Unit	204.328.400	
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	35.000.000	
26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 unit	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 unit	50.000.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	300.000.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Capaian SPM Bidang Pendidikan**	**100**	**83.916.260.044**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Capaian SPM Bidang Pendidikan**	**100**	**84.475.618.610**	
			APM SD	**100**				**APM SD**	**100**		
			APM SMP	**100**				**APM SMP**	**100**		
			APK PAUD	**90**				**APK PAUD**	**90**		
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	**100**				**Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan**	**100**		
VIII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**34.063.910.310**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**34.352.556.876**	
29	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	585.112.000	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	585.112.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Serang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	877.668.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Serang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	1.216.314.566	Pendukung SPM
31	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	300 Paket/Lokal	30.000.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	300 Paket/Lokal	30.000.000.000	
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1.430.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1400 Peserta Didik	1.430.000.000	Pendukung SPM
33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	42.800.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	42.800.000	Pendukung SPM
34	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Serang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	500.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Serang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	735 Satuan Pendidikan	500.000.000	
35	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Serang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.450 Peserta Didik	200.000.000	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Serang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.450 Peserta Didik	200.000.000	
36	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	102 orang	5.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	102 orang	5.000.000	Pendukung SPM
37	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	5.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	5.000.000	Pendukung SPM
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	735 Satuan Pendidikan	5.330.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	735 Satuan Pendidikan	5.330.000	
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	735 Satuan Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	735 Satuan Pendidikan		Pendukung SPM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
40	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	734 orang	50.000.000	
41	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 orang	100.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 orang	100.000.000	Pendukung SPM
42	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	3.500.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	3.500.000	Pendukung SPM
43	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	6.220.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	6.220.000	Pendukung SPM
44	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	285 orang	203.280.310	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	285 orang	203.280.310	Pendukung SPM
IX	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Akumulasi capaian Sub kegiatan	**100,00**	**13.747.528.000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Akumulasi capaian Sub kegiatan	**100,00**	**13.913.760.000**	
45	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	585.112.000	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	585.112.000	
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	877.668.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	1.000.000.000	Pendukung SPM
47	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 paket/lokal	10.000.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 paket/lokal	10.000.000.000	
48	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1445 peserta didik	1.011.500.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1445 peserta didik	1.011.500.000	Pendukung SPM
49	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 paket	111.100.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	111.100.000	Pendukung SPM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
50	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Serang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5134 Peserta Didik	500.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Serang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	207 Satuan Pendidikan	500.000.000	
51	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Serang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	100.000.000	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Serang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2050 Peserta Didik	250.000.000	
52	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39 orang	5.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39 orang	5.000.000	Pendukung SPM
53	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	5.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	5.000.000	Pendukung SPM
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	207 Satuan Pendidikan	47.048.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	207 Satuan Pendidikan	47.048.000	
55	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	207 Satuan Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	207 Satuan Pendidikan		Pendukung SPM
56	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 orang	170.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	207 orang	63.900.000	
57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	42.760.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	42.760.000	Pendukung SPM
58	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000	Pendukung SPM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
59	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	42.120.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	42.120.000	Pendukung SPM
60	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	245.220.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	245.220.000	Pendukung SPM
X	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Akumulasi capaian Sub kegiatan	**100,00**	**2.916.597.800**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Akumulasi capaian Sub kegiatan	**100,00**	**3.021.077.800**	
61	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Serang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	100 paket	100.400.300	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Serang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	200 paket	100.400.300	Pendukung SPM
62	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	500.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	500.000.000	Pendukung SPM
63	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	83 paket	50.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Serang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	50.000.000	Pendukung SPM
64	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 orang	10.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 orang	10.000.000	Pendukung SPM
65	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	368	1.855.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Serang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	368 orang	1.959.480.000	Pendukung SPM
66	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Serang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 satuan pendidik	151.197.500	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Serang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 satuan pendidik	151.197.500	Pendukung SPM
67	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Serang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1079 Satuan Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Serang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1079 Satuan Pendidikan		Pendukung SPM
68	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	15.000.000	Pendukung SPM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
69	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	Pendukung SPM
70	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 orang	185.000.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Serang	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	110 orang	185.000.000	Pendukung SPM
XI	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**33.188.223.934**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**33.188.223.934**	
71	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 unit	4.680.899.434	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 unit	4.680.899.434	
72	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik	1.502.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56 Peserta Didik	1.502.000.000	
73	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	11.519 Peserta Didik	26.918.522.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	11.519 Peserta Didik	26.918.522.000	
			Jumlah Peserta didik Paket A	660				Jumlah Peserta didik Paket A	660		
			Jumlah Peserta didik Paket B	3.300				Jumlah Peserta didik Paket B	3.300		
			Jumlah Peserta didik Paket C	7.559				Jumlah Peserta didik Paket C	7.559		
			Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	6225 orang				Jumlah Guru MDA yang mendapatkan Insentif	6225 orang		
			Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	9901 orang				Jumlah Guru Ngaji dan TPQ yang mendapatkan Insentif	9901 orang		
74	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	70 orang	86.802.500	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	70 orang	86.802.500	
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah**	**100,00**	**175.072.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah**	**100,00**	**175.072.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
XII	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**175.072.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**175.072.000**	
75	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	33.000.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	33.000.000	
76	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	33.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	33.000.000	
77	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	117 Buku	33.000.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	117 Buku	33.000.000	
78	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	29 Orang 90 orang SMP	76.072.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Serang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	29 Orang 90 orang SMP	76.072.000	
D	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel**	**87,21**	**19.136.400.000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel**	**87,21**	**19.136.400.000**	
XV	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**19.136.400.000**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**19.136.400.000**	
79	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	5.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	5.000.000	
80	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Laporan	19.131.400.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Laporan	19.131.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
F	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Cakupan kelompok budaya yang dibina**	**57,50**	**550.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Cakupan kelompok budaya yang dibina**	**57,50**	**550.000.000**	
XVIII	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**200.000.000**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**200.000.000**	
81	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	23 objek	150.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	27 objek	150.000.000	
82	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	29 orang	50.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	29 orang	50.000.000	
XIX	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**250.000.000**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**250.000.000**	
83	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	27 objek	150.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	27 objek	150.000.000	
84	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21 sertifikat	100.000.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Serang	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21 sertifikat	100.000.000	
XX	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**100.000.000**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**100.000.000**	
85	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 objek	100.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Serang	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 objek	100.000.000	
G	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Cakupan kelompok kesenian yang dibina**	**57,50**	**100.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Cakupan kelompok kesenian yang dibina**	**57,50**	**100.000.000**	
XXI	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**100.000.000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**100.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	dalam Daerah Kabupaten/Kota					**dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
86	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Serang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 orang	100.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Serang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 orang	100.000.000	
H	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan**	**18,73**	**65.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan**	**18,73**	**65.000.000**	
XXII	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Serang	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**65.000.000**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Serang	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**65.000.000**	
87	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000	
I	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**64,10**	**300.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**64,10**	**300.000.000**	
XXIV	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**300.000.000**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		**Akumulasi capaian Sub kegiatan**	**100,00**	**300.000.000**	
88	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 objek	240.000.000	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 objek	240.000.000	
89	2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	8 objek	60.000.000	2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Serang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	8 objek	60.000.000	
TOTAL PAGU ANGGARAN					**855.706.827.774**					**856.266.186.340**	

2.5 Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan manampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2024 dan hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2024. Kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Reses Anggota DPRD Kabupaten Serang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan februari Tahun 2024. Pada dokumen Rancangan RENJA terdapat beberapa usulan Program dan kegiatan masyarakat hasil musrenbang kecamatan dan pokok pikiran DPRD/hasil reses. Dari sekian usulan terdapat beberapa yang diakomodir atau disetujui untuk menjadi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 hal tersebut dikarenakan ketersediaan pagu Anggaran yang terbatas. Data usulan musrenbang kecamatan dan Pokok pikiran DPRD sebagai barikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Serang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				
I	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	(SDN CARINGIN) Jl. Kh Abdul Kabier RT/RW 12/3 Kp. Sinar Kepuh Desa Kemuning Kec.Tunjung Teja	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	dapat dipertimbangkan apabila anggarannya tersedia dan kriteria calon penerima sesuai kiteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis tentang rehabilitasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	(SDN TUNJUNG 1) Jl. Kh Abdul Kabier Km 2 Desa Malanggah Kec.Tunjung Teja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	dapat dipertimbangkan apabila anggarannya tersedia dan kriteria calon penerima sesuai kiteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Toilet/sanitasi
II	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMPN 1 Pabuaran	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	dapat dipertimbangkan apabila anggarannya tersedia dan kriteria calon penerima sesuai kiteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Toilet/sanitasi
III	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	12 Desa (Desa Anyar, Bandulu, Banjarsari, Bunihara, Cikoneng, Grogol Indah, Kosambironyok, Mekarsari, Sindangmandi, Sindangkaraya, Tambang Ayam, Tanjung Manis)	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Pensil Berwarna dan Buku Gambar)	12 Desa	hanya Peserta dari kategori keluarga miskin extreme yang diberikan bantuan Buku Gambar dan pensil warna
IV	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Desa Teras Bendung, Teras Tonjong, Bolang Beji, Bolang Bunut	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/bangunan lainnya yang terbangun	3 unit	dapat dipertimbangkan apabila anggarannya tersedia dan kriteria calon penerima sesuai kiteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis tentang Pemberian bantuan hibah serta diajukan melalui serang open

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Ponpes Darunniam, Kp. Cikoak RT.11/03 Desa Pasir Kembang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/bangunan lainnya yang terbangun	1 unit	dapat dipertimbangkan apabila anggarannya tersedia dan kriteria calon penerima sesuai kiteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis tentang Pemberian bantuan hibah serta diajukan melalui serang open

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi presiden tahun 2020 – 2024 adalah :

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dua Agenda Pembangunan di atas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2025. didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan Misi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 yaitu : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat. dari misi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tujuan ***"Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal."*** Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya Akses, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Bidang Pendidikan; dengan indikator:
   - Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan.

b. Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal, dengan indikator:
   - Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional.

Tabel 3.2.

Indikator Kinerja Renja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra 2021 - 2026

No	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	48,10	48,72	49,31	49,91	50,51	51,11	51,11
	Capaian SPM Bidang Pendidikan	89,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	APM SMP	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Sasaran dan Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	APK PAUD	72,47	87	88,5	90	91,5	93	93
	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	78,21	81,21	84,21	87,21	90,21	93,21	93,21
	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	41,38	48,28	58,62	79,31	93,10	100,00	100,00
	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50
	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	35,00	42,50	57,50	67,50	72,50	72,50
	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	0,00	9,36	12,49	18,73	28,09	31,32	31,32
	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	38,46	51,28	64,10	84,62	100,00	100,00
3	Nilai SAKIP Disdikbud	A	BB	BB	BB	BB	A	A
	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan Program dan Kegiatan di Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yaitu :

1. Visi Misi Kabupaten Serang

Visi

"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis".

Misi

"Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.".

2. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelyanan Minimal pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/kota terdiri dari: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Dalam mendukung pencapaian SPM pelayanan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki program dan kegiatan yang mendukung dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian SPM. Adapun Program dan Kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Sinkronisasi Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM Bidang Pendidikan	100%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	91,5%	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun
										Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun
										Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat
										Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat
										Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksnanya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
										Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
										Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD
										Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
										Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
										Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
										Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
2	PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM Bidang Pendidikan	100%	Pengelolaan Pendidikan Dasar	APM SD	100%	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang terbangun
										Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
										Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik dari rumah tangga Miskin dan Siswa Berprestasi
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Terlaksananya Bimbingan Teknis persiapan seleksai Calon guru Penggerak

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Diklat Peningkatan kompetensi dan Pengembangan profesi kepala Sekolah dan pengawas sekolah
										Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
										Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
										Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
										Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	APM SMP	100%	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun
										Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SMP)	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
										Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa
										Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Terlaksananya Bimbingan Teknis persiapan seleksi Calon guru Penggerak
										Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Diklat Peningkatan kompetensi dan Pengembangan profesi kepala Sekolah dan pengawas sekolah
										Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
										Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
										Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel	87,21%	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	100,00%	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
3	PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM Bidang Pendidikan	100%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100%	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun
										Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia
										Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* memilki tujuan dan indikator yang selaras dengan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025. Tujuan dan indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs)

TARGET TPB	GOAL/TARGET GLOBAL/TARGET SDGs/TARGET TPB		INDIKATOR DAERAH TAHUN 2025	
			SUB KEGIATAN	INDIKATOR
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah
			Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sanitasi/jamban yang terehabilitasi sedang/berat
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD

TARGET TPB	GOAL/TARGET GLOBAL/TARGET SDGs/TARGET TPB		INDIKATOR DAERAH TAHUN 2025	
			SUB KEGIATAN	INDIKATOR
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat;	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah
			Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sanitasi/jamban yang terehabilitasi sedang/berat
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Diklat Peningkatan kompetensi dan Pengembangan profesi kepala Sekolah dan pengawas sekolah
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Diklat Peningkatan kompetensi dan Pengembangan profesi kepala Sekolah dan pengawas sekolah
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - Diklat Peningkatan kompetensi dan Pengembangan profesi kepala Sekolah dan pengawas TK - Beasiswa S1 Guru PAUD

Sumber data : RENSTRA Disdikbud Kab. Serang tahun 2021 – 2026

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sesuai pagu indikatif dan pagu Prakiraan maju di Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan. Pada Pagu Prakiraan maju Tahun 2025 diisi berdasarkan Pagu Renstra 2021-2026. berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dan Pagu Prakiraan maju Tahun 2026 yang disajikan pada tabel 3.4:

1. Total Program sebanyak 8 Program, 19 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program antara lain meliputi :
   - Program Pengelolaan Pendidikan
   - Program Pengembangan kurikulum
   - Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
   - Program Pengembangan Kebudayaan
   - Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   - Program Pembinaan Sejarah
   - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A	**1.01.01**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**751.464.095.730**		**100%**	**752.951.663.530**
I	**1.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**235.000.000**		**100%**	**240.000.000**
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 dokumen	75.000.000		1 dokumen	70.000.000
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	80.000.000		1 dokumen	100.000.000
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000		1 dokumen	15.000.000
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	10.000.000		1 dokumen	5.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	10.000.000		1 dokumen	5.000.000
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	3 laporan	10.000.000		3 laporan	10.000.000
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 laporan	35.000.000		1 laporan	35.000.000
II	**1.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**748.089.518.330**		**100%**	**748.133.305.730**
8	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	Kab. Serang	6025 org/bln	748.000.735.730		6025 org/bln	748.000.735.730
9	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	550 dokumen	63.782.600		550 dokumen	107.570.000
10	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	1 laporan	25.000.000		1 laporan	25.000.000
III	**1.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**22.170.000**		**100%**	**22.170.000**
11	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	1 laporan	22.170.000		1 laporan	22.170.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
IV	**1.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**65.000.000**		**100%**	**65.000.000**
12	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	1500 dokumen	20.000.000		1500 dokumen	20.000.000
13	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Serang	1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	35.000.000
14	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	96 orang	10.000.000		96 orang	10.000.000
V	**1.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**812.275.000**		**100%**	**842.275.000**
15	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	58.275.000		1 paket	58.275.000
16	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	250.000.000		1 paket	215.000.000
17	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	199.000.000		1 paket	199.000.000
18	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	30.000.000		1 paket	55.000.000
19	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000		1 dokumen	20.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
20	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 laporan	45.000.000		1 laporan	45.000.000
21	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 laporan	215.000.000		1 laporan	250.000.000
VI	**1.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**1.550.804.000**		**100%**	**1.368.912.800**
22	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	587.444.000		1 laporan	610.606.800
23	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	963.360.000		1 laporan	758.306.000
VII	**1.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**689.328.400**		**100%**	**2.280.000.000**
24	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang	207 Unit	204.328.400		207 Unit	1.300.000.000
25	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	45 unit	35.000.000		45 unit	150.000.000
26	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	50 unit	50.000.000		50 unit	300.000.000
27	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	300.000.000		2 unit	300.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
28	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	100.000.000		2 unit	230.000.000
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
B	**1.01.02.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Capaian SPM Bidang Pendidikan**		**100**	**84.475.618.610**		**100**	**63.579.641.509**
			APM SD		**100**			**100**	
			APM SMP		**100**			**100**	
			APK PAUD		**91,5**			**93**	
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan		**100**			**100**	
VIII	**1.01.02.2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**34.352.556.876**		**100,00**	**16.136.000.000**
29	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	3 unit	585.112.000	Pendukung Program KLA dan Gender	15 unit	2.475.000.000
30	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	300 Paket/Lokal	30.000.000.000	Penurunan kemiskinan, Pendukung Program KLA dan Pendukung SPM	55 paket	2.263.250.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
31	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1400 Peserta Didik	1.430.000.000	Penurunan kemiskinan, Pendukung SPM dan Kesetaraan Gender	1400 Peserta Didik	1.400.000.000
32	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	1.450 Peserta Didik	200.000.000		1.450 Peserta Didik	100.000.000
33	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	102 orang	5.000.000	Pendukung SPM	102 orang	5.000.000
34	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	40 orang	5.000.000	Pendukung SPM	40 orang	5.000.000
35	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	5.330.000		735 Satuan Pendidikan	100.000.000
36	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	734 orang	50.000.000		734 orang	90.000.000
37	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 orang	100.000.000	Pendukung SPM	30 orang	100.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
38	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	3.500.000	Pendukung SPM	1 dokumen	2.000.000
39	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	1 dokumen	6.220.000	Program KLA (Pencegahan Perundungan)	2 dokumen	50.000.000
40	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	285 orang	203.280.310	Penurunan Stunting, Pendukung SPM	285 orang	386.750.000
41	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	500.000.000		735 Satuan Pendidikan	200.000.000
42	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	8 ruang	1.216.314.566	Penurunan kemiskinan, Pendukung SPM	59 ruang	8.319.000.000
43	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yangTersedia		1 paket	42.800.000	Pendukung SPM	5 paket	640.000.000
IX	**1.01.02.2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**13.913.760.000**		**100,00**	**10.824.607.311**
44	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	3 unit	585.112.000		5 unit	825.000.000
45	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	5 ruang	1.000.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan	42 ruang	6.191.000.000
46	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	100 paket/lokal	10.000.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan	48 paket	1.661.031.311

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
47	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1445 peserta didik	1.011.500.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan	1445 peserta didik	1.031.326.000
48	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	2050 Peserta Didik	250.000.000	Kespro dan Gender	2050 Peserta Didik	100.000.000
49	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	39 orang	5.000.000	Pendukung SPM	39 orang	10.000.000
50	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	20 orang	5.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	20 orang	5.000.000
51	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Serang	207 Satuan Pendidikan	47.048.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting dan Pendidikan Anti Korupsi	207 Satuan Pendidikan	50.000.000
52	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	207 orang	63.900.000		207 orang	50.000.000
53	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 Orang	42.760.000	Pendukung SPM	30 Orang	100.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
54	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	5.000.000	Pendukung SPM	1 Dokumen	2.000.000
55	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 Dokumen	42.120.000	Pendukung SPM	2 Dokumen	50.000.000
56	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	207 Satuan Pendidikan	500.000.000	Kespro, Pendidikan Anti Korupsi	5134 Peserta Didik	300.000.000
57	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	150 Orang	245.220.000	Pendukung SPM	150 Orang	249.250.000
58	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 paket	111.100.000	Pendukung SPM	20 paket	200.000.000
X	**1.01.02.2.03**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**3.021.077.800**		**100,00**	**5.955.000.000**
59	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1000 peserta Didik	500.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	1000 Peserta Didik	500.000.000
60	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Serang	120 orang	10.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	120 orang	5.000.000
61	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	368 orang	1.959.480.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	371 orang (PK S1)	1.855.000.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
62	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Serang	70 satuan pendidik	151.197.500	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	1079 Satuan Pendidikan	500.000.000
63	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	15.000.000	Pendukung SPM	1 dokumen	5.000.000
64	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	1 Dokumen	50.000.000	Pendukung SPM	2 dokumen	50.000.000
65	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	110 orang	185.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	60 orang	40.000.000
66	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	200 paket	100.400.300	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	100 paket	500.000.000
67	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		1 paket	50.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	83 paket	2.500.000.000
XI	**1.01.02.2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**33.188.223.934**		**100,00**	**30.664.034.198**
68	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	56 Peserta Didik	1.502.000.000	Pendukung SPM	56 Peserta Didik	1.951.200.000
69	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	70 orang	86.802.500		72 orang	241.710.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
70	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	11.519 Peserta Didik	26.918.522.000	Program Prioritas	11.971 Peserta Didik	28.471.124.198
71	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kab. Serang	20 unit	4.680.899.434	Pendukung SPM	23 unit	4.640.000.000
C	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah**		**100,00**	**175.072.000**		**100,00**	**250.000.000**
XII	**1.01.03.2.01**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**175.072.000**		**100,00**	**250.000.000**
72	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	1 dokumen	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP	2 Dokumen	67.500.000
73	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab. Serang	117 Buku	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP	235 Buku	67.500.000
74	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Serang	29 Orang 90 orang SMP	76.072.000	Kurikulum SD dan SMP	47 orang	47.500.000
75	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	1 dokumen	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP	2 Dokumen	67.500.000
D	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel**		**90,21**	**19.136.400.000**		**93,21**	**36.513.582.881**

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
XIII	**1.01.04.2.01**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**19.136.400.000**		**100,00**	**36.513.582.881**
76	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Dokumen	5.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	4 Dokumen	20.000.000
77	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Laporan	19.131.400.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting	4 Laporan	36.493.582.881
	2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.015.000.000**			**3.055.000.000**
E	**02.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan kelompok budaya yang dibina**		**67,50**	**550.000.000**			**1.295.000.000**
XIV	**2.22.02.2.01**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**200.000.000**			**750.000.000**

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
78	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		27 objek	150.000.000		29 objek	715.000.000
79	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		29 orang	50.000.000		29 orang	35.000.000
XV	**2.22.02.2.02**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**250.000.000**			**545.000.000**
80	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		27 objek	150.000.000		29 objek	370.000.000
81	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		21 sertifikat	100.000.000		21 sertifikat	175.000.000
XVI	**2.22.02.2.03**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**100.000.000**			
82	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3 objek	100.000.000		3 objek	55.000.000
F	**02.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan kelompok kesenian yang dibina**		**67,50**	**100.000.000**		**72,5**	**1.250.000.000**
XVII	**2.22.03.2.01**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**100.000.000**		**100**	**1.250.000.000**

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
83	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		100 orang	100.000.000		500 orang	1.250.000.000
G	**02.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan**		**28,09**	**65.000.000**		**31,32**	**150.000.000**
XVIII	**2.22.04.2.01**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**65.000.000**		**100**	**150.000.000**
84	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		1 Dokumen	65.000.000		1 Dokumen	150.000.000
H	**02.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**		**64,10**	**300.000.000**		**100**	**360.000.000**
XIX	**2.22.05.2.02**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**300.000.000**		**100**	**360.000.000**
85	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		15 objek	240.000.000,00		20 objek	270.000.000
86	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		8 objek	60.000.000		9 objek	90.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN						**856.266.186.340**			**856.349.887.920**

BAB IV

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	**1.01.01**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**751.464.095.730**	
I	**1.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**235.000.000**	
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 dokumen	75.000.000	
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	80.000.000	
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000	
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	10.000.000	
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Serang	1 dokumen	10.000.000	
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	3 laporan	10.000.000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 laporan	35.000.000	
II	**1.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**748.089.518.330**	
8	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Calon ASN dan ASN	Kab. Serang	6025 org/bln	748.000.735.730	
9	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Serang	550 dokumen	63.782.600	
10	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	1 laporan	25.000.000	
III	**1.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**22.170.000**	
11	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Serang	1 laporan	22.170.000	
IV	**1.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**65.000.000**	
12	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Serang	1500 dokumen	20.000.000	
13	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Serang	1 dokumen	35.000.000	
14	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang	96 orang	10.000.000	
V	**1.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**812.275.000**	
15	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	58.275.000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	250.000.000	
17	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	199.000.000	
18	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 paket	30.000.000	
19	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 dokumen	15.000.000	
20	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 laporan	45.000.000	
21	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 laporan	215.000.000	
VI	**1.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**1.550.804.000**	
22	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	587.444.000	
23	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 laporan	963.360.000	
VII	**1.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100%**	**689.328.400**	
24	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang	207 Unit	204.328.400	
25	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	45 unit	35.000.000	
26	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Serang	50 unit	50.000.000	
27	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	300.000.000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
28	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	2 unit	100.000.000	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
B	**1.01.02.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Capaian SPM Bidang Pendidikan**		**100**	**84.475.618.610**	
			APM SD		**100**		
			APM SMP		**100**		
			APK PAUD		**91,5**		
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan		**100**		
VIII	**1.01.02.2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**34.352.556.876**	
29	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	3 unit	585.112.000	Pendukung Program KLA dan Gender
30	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	300 Paket/Lokal	30.000.000.000	Penurunan kemiskinan, Pendukung Program KLA dan Pendukung SPM
31	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1400 Peserta Didik	1.430.000.000	Penurunan kemiskinan, Pendukung SPM dan Kesetaraan Gender
32	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	1.450 Peserta Didik	200.000.000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
33	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Serang	102 orang	5.000.000	Pendukung SPM
34	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	40 orang	5.000.000	Pendukung SPM
35	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	5.330.000	
36	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Serang	734 orang	50.000.000	
37	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 orang	100.000.000	Pendukung SPM
38	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 dokumen	3.500.000	Pendukung SPM
39	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	1 dokumen	6.220.000	Program KLA (Pencegahan Perundungan)
40	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	285 orang	203.280.310	Penurunan Stunting, Pendukung SPM
41	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	735 Satuan Pendidikan	500.000.000	
42	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	8 ruang	1.216.314.566	Penurunan kemiskinan, Pendukung SPM
43	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 paket	42.800.000	Pendukung SPM
IX	**1.01.02.2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**13.913.760.000**	
44	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Serang	3 unit	585.112.000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
45	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Serang	5 ruang	1.000.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan
46	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Serang	100 paket/lokal	10.000.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan
47	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1445 peserta didik	1.011.500.000	Pendukung SPM, Penurunan Kemiskinan
48	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Serang	2050 Peserta Didik	250.000.000	Kespro dan Gender
49	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	39 orang	5.000.000	Pendukung SPM
50	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	20 orang	5.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
51	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Serang	207 Satuan Pendidikan	47.048.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting dan Pendidikan Anti Korupsi
52	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Serang	207 orang	63.900.000	
53	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Serang	30 Orang	42.760.000	Pendukung SPM
54	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	5.000.000	Pendukung SPM
55	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	2 Dokumen	42.120.000	Pendukung SPM
56	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Serang	207 Satuan Pendidikan	500.000.000	Kespro, Pendidikan Anti Korupsi
57	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	150 Orang	245.220.000	Pendukung SPM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
58	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 paket	111.100.000	Pendukung SPM
X	**1.01.02.2.03**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**3.021.077.800**	
59	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	1000 peserta Didik	500.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
60	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Serang	120 orang	10.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
61	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Serang	368 orang	1.959.480.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
62	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Serang	70 satuan pendidik	151.197.500	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
63	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Serang	1 Dokumen	15.000.000	Pendukung SPM
64	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	1 Dokumen	50.000.000	Pendukung SPM
65	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Serang	110 orang	185.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
66	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Serang	200 paket	100.400.300	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
67	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		1 paket	50.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
XI	**1.01.02.2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**33.188.223.934**	
68	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Serang	56 Peserta Didik	1.502.000.000	Pendukung SPM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
69	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	70 orang	86.802.500	
70	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Serang	11.519 Peserta Didik	26.918.522.000	Program Prioritas
71	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kab. Serang	20 unit	4.680.899.434	Pendukung SPM
C	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah**		**100,00**	**175.072.000**	
XII	**1.01.03.2.01**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**175.072.000**	
72	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	1 dokumen	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP
73	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab. Serang	117 Buku	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP
74	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Serang	29 Orang 90 orang SMP	76.072.000	Kurikulum SD dan SMP
75	1.01.03.2.01.01/0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Serang	1 dokumen	33.000.000	Kurikulum SD dan SMP
D	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap Rombel**		**90,21**	**19.136.400.000**	
XIII	**1.01.04.2.01**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**19.136.400.000**	
76	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Dokumen	5.000.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
77	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Serang	4 Laporan	19.131.400.000	Pendukung SPM, Penurunan Stunting
	2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.015.000.000**	
E	**02.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan kelompok budaya yang dibina**		**67,50**	**550.000.000**	
XIV	**2.22.02.2.01**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**200.000.000**	
78	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		27 objek	150.000.000	
79	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		29 orang	50.000.000	
XV	**2.22.02.2.02**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**250.000.000**	
80	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		27 objek	150.000.000	
81	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		21 sertifikat	100.000.000	
XVI	**2.22.02.2.03**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**100.000.000**	
82	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3 objek	100.000.000	
F	**02.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan kelompok kesenian yang dibina**		**67,50**	**100.000.000**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	RANCANGAN RENJA TA 2025			Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
XVII	**2.22.03.2.01**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**100.000.000**	
83	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		100 orang	100.000.000	
G	**02.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan**		**28,09**	**65.000.000**	
XVIII	**2.22.04.2.01**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**65.000.000**	
84	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		1 Dokumen	65.000.000	
H	**02.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**		**64,10**	**300.000.000**	
XIX	**2.22.05.2.02**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Akumulasi capaian Sub kegiatan**		**100,00**	**300.000.000**	
85	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		15 objek	240.000.000,00	
86	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		8 objek	60.000.000	
TOTAL PAGU ANGGARAN						**856.266.186.340**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun sebagai langkah awal penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Penyusunan RENJA didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

RENJA ini masih belum sempurna, maka diperlukan masukan atau koreksi dari Pemangku kepentingan sebagai perbaikan. Renja ini masih masih bersifat perencanaan yang pada akhirnya ada ketidaktercapaian dengan target yang sudah tercantum pada Indikator Kinerja Utama. Dalam hal ini dimungkinkan menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Daerah.

Serang, 03 Juli 2024

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
20. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Penyusuna Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
21. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 500.14.2.1/1/Bappedalitbang/Setda/2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.
22. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 03 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660217 199103 1 006

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERANG

RENCANA KERJA TA 2025

DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
JL. RAYA JAKARTA-SERANG, KASERANGAN, KECAMATAN CIRUAS-SERANG

WWW.DINKES.SERANGKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Kami sadar bahwa Rencana Kerja Tahun 2025 yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja di tahun mendatang.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan pemerintah Kabupaten Serang

Serang, 3 Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN

dr. Rahmat Fitriadi, M.Kes., MH.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. : 19701130 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 49

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 71

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 72

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 111

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 116

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 116

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 118

3.3 Program Dan Kegiatan 118

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 125

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 125

BAB V PENUTUP 171

5.1 Catatan Penting Rencana Kerja 2025 171

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 171

5.3 Rencana Tindak Lanjut 171

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023 50

Tabel 2.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023 69

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 74

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 111

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2025 119

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 126

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Anggaran BLUD 32 UPT Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....161

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri nomor 86 tahun 2017 Pasal 15 Ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, ayat (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 ayat (2) Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dengan tujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam renja dengan Renstra, evaluasi hasil Renja tahun 2022 dan tahun 2023 dengan tujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Rencana Kerja OPD mencakup perumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan termasuk pendanaan indikatif, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam negri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah *Kabupaten Serang* Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (*RPJPD*) *Kabupaten Serang* Tahun *2006-2026;*
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemeribtahan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang adalah untuk memberikan pedoman serta gambaran pada Dinas Kesehatan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja antara lain:

1. Mengintegrasikan antara dokumen perencanaan sesuai peran dan kewenangan dinas kesehatan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik APBD maupun sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Memaksimalkan upaya pencapaian indikator kinerja sesuai target yang telah direncanakan khususnya SPM dan SDGs dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
3. Menetapkan prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Serang pada Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rumusan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas kesehatan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Serang
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III Tujuan dan Sasaran
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
3.3 Program Dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V Penutup
5.1 Catatan Penting Rencana Renja 2025
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Total anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023 sampai dengan perubahan sebesar Rp. 304,153,119,997 yang bersumber dari APBD, terdiri dari DAU sebesar Rp. 246,810,561,660; Dan DAK sebesar Rp. 57,342,558,337; dengan total realisasi Rp. 273.797.272.171; atau 90,02%. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp. 100,355,500,000; dengan realisasi Rp. 93,522,018,064; atau 93,19% adalah untuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Kesehatan beserta Puskesmas. Dan total anggaran yang digunakan pada 4 bidang dan 1 Sekretariat, dan 4 UPT yang ada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 136,523,947,081 ; dengan realisasi Rp. 119,718,381,151; atau 88 % (Cukup Efektif). Sedangkan Belanja BLUD 32 UPT yang ada pada Dinas Kesehatan yaitu 31 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan adalah sebesar Rp. 67,273,672,916; dengan realisasi sebesar Rp. 60,556,872,956; atau 90,02% (Cukup Efisien).

Tahun 2023 Dinas Kesehatan melaksanakan 5 Program dengan 4 program terkait kesehatan dan 1 penunjang, untuk realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini mencapai 90,02% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan program sudah berjalan sesuai rencana walaupun dalam perjalanannya masih terkendala. Berikut rincian realiasi anggaran program pada Dinas Kesehatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 91,86%;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 86,39%;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 91,24%;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 78,49%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 98,63%.

Implikasi dari realisasi anggaran di atas merupakan kinerja Renstra, karena program yang dilaksanakan adalah program yang tertera dalam dokumen Renstra. Dan pada tahun 2023 ini kategori capaian kinerja anggaran pada Dinas Kesehatan adalah *cukup efektif* dan *cukup efisien*.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab berdasarkan implikasi yang dikemukakan di atas, tindakan perencanaan dan penganggaran yang dapat diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab antara lain :

- Untuk program dengan realisasi di bawah 80%, tindakan yang dapat diambil untuk kendala e-katalog adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan penyedia yang masuk e-katalog.
- Ada efesiensi belanja dari beberapa sub kegaitan yang menyebabkan prosentase program tidak maksimal

Rincian evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024 serta evaluasi capaian target Renstra terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 :
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Serang

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
1.02.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PERANGKAT DAERAH										
1.02. 01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18	Dokumen	3	3	3	100	3	9	50.00
1.02. 01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**										
1.02. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6006	orang	1001	1001	1001	100	1036	3038	50.58
1 02 01 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1 02 01 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	108	Dokumen	18	18	18	100	6	42	38.89
1.02. 01.2. 03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**										
1.02. 01.2. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	6	Laporan	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**										
1.02. 01.2. 05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen					1	1	100.00
1.02. 01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	orang	10			#DIV/0!		10	16.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	80	orang	80			#DIV/0!		80	100.00
1.02. 01.2. 06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**										
1.02. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	Paket	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Paket	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	6	Paket	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pakte barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Paket	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	Paket	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Laporan	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 01.2. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14	Unit					14	14	100.00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit					10	10	100.00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit					5	5	100.00
1.02.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH										
1.02. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	216	Laporan	36	36	36	100	12	84	38.89
1.02. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	10	10	10	100	4	24	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
1.02. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan prizinannya	198	Unit	33	33	33	100	33	99	50.00
1.02. 01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	270	Unit	45	45	45	100	45	135	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Gedung	1			#DIV/0!		1	16.67
1.02. 01.2. 10	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**										
1.02. 01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	32	UPT	32	32	32	100	32	32	100.00
1.02. 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	10	PKM	1	1	1	100	1	3	30.00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	2	Unit	1			#DIV/0!		1	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	31	Unit	31			#DIV/0!		31	100.00
1.02. 02.2. 01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8	Unit						0	0.00
1.02. 02.2. 01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan	1554	Unit	259	259	259	100	259	777	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan Kesehatan	kesehatan yang disediakan									
1.02. 02.2. 01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center	1554	Unit	259	259	259	100	259	777	50.00
1.02. 02.2. 01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	6	paket	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6	paket	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan,Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3672	Paket	612	612	612	100	612	1836	50.00
1.02. 02.2. 02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	211650	orang	29376	35275	35275	100	35275	99926	47.21
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	202032	orang	29017	33672	33672	100	33672	96361	47.70
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	192432	orang	32439	37072	37072	100	37072	106583	55.39
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	833628	orang	147845	138938	138938	100	138938	425721	51.07

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1453 932	orang	37713	242322	242322	100	242322	522357	35.93
1.02. 02.2. 02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6630 246	orang	1095199	1105041	1105041	100	1105041	3305281	49.85
.02.0 2.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7040 52	orang	97949	117342	117342	100	117342	332633	47.25
1.02. 02.2. 02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2425 44	orang	273606	40424	40424	100	40424	354454	146.14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47694	orang	16573	7949	7949	100	7949	32471	68.08
1.02. 02.2. 02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	6870	orang	2255	1145	1145	100	1145	4545	66.16
1.02. 02.2. 02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	52470	orang	18736	18371	18371	100	18371	55478	105.73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIVyang mendapatkan pelayanan sesuai standar	264738	orang	36237	43992	43992	100	43992	124221	46.92
1.02. 02.2. 02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		berpotensi bencana sesuai standar									
1.02. 02.2. 02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	6	dokumen	1	1	1	100		2	33.33
1.02. 02.2. 02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	399072	orang	66512	66512	66512	100	66512	199536	50.00
1.02. 02.2. 02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120	orang	20	20	20	100	20	60	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan danpaska krisis kesehatan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 02.2. 02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	12	orang	12	1	1	100	1	14	116.67
1.02. 02.2. 02.00 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	umlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket					1	1	100.00
1.02. 02.2. 02.29	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	6	dokumen	1	1	1	1	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	4	Unit	1	1	1		1	1	25.00
1.02. 02.2. 02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	186	dokumen	31	31	31	100	31	93	50.00
1.02. 02.2. 02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	63	unit	23	35	35	100	35	35	55.56
.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam SPGDT	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50.00
1 02 02 2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13600	Orang		3406	3406	100	3406	6812	50.09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 02 02 2.02. 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	296	Orang		71	71	100	71	142	47.97
3 02 02 2.02. 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12	Orang		3	3	100	3	3	25.00
1.02. 02.2. 02.00 43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10	Tatanan					10	10	100.00
1.02. 02.2. 02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	Dokumen					1	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.03	**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI**										
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	6	dokumen		1	1	100	1	2	33.33
1.02.02.2.04	**PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KABUPATEN/KOTA										
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	60	Unit					60	60	100.00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	72	Unit	31	55	55	100	54	55	76.39

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 02.2. 04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil pemyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										
1.02. 03.2. 01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**										
1.02. 03.2. 01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	Dokumen	1			#DIV/0!	1	2	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 03.2. 01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	Dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 03.2. 02	**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KABUPATEN/KOTA										
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	5634	orang	939	418	418	100	376	1733	30.76
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen					1	1	100.00
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02. 03.2. 03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK tingkat daerah kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	30	orang	5	5	5	100	5	15	50.00
1.02. 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 01	**PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	6	dokumen		1	1	1	1	2	33.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2	Dokumen		1	1	1	1	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 05	**PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN JAJANAN**										
1.02. 04.2. 05.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	6	dokumen	1			#DIV/0!		1	16.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 04.2. 06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**										
1.02. 04.2. 06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	140	Unit		78	78	62	62	140	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										
1.02.05.2.01	**ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 05.2. 01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00
1.02. 05.2. 02	**PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
1.02. 05.2. 02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan	6	dokumen	1	1	1	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan gerakan hidup bersih dan sehat									
1.02. 05.2. 03	**PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02. 05.2. 03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervise upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	6	dokumen					1	1	16.67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

160 indikator kinerja yang ada pada Dinas Kesehatan merupakan indikator kinerja bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, dan dari 160 indikator tersebut sebanyak 12 indikatornya merupakan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Rincian capaian kinerja pelayanan dinas kesehatan terlihat pada tabel 2.2, serta tabel 2.3 capaian khusus SPM tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2023
Kabupaten Serang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Standar Nasional		65,26	65,47	65,68	65,89	74,62	65,47	65,68	65,89
2	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	Standar Nasional		35%	40%	45%	50%	37,4%	40%	45%	50%
3	Angka Kematian Ibu (konversi dari jml Kematian Ibu)	Standar Nasional		194	183	182	180	93,88	183	182	180
4	Angka Kematian Bayi (konversi dari jml Kematian bayi)	Standar Nasional		8.23	8.21	8,19	8,17	6,7	8.21	8,19	8,17
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	Standar Nasional		16%	14%	13,5%	13%	5,66%	14%	13,5%	13%
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	93,69%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	88,20%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Balita	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	81,63%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	92,41%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	87,58%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	77,80%	100%	100%	100%
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	81,57%	100%	100%	100%
15	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	85,27%	100%	100%	100%
17	Cakupan fasilitas kesehatan terakreditasi (RS,Puskesmas, Klinik)	Standar Nasional		35%	40%	45%	50%	37,4%	40%	45%	50%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
18	Prosentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang terstandar	Standar Nasional		59%	61%	61%	61%		61%	61%	61%
19	Cakupan Universal Health Coverage	Standar Nasional		90%	90%	95%	95%	84,48%	90%	95%	95%
20	Cakupan pembiayaan kesehatan anggaran daerah	Standar Nasional		10%	10%	10%	10%	8%	10%	10%	10%
21	Prosentase Puskesmas yang memiliki alkes sesuai standar	Standar Nasional		45,45%	63,64%	81,82%	100%	95%	63.64%	81,82%	100%
22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Standar Nasional		100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
23	Cakupan Desa Stop BABS	Standar Nasional		25%	35%	40%	50%	35,89%	35%	40%	50%
24	Persentase Rekomendasi Teknis Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
26	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Prosentase Posyandu aktif			60%	65%	70%	75%	74,4%	65%	70%	75%
29	Prosentase Desa Dengan Capaian Minimal 80% bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap			94.6%	95%	95,5%	96%	77%	95%	95,5%	96%
30	Prosentase Bayi Berusia Kurang dari 1 Tahun yang telah mendapatkan Imunisasi : Hepatitis B 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT/HB/HiB 3 dosis, Polio 4 dosis, dan Campak/MR 1 dosis.			91.6%	95%	95,5%	96%	92,2%	95%	95,5%	96%
31	Prosentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Penanggulangan Kurang dari 24 jam			100%	100%	100%	100%	99,1%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
32	Prosentase Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dilakukan Perekaman data pada Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Prosentase Daerah Terdampak Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Prosentase usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	92.40%	100%	100	100%
35	Prosentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100	77.80%	100%	100%	100
36	Prosentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
37	Jumlah desa yang melaksanakan posbindu Penyakit Tidak menular (PTM)			326	326	326	326	326	326	326	326
38	Prosentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan sesuai stadar			100%	100%	100%	100%	81,57%	100%	100%	100%
39	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan napza			31	31	31	31	31	31	31	31
40	Prosentase penemuan dan penanganan penderita Pneumoni Balita			90%	90%	90%	90%	50,23%	90%	90%	90%
41	Prosentase penemuan dan penanganan penderita diare Balita			100%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%
42	Jumlah angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)			<5	<5	<5	<5	7,24/ 100.000 pddk	<5	<5	<5
43	Prosentase angka kecacatan tingkat 2 kusta			<5	<5	<5	<5	13 Kasus	<5	<5	<5
44	Prosentase angka proporsi kusta anak			<5	<5	<5	<5	10 kasus	<5	<5	<5

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
45	Jumlah angka kesakitan penderita DBD			49 per 100.000	49 per 100.000	49 per 100.000	49 per 100.000	13,85/100.000 pddk	49 per 100.000	49 per 100.000	49 per 100.000
46	Prosentase angka bebas jentik			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
47	Prosentase penderita HIV mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan			100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
48	Cakupan pengobatan semua kasus TB yang diobati			90%	90%	90%	90%	92%	90%	90%	90%
49	Cakupan angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus			85%	85%	85%	85%	92,8%	85%	85%	85%
50	Prosentase pelayanan pasien TB semua kasus			100%	100%	100%	100%	98,8 %	100%	100%	100%
51	Prosentase Puskesmas yang mendapatkan alat Kesehatan			100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
52	Prosentase Puskesmas yang mendapatkan obat dan perbekalan kesehatan			100%	100%	100%	100%	83,87%	100%	100%	100%
53	Prosentase Penggunaan Obat Rasional Puskesmas			65%	70%	70%	75%	100%	70%	70%	75%
54	Cakupan Peningkatan Pembinaan SDM Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
55	Kompetensi Petugas Kesehatan dalam pelayanan meningkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Jumlah penilaian angka kredit yang diselesaikan oleh Tim Penilai Jabfung			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	Cakupan peningkatan pembinaan SDM Kesehatan (Monev dan Koordinasi dan Konsultasi)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat			100%	100%	100%	100%	84,15%	100%	100%	100%
60	Jumlah Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sarana Air Minum			216,000	234,000	252,000	270,000	105,268	234,000	252,000	270,000
61	Persentase Akses penduduk terhadap air minum yang memenuhi syarat			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
62	Jumlah Desa Stop buang air besar sembarangan			60	65	70	75	117	65	70	75
63	Jumlah IKL Tempat tempat Umum			1,535	1,610	1,685	1,760	1,448	1,610	1,685	1,760
64	Jumlah IKL Tempat Pengelolaan Makanan			2,700	2,800	2,900	3,000	1,055	2,800	2,900	3,000
65	Jumlah desa yang melaksanakan kampanye higiene dan sanitasi			326	326	326	326	158	326	326	326
66	Jumlah Desa yang melaksanakan kampanye pengelolaan limbah cair rumah tangga			212	305	326	326	156	305	326	326
67	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan			93%	95%	95%	95%	89,1%	95%	95%	95%
68	Cakupan kunjungan antenatal (persen)			93%	95%	95%	95%	89,1%	95%	95%	95%
69	Cakupan kunjungan neonatal (persen)			92%	95%	95%	95%	92,4%	95%	95%	95%
70	Persentase pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dasar			95%	97%	100%	100%	100%	97%	100%	100%
71	Persentase rumah tangga ber PHBS			45%	47%	50%	50%	56,6%	47%	50%	50%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
72	Persentase posyandu Purnama dan Mandiri			60%	70%	80%	80%	74,4%	70%	80%	80%
73	Cakupan Ibu Hamil Yang mendapat TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan			82%	83%	84%	85%	80%	83%	84%	85%
74	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT			80%	80%	80%	80%	71,38%	80%	80%	80%
75	Persentase Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A (2 kapsul)			76%	79%	80%	82%	89,14%	79%	80%	82%
76	Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD)			62%	66%	68%	70%	77,68	66%	68%	70%
77	Persentase Bayi Usia kurang dari 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif			50%	55%	60%	65%	76%	55%	60%	65%
78	Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif			45%	50%	55%	60%	67,54%	50%	55%	60%
79	Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi Usia 6-12 bln			88%	89%	90%	90%	95,68%	89%	90%	90%
80	Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita Usia 1-5 thn			88%	89%	90%	90%	95,44%	89%	90%	90%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
81	Persentase Balita Gizi kurang mendapatkan PMT			85%	85%	85%	85%	65,44%	85%	85%	85%
82	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan			86%	88%	90%	90%	100%	88%	90%	90%
83	Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badannya (D/S)			70%	75%	80%	85%	84,89%	75%	80%	85%
84	Cakupan Balita Ditimbang Yang Naik Berat Badannya (N/D)			82%	84%	86%	88%	87,83%	84%	86%	88%
85	Cakupan Balita Memiliki Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S)			70%	75%	80%	85%	96,91%	75%	80%	85%
86	Prevalensi Berat Badan Kurang (BB kurang dan sangat kurang) pada Balita			14%	13%	12%	12%	5,51%	13%	12%	12%
87	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita			7.3%	7%	7%	7%	7,2%	7%	7%	7%
88	Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah (TTD)			54%	56%	58%	58%	65,77%	56%	58%	58%
89	Cakupan K1			95%	100%	100%	100%	94,5%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
90	Cakupan K6			80%	80%	80%	80%	77,4%	80%	80%	80%
91	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (PN)			95%	97%	100%	100%	89,1%	97%	100%	100%
92	Cakupan Pelayanan Nifas (KF) Terstandar			100%	100%	100%	100%	90,1%	100%	100%	100%
93	Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Pertama (KN1)			100%	100%	100%	100%	92,4%	100%	100%	100%
94	Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Lengkap (KNL)			100%	100%	100%	100%	89,1%	100%	100%	100%
95	Cakupan Deteksi Resti Nakes (DRN)			100%	100%	100%	100%	88,6%	100%	100%	100%
96	Cakupan Deteksi Resti Masyarakat (DRM)			100%	100%	100%	100%	65,7%	100%	100%	100%
97	Cakupan Pelayanan Bayi			100%	100%	100%	100%	100,89%	100%	100%	100%
98	Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
99	Cakupan Pelayanan MTBS Terstandar			100%	100%	100%	100%	99,2%	100%	100%	100%
100	Cakupan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dasar			97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
101	Cakupan Puskesmas Ramah Anak			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
102	Cakupan Puskesmas Mampu PKPR			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
103	Cakupan Puskesmas PKRT			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
104	Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			95%	97%	100%	100%	95%	97%	100%	100%
105	Persentase rumah tangga dibina PHBS			75%	77%	80%	82%	74,3	77%	80%	82%
106	Persentase sekolah dibina PHBS			70%	80%	90%	100%	68,6	80%	90%	100%
107	Persentase sekolah dibina SBH			70%	80%	90%	100%	44,1	80%	90%	100%
108	Jumlah Anggota SBH di Tingkat Ranting			35	40	45	50	17	40	45	50
109	Cakupan Pembinaan Posyandu			90%	95%	100%	100%	67%	95%	100%	100%
110	Persentase Posyandu Aktif			60%	65%	70%	75%	74,4%	65%	70%	75%
111	Cakupan Pembinaan Desa Siaga Aktif			60%	65%	70%	75%	69,8	65%	70%	75%
112	Cakupan pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat Kecamatan			70%	80%	90%	100%	100%	80%	90%	100%
113	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan			4	4	6	6	10	4	60	6

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	bermitra di bidang kesehatan										
114	Prosentase Puskesmas melaksanakan yankestrad			25%	30%	35%	40%	6%	30%	35%	40%
115	Posentase Puskesmas yang dibina dan diawasi			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
116	Prosentase Puskesmas PONED terstandar			20%	30%	40%	50%	-	30%	40%	50%
117	Prosentase Klinik yang dibina dan diawasi			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
118	Prosentase Laboratorium Kesehatan, Apotik, Optikal dan Fasilitas Kesehatan Tradisioanl dibina dan diawasi			80%	85%	90%	95%	75%	85%	90%	95%
119	Prosentase Praktik Mandiri Nakes terstandar			70%	80%	90%	100%	-	80%	90%	100%
120	Prosentase Praktik Mandiri Nakes berizin			70%	80%	90%	100%	-	80%	90%	100%
121	Prosentase Dokter dan Dokter Gigi Praktek Mandiri yang dibina dan diawasi			80%	85%	90%	100%	-	85%	90%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
122	Prosentase Praktek Mandiri Bidan dan Perawat yang dibina dan diawasi			85%	90%	95%	100%	-	90%	95%	100%
123	Jumlah Puskesmas yang menyediakan perangkat Telemedicine			5	8	11	14	-	8	11	14
124	Jumlah Faskes yang menyelenggarakan pelayanan Telemedicine			10	12	14	16	2	12	14	16
125	Prosentase Rumah Sakit yang dibina dan diawasi			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
126	Prosentase Rumah Sakit PONEK			80%	90%	90%	90%	-	90%	90%	90%
127	Prosentase Penerbitan Izin RS			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
128	Prosentase Faskes menggunakan SISRUTE			85%	90%	95%	100%	100%	90%	95%	100%
129	Prosentase Faskes dengan pelayanan rujukan terstandar			85%	90%	95%	100%	100%	90%	95%	100
130	Prosentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna			60%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100
131	Prosentase Rumah Sakit terakreditasi			60%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
132	Prosentase Klinik Terakreditasi			20%	30%	40%	50%	27%	30%	40%	50%
133	Prosentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien			20%	30%	40%	50%	100%	30%	40%	50%
134	Prosentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)			20%	30%	40%	50%	100%	30%	40%	50%
135	Persentase ketepatan distribusi obat dan bmhp			78%	80%	82%	85%	79,57%	80%	82%	85%
136	Persentase obat rusak			6%	5%	4%	3%	0	5%	4%	3%
137	Prosentase ketersediaan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
138	Prosentase ketersediaan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
139	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial			70%	72%	75%	80%	83,87%	72%	75%	80%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
140	Prosentase Pelayanan Gawat Darurat Pra Faskes			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
141	Prosentase Pelayanan Non Gawat Darurat Pra Faskes			90%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	100%
142	Prosentase Successfull Call Ratio			65%	70%	75%	80%	88,3%	70%	75%	80%
143	Pemeriksaan Laboratorium kesehatan masyarakat dan medical chek up			3,500	4,000	4500	5000	1354	4,000	4500	5000
144	Terpeliharanya akreditasi Laboratorium			KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN	KALK dan KAN
145	KALK dan KAN ISO 17025			ISO 17025	ISO 17025	ISO 17025	ISO 17025	0	ISO 17025	ISO 17025	ISO 17025
146	Penambahan parameter ruang lingkup akreditasi			0	0	0	2	0	0	0	2
147	Penambahan parameter pemeriksaan			0	1	1	0	0	1	1	0
148	Penyelesaian komplain pelanggan			100%	100%	100%	100%	6 komplain	100%	100%	100
149	Survey kepuasan pelanggan			≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	76,61	≥ 80	≥ 80	≥ 80
150	Manajemen K3			50	50	70	100	80	50	70	100

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
151	Cakupan Masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan			90%	90%	95%	98%	84,48%	90%	95%	98%
152	Penunjang Bantuan Operasional Kesehatan untuk Meningkatkan Pelayanan pada masyarakat			100%	100%	100%	100%	85,74%	100%	100%	100%
153	Penunjang Operasional Puskesmas			100%	100%	100%	100%	91,61%	100%	100%	100%
154	Fleksibilitas Penggunaan Anggaran di Puskesmas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
155	Tersedianya dokumen perencanaan tingkat dinkes			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
156	Tersedianya dokumen capaian kinerja tingkat dinkes			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
157	Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan di Kabupaten Serang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
158	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
159	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Aset			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
160	Terlaksananya Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 : Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM (%)	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	35,774	33,516	93.69	35,774	33,516	93.69	93.69	Tuntas Utama
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	34,147	30,119	88.20	34,147	30,119	88.20	88.20	Tuntas Madya
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	32,521	31,274	96.17	32,521	31,274	96.17	96.17	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	15,5261	15,6641	100.89	15,5261	15,6641	100.00	100.00	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	24,8539	202,892	81.63	248,539	202,892	81.63	81.63	Tuntas Madya
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1,133,799	1,047,693	92.41	1,133,799	1,047,693	92.41	92.41	Tuntas Utama
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	120,297	105,354	87.58	120,297	105,354	87.58	87.58	Tuntas Madya
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	323,557	251,729	77.80	323,557	251,729	77.80	77.80	Tuntas Pratama

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM (%)	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	18,811	18,811	100	18,811	18,811	100	100.00	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2,225	1,815	81.57	2,225	1,815	81.57	81.57	Tuntas Madya
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	30,610	30,610	100.00	30,610	30,610	100.00	100.00	Tuntas Utama
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	44,092	37,597	85.27	44,092	37,597	85.27	85.27	Tuntas Madya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

160 indikator kinerja yang ada pada Dinas Kesehatan merupakan indikator kinerja bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, Sedangkan untuk kinerja SPM tahun 2023 dari 12 indikator, ada 7 indikator dengan tuntas utama yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan ada 5 indikator dengan kategori tuntas madya yaitu Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan isu strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan antara lain :

1. Masih adanya kematian ibu dan bayi;
2. Masih adanya kasus stunting;
3. Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular
4. Masih Rendahnya cakupan STBM dan kualitas lingkungan
5. Peningkatan faskes yang terstandarisasi dan terakreditasi
6. Peningkatan status puskesmas menjadi BLUD
7. Penanganan dampak cuaca ekstrim
8. Peningkatan SDM dan tatakelola kesehatan

Selain hal tersebut, beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan antara lain

1. Peran lintas sektor dan lintas program belum maksimal;
2. Petugas pemberi pelayanan belum maksimal dalam melakukan pencatatan dan pelaporan berbasis online;
3. Pemenuhan petugas kesehatan belum sesuai standar nasional, sehingga dalam pemenuhan kegiatan petugas masih merangkap;
4. Proses penyusunan perencanaan kinerja belum maksimal;

Dari permasalahan dan hambatan tersebut menyebabkan pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program kesehatan belum bisa optimal. Dinas Kesehatan

juga mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan paripurna serta lingkungan tempat pelayanan yang nyaman;
2. Merebaknya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan;
3. Masih adanya penolakan imunisasi;
4. Pola asuh orang tua terhadap asupan makanan pada anak yang belum baik.

Beberapa peluang yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang antara lain :

1. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan penyelenggaran Jaminan Kesehatan seperti BPJS;
2. Banyaknya fasilitas kesehatan swasta;
3. Adanya anggaran dari pusat untuk program kesehatan.

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kerja sama antara fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Memaksimalkan penggunaan anggaran dari pusat melalui anggaran Dana Alokasi Khusus;
3. Memaksimalkan keterlibatan peran swasta maupun masyarakat serta lintas sektor terkait peningkatan status kesehatan di Kabupaten Serang;
4. Optimalisasi pemanfaatan perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan;
5. Menerapan penilaian kenaikan pangkat berdasarkan pada kinerja sesuai dengan tupoksinya dan pencapian indikator program dan kegiatan yang ditargetkan;
6. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana;
7. Perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan & implementasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan

SPM Bidang Kesehatan. Program kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan tahun 2025 sebagian besar sama dengan tahun 2024.

Dalam penyusunan dokumen perencaan Program Kegiatan dan Subkegiatan disusun dengan acuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Mentei dalam negri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan untuk tahun 2025 disusun langsung menyesuaikan dengan RKPD awal dari Bappeda, dan rancangan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dimasing-masing program yanga ada pada unit kerja di dinas kesehatan.

Total anggaran Dinas Kesehatan pada Rancangan Awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp 239,723,361,527; sedangkan dalam hasil analisis kebutuhan tahun 2025 total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 268,241,043,918; sehingga ada Selisih Rp 28,517,682,391; Lebih rinci perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan kebutuhan program kegiatan tahun 2025 yang sudah disesuaikan dengan rancangan awal RKPD dituangkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 :
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab Serang**	**Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan (%)**	**100%**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab Serang**	**Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan (%)**	**100%**		
			AKI (Angka)	**182 Per 100.000 KH**				**AKI (Angka)**	**182 Per 100.000 KH**		
			AKB (Angka)	**8,19 Per 1000 KH**				**AKB (Angka)**	**8,19 Per 1000 KH**		
			Prevalensi Stunting (%)	**13,5%**				**Prevalensi Stunting (%)**	**13,5%**		
			Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan (%)	**95%**				**Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan (%)**	**95%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Prosentase Desa Stop BABS (%)	**40%**				**Prosentase Desa Stop BABS (%)**	**40%**		
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Tersediany a Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan**	**100%**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan**	**100%**		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Rp 458,719,000	Pembangunan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Rp 458,719,000	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Oleh Puskesmas	4 unit	Rp 2,541,281,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 unit	Rp 2,541,281,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Serang	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	Rp 150,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Serang	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	Rp 150,000,000	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	Rp 1,800,000,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	Rp 11,800,000,000	Kebutuhan Obat dan BMHP 31 Puskesmas

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	612 paket	Rp 335,881,928	Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	612 paket	Rp 335,881,928	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Tersediany a Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan**	**100%**		**Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**100%**			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35.275 orang	Rp 500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	35.275 orang	Rp 500,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			sesuai standar					kesehatan sesuai standar			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab Serang	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33.672 orang	Rp 300,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab Serang	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33.672 orang	Rp 300,000,000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	Kab Serang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	32.072 orang	Rp 150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	Kab Serang	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	32.072 orang	Rp 150,000,000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kab Serang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138.938 orang	Rp 130,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kab Serang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138.938 orang	Rp 130,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Kab Serang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242.322 orang	Rp 120,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Kab Serang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242.322 orang	Rp 120,000,000	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab Serang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.105.041 orang	Rp 97,205,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab Serang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.105.041 orang	Rp 97,205,600	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kab Serang	Jumlah penduduk lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	117.342 orang	Rp 100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kab Serang	Jumlah penduduk lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	117.342 orang	Rp 100,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab Serang	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.424 orang	Rp 92,204,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab Serang	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.424 orang	Rp 92,204,500	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab Serang	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.949 orang	Rp 97,205,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab Serang	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.949 orang	Rp 97,205,800	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab Serang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.145 orang	Rp 115,617,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab Serang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.145 orang	Rp 115,617,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kab Serang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	18.371 Orang	Rp 69,432,600	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kab Serang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	18.371 Orang	Rp 69,432,600	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kab Serang	Jumlah orang beresiko menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	43.992 Orang	Rp 84,149,600	Pengelolaan layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kab Serang	Jumlah orang beresiko menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	43.992 Orang	Rp 84,149,600	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	1 Dokumen	Rp 50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	Rp 50,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			sesuai standar								
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai	2 Dokumen	Rp 577,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai	2 Dokumen	Rp 577,400,000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyrakat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Rp 600,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyrakat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Rp 600,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Rp 416,602,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Rp 416,602,300	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Rp 22,885,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Rp 22,885,000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Rp 115,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Rp 115,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab Serang	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	66.512 orang	Rp 184,384,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab Serang	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	66.512 orang	Rp 184,384,100	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab Serang	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20 orang	Rp 99,998,900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab Serang	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20 orang	Rp 99,998,900	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan paska krisis kesehatan	1 dokumen	Rp 50,000,000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan paska krisis kesehatan	1 dokumen	Rp 50,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	Rp 198,583,350	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	Rp 198,583,350	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	Rp 32,337,399,292	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	Rp 32,337,399,292	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab Serang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	300 Paket	Rp 40,000,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab Serang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	300 Paket	Rp 40,000,000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah dokumen operasional	1 dokumen	Rp 4,282,773,825	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab Serang	Jumlah dokumen operasional	1 dokumen	Rp 4,282,773,825	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			pelayanan puskesmas					pelayanan puskesmas			
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 419,955,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 419,955,000	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab Serang	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	31 pkm 35 faskes	Rp 144,575,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab Serang	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	31 pkm 35 faskes	Rp 144,575,000	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab Serang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	1 Laporan	Rp 87,787,750	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab Serang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Rp 87,787,750	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Obat Massal)								
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen	Rp 50,000,000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen	Rp 50,000,000	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab Serang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 UPT	Rp 577,400,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab Serang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 UPT	Rp 577,400,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1 02 02 2.02. 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab Serang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.406 Orang	Rp 13,886,400	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab Serang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.406 Orang	Rp 13,886,400	
1 02 02 2.02. 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab Serang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	Rp 34,716,300	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab Serang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	Rp 34,716,300	
1 02 02 2.02. 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab Serang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	Rp 6,942,800	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab Serang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	Rp 6,942,800	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1 2 02 02 2.02. 0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab Serang	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10 Tatanan	Rp 25,902,000	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab Serang	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10 Tatanan	Rp 25,902,000	
1.02. 02.2. 03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Kab Serang**	**Ketersediaan Informasi Kesehatan**	**100%**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Kab Serang**	**Ketersediaan Informasi Kesehatan**	**100%**		
1.02. 02.2. 03.0 002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 17,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 17,000,000	
1.02. 02.2. 04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Penyelenggaraan Izin RS kelas C dan D serta faske**	**100%**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Penyelenggaraan Izin RS kelas C dan D serta faske**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	70 Faskes	Rp 62,250,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab Serang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	70 Faskes	Rp 62,250,000	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	31 pkm 75 faskes	Rp 120,425,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	31 pkm 75 faskes	Rp 120,425,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	Rp 265,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	Rp 265,000,000	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Kab Serang**	**Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**100%**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Kab Serang**	**Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**100%**		
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan**	**100%**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan**	**100%**		
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik	1 Dokumen	Rp 107,465,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Rp 107,465,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Tenaga Kesehatan								
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Rp 150,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Rp 150,000,000	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Tersediany a Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagu naan Sumberday a ManusiaKe sehatan untuk UKP dan UKM**	**100%**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumberdaya ManusiaKese hatan untuk UKP dan UKM**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab Serang	Jumlah SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	400 Orang	Rp 13,000,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab Serang	Jumlah SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	400 Orang	Rp 13,000,000,000	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia**	**100%**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia**	**100%**		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Serang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	250 Orang	Rp 833,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Serang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	Rp 833,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Kompetensinya								
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kab Serang**	**Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes**	**100%**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kab Serang**	**Prosentase PKM dengan ketersediaa n obat esensial, vaksin, alkes**	**100%**		
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100%**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 25,350,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 25,350,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100%**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Rp 27,204,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Rp 27,204,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**100%**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**100%**		
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp 19,079,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp 19,079,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMENUHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kab Serang**	**Prosentase Posyandu aktif**	**70%**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMENUHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kab Serang**	**Prosentase Posyandu aktif**	**70%**		
			Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	**90%**				**Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)**	**90%**		
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif**	**90%**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif**	**90%**		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan	1 Dokumen	Rp 453,686,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab Serang	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup	1 Dokumen	Rp 453,686,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			dan gerakan hidup bersih dan sehat					bersih dan sehat			
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sekto**	**70%**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sekto**	**70%**		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Serang	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	Rp 6,196,500,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab Serang	Pemberdayaan, Kemitraan,	1 Dokumen	Rp 6,196,500,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab Serang**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab Serang**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		
			Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	**100%**				**Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas**	**100%**		
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan**	**100%**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan**	**100%**		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 43,215,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 43,215,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 50,975,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 50,975,000	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 72,235,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 72,235,000	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Presentase dokumen pelaporan keuangan**	**100%**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Presentase dokumen pelaporan keuangan**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Serang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1036 Orang/bulan	Rp 102,746,900,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Serang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1036 Orang/bulan	Rp 121,264,582,391	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 83,730,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Serang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 83,730,000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 97,312,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 97,312,900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 93,905,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 93,905,400	
1.02.01.2.03	**Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**		**Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**		
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Serang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1 Dokumen	Rp 100,575,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Serang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 100,575,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Daerah SKPD								
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 42,506,700	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 42,506,700	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 10,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	Rp 10,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	Rp 10,000,000	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 30,000,000	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 270,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 270,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 70,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 70,000,000	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 7,200,000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 1,076,114,404	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 1,076,114,404	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 738,146,324	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 738,146,324	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 609,496,272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 609,496,272	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Rp 250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Rp 250,000,000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Rp 150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Serang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Rp 150,000,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kab Serang**	**Terlaksananya Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**	**32 Unit Kerja**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kab Serang**	**Terlaksanannya Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**	**32 Unit Kerja**		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab Serang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32 Unit Kerja	Rp 64,166,201,482	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab Serang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32 Unit Kerja	Rp 64,166,201,482	
	JUMLAH				**Rp 239,723,361,527**	**JUMLAH**				**Rp 268,241,043,918**	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan masyarakat diperoleh melalui kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten serta kegiatan Reses Dewan, usulan tersebut terangkum dalam aplikasi SIPD yang dimasukan oleh petugas yang ada di tiap-tiap Kecamatan.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan tersebut, seluruhnya sudah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dan semua usulan tersebut sesuai dengan isu strategis yang diusung oleh dinas kesehatan. Berikut rincian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2025 yang diperoleh saat pertemuan Forum OPD Dinkes dan usulan masyarakat melalui aplikasi SIPD :

Tabel 2.5 :
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas)	Kecamatan Anyar, Kab. Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Tidak dapat diproses, antara puskesmas dan rumah sakit memiliki aturan tersendiri
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Rehabilitasi Puskesmas)	Desa Anyar, Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Paket	Disetujui untuk ditindaklanjuti
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	Desa Parakan 6 rw, Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pengadaan alat - alat kesehatan dan farmasi)	desa pabuaran, Kab. Serang	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Ditolak karena Pengadaan Alkes tidak bisa di Desa akan tetapi akan diakomodir oleh puskemas atau Dinas Kesehatan
5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (penyediaan obat dan vitamin)	desa pabuaran, Kab. Serang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Ditolak karena Pengadaan Obat tidak bisa di Desa akan tetapi akan diakomodir oleh puskemas atau Dinas Kesehatan
6	Pembangunan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas)	Kp. Pasir Kupa Rt.007/002, Kab. Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Tidak disetujui
7	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	kp. cimanggu Rt. 001 Rw. 003, Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa
8	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	Kp. Kadu Badak RT 012 RW 005, Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa
9	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pelayanan Rekam Medis)	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	Statusnya dibatalkan
10	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	Kp. Jambangan, Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			kesehatan lainnya		
11	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	DESA CEMPLANG ,Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa
12	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	Kp. Pontang RT 009 RW 003 Ds. Pontang Kec. Pontang Kab. Serang Banten., Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa
13	Pembangunan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas)	Desa Sukabares, Kab. Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Tidak disetujui
14	Pembangunan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas)	Kp. Gempol Dampit RT.002 RW.003 Ds. Koper Kec. Cikande Kab. Serang, Kab. Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Tidak disetujui karena sudah masuk dam renja 2024
15	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Penyediaan Obat-Obatan)	Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten, Kab. Serang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Ditolak karena Pengadaan Obat tidak bisa di Desa akan tetapi akan diakomodir oleh puskemas atau Dinas Kesehatan
16	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (penyediaan obat dan vitamin)	Desa cemplang , Kab. Serang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	1 Paket	Ditolak karena Pengadaan Obat tidak bisa di Desa akan tetapi akan diakomodir oleh puskemas atau Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			Kesehatan yang disediakan		
17	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pembangunan/ rehabilitasi posyandu)	Kp.Panenjoan, Kab. Serang	Terbangunnya fasilitas kesehatan lainnya	1 Unit	Kewenangan Anggaran ada di Kepala Desa
18	Pembangunan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas)	Jl. KH. abdul kabier Kp. Tunjung Pasar Desa Tunjung Teja Kec. Tunjung Teja (Eks lahan pasar tunjung Teja), Kab. Serang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Tidak disetujui
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Rehab sedang/berat Puskesmas)	Kp. Kadaung RT. 005 Rw. 004 Puskesmas Anyar , Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Disetujui untuk ditindaklanjuti
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Rehab sedang/berat Puskesmas)	Puskesmas Anyar Kp. Kedaung Rt. 004 Rw. 005, Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Tidak disetujui
21	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Rehab sedang/berat Puskesmas)	Kp. Kedaung Rt. 005 Rw. 004 Puskesmas Anyar, Kab. Serang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	1 Unit	Tidak disetujui

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			Pemeliharaan Oleh Puskesmas		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebiajakan nasional merupakan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Jenis Pelayanan dasar Bidang Kesehatan terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM);
2. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol;
3. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas;
4. Universal Health Coverage;
5. Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Sesuai dengan Tema RKP Nasional Tahun 2025: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, prioritas nasional RKP tahun 2025 diarahkan pada 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang meliputi :

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2025 antara lain :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah;
2. Penurunan Kemiskinan;
3. Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik; dan
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Serang tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Dan Layanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat", sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Bagi Masyarakat dengan indikator :

1. Meningkatnya angka harapan hidup;
2. Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;
4. Menurunnya stunting bagi balita;
5. Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi.

3.3 Program Dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, maka dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2025 merumuskan 5 program 20 kegiatan dan 74 sub kegiatan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2025

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya
		Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyrakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
II	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Pengembangan Mutu dan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
III	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
IV	PEMBERDAYAAN PEMENUHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
V	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan penetapan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan antara lain pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, SDGs, SPM serta indikator pembangunan kesehatan yang saat ini digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Rencana Kerja ini sesuai Pagu Rancangan Akhir RKPD Dinkes tahun 2025, Dinas kesehatan menggunakan 5 program, 20 kegiatan dan 74 sub kegiatan. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan kabupaten Serang tahun 2025 sebesar Rp 242,823,361,527; dan perkiraan 2026 senilai Rp 264,021,481,434;. Secara rinci termuat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 :
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan (%)**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
		AKI (Angka)	**Kab Serang**	**182 Per 100.000 KH**				**180 Per 100.000 KH**	
		AKB (Angka)	**Kab Serang**	**8,19 Per 1000 KH**				**8,17 Per 1000 KH**	
		Prevalensi Stunting (%)	**Kab Serang**	**13,5%**				**13%**	
		Prosentase kepesertaan jaminan	**Kab Serang**	**95%**				**98%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		kesehatan (%)							
		Prosentase Desa Stop BABS (%)	**Kab Serang**	**40%**				**50%**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab Serang	1 Unit	Rp 458,719,000	APBD	IKU	1 Unit	Rp 481,654,950

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab Serang	4 unit	Rp 2,541,281,000	APBD	IKU	1 unit	Rp 2,668,345,050
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab Serang	2 Unit	Rp 150,000,000	APBD	IKK / IKU	10 Unit	Rp 1,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab Serang	1 paket	Rp 4,900,000,000	APBD	IKK / IKU	1 paket	Rp 10,000,000,000
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan,Obat,Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	612 paket	Rp 335,881,928	APBD	IKU	612 paket	Rp 352,676,024
1.02.02.2.02	**Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk**	**Tersedianya Pelayanan**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kesehatan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	35.275 orang	Rp 500,000,000	APBD	SPM / IKK	35.275 orang	Rp 1,000,000,000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	33.672 orang	Rp 300,000,000	APBD	SPM / IKK	33.672 orang	Rp 600,000,000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	Kab Serang	32.072 orang	Rp 150,000,000	APBD	SPM / IKK	32.072 orang	Rp 300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	138.938 orang	Rp 130,000,000	APBD	SPM / IKK	138.938 orang	Rp 260,000,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	242.322 orang	Rp 120,000,000	APBD	SPM / IKK	242.322 orang	Rp 240,000,000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	1.105.041 orang	Rp 97,205,600	APBD	SPM / IKK	1.105.041 orang	Rp 116,646,720
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah penduduk lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	117.342 orang	Rp 100,000,000	APBD	SPM / IKK	117.342 orang	Rp 200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	40.424 orang	Rp 92,204,500	APBD	SPM / IKK	40.424 orang	Rp 110,645,400
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	7.949 orang	Rp 97,205,800	APBD	SPM / IKK	7.949 orang	Rp 116,646,960
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kab Serang	1.145 orang	Rp 115,617,000	APBD	SPM / IKK	1.145 orang	Rp 327,035,700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab Serang	18.371 Orang	Rp 69,432,600	APBD	SPM / IKK	18.371 Orang	Rp 83,319,120
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab Serang	43.992 Orang	Rp 84,149,600	APBD	SPM / IKK	43.992 Orang	Rp 100,979,520
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai	Kab Serang	2 Dokumen	Rp 577,400,000	APBD	IKU	2 Dokumen	Rp 606,270,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyrakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 600,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 1,200,000,000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 65,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 68,250,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 461,602,300	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 555,462,360
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 22,885,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 24,029,250
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 115,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 120,750,000
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab Serang	66.512 orang	Rp 184,384,100	APBD	IKU	66.512 orang	Rp 305,648,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kesehatan Jiwa (ODMK)								
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab Serang	20 orang	Rp 99,998,900	APBD	IKU	20 orang	Rp 205,592,400
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan paska krisis kesehatan	Kab Serang	1 dokumen	Rp 50,000,000	APBD	IKU	1 dokumen	Rp 52,500,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kab Serang	1 dokumen	Rp 198,583,350	APBD	IKU	1 dokumen	Rp 238,200,020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kab Serang	1 dokumen	Rp 32,337,399,292	APBD	IKU	1 dokumen	Rp 33,000,000,000
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab Serang	300 Paket	Rp 40,000,000	APBD	IKU	300 Paket	Rp 42,000,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab Serang	1 dokumen	Rp 4,282,773,825	APBD, APBN	IKU	1 dokumen	Rp 4,496,912,516
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 419,955,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 440,952,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Kab Serang	66 Unit	Rp 144,575,000	APBD	IKU	61 Unit	Rp 151,803,750
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab Serang	1 Laporan	Rp 87,787,750	APBD	IKU	1 Laporan	Rp 92,177,138
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 52,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab Serang	1 UPT	Rp 577,400,000	APBD	IKU	1 UPT	Rp 593,753,000
1 02 02 2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	3.406 Orang	Rp 13,886,400	APBD	IKU	3.406 Orang	Rp 16,663,680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 02 02 2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab Serang	71 Orang	Rp 34,716,300	APBD	IKU	71 Orang	Rp 41,659,560
1 02 02 2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab Serang	3 Orang	Rp 6,942,800	APBD	IKU	3 Orang	Rp 8,331,360
1 2 02 02 2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab Serang	10 Tatanan	Rp 25,902,000	APBD	IKU	10 Tatanan	Rp 27,197,100
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Ketersediaan Informasi Kesehatan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 17,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 60,000,000
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Izin RS kelas C dan D serta faske**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab Serang	70 Faskes	Rp 62,250,000	APBD	IKU	70 Faskes	Rp 65,362,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab Serang	106 Unit	Rp 120,425,000	APBD	IKU	131 Unit	Rp 126,446,250
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 200,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 210,000,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 107,465,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 112,838,250
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 150,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 165,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Kab Serang	400 Orang	Rp 13,000,000,000	APBD	IKU	425 orang	Rp 14,500,000,000
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Teknis Sumber Daya Manusia							
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab Serang	250 Orang	Rp 833,000,000	APBD	IKU	350 Orang	Rp 1,800,000,000
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Prosentase PKM dengan ketersediaa n obat esensial, vaksin, alkes**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat**	**Terselenggarany a Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Tradisional (UMOT)	**Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 25,350,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 75,000,000
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah**	**Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**							
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 27,204,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 28,564,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Terselenggaranya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**100%**					**100%**	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasanserta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 19,079,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 20,032,950
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMENUHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Prosentase Posyandu aktif**	**Kab Serang**	**70%**				**70%**	
		Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	**Kab Serang**	**90%**				**90%**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif**	**Kab Serang**	**90%**					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 453,686,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 476,370,300
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sekto**	**Kab Serang**	**70%**				**75%**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 6,196,500,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 6,506,325,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
		Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 43,215,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 45,375,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Serang	3 Laporan	Rp 50,975,000	APBD	IKU	3 Laporan	Rp 53,523,750
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Serang	1 Laporan	Rp 72,235,000	APBD	IKU	1 Laporan	Rp 75,846,750
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen pelaporan keuangan**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Serang	1036 Orang/bulan	Rp 102,746,900,000	APBD	IKU	1036 Orang/bulan	Rp107,884,245,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 83,730,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 87,916,500
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Serang	1 Laporan	Rp 97,312,900	APBD	IKU	1 Laporan	Rp 102,178,545

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Serang	6 Laporan	Rp 93,905,400	APBD	IKU	6 Laporan	Rp 98,600,670
1.02.01.2.03	**Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 100,575,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 105,603,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Serang	1 Laporan	Rp 42,506,700	APBD	IKU	1 Laporan	Rp 44,632,035
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 10,000,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 10,500,000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Serang	80 Orang	Rp 10,000,000	APBD	IKU	80 Orang	Rp 10,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	
1.02.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Serang	1 Paket	Rp 30,000,000	APBD	IKU	1 Paket	Rp 31,500,000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Serang	1 Paket	Rp 270,000,000	APBD	IKU	1 Paket	Rp 283,500,000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Serang	1 Paket	Rp 250,000,000	APBD	IKU	1 Paket	Rp 262,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Serang	1 Paket	Rp 70,000,000	APBD	IKU	1 Paket	Rp 73,500,000
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Serang	1 Dokumen	Rp 7,200,000	APBD	IKU	1 Dokumen	Rp 7,560,000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Serang	1 Laporan	Rp 1,076,114,404	APBD	IKU	1 Laporan	Rp 1,129,920,124
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Serang	12 Laporan	Rp 738,146,324	APBD	IKU	12 Laporan	Rp 775,053,640
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Serang	4 Laporan	Rp 609,496,272	APBD	IKU	4 Laporan	Rp 639,971,086
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab Serang**	**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Serang	33 Unit	Rp 250,000,000	APBD	IKU	33 Unit	Rp 262,500,000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Serang	45 Unit	Rp 150,000,000	APBD	IKU	45 Unit	Rp 157,500,000
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksanannya Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**	**Kab Serang**	**32 Unit Kerja**				**32 Unit Kerja**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	32 Unit Kerja	Rp 64,166,201,482	APBD	IKU	32 Unit Kerja	Rp 67,374,511,556

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
JUMLAH					**Rp 242,823,361,527**				**Rp 264,021,481,434**

Untuk Anggaran BLUD ditahun 2025, 32 UPT sudah mengentry dalam sub unit masing-masing ke dalam aplikasi SIPD RI, adapun pagu anggaran BLUD 32 UPT tersebut terurai pada table dibawah ini :

Tabel 4.2 :
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Anggaran BLUD 32 UPT Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								
	UPT Puskesmas Anyar								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,032,181,100	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,133,790,155
	UPT Puskesmas Baros								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,311,839,600	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,427,431,580

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UPT Puskesmas Binuang								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 742,825,600	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 779,966,880
	UPT Puskesmas Bojonegara								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,353,418,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,471,088,900
	UPT Puskesmas Bandung								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,683,827,842	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,768,019,234
	UPT Puskesmas Carenang								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,083,790,400	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,187,979,920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							
	UPT Puskesmas Cikande								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 3,883,508,651	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 4,077,684,084
	UPT Puskesmas Cikeusal								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 3,425,612,300	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 3,596,892,915
	UPT Puskesmas Cinangka								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,164,576,400	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,272,805,220
	UPT Puskesmas Ciomas								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,646,512,400	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,778,838,020
	UPT Puskesmas Ciruas								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 3,010,342,200	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 3,160,859,310
	UPT Puskesmas Gunung Sari								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 832,972,400	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 874,621,020
	UPT Puskesmas Jawilan								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,577,029,220	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,705,880,681

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penunjang Pelayanan							
	UPT Puskesmas Kibin								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,038,214,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,090,124,700
	UPT Puskesmas Kopo								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,302,865,200	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,368,008,460
	UPT Puskesmas Kragilan								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,512,157,400	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,587,765,270
	UPT Puskesmas Kramat Watu								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,989,800,900	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 3,139,290,945
	UPT Puskesmas Mancak								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,904,882,740	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,000,126,877
	UPT Puskesmas Nyompok								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,231,554,600	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,293,132,330
	UPT Puskesmas Pabuaran								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,594,191,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,673,900,550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penunjang Pelayanan							
	UPT Puskesmas Padarincang								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,482,308,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,606,423,400
	UPT Puskesmas Pamarayan								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 3,189,624,100	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 3,349,105,305
	UPT Puskesmas Petir								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,504,337,600	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,629,554,480
	UPT Puskesmas Pematang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 670,819,500	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 704,360,475
	UPT Puskesmas Pulo Ampel								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,159,996,179	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,217,995,988
	UPT Puskesmas Pontang								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,180,000,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,289,000,000
	UPT Puskesmas Tanara								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,997,585,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,097,464,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penunjang Pelayanan							
	UPT Puskesmas Tirtayasa								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,196,832,700	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,306,674,335
	UPT Puskesmas Tunjung Teja								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,349,017,300	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,466,468,165
	UPT Puskesmas Waringin Kurung								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 2,139,366,150	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 2,246,334,458
	UPT Puskesmas Lebak Wangi								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 1,374,213,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 1,442,923,650
	UPT Labkesda								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Serang	1 Unit Kerja	Rp 600,000,000	APBD	IKU	1 Unit Kerja	Rp 630,000,000
JUMLAH					**Rp 64,166,201,482**				**Rp 67,374,511,556**

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Rencana Kerja 2025

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan rencana kinerja tahun kelima dari RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinkes 2021-2026. Usulan kebutuhan anggaran pada dinas kesehatan tidak seluruhnya tercukupi, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran APBD, sehingga komposisi anggaran disesuaikan dengan kondisi ketersediaan anggaran berdasarkan prioritas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu :

1. Rencana kerja Dinas Kesehatan disusun oleh tim penyusun Renja, dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan renja.
2. Penyajian Dokumen Rencana Kerja Dinas kesehatan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, disusun menurut sistimatika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta BAB V Penutup.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 310 ayat (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
2. Rencana Kerja yang sudah ditetapkan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan;

3. Dijadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun berikutnya.

Serang, 3 Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN

dr. Rahmat Fitriadi, M.Kes., MH.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. : 19701130 200212 1 005

RENCANA KERJA

RENJA

2025

BPKAD KAB. SERANG

KATA PENGANTAR

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka pendek 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026, dan menjadi langkah awal untuk pencapaian kinerja dalam 5 (lima) tahyn mendatang.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pemrintah daerah khususnya di bidang anggaran dan asset, dengan mendorong partisipasi masyarakat selama satu tahun anggaran. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan kegiatan baru sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-308 tentang hasil Verifikasi dan Validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Rencana kerja digunakan sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja tahun 2024. Dengan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 diharapkan dapat meningkatakan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pada tahun awal RPJMD 2021-2026.

Serang, Mei 2024

Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Roni Rohani S.,S.E
NIP. 19681119 200701 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR . ..... **I**

DAFTAR ISI . ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN **1**

LATAR BELAKANG **2**

LANDASAN HUKUM **3**

MAKSUD DAN TUJUAN **3**

SISTEMATIKA PENULISAN **4**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU **5**

2.1 RINCIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 5

2.2 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2024) 17

2.3 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 20

2.4 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD 24

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **47**

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 47

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 50

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **76**

BAB V PENUTUP **83**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di 1 aktor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk perencanaan tahunan, paralel dengan kewajiban daerah dalam penyiapan rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen resmi Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang dipersyaratkan sebagai acuan program dan kegiatan OPD dalam waktu satu tahun yang disusun oleh OPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. Mengingat pentingnya fungsi perencanaan tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang sebagai Salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib Keuangan dan urusan pilihan Aset Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan program kerja tahunan selama tahun 2025.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Serang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan DanAsset Daerah Kab, Serang Kabupaten Serang Tahun 2019 didasarkan pada :

1. UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Surat Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 87 Tahun 2018 tentang Tugas PokokFungsi dan Uraian Tugas pada BPKAD Kab, Serang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan unsur ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

1.4. Sistimatika Penulisan

Adapun sistimatika penulisan Rencana Kerja sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan, terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)

2.3 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup .

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Serang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah dapat dilihat pada tabel.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan PengelolaKeuangan Dan Asset Daerah Kab. Serang pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA / DPA tahun bersangkutan dan APBD Kab. Serang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2021 adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang sesuai.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra OPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan

tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 2.1

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
BELANJA DAERAH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	61.259.538.212,00	17.111.832.247,00	27,93
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	357.803.036,00	346.219.282,00	96,76
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	223.084.136,00	212.509.482,00	95,26
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.402.500,00	8.102.000,00	96,42
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.123.000,00	8.822.400,00	96,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.193.400,00	116.785.400,00	99,65
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.395.638.517,00	9.660.040.178,00	72,11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.395.638.517,00	9.660.040.178,00	72,11
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	203.000.000,00	203.000.000,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.500.000,00	178.500.000,00	100,00
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.072.900.550,00	3.050.260.200,00	99,26
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	118.058.350,00	117.972.600,00	99,93
BELANJA OPERASI	118.058.350,00	117.972.600,00	99,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.582.800,00	431.762.000,00	99,81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.631.500,00	260.053.500,00	97,53
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	310.050.500,00	309.562.500,00	99,84
BELANJA OPERASI	310.050.500,00	309.562.500,00	99,84

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	193.000.000,00	183.725.000,00	95,19
Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.180.000,00	195.684.000,00	99,24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.453.997.400,00	1.450.950.600,00	99,79
Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101.400.000,00	100.550.000,00	99,16
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.757.825.400,00	1.540.765.525,00	3,69
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.757.825.400,00	1.247.400.000,00	70,96
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
BELANJA MODAL	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
Belanja Modal Tanah	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
Belanja Modal Tanah	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
Belanja Modal Tanah Persil	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	40.000.000.000,00	293.365.525,00	0,73
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	973.109.544,00	874.496.757,00	89,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	352.919.800,00	352.874.439,00	99,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620.189.744,00	521.622.318,00	84,11
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.499.261.165,00	1.437.050.305,00	95,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.643.400,00	193.213.180,00	96,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	518.216.600,00	470.008.500,00	90,70
BELANJA OPERASI	518.216.600,00	470.008.500,00	90,70
Pemeliharaan Mebel	31.080.600,00	30.000.000,00	96,52

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.158.000,00	298.427.500,00	99,76
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.211.925,00	195.901.125,00	99,84
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.070.040,00	109.100.000,00	97,35
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.880.600,00	140.400.000,00	98,96
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.171.294.761,00	6.675.186.766,00	50,68
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	3.296.979.656,00	3.019.152.500,00	91,57
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	538.464.000,00	527.186.900,00	97,91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	537.334.000,00	492.089.800,00	91,58
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	477.130.800,00	443.320.000,00	92,91
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	251.218.800,00	217.819.600,00	86,71
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	794.352.056,00	743.231.000,00	93,56
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	698.480.000,00	595.505.200,00	85,26
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.574.405.105,00	1.470.236.416,00	93,38
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	512.786.948,00	506.803.300,00	98,83
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	875.846.505,00	794.777.816,00	90,74
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	185.771.652,00	168.655.300,00	90,79
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN	2.059.210.000,00	1.386.776.000,00	67,35

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH			
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	483.187.500,00	459.123.200,00	95,02
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	547.045.500,00	516.584.000,00	94,43
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	480.812.000,00	201.229.600,00	41,85
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	548.165.000,00	209.839.200,00	38,28
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.525.000.000,00	168.787.450,00	3,05
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.000.950,00	98,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.475.000.000,00	119.786.500,00	2,19
PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	715.700.000,00	630.234.400,00	88,06
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	715.700.000,00	630.234.400,00	88,06
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.450.566.684,00	2.754.661.100,00	79,83
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.450.566.684,00	2.754.661.100,00	79,83
Penatausahaan Barang Milik Daerah	743.437.848,00	664.734.400,00	89,41
Pengamanan Barang Milik Daerah	2.073.068.536,00	1.817.320.500,00	87,66

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	546.724.700,00	231.744.200,00	42,39
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	87.335.600,00	40.862.000,00	46,79
JUMLAH BELANJA DAERAH	77.881.399.657,00	26.541.680.113,00	34,08
SURPLUS / (DEFISIT)	2.379.088.310.689,00	2.369.730.090.540,00	99,61

Tabel 2.2
Komposisi Anggaran Pembiayaan dan Realisasinya BPKAD Tahun 2023

PEMBIAYAAN DAERAH	PAGU	REALISASI	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.733.763.760,00	43.733.763.760,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.733.763.760,00	43.733.763.760,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.567.000.000,00	4.566.821.934,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	3.067.000.000,00	3.066.821.934,00	99,99
PEMBIAYAAN NETTO	39.166.763.760,00	39.166.941.826,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.418.255.074.449,00	2.408.897.032.366,00	99,61

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan

Uraian	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.973.137.573	29.484.375.194	92,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657	21.844.221.657	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.128.915.916	7.640.153.537	75,43
PENDAPATAN TRANSFER	2.411.653.094.773	2.356.514.555.113	97,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.105.611.462.409	2.064.362.193.005	98,04
Pendapatan Transfer Antar Daerah	306.041.632.364	292.152.362.108,	95,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.343.478.000	10.272.840.346	76,99
Pendapatan Hibah	13.343.478.000	10.272.840.346	76,99
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.456.969.710.346	2.396.271.770.653	97,53

Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang sampai akhir tahun 2023, dengan pagu Rp. 77.881.399.657,00,- terrealisasi sebesar Rp. 26.541.680.113,00,-. Dengan presentase 34,08 % ini di akibatkan salah satunya dengan adanya belanja modal tanah dengan pagu Rp 40.000.000.000,00 yang hanya terealisasi Rp 293.365.525,00.

Kapasitas keuangan daerah merupakan kemampuan pendapatan dan pembiayaan dalam mendanai kebutuhan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.

Kemampuan pendapatan daerah tercermin dalam sumber potensi pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran 2023, yang dapat dikaji dari kondisi umum pendapatan daerah tahun 2023 dan tahun sebelumnya dengan memperhitungkan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh pada penggalian potensi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.456.969.710.346,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.396.271.770.653,00 - atau 97,53 % dari target. Rincian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1

Untuk mencapai tujuan dan sasaran agar terwujudnya visi dan misi Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabaupaten Serang di tahun 2023 dengan menitik beratkan pada 13 (tiga belas) program kegiatan, kegiatan-kegitan ini ditujukan untuk membangun pembenahan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memenuhi kebutuhan dasar aparatur, selain itu juga diarahkan untuk mempersiapkan pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien. Dalam impelentasinya program-program ini dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang secara operasional dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-Bidang yang ada di lingkungan Badan pengelolaan keuangan dan aste daerah Kabaupaten Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang relevan dengan program dimaksud.

2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)

Program dan kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari RPJMD tahun Ketiga yang mana penyusunannya sudah memperhatikan undang- undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini anggaran 2024.

Tabel 2.2.1
Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**59.587.479.631,00**
2	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	**207.355.888,00**
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	83.355.888,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000,00

7	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**11.785.375.536,00**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.785.375.536,00
9	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**48.850.000,00**
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.550.000,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.300.000,00
13	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**1.337.310.650,00**
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	69.997.600,00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.758.000,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.488.050,00
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.487.000,00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00

19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.780.000,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.000.000,00
21	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	109.800.000,00
22	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSANPEMERINTAH DAERAH	**43.805.208.475,00**
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.818.574.000,00
24	Pengadaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.956.634.475,00
26	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	**1.305.548.682,00**
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	538.341.000,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.207.682,00
29	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.097.830.400,00**

30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.643.400,00
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.652.400,00
32	Pemeliharaan Mebel	40.000.000,00
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.050.000,00
34	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.700.000,00
35	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.770.000,00
36	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.014.600,00
37	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**585.592.724.870,00**
38	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	**3.502.541.180,00**
39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	553.998.000,00
40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	572.510.945,00
41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	460.082.000,00

42	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	262.225.133,00
43	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	676.167.102,00
44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	720.658.000,00
45	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	78.150.000,00
46	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	78.150.000,00
47	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.600.000,00
48	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	**573.507.853.690,00**
49	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	682.156.000,00
50	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	570.946.556.390,00
51	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	189.750.000,00

52	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	126.194.000,00
53	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	285.000.000,00
54	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	397.540.000,00
55	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	880.657.300,00
56	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	**2.044.830.000,00**
57	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	681.990.000,00
58	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	661.760.000,00

59	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	458.880.000,00
60	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	242.200.000,00
61	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**5.911.000.000,00**
62	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	136.000.000,00
63	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.775.000.000,00
64	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	**626.500.000,00**
65	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	626.500.000,00
66	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**3.305.678.504,00**
67	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**3.805.416.352,00**
68	Penyusunan Standar Harga	499.800.000,00

69	Penatausahaan Barang Milik Daerah	743.437.848,00
70	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.685.838.504,00
71	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	692.760.000,00
72	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	183.580.000,00
		648.485.883.005

Untuk menentukan target kegiatan disusunlah Perjanjian Kinerja 2024 dengan tujuan untuk mewujudkan target kinerja tahun dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab BPKAD. Berikut Tabel PK Tahun 2024.

2.3 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang dari 2 sasaran dan 11 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel T.C-30 sebagai berikut :

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaanyang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasildari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilahdari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab, Serang yang membantu Bupati Kabupaten Serang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab, Serang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebutmeliputi dan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Serang

No		Indikator Sasaran	SPM/Standarnasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	DLM PROSES	
	2	Ketepatan waktu penyusunan KUA PPAS			TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	DLM PROSES	
	3	Ketepatan waktu penyampaian Raperda tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBD.			TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	DLM PROSES	
	4	Ketepatan waktu penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban			TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	DLM PROSES	

		pelaksanaan APBD.										
	5	Persentase laporan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).			100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLM PROSES	
	6	Penyelesaian Kasus TGR			28	5	5				DLM PROSES	
	7	Persentase SP2D tepat waktu.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLM PROSES	
	8	Persentase SPJ tepat waktu.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLM PROSES	
2	9	Jumlah tanah milik Pemkab Serang yang bersertifikat.			100%	1400	1300	1200	100%	100%	DLM PROSES	
	10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan pengelolaan Asetbaik.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLM PROSES	
	11	Persentase keseuaian neraca dengan total Aset..			100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLM PROSES	

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsiBPKAD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya SIPD Keuangan dengan ATISISBADA Barang;
2. Masih terdapat persyaratan administrasi pengajuan proposal hibah yang diminta tidaksesuai dengan yang diajukan oleh penerima manfaat;
3. Belum mempunyai gudang aset yang representatif;
4. Proses pengajuan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Serang berjalan lambatkarena kurangnya SDM/ Pegawai yang mengelola BMD berupa tanah;
5. Jangka waktu pengusulan KUA PPAS ke RAPBD tidak cukup untuk melakukanpendahuluan RKA kegiatan.

Tantangan yang harus dihadapi BPKAD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat dan Perangkat Daerah lain sebagai penerima layanan dari BPKAD semakin kritisdan menuntut kualitas pelayanan secara prima;
2. Diperlukan penerapan teknologi informasi yang tinggi dalam mendukung pelayanan prima;
3. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapatdimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalamseluruh aspek pelayanan;
2. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang

masih bisadikembangkan secara optimal;

3. Peran strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menambah anggaran pada kegiatan Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah agar SIPDKeuangan dengan ATISISBADA Barang dapat terintegrasi;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan penerima manfaat hibah dengan menambahanggaran pada kegiatan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
3. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan SP2D Online dengan menambahanggaran pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah BPKAD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-2.5.1 sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2025 Kabupaten Serang

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Analisis Kebutuhan Pagu 2025		
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Tolok Ukur	Target	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				559.025.711.292,00				95.122.659.867,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				559.025.711.292,00				95.122.659.867,00
KEUANGAN				559.025.711.292,00				95.122.659.867,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.699.160.179,00				28.690.469.400,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				410.080.600,00				377.300.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	279.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	210.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.400.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.400.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	118.080.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	150.500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.171.000.000,00				21.000.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang/bulan	21.171.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	21.000.000.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.241.000,00				123.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	58.341.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00 Paket	61.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	36.750.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.773.144.435,00				1.957.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	185.191.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	193.673.135,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	210.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	210.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	122.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	210.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	960.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	925.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	101.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	52.500.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.225.000.000,00				2.760.500.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	3.215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	2.500.000.000,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud								
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.00 Unit	10.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serang, Ciruas, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				752.855.144,00				840.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	214.014.065,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	538.841.079,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.273.839.000,00				1.727.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	200.643.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	262.500.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	391.995.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	362.500.000,00
Pemeliharaan Mebel								
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	210.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	196.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	262.500.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	5.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	315.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	210.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	105.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				521.523.462.888,00				65.903.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.617.930.905,00				3.240.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								

	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	568.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	525.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	556.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	525.000.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	403.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	315.000.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	293.983.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	300.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								

	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	809.775.264,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	577.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	668.068.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	577.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	108.358.641,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	105.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	108.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	157.500.000,00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	100.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	157.500.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				509.507.064.454,00				1.300.000.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	682.156.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	315.000.000,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	250.000.000,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	507.442.144.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	210.000.000,00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	195.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	105.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	126.194.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	52.500.000,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								

	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	285.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	52.500.000,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								

	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	82.519.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	157.500.000,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang	543.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Orang	157.500.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2.020.639.700,00				997.500.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								

	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	507.874.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	315.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								

	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	712.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8 Dokumen	315.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	460.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	262.500.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	340.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	105.000.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.693.727.829,00				60.115.500.000,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	193.727.829,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	105.000.000,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.500.000,00
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	60.000.000.000,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				684.100.000,00				250.000.000,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	684.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	250.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.803.088.225,00				661.609.867,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.803.088.225,00				661.609.867,00
Penyusunan Standar Harga								

	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	579.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	105.000.000,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	105.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	315.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								

	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	348.288.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	36.609.867,00
				559.025.711.292,00				**95.122.659.867,00**

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif" Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif. Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan. Transparan merupakan prinsipketerbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel. Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif. Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain. Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

Visi

"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis"

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demiterwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya.
2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang danpermukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.
5. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Serang agar lebih dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuh kembangkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program- program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama limatahun mendatang.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Serang tersebut, BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program kegiatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansidan aset daerah; dan
d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran, perbendaharaan,akuntansi dan aset daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendukung untuk mewujudkan Visi "KABUPATENSERANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS". Visi tersebut mengandung makna :

Maju :

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

Sejahtera :

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

Sejahtera :

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten

Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

Berkeadilan :

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosialekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Agamis :

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.

6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab untuk mendukung Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional. Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan indikator tujuan yaitu Indeks reformasi birokrasi

b. Sasaran

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona inteegritas (ZI) WBBM WBK.
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP
3. Meningkatnya Pendapatan asli Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan PAD.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator: nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Nilai capaian kinerja prioritas perangkat daerah, Indeks Inovasi Daerah, Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator: Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik dan Cakupan standar

kompetensi pegawai.

6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks keterbukaan informasi publik (PPID), Indeks Kematangan penerapan SPBE, Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI).
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital, Cakupan kepemilikan dokumen adminduk, Indeks Risiko Bencana, Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target Capaian Kinerja		
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				559.025.711.292,00					560.125.711.292,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				559.025.711.292,00					560.125.711.292,00
KEUANGAN				559.025.711.292,00					560.125.711.292,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.699.160.179,00					34.799.160.179,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				410.080.600,00					410.080.600,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	279.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	279.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	118.080.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	118.080.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.171.000.000,00					22.271.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang, Semua Kecamata	50 Orang/bulan	21.171.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	22.271.000.000,00

		n, Semua Kel/Desa							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.241.000,00					93.241.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	58.341.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.00 Paket	58.341.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	20.400.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	14.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.773.144.435,00					1.773.144.435,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Paket	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Paket	185.191.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	185.191.300,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	193.673.135,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	193.673.135,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	122.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	122.880.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	960.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	960.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	101.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	101.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.225.000.000,00					3.225.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	3.215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	3.215.000.000,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud									
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.00 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Serang, Ciruas, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				752.855.144,00					752.855.144,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	214.014.065,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.014.065,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	538.841.079,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	538.841.079,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.273.839.000,00					6.273.839.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	200.643.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	200.643.400,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	391.995.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	391.995.600,00
Pemeliharaan Mebel									
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	60.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	196.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	196.200.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	5.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	5.200.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	175.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	50.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				521.523.462.888,00					521.523.462.888,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.617.930.905,00					3.617.930.905,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									

	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	568.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	568.998.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	556.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	556.998.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	403.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	403.000.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	293.983.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	293.983.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									

	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	809.775.264,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	809.775.264,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	668.068.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	668.068.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	108.358.641,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	108.358.641,00

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	108.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	108.150.000,00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	100.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	100.600.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				509.507.064.454,00					509.507.064.454,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	682.156.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	682.156.000,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	150.000.000,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	507.442.144.657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	507.442.144.657,00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	195.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	195.550.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	126.194.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	126.194.000,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									

	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	285.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	285.000.000,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									

	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	82.519.797,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	82.519.797,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang	543.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Orang	543.500.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2.020.639.700,00					2.020.639.700,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									

	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Serang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Laporan	507.874.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	507.874.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									

	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	712.355.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8 Dokumen	712.355.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	460.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	460.010.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	340.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	340.400.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.693.727.829,00					5.693.727.829,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah									
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	193.727.829,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	193.727.829,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.500.000.000,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				684.100.000,00					684.100.000,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	684.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	684.100.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.803.088.225,00					3.803.088.225,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.803.088.225,00					3.803.088.225,00
Penyusunan Standar Harga									
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	579.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	579.800.000,00

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah									
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	325.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah									
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.800.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									

	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	750.000.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	348.288.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	348.288.225,00
				559.025.711.292,00					**560.125.711.292,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan 2025

Berdasarkan Musrenbang Tahun 2025, Badan Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang membuat Rencana Program dan Kegiatan hasil usulan melalui Forum BPKAD yang dilaksanakan pada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang dihadiri oleh lintas BPKAD pihak terkait.
Adapun usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus menjadi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja 2025 BPKAD

HIBAH / BANSOS/ BANKEU	PRIORITAS	PENUNJANG	JUMLAH
520.384.267.436	**7.030.649.509**	**9.244.897.995**	**559.025.711.292**

Tabel. 4.1

Rencana Kerja TA. 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			559.025.711.292,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			559.025.711.292,00
KEUANGAN			559.025.711.292,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.699.160.179,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			410.080.600,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	279.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.080.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.171.000.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.171.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			93.241.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.341.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.400.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.773.144.435,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.191.300,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	193.673.135,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.880.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	960.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.225.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.215.000.000,00
Pengadaan Aset Tak Berwujud			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			752.855.144,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.014.065,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	538.841.079,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.273.839.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.643.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	391.995.600,00
Pemeliharaan Mebel			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	196.200.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.200.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			521.523.462.888,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3.617.930.905,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	568.998.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	556.998.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	403.000.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.983.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			

	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	809.775.264,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.068.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.358.641,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.150.000,00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.600.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			509.507.064.454,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	682.156.000,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.442.144.657,00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.550.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.194.000,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			

	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.000.000,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.519.797,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	543.500.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.020.639.700,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.874.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	712.355.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	460.010.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340.400.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.693.727.829,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	193.727.829,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.500.000.000,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			684.100.000,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			

	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	684.100.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.803.088.225,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.803.088.225,00
Penyusunan Standar Harga			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	579.800.000,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			

	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	348.288.225,00
			559.025.711.292,00

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun satu tahun sebagai tolok ukur indikator kinerja untuk pencapaian target atau sasaran yang telah direncanakan melalui kebijakan dan program kerja yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

Selanjutnya agar program-program yang tertuang didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka diharapkan adanya peran serta dari semua stakeholders, demikian pula dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu, sehingga oleh semua pihak sehingga diperoleh umpan balik yang positif untuk pelaksanaan program-program tahun berikutnya.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang. Amin.

Serang, 17 Mei 2024

Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Roni Rohani S.,S.E

NIP 19681119 200701 1 010

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

BAPENDA
KABUPATEN SERANG

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa di dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat khususnya bagi yang memerlukannya.

Serang, 28 November 2024

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG

Drs.H. M ISHAK AR, M.Si
NIP. 19710907 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA **II-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra II-1

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan II-18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi II-22

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD II-30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA **III-1**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapenda III-1

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 ..... **III-6**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Indikator Sasaran dan Indikator Program Tahun 2025 ..... I-4
Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... II-1
Tabel 2.1.2 Laporan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023..... II-3
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Renstra..... II-12
Tabel 2.2.1 Target Kinerja II-19
Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja II-20
Tabel 2.2.3 Realisasi Berdasarkan Rasio II-21
Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025..... II-31
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan..... II-39
Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja III-5
Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 ..... III-7
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 ..... IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi..... II-299

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja BAPENDA memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang periode tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Serang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan rencana tahunan ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yang memuat rencana pencapaian indikator-indikator kinerja Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Banten serta muatan lokal lainnya.

Rencana Kerja BAPENDA merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang

dihadapi, serta pertimbangan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta pertimbangan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa :

(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:

   a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan

   b. Program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.

(4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Kemudian, dalam Pasal 84 disebutkan bahwa :

(1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

(2) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

(3) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Akhir RKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja BAPENDA Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2025 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

Di samping mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Rancangan Akhir Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan BAPENDA diharapkan akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2025.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Bagi masing-masing bidang dan perangkat kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi.

Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah tahun 2025 di Kabupaten Serang. Adapun pagu ini merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten sehingga harus disesuaikan kembali.

Indikator Sasaran dan Indikator Program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 2025 yang merupakan urusan dengan

berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yaitu :

Tabel 1.1.1 Indikator Sasaran dan Indikator Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025
1	Tingkat Pertumbuhan PAD	3,34%	Tingkat ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%
2	Nilai SAKIP	BB	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Kabupaten Serang Tahun 2025 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang (RPJMD) Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
17. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah untuk memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan program dan

kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun program/kegiatan prioritas Tahun 2025;
b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Bapenda, proses penyusunan Renja Bapenda, keterkaitan antara Renja Bapenda dengan dokumen Rancangan Akhir RKPD, Renstra Bapenda serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bapenda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bapenda;

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bapenda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bapenda, serta susunan garis besar dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bapenda.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapenda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapenda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapenda.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Global seprti NSPK, SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPENDA.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda, kewenangan Bapenda, kebijakan dan prioritas daerah Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

Perumusan tujuan dan sasaran Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra Bapenda 2021-2026. Bagian ini menguraikan juga tentang indikator dan terget Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama beserta tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bapenda

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	TARGET (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	RASIO %
1	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	97,71%	97,71%
2	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu meningkatnya pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 97,71%, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya sasaran, yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 program dan 43 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan 5 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 memang tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab realisasi yang tidak melebihi/mencapai target. Namun demikian, meski dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan cenderung turun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mampu menunjukkan hasil yang sangat baik dan hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang telah mengambil kebijakan-kebijakan guna mengatasi kendala dalam mencapai target pendapatan dan kinerja perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang memberikan stimulus pajak daerah berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang Nomor 973/Kep.214-Huk.Bapenda/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah. Bapenda Kabupaten Serang juga telah melakukan kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai strategi dalam mengejar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kinerja program yang ditetapkan dalam rencana strategis memuat kinerja program yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah. Maka dari itu, ketidaktercapaian kinerja program rencana kerja dapat berdampak pada target capaian kinerja program rencana strategis. Penyesuaian target dalam rencana strategis mungkin perlu dilakukan jika capaian kinerja rencana kerja terus menunjukkan hasil yang tidak maksimal.

Realisasi pelaksanaan Belanja program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 43.881.032.913,- dan realisasi realisasi Rp.41.578.066.230,- atau 94,75% dari total anggaran. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Laporan Realisasi Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**38.638.280.543**	**21,32**	**9.227.728.224**	**22,78**	**8.901.080.128**	**16,78**	**8.534.308.833**	**39,11**	**10.146.621.536**	**100,00**	**35.935.287.107**	**100,00**	**93,004**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan**	**100**	**%**	**164.693.869**	**0**	**14.674.200**	**0**	**13.830.000**	**0**	**25.656.000**	**100,00**	**107.152.000**	**100,00**	**161.312.200**	**100,00**	**97,947**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	89.438.700	0	14.674.200	0	0	0	0	3	71.790.100	3	86.464.300	100,00	96,674
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	25.932.240	0	0	0	0	0	25.656.000	1		1	25.656.000	100,00	98,935
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.322.929	0	0	0	13.830.000	0	0	1	35.361.900	1	49.191.900	100,00	99,734

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen pelaporan keuangan**	**100**	**%**	**33.864.339.360**	**25,00**	**8.260.069.282**	**25,00**	**8.035.379.070**	**25,00**	**7.679.548.133**	**25,00**	**8.363.022.614**	**100,00**	**32.338.019.099**	**100,00**	**95,493**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/ Bulan	33.423.100.000	72	8.194.403.528	72	7.928.473.939	72	7.541.308.009	72	8.263.156.917	72	31.927.342.393	100,00	95,525
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	437.846.360	1	65.665.754	1	106.905.131	1	136.017.324	1	98.724.197	4	407.312.406	100,00	93,026
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	3.393.000	3	0	3	0	3	2.222.800	3	1.141.500	12	3.364.300	100,00	99,154
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu**	**100**	**%**	**2.330.815.240**	**28,57**	**393.368.162**	**32,14**	**401.092.750**	**14,29**	**326.162.700**	**25,00**	**1.078.774.000**	**100,00**	**2.199.397.612**	**100,00**	**94,362**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	36.155.200	1	24.503.600	2	10.412.500	0	0	0		3	34.916.100	100,00	96,573
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	484.006.440	1	0	2	0	0	0	0	357.540.000	3	357.540.000	100,00	73,871
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	226.718.400	1	81.786.100	1	83.090.250	0	0	1	58.936.000	3	223.812.350	100,00	98,718
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	110.435.200	1	58.839.400	0	0	0	3.619.100	2	47.362.000	3	109.820.500	100,00	99,443
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	3	1.500.000	3	6.000.000	3	4.500.000	3	6.000.000	12	18.000.000	100,00	100,000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.455.500.000	1	226.739.062	1	301.590.000	1	318.043.600	1	608.936.000	4	1.455.308.662	100,00	99,987
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,000**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.417.135.080**	**25**	**278.533.680**	**25**	**304.222.308**	**25**	**343.335.900**	**25**	**350.682.582**	**100,00**	**1.276.774.470**	**100,00**	**90,095**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	7.000.000	1	7.000.000	1	0	1	0	1		4	7.000.000	100,00	100,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	851.264.008	1	134.083.142	1	181.397.151	1	218.430.743	1	220.819.668	4	754.730.704	100,00	88,660

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	558.871.072	1	137.450.538	1	122.825.157	1	124.905.157	1	129.862.914	4	515.043.766	100,00	92,158
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100**	**%**	**861.296.994**	**28**	**281.082.900**	**32**	**146.556.000**	**20**	**159.606.100**	**21**	**246.990.340**	**100,00**	**834.235.340**	**100,00**	**96,858**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	248.205.600	9	71.758.300	4	46.636.000	6	64.001.100	4	51.683.900	23	234.079.300	100,00	94,309
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	Unit	32.078.000	38	0	49	13.410.000	30	18.450.000	0		117	31.860.000	100,00	99,320
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	504.150.694	0	197.424.600	1	60.035.000	0	46.655.000	0	195.306.440	1	499.421.040	100,00	99,062
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	Unit	76.862.700	13	11.900.000	14	26.475.000	6	30.500.000	40		73	68.875.000	100,00	89,608

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	100	%	5.242.752.370		555.823.121		1.267.842.069		1.156.194.995	34,85	1.788.467.324	97,71	4.768.327.509	97,71	90,951
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	100	%	5.242.752.370	9,09	555.823.121	27,27	1.267.842.069	36,36	1.156.194.995	27,27	1.788.467.324	100,00	4.768.327.509	100,00	90,951
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	100	%		16,67		16,67		50,00		16,67		100,00		100,00	
			Persentase Pelaksanaan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan	100	%		6,06		36,36		27,27		30,30		100,00		100,00	
			Persentase Pelaksanaan Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan	100	%		16,67		43,94		22,73		16,67		100,00		100,00	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	65.715.420	0	7.185.900	0	14.947.500	1	7.020.000	1	21.802.400	2	50.955.800	100,00	77,540

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dokumen	441.052.595	0	187.254.800	2	42.665.900	2	47.883.000	1	154.411.700	5	432.215.400	100,00	97,996
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	488.552.520	1	0	1	113.240.000	1	237.416.000	1	123.762.500	4	474.418.500	100,00	97,107
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Unit	954.702.032	0	75.739.228	0	560.813.342	4	19.108.842	0	189.183.284	4	844.844.696	100,00	88,493
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	610.409.124	1	78.774.596	1	135.499.446	1	123.219.927	1	200.297.466	4	537.791.435	100,00	88,103
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	318.282.576	1	51.062.115	1	146.835.921	1	17.046.921	1	67.091.392	4	282.036.349	100,00	88,612

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25	Objek Pajak	1.214.669.910	0	0	10	0	7	543.635.820	8	604.810.020	25	1.148.445.840	100,00	94,548
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dokumen	661.603.463	1	54.721.912	1	177.993.855	1	84.626.880	1	272.606.252	4	589.948.899	100,00	89,170
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.144	Layanan	18.445.200	0	14.352.000	6.423	0	4.252	4.065.600			10675	18.417.600	105,23	99,850
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	13.500.000	3	0	3	0	3	0	3	13.336.000	12	13.336.000	100,00	98,785
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	121.782.450	1	37.384.500	1	5.250.000	1	0	1	19.125.000	4	61.759.500	100,00	50,713

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan …								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
							I		II		III		IV					
				K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	Dokumen	4.860.000	1	0	1	0	1	0	1		4	0	100,00	0,000
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	46	Dokumen	310.435.080	6	49.348.070	24	64.272.105	10	64.272.105	6	117.563.210	46	295.455.490	100,00	95,175
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	18.742.000	1	0	1	6.324.000	1	7.899.900	1	4.478.100	4	18.702.000	100,00	99,787
				10.613		**43.881.032.913**	**163**	**9.783.551.345**	**6.625**	**10.168.922.197**	**4.411**	**9.690.503.828**	**161**	**11.935.088.860**	**11.144**	**41.578.066.230**	**105,00**	**94,75**

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18	3	3	100	9	9	100
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	4	1	1	100	2	2	100
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2					2	2	100
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	8	1	1	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	%	100	**200**	100	100	100	**100**	**100**	100
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	73	146	72	72	100	73	73	100
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	24	12	12	100	12	12	100
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	%	100	**200**	100	100	100	**100**	**100**	100
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	24	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	%	100	**200**				**100**	**100**	100
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	2	-				-	-	0
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	-				-	-	0
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	%	100	**200**	100	100	100	**100**	**100**	100
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	%	100	**200**	100	100	100	**100**	**100**	100
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	46	23	23	100	23	23	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	80	88	117	117	100	44	44	100
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	1	1	100	1	1	100
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	43	88	73	73	100	44	44	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01.01	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	4	2	2	100	2	2	100
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	5	5	100	5	5	100
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	54	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	objek pajak	25	50	25	25	100	25	25	100
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	10.144	20.288	10,144	10,144	100	10,144	10,144	100
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	24	12	12	100	12	12	100
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.15	Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	8	4	4	100	4	4	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BAPENDA

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 adalah :

a. Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,71% dari target sebesar 100%

b. Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Adapun pencapaian, dan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp	291.931.000.000	354.253.000.000	384.872.990.000	427.635.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	-	-	33.993.762.000	33.191.348.000	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

No	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	337.253.848.564	379.045.284.058	381.734.146.730	378.839.996.148	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	-	-	35.259.940.321	41.357.821.227	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	78,25	81,54	114,52	89,89	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	74,13	80,48				
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	121,92				

Tabel 2.2.3 Realisasi Berdasarkan Rasio Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	RASIO RELISASI TERHADAP TARGET RENSTRA (%)							RASIO REALISASI TERHADAP TARGET RENJA (%)							KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	118,71	130,20	126,29	120,73	-	-	-	115,53	107,00	99,18	90,84	-	-	-	BPPD/BAPENDA Kab. Serang
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	-	-	103,72	117,46	-	-	-	-	-	103,72	113,83	-	-	-	BAPENDA
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Point	97,81	101,93	143,15	112,36	-	-	-	97,81	101,93	143,15	112,36	-	-	-	BPPD/BAPENDA Kab. Serang
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	74,13	80,48		-	-	-	-	74,13	80,48	80,48	BAPENDA Kab. Serang
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	121,92		-	-	-	-	100	121,92	121,92	BAPENDA Kab. Serang

2.3 Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Serang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah telah berhasil menunjukkan kinerja pelayanan yang maksimal dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan target pendapatan dan realisasinya setiap tahun meski sedang dalam kondisi perekonomian yang syarat dengan ketidakpastian akibat pandemi *covid-19*.

Faktor-faktor kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mencakup semua hal yang dapat membuat pelayanan bekerja secara lebih optimal baik secara internal maupun eksternal. Peningkatan kapasitas staf pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan guna mendukung optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pajak daerah lainnya, pengelolaan PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah;
b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah;
c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah; dan
d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya Basis data potensi pajak daerah secara akurat;
2. Belum tersedianya data spasial/peta digital bidang objek pajak secara lengkap;
3. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pajak daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;

4. Masih kurangnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak daerah;
5. Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola perpajakan daerah;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pajak daerah;
7. Belum terbentuknya jabatan penilai, pemeriksa, jurusita dan PPNS pajak daerah;

Permasalahan di atas pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian program. Dalam mencapai visi dan misi, Kepala Daerah memerlukan efisiensi dan efektifitas setiap Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hal ini akan terwujud jika setiap Perangkat Daerah berhasil mengatasi hambatan dan permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentunya dengan bantuan dan dukungan yang memadai.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*)

1. **Hukum dan Perundangan** : Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

   Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan daerah Kabupaten Serang sebagai dasar dalam pengelolaan pajak daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan pajak daerah,

maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum.

2. **Potensi dan lokasi** : letak geografis Wilayah Kabupaten Serang sebagai penyangga ibu Kota Provinsi yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pajak daerah, baik dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
3. **Kelembagaan dan Tata Laksana** : Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Daerah mengalami perubahan nomeklatur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang berfungsi untuk mengelola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness, responsibility* dan akuntabilitas. Berkenaan dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan pajak daerah turut menjadikan kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah karena dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak serta lebih fokus dalam menangani pajak daerah;
4. **Sumber Daya Manusia** : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 dan Strata-1, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
5. **Pembiayaan** : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
6. **Sarana/Prasarana** : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pajak daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
7. **Kepemimpinan;** Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada

didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *divison of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

1. **Hukum dan Perundangan :** Belum komprehensifnya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Badan yang mengatur dan menetapkan tentang tata kelola pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. **Luas wilayah dan Potensi**: luas wilayah Kabupaten Serang 1.467,35 Km2 yang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa dengan keterbatasan personil menyulitkan untuk melakukan pemetaan potensi pajak daerah baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.
3. **Sumber Daya Manusia :** Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pajak daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah. Pegawai Badan Pendapatan Daerah masih perlu pengembangan kompetensi di bidang pajak daerah, seperti diklat penilaian, diklat pemeriksaan, diklat PPNS, jurusita dan diklat penyuluhan pajak.
4. **Sarana/Prasarana** : Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah terutama sistem yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait masih dalam tahapan persiapan sehingga pembayaran pajak belum sepenuhnya dapat di laksanakan secara online.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*)

1. Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
2. Dukungan dari unsur pimpinan dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang atas pengelolaan pajak daerah di wilayah Kabupaten Serang;
3. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Serang yang cukup kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Serang;

4. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa maka berpeluang meningkatkan potensi pajak daerah;
5. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi;
6. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di Kabupaten Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan;
7. Telah terjalinnya kerjasama yang baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya, instansi terkait lainnya seperti lembaga perbankan, PT. POS, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (*THREAT*)

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan daerah termasuk pemahaman tentang teknologi informasi;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah;
3. Wilayah yang luas dengan keterbatasan sumber daya manusia akan menyulitkan pelayanan secara merata kepada masyarakat;
4. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang diatur dengan peraturan pemerintah sehingga penerapan atas kebijakan pemerintah pusat menyulitkan pemerintah daerah khususnya dalam bidang perpajakan daerah;
5. Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Serang, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

STRATEGI UMUM KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG:

a. **Tahap Perencanaan**; Perencanaan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan usulan dari bidang-bidang pengelola pajak daerah dan retribusi daerah realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya atas berbagai potensi pajak daerah sehingga dapat ditentukan jumlah besaran target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah untuk jangka waktu tertentu;

b. **Tahap Pelaksanaan**; pelaksanaan dii dengan kegiatan penggalian potensi, pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, dan pelaporan atas kegiatan pemungutan pajak daerah;

c. **Tahap Koordinasi**; Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber pajak daerah;

d. **Tahap Pengawasan**; Pengawasan internal maupun eksternal dilakukan secara periodik dan temporer.

e. **Tahap Evaluasi**; Evaluasi dilakukan secara internal setiap bulan dan eksternal setiap triwulan dengan melibatkan BAPENDA pengelola PAD, BAPENDA pendukung termasuk unsur legislatif dan BUMD.

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yaitu penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki.

Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Isu strategis pada RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan

11. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun 2025, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang, dan 1 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak, dengan susunan sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat membawahi :
   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah membawahi
   1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
   2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
d. Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi :
   1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
   2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
e. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi:
   1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
   2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
f. Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan:
   1. Sub Bidang Penagihan;
   2. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

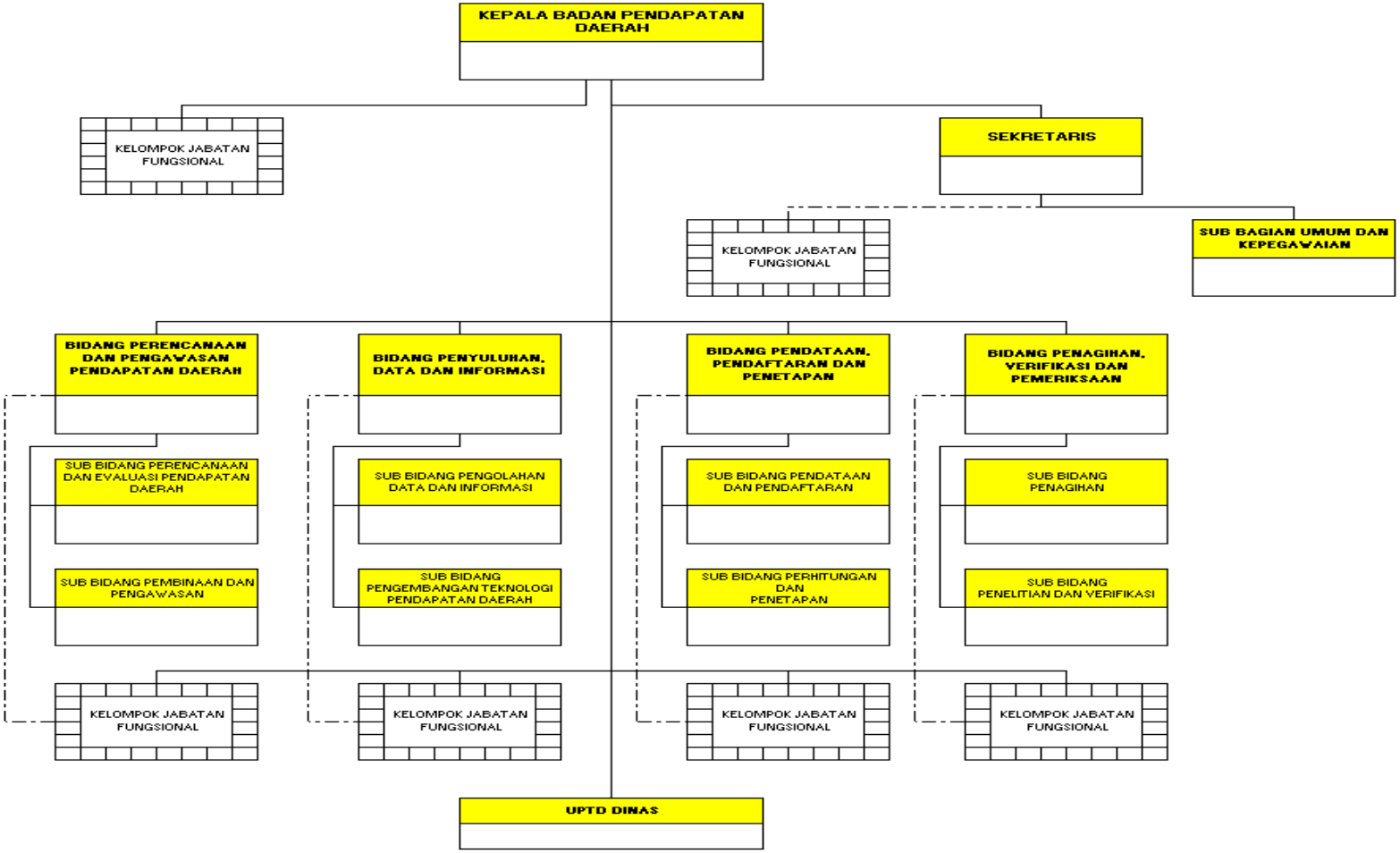

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel berikut menyajikan perbandingan pagu anggaran Rancangan Akhir RKPD dengan Pagu Kebutuhan Dana Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan antara pagu pada Rancangan Akhir RKPD 2025 dengan Kebutuhan Dana tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2025. Pagu ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga harus disesuaikan kembali.

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025 Kabupaten Serang
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	KEUANGAN					**KEUANGAN**					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Serang	100%	**39.513.865.970**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Serang	100%	**54.420.263.749**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	Serang	100%	**81.763.870**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	Serang	100%	**76.949.500**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	27.675.470	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	31.050.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	15.678.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	15.678.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	22.732.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	16.619.500	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	Serang	100%	**36.255.874.300**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	Serang	100%	**47.533.892.541**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	35.949.800.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	47.530.298.041	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan**	**Catatan**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Serang	4 Dokumen	302.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Serang	12 Laporan	3.674.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Serang	4 Laporan	3.594.500	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	Serang	100%	**1.161.053.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	Serang	100%	**2.539.307.300**	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	55.883.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	59.912.000	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	5.562.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	324.109.000	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Serang	3 Paket	188.024.050	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Serang	2 Paket	226.231.300	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	3 Paket	60.084.000	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	179.155.000	
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	833.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	1.731.900.000	
4	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	Serang	100%	**2.778.000**	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	Serang	100%	**1.396.050.000**	
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	900.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	Kendaraan operasional Molling
4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	4 Unit	1.878.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	Serang	100%	**1.563.569.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	Serang	100%	**1.897.917.728**	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	4 Laporan	6.996.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	828.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	728.173.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	874.161.272	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	Serang	100%	**448.827.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	Serang	100%	**976.146.680**	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	242.430.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	268.601.200	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	44 Unit	31.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	1 Unit	118.197.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Serang	2 Unit	530.265.480	
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	44 Unit	57.040.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	Serang	100%	**3.802.080.180**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	Serang	100%	**8.486.620.456**	
7	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	Serang	100%	**3.802.080.180**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	Serang	100%	**8.486.620.456**	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Serang	100%			**Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu**	Serang	100%		
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Serang	100%			**Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif**	Serang	100%		
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Serang	100%			**Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%			**Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Serang	100%			**Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah**	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Serang	100%			**Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah**	Serang	100%		
7.1	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	333.482.000	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	479.060.000	Rekonsiliasi Pajak Daerah
7.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	5 Dokumen	10.118.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	10 Dokumen	78.200.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	443.402.084	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	1.712.716.000	Anugrah Pajak Daerah dan Desiminasi Pajak Daerah/Opsen
7.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	4 Unit	490.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.447.767.264	
7.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	543.470.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	711.367.120	Pemutkahiran Objek Pajak dan SMART MAP
7.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	439.904.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.287.632	
7.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	611.075.532	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	712.475.500	Penilaian Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
7.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	499.929.500	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	712.059.924	
7.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	32.372.600	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	411.476.688	Pelayanan keliling/moling pajak daerah dan keg di UPT
7.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	3.600.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	17.800.000	
7.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	95.600.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	671.646.000	Kegiatan opsen PKB dan BBNKB/Razia Pajak Kendaraan Bermotor

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan**	**Catatan**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	4.800.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	3.840.000	
7.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	287.026.464	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	507.974.528	
7.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	6.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	115.893.800	
7.15	Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	4 Laporan	900.000	Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	
	BELANJA OPERASI				**7.366.146.150**	**BELANJA OPERASI**				**15.376.586.164**	
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				**35.949.800.000**	**BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN**				**47.530.298.041**	
	TOTAL BELANJA				**43.315.946.150**	**TOTAL BELANJA**				**62.906.884.205**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang mempunyai 1 Unit Pelaksana Teknis.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diselaraskan dengan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
        a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
        c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
        d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
        a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
        b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
        c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
        a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        c) Penyediaan Bahan Logistik
        d) Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
        e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    4. Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
        a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
        b) Pengadaan Mebel
    5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
        a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

a) Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah;

b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah

c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;

e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

h) Penetapan Wajib Pajak Daerah

i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

k) Penagihan Pajak Daerah

l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada saat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tahun 2025 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang namun program yag dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja. Program dan kegiatan dalan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang kemudian dilakukan penyelarasan pada sekertariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Usulan program dan kegiatan dari Sekretariat yang mengakomodir seluruh kepentingan bidang kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	Serang	**54.420.263.749**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**100%**	Serang	**76.949.500**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Serang	31.050.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Serang	14.640.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Serang	14.640.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Serang	16.619.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	Serang	**47.533.892.541**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	Serang	47.530.298.041	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Serang	3.594.500	

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	Serang	**2.539.307.300**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Serang	59.912.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Serang	324.109.000	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Serang	226.231.300	
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Serang	179.155.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Serang	18.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Serang	1.731.900.000	
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	Serang	**1.396.050.000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	Serang	1.308.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Serang	88.050.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	Serang	**1.897.917.728**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Serang	10.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Serang	1.013.756.456	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Serang	874.161.272	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100%**	Serang	**976.146.680**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Serang	268.601.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Serang	56.400.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Serang	530.265.480	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Serang	120.880.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	**100%**	Serang	**8.486.620.456**	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	**100%**	Serang	**8.486.620.456**	
	Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	**100%**	Serang		
	Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	**100%**	Serang		
	Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	**100%**	Serang		

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2	**100%**	Serang		
	Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	**100%**	Serang		
	Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	**100%**	Serang		
Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Serang	479.060.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Dokumen	Serang	78.200.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Serang	1.712.716.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	54 Unit	Serang	1.447.767.264	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Serang	711.367.120	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Serang	807.287.632	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25 Objek Pajak	Serang	712.475.500	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	712.059.924	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.144 Layanan	Serang	411.476.688	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Serang	17.800.000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	671.646.000	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	3.840.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	507.974.528	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Serang	115.893.800	
Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Serang	97.056.000	
BELANJA OPERASI				**15.376.586.164**	
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				**47.530.298.041**	
TOTAL BELANJA				**62.906.884.205**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Serang, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal itu dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, skala prioritas pembangunan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2017-2022) adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapenda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap tahun, dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu

keberhasilan yang ada, dan tujuan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Badan Pendapatan DaerahKabupaten Serang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam keberhasilan pencapaian harapan terhadap terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, karena hal tersebut merupakan janji Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Serang, serta dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis*". Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 yaitu: "Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis". Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten dan visi pembangunan nasional.

Uraian makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MAJU : Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA : Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN: Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan

mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS : Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari visi Kabupaten Dengan penetapan misi Kabupaten Serang tersebut, sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang pada misi ke 5, sejalan dengan isu

strategis tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
Visi Kab.Serang ***"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis".*** **Misi ke-5** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional**	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan & pelayanan publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan BAPENDA adalah sekumpulan rencana kerja suatu BAPENDA, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPENDA dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan BAPENDA menurut Rancangan Akhir RKPD 2025, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Serang yang memiliki keunggulan lokal;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel berikut dapat dilihat gambaran plafon dana belanja langsung untuk masing–masing program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.02	**KEUANGAN**								
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**54.420.263.749**	APBD		**100%**	**43.888.123.341**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**Serang**	**100%**	**76.949.500**	APBD		**100%**	**185.680.000**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	31.050.000	APBD		9 Dokumen	55.000.000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	APBD		2 Dokumen	24.000.000
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	APBD		2 Dokumen	24.000.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	16.619.500	APBD		4 Laporan	72.600.000
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**47.533.892.541**	APBD		**100%**	**36.354.970.000**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	47.530.298.041	APBD		73 Orang/ Bulan	36.048.800.000
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Serang	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	302.400.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Serang	12 Laporan	3.594.500	APBD		12 Laporan	3.770.000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Serang**	**100%**	**2.539.307.300**	APBD		**100%**	**2.494.049.160**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	59.912.000	APBD		3 Paket	63.215.420
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	324.109.000	APBD		3 Paket	244.120.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	226.231.300	APBD		3 Paket	197.685.740
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	3 Paket	179.155.000	APBD		3 Paket	120.528.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	APBD		12 Dokumen	18.000.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	1.731.900.000	APBD		4 Laporan	1.850.500.000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Serang**	**100%**	**1.396.050.000**	APBD		**100%**	**2.044.030.000**
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	APBD			1.900.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	4 Unit	88.050.000	APBD		15 Unit	144.030.000
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**1.897.917.728**	APBD		**100%**	**1.733.977.181**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	7.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	APBD		4 Laporan	860.859.896
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	874.161.272	APBD		4 Laporan	866.117.285
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Serang**	**100%**	**976.146.680**	APBD		**100%**	**1.075.417.000**
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	268.601.200	APBD		23 Unit	517.115.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	44 Unit	56.400.000	APBD		44 Unit	113.172.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	1 Unit	530.265.480	APBD		2 Unit	249.090.000
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	44 Unit	120.880.000	APBD		44 Unit	196.040.000
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	**Serang**	**100%**	**8.486.620.456**	APBD		**100%**	**9.143.765.500**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	**Serang**	**100%**	**8.486.620.456**	APBD		**100%**	**9.143.765.500**
		Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu		**100%**				**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif		**100%**				**100%**	
		Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah		**100%**				**100%**	
		Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah		**100%**				**100%**	
5.02.04.2.01.01	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	479.060.000	APBD		2 Dokumen	513.590.000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	5 Dokumen	78.200.000	APBD		5 Dokumen	224.345.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	1.712.716.000	APBD		4 Laporan	1.624.120.000
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	4 Unit	1.447.767.264	APBD		4 Unit	1.037.890.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	711.367.120	APBD		4 Laporan	1.053.735.700
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	807.287.632	APBD		4 Laporan	643.435.600
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	712.475.500	APBD		25 Objek Pajak	1.275.465.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	712.059.924	APBD		4 Dokumen	674.940.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	411.476.688	APBD		10.144 Layanan	444.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	17.800.000	APBD		12 Dokumen	43.300.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	671.646.000	APBD		4 Dokumen	514.440.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	3.840.000	APBD		4 Dokumen	130.180.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	507.974.528	APBD		4 Dokumen	647.034.200
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	115.893.800	APBD		4 Laporan	317.050.000
5.02.04.2.01.15	Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	4 Laporan	97.056.000	APBD		4 Laporan	27.400.000
	BELANJA OPERASI				**15.376.586.164**				**16.983.088.841**
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				**47.530.298.041**				36.048.800.000
	TOTAL BELANJA				**62.906.884.205**				**53.031.888.841**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Program Prioritas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, antara sebagai berikut:

1. Anugrah Pajak Daerah;
2. Penilaian Zona Nilai Tanah;
3. Pemutkahiran objek pajak;
4. Diskon Pajak dalam rangka HUT Kabupaten Serang;
5. Sasar dan Berkunjung (SANJUNG);
6. Penetapan Pajak Daerah;
7. Rekonsiliasi Pajak Daerah;
8. Desiminasi Pajak Daerah ;
9. Penagihan Pajak Daerah;
10. Verifikasi Piutang Pajak Daerah;
11. Razia Pajak Kendaraan bermotor; dan
12. Penguatan E-TPD Bersama dengan TP2DD.

Di bawah ini disajikan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025. Dapat dilihat bahwa dalam rangka menjalankan program dan kegiatan, Bapenda Kabupaten Serang pada tahun 2025 mendatang mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp.43.315.946.150,-, namun berdasarkan hasil analisis kebutuhannya sebesar Rp.62.906.884.205,-. Maka Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang sebesar Rp.62.906.884.205,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5.02	**KEUANGAN**						
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**54.420.263.749**	APBD	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**Serang**	**100%**	**76.949.500**	APBD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	31.050.000	APBD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	APBD	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	14.640.000	APBD	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	16.619.500	APBD	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**47.533.892.541**	APBD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	47.530.298.041	APBD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Serang	4 Dokumen		APBD	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Serang	4 Laporan	3.594.500	APBD	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Serang**	**100%**	**2.539.307.300**	APBD	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	59.912.000	APBD	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	324.109.000	APBD	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	226.231.300	APBD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	179.155.000	APBD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	APBD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	1.731.900.000	APBD	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Serang**	**100%**	**1.396.050.000**	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	APBD	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	APBD	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah**	**Serang**	**100%**	**1.897.917.728**	APBD	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	APBD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	APBD	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	874.161.272	APBD	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Serang**	**100%**	**976.146.680**	APBD	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	268.601.200	APBD	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	APBD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	2 Unit	530.265.480	APBD	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	APBD	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah**	**Serang**	**100%**	**8.486.620.456**	APBD	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu**	**Serang**	**100%**	**8.486.620.456**	**APBD**	
		Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu		**100%**			
		Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif		**100%**			
		Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		**100%**			
		Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah		**100%**			
		Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah		**100%**			
		Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah		**100%**			
5.02.04.2.01.01	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	479.060.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	10 Dokumen	78.200.000	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	1.712.716.000	APBD	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.447.767.264	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	711.367.120	APBD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.287.632	APBD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	712.475.500	APBD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	712.059.924	APBD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	411.476.688	APBD	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	17.800.000	APBD	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	671.646.000	APBD	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	3.840.000	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	507.974.528	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	115.893.800	APBD	
5.02.04.2.01.15	Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	APBD	
	BELANJA OPERASI				**15.376.586.164**		
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				**47.530.298.041**		
	TOTAL BELANJA				**62.906.884.205**		

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Pemerintahan Daerah untuk menuju terciptanya landasan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Serang, 28 November 2024

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Drs.H. M. ISHAK AR, M.Si
NIP. 19710907 199202 1 001

RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SERANG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (Satu) tahun anggaran. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD.

Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Kesbangpol baik dalam merumuskan kegiatan maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Serang, 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN KESBANGPOL

H. EPPERIATNA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19660309 198603 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25
3.1 TelaahanterhadapkebijakanNasional 25
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Serang 26
3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB V PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan capaian Renstra 2021-2026	T.11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Serang	T.15
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	T.18
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kabupaten Serang	T.24
Tabel 3.2	Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kab. Serang	T.25
Tabel 3.3	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Badan Kesbangpol Kab. Serang	T.27
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju di Tahun 2026	T.33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (RKOPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang (OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Serang untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang I-6 Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesbangpol Kab. Serang, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Periode 2021 - 2026 Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi, dan misi, tantangan dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang I-7 Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangakat Daerah

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan,prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang.

1.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Rencana Kerja SKPD tahun 2021 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD.

Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.

ϖ Fasilitasi Kunjungan Tamu.

ϖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

ϖ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

ϖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

e. Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

ϖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

ϖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

ϖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

ϖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, diantaranya:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan:

ϖ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

ϖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

ϖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, meliputi:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan:

ϖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, meliputi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan:

ϖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KE TAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :

ϖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, meliputi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

ϖ Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

ϖ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Berkaitan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026, karena dokumen perencanaan ini ditetapkan pada tahun 2021, maka di dalam mengevaluasi capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, maka yang masuk dalam koridor evaluasi adalah capaian (perkiraan capaian) Renstra mulai tahun anggaran 2021, dan realisasi tahun 2021 merupakan bagian dari realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sebelumnya. Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sampai dengan saat disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang 2021 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Serang sampai dengan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kesbangpol Periode 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Kesbangpol Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 (5+7+9)	11
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100		100	97	97	100	100	100
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100		100	97	97	100	100	100
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan partai politik yang difasilitasi	100		100	96	96	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 (5+7+9)	11
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi	100		100	96	96	100	100	100
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan organisasi kemasyarakatan	100		100	96	96	100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	100		100	96	96	100	100	100
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100		100	96	96	100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100		100	97	97	100	100	100

T.12

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10 (5+7+9)	11
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan konflik sosial terselesaikan	100		100	98	98	100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial terselesaikan	100		100	98	98	100	100	100

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang pada tahun 2025 memiliki 5 (Lima) Program Prioritas yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk mencapai Program – program tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang memiliki Indikator Utama yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Serang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Demokrasi Indonesia			73	73,5	73,8	74	74,3	74,9	73,6	74	74,5	75	Target tercapai
2.	Jumlah Konflik Sara Bernuansa Agama			86,9	87,4	87,9	88,5	89	89,5	87,45	88	89	89,5	Target tercapai

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sesuai Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Serang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

a. Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang;
b. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM;
c. Masih terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Letak geografis Kabupaten Serang yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia, telah menjadikan Kabupaten Serang sebagai daerah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional;
2. Dalam lingkup internasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkotika, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang terjadi salah satunya penemuan penyelundupan narkoba berskala besar, serta beberapa orang yang ditangkap sebagai terduga terorisme.
3. Potensi bencana alam berupa banjir kiriman dan sistem drainase yang buruk.
4. Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran.
5. Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (well- educated) dengan penduduk pribumi yangmasih berpendidikan dan berpenghasilan rendah .
6. Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kabupaten Serang dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

a. Letak strategis Kabupaten Serang sebagai Kabupaten yang diapit oleh dua provinsi Lampung dan DKI Jakarta dapat mempercepat perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah dan penyerapan informasi yang dapat mendukung terciptanya Pemerintahan yang demokratis.
b. Keberadaan partai poltik, ormas/LSM dan OKP sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah sebagai daerah otonom.
c. Percepatan demokratisasi warga masyarakat Kabupaten Serang yang majemuk dengan latar belakang berbagai etnis dan suku bangsa serta agama .
d. Potensi partisipasi politik warga masyarakat yang tinggi dengan didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki hak suara (vote).
e. Koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas politik daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Badan Kesbangpol dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasingmasing program & kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan		Sumber Dana
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**13,711,930,000**		**14,683,012,900**	
	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.914.559.000**		**6,222,500,000**	
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**350,000,000**		**370,000,000**	
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	120,000,000	APBD
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	100,000,000	APBD
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	APBD
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.161.145.000**		**4,300,000,00**	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	21 OB	4.161.145.000	21 OB	4,491,503,690	APBD
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**576,463,100**		**672,500,000**	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Paket	5,567,000	12 Paket	6,000,000	APBD
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	6 Paket	75,143,000	6 Paket	12,000,000	APBD
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Paket	57,290,000	12 Paket	60,000,000	APBD
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kesbangpol	12 Paket	24,236,300	12 Paket	50,000,000	APBD
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kesbangpol	12 Dokumen	3,600,000	12 Dokumen	9,000,000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kesbangpol	12 Laporan	17,126,800	12 Laporan	35,000,000	APBD
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	24 Laporan	248,500,000	24 Laporan	250,500,000	APBD
	8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kesbangpol	12 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	250,000,000	APBD
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**886.589.580**		**450.000.000**	
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kesbangpol	1 Unit	886.589.580	1 Unit	450.000.000	APBD
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**293.984.320**		**300,000,000**	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan	293.984.320	12 Laporan	300,000,000	APBD
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**230,257,000**		**250,000,000**	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	1 Unit	84,615,000	1 Unit	100,000,000	APBD
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kesbangpol	6 Unit	145,642,000	6 Unit	150,000,000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**1.610,010,000**		**350,000,000**	
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**1.610,010,000**		**350,000,000**	
	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kesbangpol	2 Dokumen	60.343.500	2 Dokumen	100,000,000	APBD
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	50 Orang	100.000.000	50 Orang	150,000,000	APBD
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	50 Orang	1.449,666,500	50 Orang	100,000,000	APBD
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**2.892.921.000**		**5,760,512,900**	
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**2.892.921.000**		**5,760,512,900**	
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	50 Orang	2.485.785.000	50 Orang	2,579,591,000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	300 Orang	150.000.000	300 Orang	3,024,186,100	APBD
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	156,735,800	APBD
	8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**450.000.000**		350,000,000	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**450.000.000**		350,000,000	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	100 Orang	100.000.000	100 Orang	150,000,000	APBD
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	100 Orang	150.000.000	100 Orang	100,000,000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Kesbangpol	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	100,000,000	APBD
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**350,000,000**		**450,000,000**	
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**350,000,000**		**450,000,000**	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	200,000,000	200,000,000	100 Orang	300,000,000	APBD
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	150,000,000	150,000,000	100 Orang	150,000,000	APBD
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**1.424.440.000**		**1,750,000,000**	
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**1.424.440.000**		**1,750,000,000**	
	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol	3 Dokumen	77.952.600	3 Dokumen	200,000,000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	30 Orang	71.718.400	30 Orang	150,000,000	APBD
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	30 Orang	74,769,000	30 Orang	200,000,000	APBD
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	12 Dokumen	1,200,000,000	12 Dokumen	1,200,000,000	APBD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dan hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2022. Kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Kesbangpol Kabupaten Serang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Serang	Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	12 Parpol	DPRD
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Serang	Hibah Bantuan Keuangan kepada KPU Kab. Serang	12 Tahapan Sosialisasi	KPU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Prioritas Nasional meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara".

B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
				2021	2022	2025	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	%	73	73,5	73,8	74	74,3	74,9
		Jumlah Konflik Sara Bernuansa Agama	%	86,9	87,4	87,9	88,5	89	89,5

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Visi Kabupaten Serang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis".
2. Badan Kesbangpol mengampu misi ke 6 yaitu "Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara".

Dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang telah mengidentifikasi permasalahan-permsalahan dalam pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Serang baik faktor pendukung maupun faktor penghambat sebagai berikut;

Faktor penghambat :

1. Kekosongan Pegawai dan Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi;
2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai Kesbangpol Kabupaten Serang yang belum optimal;
3. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang yang belum maksimal;
4. Adanya potensi terjadinya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
5. Disinyalir terjadinya penurunan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
6. Adanya potensi terjadinya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah;
7. Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal.

Faktor pendorong :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelengaraan sistem pemilukada serentak;
2. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Serang merumuskan 6 (Enam) Program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan. Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2.			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
5.			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6.			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

7.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
9.			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
10.			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
11.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
12.			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
13.			Pelaksanaan Monev dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
14.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

15.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
16.			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
17.			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
18.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.		Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.			Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27.			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
28		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang menempati program dan kegiatan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Renstra mulai tahun 2021 – 2026. Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tahun 2025 (adapun sesuai RKPD Tahun 2025) adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
     a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
     b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
     c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
     b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
     a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
     b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
     c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
     a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
     b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
     c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
     a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025 sebesar **Rp. 13.711.930.000,-** secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 termuat dalam tabel Rencana Kerja dan Pendanaan, sebagai berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**13,711,930,000**				**14,683,012,900**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.914.559.000**				**6,222,500,000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**350,000,000**				**370,000,000**
8	01	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	APBD		5 Dokumen	120,000,000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	APBD		12 Laporan	150,000,000
8	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	12 Laporan	150,000,000	APBD		12 Laporan	150,000,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,161,145,000**				**4,500,000,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orangyang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	Kab. Serang	21 Orang/bulan	4,161,145,000	APBD		21 Orang/bulan	4,500,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**576,463,100**				**909,600,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Paket	5,567,000	APBD		12 Paket	9,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	6 Paket	10,143,000	APBD		6 Paket	160,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Paket	57,290,000	APBD		12 Paket	60,000,000

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**13,711,930,000**				**14,683,012,900**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.914.559.000**				**6,222,500,000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**350,000,000**				**370,000,000**
8	01	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	APBD		5 Dokumen	120,000,000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	5 Dokumen	100,000,000	APBD		12 Laporan	150,000,000
8	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	12 Laporan	150,000,000	APBD		12 Laporan	150,000,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,161,145,000**				**4,500,000,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orangyang Menerima Gajidan TunjanganASN	Kab. Serang	21 Orang/bulan	4,161,145,000	APBD		21 Orang/bulan	4,500,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**576,463,100**				**909,600,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Paket	5,567,000	APBD		12 Paket	9,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	6 Paket	10,143,000	APBD		6 Paket	160,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Paket	57,290,000	APBD		12 Paket	60,000,000

8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	12 Paket	24,236,300	APBD		12 Paket	57,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	12 Dokumen	3,600,000	APBD		12 Dokumen	3,600,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	12 Laporan	17,126,800	APBD		12 Laporan	50,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	24 Laporan	248,500,000	APBD		24 Laporan	300,000,000
8	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Serang	12 Dokumen	200,000,000	APBD		12 Dokumen	270,000,000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**886.589.580**				**0**
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Unit	886.589.580	APBD			0
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**293,984,320**				**350,000,000**
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	12 Laporan	279,840,000	APBD		12 Laporan	350,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**230,257,000**				**400,000,000**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Serang	1 Unit	84,615,000	APBD		1 Unit	100,000,000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang	6 Unit	145,642,000	APBD		6 Unit	300,000,000

8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**1.610,010,000**				**400,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**1.610,010,000**				**400,000,000**
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Serang,	2 Dokumen	60.343,500	APBD		2 Dokumen	150,000,000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Serang	50 Orang	100,000,000	APBD		50 Orang	100,000,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Serang	50 Orang	1.449,666,500	APBD		50 Orang	150,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**2,892,921,000**				**4,580,050,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**2,892,921,000**				**5,580,050,000**
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		50 Orang	2.485.785.000	APBD		50 Orang	3,529,591,000

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		300 Orang	150.000.000	APBD		300 Orang	1,50,000,500
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3 Laporan	200.000.000	APBD		3 Laporan	1,000,458,500
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**450.000.000**				**402,600,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**450.000.000**				**402,600,000**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	234,750,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	117,850,000

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		300 Orang	150.000.000	APBD		300 Orang	1,50,000,500
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3 Laporan	200.000.000	APBD		3 Laporan	1,000,458,500
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**450.000.000**				**402,600,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**450.000.000**				**402,600,000**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	234,750,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	117,850,000

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas		12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	50,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**350,000,000**				**350,000,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**350,000,000**				**350,000,000**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200,000,000	APBD		100 Orang	200,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	150,000,000	APBD		100 Orang	150,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**1,424,440,000**				**1,600,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**1,424,440,000**				**1,600,000,000**
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	77.952.600	APBD		3 Dokumen	200,000,000

8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	71.718.400	APBD		30 Orang	100,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	74,769,000	APBD		40 Orang	1,300,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Derah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.200.000.000	APBD		40 Orang	1,200,000,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penyusunan Renja ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang tahun 2025, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Demikian penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Serang yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS" sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026.

Serang, 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERANG

H. EPI PRIATNA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19660309 198603 1 005

Pemerintah Kab. Serang

2025

RENCANA KERJA (RENJA FINAL)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Serang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Tahun 2025 telah selesai di susun.

Rencana Kerja DLH Kabupaten Serang Tahun 2025 memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Serang sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Serang

Serang, 02 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

H. PRAURI, S.H, S.Sos, M.Si
NIP. 19641226 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU **9**
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja DLH tahun lalu dan capaian Renstra DLH 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH 26
2.4 Review terhadap rancangan akhir RKPD 28
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **51**
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 51
3.2 tujuan dan sasaran Renja DLH 53
3.3 Program dan Kegiatan DLH 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **73**
4.1 Program dan Kegiatan DLH 73
4.2 Rencana Pendanaan 74

BAB V PENUTUP **86**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD s/d 2023 11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD DLH Kab. Serang 25
Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Final 2025..... 30
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 49
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DLH Kab. Serang 57
Tabel 4.1 Program Kerja DLH..... 73
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan DLH Tahun 2025 beserta Pagu Indikatif atau Rencana Pendanaan 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RKPD Kabupaten Serang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2
Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten/Kota 4
Gambar 1.3 Bagan Alir Penyusunan Renja Tahun 2025..... 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk perencanaan tahunan. Mekanisme penyusunannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja merupakan suatu proses rencana pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan isu tersebut kedalam program kegiatan perangkat daerah. Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017, renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam 1 periode atau selama 1 tahun. Renja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun ini mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 dan Rancangan Renstra 2021-2026 nantinya. Renja ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN untuk tahun anggaran 2025.

Dokumen Renja disusun berdasarkan Rancangan awal RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Tahun 2017 Pasal 84 yang menyatakan bahwa OPD harus menyusun dan menyampaikan dokumen Renja.

Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam proses penyusunan dan penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup ini telah dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk pertimbangan dan menyesuaikan sasaran kegiatan program kerja. Kegiatan Forum tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2024 (Lampiran 1).
2. Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan RKPD Final Kabupaten Serang Tahun 2025

Adapun hubungan (keterkaitan) antara dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai berikut:

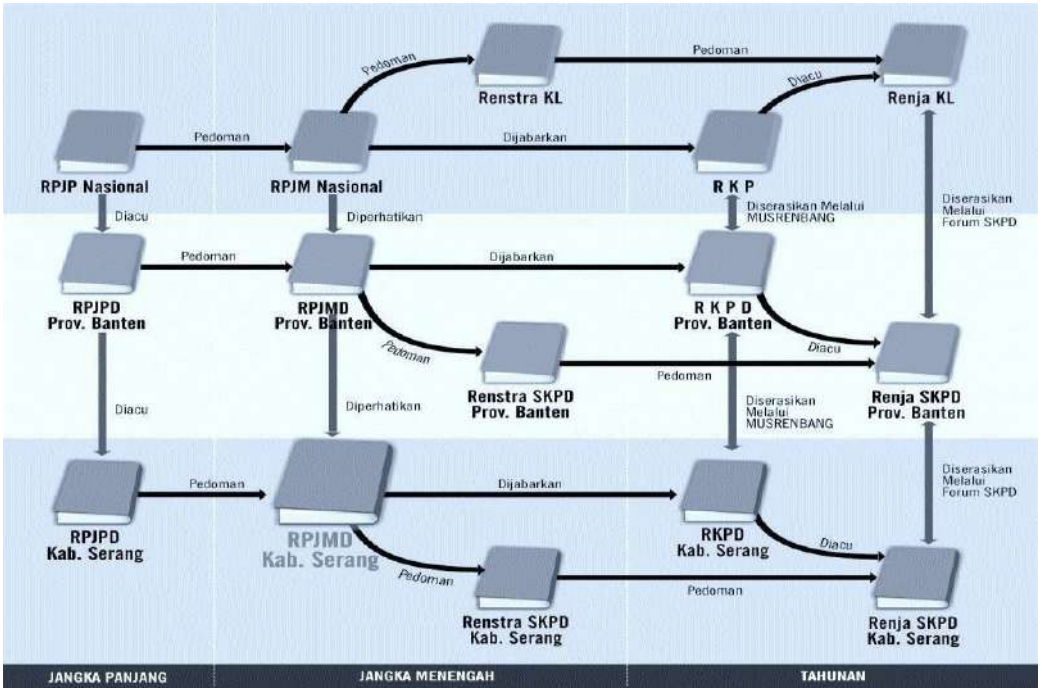

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RKPD Kabupaten Serang

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 dan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan dilanjutkan pembahasan melalui Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
- Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Serang termasuk Renja Dinas Lingkungan Hidup menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Serang 2025 dan menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Serang 2025;
- Rancangan RKPD Kabupaten Serang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Serang;
- Hasil Musrenbang Kabupaten Serang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang 2025;
- Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam pemutakhiran Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkap Daerah, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang 2025;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Serang maka Perangkat Daerah Kabupaten Serang menetapkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja 2025.

Berikut ini adalah bagan alur tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan pada gambar 1.2.

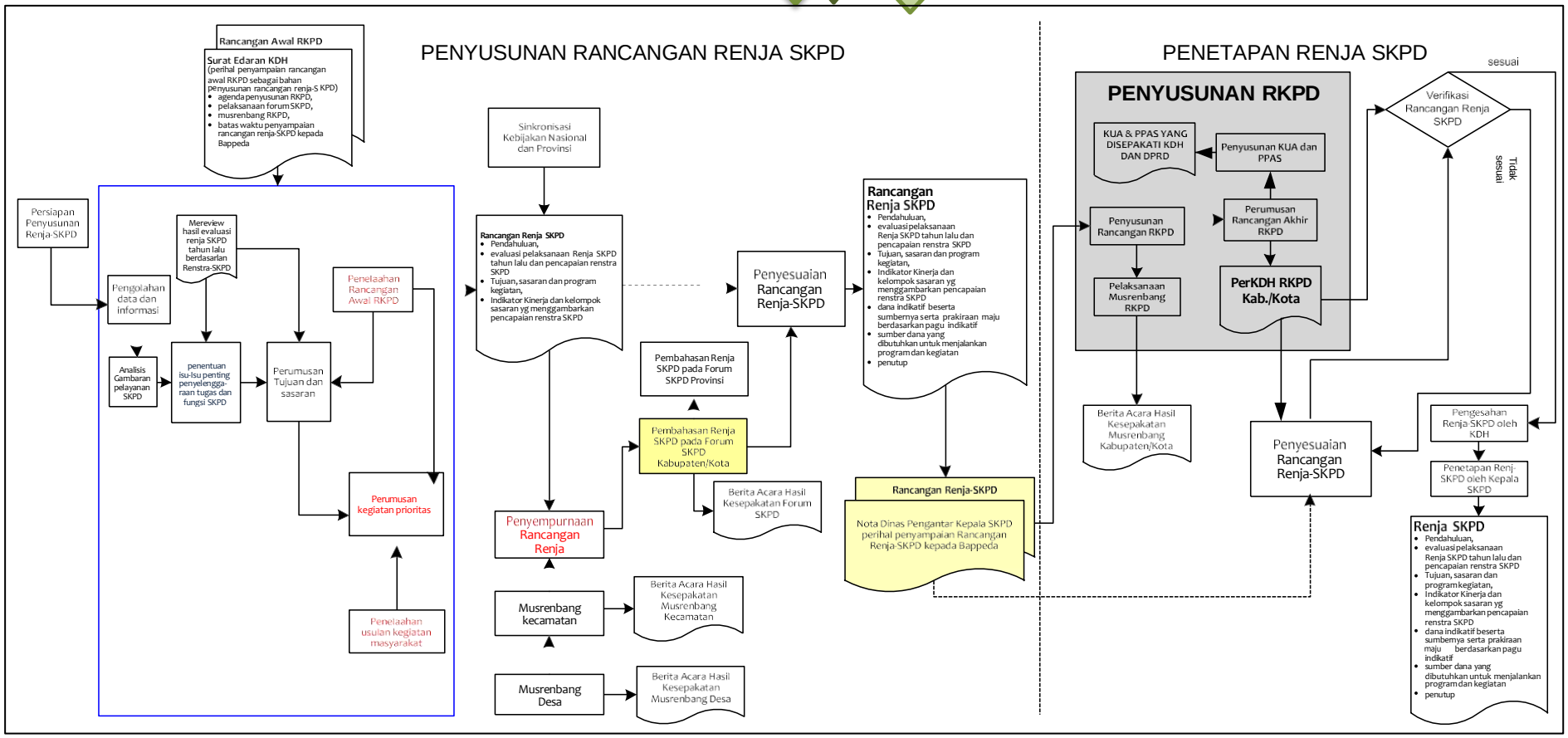

Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten/Kota

Selanjutnya proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Final, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2024. Berdasarkan uraian di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir penyusunan Renja tahun 2025 di bawah ini

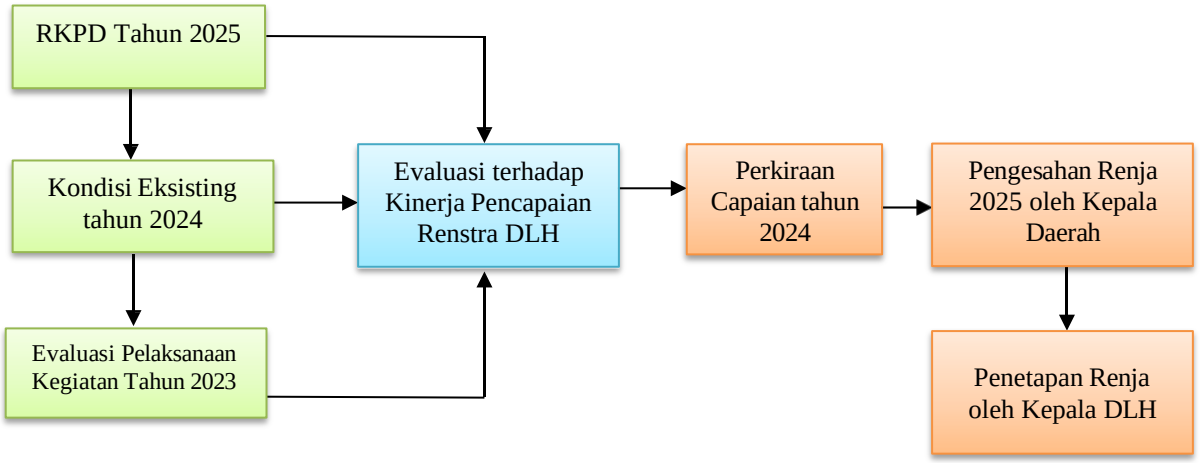

Gambar 1.3

Bagan Alir Penyusunan Renja Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Serang tahun 2006- 2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Serang Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 258 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024
15. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Renstra peringkat daerah di lingkungan Kab. Serang Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Serang Tahun 2025
17. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024
18. Peraturan Bupati Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renja Final Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Penyusunan Renja dimaksudkan untuk:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya selama tahun 2025
3. Memperoleh pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja pada akhir tahun 2025

Sedangkan tujuan Perumusan renja Dinas Lingkungan Hidup yaitu untuk memperjelas arah dan pengendalian pelaksaaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang: latar belakang yang mengemukakan tentang pengertian Renja Perangkat Daerah secara ringkas, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu; kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan akhir RKPD; Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan tentang: telaahan terhadap kebijakan nasional; telaahan terhadap kebijakan Provinsi; tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menyajikan tentang: Rencana Kerja dan pendanaan yang tertuang dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terjadinya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; rencana tindaklanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah melakukan upaya untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, fisik, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Pemerintahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja secara faktual dan konseptual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan penetapan program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tahun 2023 meliputi realisasi hasil program dan kegiatan terhadap target Renja tahun 2023. Untuk mencapai tujuan dan sasaran agar terwujudnya visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang ditahun 2025 dengan menitikberatkan pada 10 program 22 kegiatan, 72 sub kegiatan. Program-program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan persampahan, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengimplementasikan program – program kegiatan ini dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang secara operasional dilaksanakan oleh sub satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang relevan dengan program dimaksud.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2023 dari 10 (sepuluh) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 48 (empat delapan) sub kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Terdapat 9 (sembilan) program/kegiatan dengan realisasi kinerja hasil/keluaran yang melebihi dari target yang direncanakan
b. Terdapat 5 (lima) paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan, Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatan direfocusing, terjadinya gagal lelang, dan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.
c. Terdapat 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan realisasi kinerja hasil/keluaran yang memenuhi target yang direncanakan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 2023 terdapat dalam pada Tabel 2.1.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Serang

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 Tw 2 DLH KAB. SERANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2026(Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RKPD Tahun 2023 (2021+2022+2023)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023				Target program dan kegiatan (RENJA DLH 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun 2024	
							Target perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	realisasi anggaran tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
4	*5*		*6*		*7*		6	7		8	9	10	11
	Indikator (output)	satuan	K	Rp	K	Rp							
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan , barang milik daerah dan tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**	**%**	**100**	**84.687.740.922**	**88**	**38.350.149.555**	**30**	**36**	**11.966.605.664**	**118**	**34**	25	72
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (%)**	**%**	**100**	**655.765.600**	**10**	**282.384.230**	**3**	**3**	**98.230.926**	**100**	**3**	2	50
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dok	**6**	**254.607.000**	**4**	**92.056.800**	**1**	**1**	**21.644.100**	**100**	**1**	1	100
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	laporan	**5**	**178.655.000**	**3**	**93.928.200**	**1**	**1**	**46.731.600**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	**5**	**222.503.600**	**3**	**96.399.230**	**1**	**1**	**29.855.226**	**100**	**1**	0	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan (%)	%	**100**	**71.275.330.362**	**45**	**32.906.530.744**	**15**	**15**	**10.236.832.023**	**300**	**20**	9	45

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan	**60**	**69.927.530.362**	**36**	**32.671.216.069**	**12**	**12**	**10.131.199.278**	**100**	**12**	6	50
Sub kegiatan Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksaan tugas ASN	dok	**10**	**1.279.850.000**	**6**	**190.898.830**	**2**	**2**	**90.580.000**	**100**	**2**	1	50
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	laporan									**1**	1	
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan , triwulanan /semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran skpd	laporan									**4**	1	
Sub kegiatan Penyusunan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelpaoran dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	**5**	**67.950.000**	**3**	**44.415.845**	**1**	**1**	**15.052.745**	**100**	**1**	0	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu (%)**	%										86	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket									**86**	86	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi kebutuhan kantor tepat waktu (%)	%	**100**	**2.035.345.000**	**15**	**870.288.343**	**6**	**5,00**	**279.997.124**	**83**	**5**	3,00	60
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	**5**	**56.600.000**	**3**	72.963.610	**1**	**1**	**4.881.200**	**100**	**1**	1	100

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	**5**	**75.000.000**	**-**	**-**	**1**	**0**	**-**	**-**	**-**	0	#VALUE!
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	Paket									**1**	0,5	
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	**5**	**515.715.000**	**3**	**162.045.660**	**1**	**1**	**59.230.760**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	**5**	**102.000.000**	**3**	**34.880.000**	**1**	**1**	**7.410.000**	**100**	**-**	0	#VALUE!
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	**5**	**50.000.000**	**3**	**25.798.500**	**1**	**1**	**8.478.500**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	**5**	**1.236.030.000**	**3**	**574.600.573**	**1**	**1**	**199.996.664**	**100**	**1**	0,5	50
kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	%	**100**	**7.747.444.173**	**12**	**3.408.271.422**	**4**	**4**	**1.088.949.891**	**100**	**4**	2	50
Sub kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	**5**	**3.042.300.000**	**3**	**1.342.569.409**	**1**	**1**	**372.182.605**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber fdaya air dan listrik yang di sediakan	laporan	**5**	**2.502.818.272**	**3**	**1.107.344.143**	**1**	**1**	**413.401.170**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	**5**	**290.826.000**	**3**	**96.395.500**	**1**	**1**	**41.509.500**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	**5**	**1.911.499.901**	**3**	**861.962.370**	**1**	**1**	**261.856.616**	**100**	**1**	0,5	50
kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**%**	**100**	**2.973.855.787**	**6**	**882.674.816**	**2**	**2,00**	**262.595.700**	**100**	**2**	0,50	25

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak. Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	unit	**5**	**2.558.795.787**	**3**	815.285.083	**1**	**1**	**236.748.700**	**100**	**1**	0,5	50
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	**5**	**415.060.000**	**3**	**67.389.733**	**1**	**1**	**25.847.000**	**100**	**1**	0	-
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Tingkat ketersediaaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses Persentase perencanaan dan penganggaran peayanan administrasi**	%	**100**	**3.862.920.000**	**12**	**186.239.850**	**5**	**2**	**113.994.650**	**40**	**2**	-	-
kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase dokumen/aturan yang dibuat (jumlah dok/aturan yang dibuat dibagi jumlah dok/aturan yang direncanakan x 100%) (%)**	%	**100**	**1.450.000.000**	**5**	**9.893.300**	**2**	**0,50**	**3.550.000**	**25**	**1**	-	-
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabuoaten/Kota yang disusun	dok	**5**	**750.000.000**	**2,25**	**6.131.300**	**1**	**0,25**	**1.800.000**	**25**	**1**	0	-
Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang di telaah mengakomodir RPPLH Kabupaten/kota	dok	**5**	**700.000.000**	**2,25**	**3.762.000**	**1**	**0,25**	**1.750.000**	**25**		0	#DIV/0!
kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dok lingkungan yang di proses (jumlah dok lingkungan yang diproses dibagi jumlah kegiatan wajib x 100%) (%)	%	**100**	**2.412.920.000**	**8**	**176.346.550**	**3**	**1,50**	**110.444.650**	**50**	**1**	-	-

Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dok KLHS Tata ruang Kabuoaten/kota yang disusun	dok	**5**	**912.920.000**	**3**	**106.694.650**	**1**	**1**	**106.694.650**	**100**		0	#DIV/0!
Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang disusun	dok	**5**	**750.000.000**	**2,25**	**67.101.900**	**1**	**0,25**	**1.200.000**	**25**		0	#DIV/0!
Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP Kabupaten /kota yang berpotensi menimbulkjan dampak /resiko lingkungan hidup yang disusun	dok	**5**	**750.000.000**	**2,25**	**2.550.000**	**1**	**0,25**	**2.550.000**	**25**	**1**	0	-
Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	**Tingkat ketersediaan untuk perhitungan ITV/L (sampel)**	sampel	**3398**	**7742409900**	**2475**	**3221207149**	**648**	**2636**	**635.312.408**	**407**	**648**	3137	484
kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase parameter inti memenuhi BMa (jumlah parameter inti yang memenuhi dibagi jumlah parameter inti yang diukur x 100%) [persentase sampel uji yang memenuhi BM (jumlah sampel yang memenuhi dibagi jumlah sampel uji x 100%) (%)**	%	**100**	**4.949.058.900**	**2.494**	**2.721.788.549**	**653**	**986**	**471.269.808**	**151**	**653**	287	44
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	dok (SPA, SPU)	**1248**	**1.065.210.000**	**893**	**1.447.448.800**	**348**	**545**	**111.048.800**	**157**	**348**	68	20
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang di laksanakan	dok (desa)	**25**	**789.775.800**	**19**	**146.071.000**	**5**	**9**	**27.580.000**	**180**	**5**	4	80

Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	sampel	**2150**	**3.094.073.100**	**1582**	**1.128.268.749**	**300**	**432**	**332.641.008**	**144**	**300**	215	72
kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase lahan terpulihkan (jumlah atau luas lahan terpulihkan dibagi jumlah atau luas lahan pencemaran x 100%) (%)**	%	**100**	**2.793.351.000**	**5.847**	**499.418.600**	**5.250**	**1.650**	**164.042.600**	**31**	**5.250**	2.850	54
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	dok (batang pohon)	**25000**	**1.908.166.000**	**5097**	**398.496.000**	**5000**	**1400**	**139.550.000**	**28**	**5000**	2850	57
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan restorasi	dok (batang pohon dan benih ikan)	**1250**	**885.185.000**	**750**	**100.922.600**	**250**	**250**	**24.492.600**	**100**	**250**	0	-
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**Tingkat ketersediaan informasi untuk perhitungan ITV/L (Ha) tingkat ketersediaan dok lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**	dok (ha)	**10**	**3361335500**	**391**	**447799075**	**1003**	**3**	**152325500**	**0**	**1003**	0	-
kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Luas lahan yang ditanami (lokasi)**	ha (lokasi)	**10**	**3.361.335.500**	**391**	**447.799.075**	**1.003**	**3,00**	**152.325.500**	**0**	**1.003**	-	-
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	dok (lokasi)	**5**	**614.850.000**	**2**	**37.010.000**	**1**	**1**	**8.605.000**	**100**	**1**	0	-
Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	ha	**4**	**755.425.000**	**3**	**132.570.000**	**1**	**1**	**61.905.000**	**100**	**-**	0	#VALUE!
Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	ha (batang pohon)	**5000**	**1.391.060.500**	**384**	**234.393.575**	**1000**	**0**	**72.180.000**	**-**	**1000**	0	-

sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	kelompok									1		
Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas tamah kehati lainnya yang di kelola lingkup kewenangan Kabupaten	Ha (dok)	5	600.000.000	2	43.825.500	1	1	9.635.500	100	1	0	-
Program Pengend bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	**Persentase penaatan B3 dan limbah B3 kegiatan/usaha (%)**	%	**100**	**1.789.878.000**	**721**	**160.035.900**	**260**	**79**	**15.204.500**	**30**	**1.000**	-	-
kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah rekomendasi PSLB3 (kegiatan usaha)**	kegiatan usaha	**400**	**1.139.878.000**	**323**	**125.126.900**	**110**	**74**	**9.809.500**	**67**	**4**	-	-
Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang di laksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dok (kegiatan usaha)	**500**	**587.923.000**	**253**	**66.956.800**	**10**	**71**	**4.935.000**	**710**	**2**	0	-
Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan /izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	laporan (kegiatan usaha)	**245**	**551.955.000**	**70**	**58.170.100**	**100**	**3**	**4.874.500**	**3**	**2**	0	-
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rekomendasi pengumpul LB3 skala Kabupaten (Kegiatan usaha)**	**kegiatan usaha**	**750**	**650.000.000**	**398**	**34.909.000**	**150**	**5**	**5.395.000**	**3**	-	-	#DIV/0!
Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dok	**750**	**650.000.000**	**398**	**34.909.000**	**150**	**5**	**5.395.000**	**3**		0	#DIV/0!

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Persentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha Persentase penaatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada kegiatan/usaha (%)**	%	**100**	**3.402.960.000**	**814**	**330.956.500**	**262**	**248**	**117.848.000**	**95**	**180**	75	42
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rekomendasi PLH dan persentase kegiatan/usaha yang diawasi (jumlah keg/usaha yang diawasi dibagi jumlah keg/usaha kewenangan kab x 100%) (%)**	%	**100**	**3.402.960.000**	**814**	**330.956.500**	**262**	**248**	**117.848.000**	**95**	**180**	75	42
Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di benarkan	dok	**460**	**800.000.000**	**509**	**112.548.500**	**100**	**176**	**53.902.500**	**176**	**30**	8	27
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetjuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di berikan	orang	**40**	**600.000.000**	**2**	**4.420.500**	**10**	**2**	**4.420.500**	**20**	**-**	0	#VALUE!
Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan / Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang di awasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabuoaten/kota	laporan	**1060**	**1.460.000.000**	**302**	**208.787.500**	**150**	**69**	**54.325.000**	**46**	**150**	67	45
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD	dok	**8**	**542.960.000**	**1**	**5.200.000**	**2**	**1**	**5.200.000**	**50**	**-**	0	#VALUE!
Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat	**Tingkat peran serta Lembaga masyarakatan/ Pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**%**	**100**	**2.114.136.000**	**48**	**338.367.030**	**25**	**23**	**82.998.500**	**92**	**46**	-	-
kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina (jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi jumlah Lembaga kemasyarakatan yang terdata x 100%) (%)**	**%**	**100**	**2.114.136.000**	**48**	**338.367.030**	**25**	**23**	**82.998.500**	**92**	**46**	-	-

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat /institusi yang terdaftar yang menigkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	**45**	**700.000.000**	**15**	**28.247.600**	**15**	**10**	**5.885.000**	**67**	**15**	0	-
sub kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	orang									**30**		
Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan poduli dan berbudaya lingkungan hidup yang di laksanakan	dok (sekolah)	**50**	**1.414.136.000**	**33**	**310.119.430**	**10**	**13**	**77.113.500**	**130**	**1**	0	-
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Tingkat kepedulian Masyarakat atau kelompok/Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan/dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**%**	**100**	**2.539.545.000**	**3**	**185.503.750**	**1**	**1**	**87.253.750**	**100**	**1**	1	100
kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah jenis penghargaan (kegiatan)**	**kegiatan**	**5**	**2.539.545.000**	**3**	**185.503.750**	**1**	**1**	**87.253.750**	**100**	**1**	1	100
Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas (kegiatan)	**5**	**2.539.545.000**	**3**	**185.503.750**	**1**	**1**	**87.253.750**	**100**	**1**	1	100
Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup	**Persentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani**	**%**	**100**	**2.149.009.000**	**236**	**316.100.900**	**223**	**70**	**59.965.100**	**31**	**77**	34	44
kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	**Jumlah pengaduan kewenangan kabupaten (pengaduan)**	**pengaduan**	**1347**	**2.149.009.000**	**236**	**316.100.900**	**223**	**70**	**59.965.100**	**31**	**77**	34	44

Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang di tindaklanjuti/ditangani	dok (monitoring)	**1210**	**1.451.120.200**	**227**	**204.222.100**	**220**	**65**	**53.695.100**	**30**	**70**	27	39
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkrinisasi penerapan sanksi adminstrasi , penyelesaian sengketa, dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	dok (kegiatan)	**13**	**697.888.800**	**9**	**111.878.800**	**3**	**5**	**6.270.000**	**167**	**7**	7	100
Program Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah (%)**	%	**100**	**172.972.811.566**	**144.191**	**56.401.307.477**	**1.217.931**	**77.798**	**17.167.050.014**	**6**	**1.217.916**	26.569	2
kegiatan Pengelolaan Sampah	**Jumlah sampah yang masuk TPA dan jumlah sampah yang dimanfaatkan**	ton	**183.960**	**172.842.811.566**	**144.189,06**	**56.344.957.477**	**1.217.930**	**77.797**	**17.130.300.014**	**6**	**1.217.915**	26.569	2
Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulag dan pemanfaatan kembali	laporan	**54**	**350.000.000**	**17**	**34126000**	**10**	**17**	**34.126.000**	**170**	**-**	0	#VALUE!
Sub kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA/Kabupaten kota	ton	**1217903,1**	**80.740.343.620**	**144189,06**	**31.704.986.430**	**1217903,07**	**77770,31**	**14.587.207.514**	**6**	**1217903,07**	26556,5	2
Sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	dok	**50**	**351.869.800**	**16**	**218.210.177**	**10**	**6**	**49.915.000**	**60**	**10**	11	110

Sub kegiatan Koordinasi dan sinkroniasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, propinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabuoaten/kota pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	dok	**12**	**17.032.022.000**	**4**	**1.351.290.500**	**1**	**1**	**38.354.000**	**100**	**1**	0,5	50
Penyediaan sarana dan prasrana pengelolaan TPA/TPST/SPA kabupaten / kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemlahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pmprosesan akhir	unit	**190**	**74.368.576.146**	**101**	**23.036.344.370**	**6**	**3**	**2.420.697.500**	**50**	**1**	0,5	50
kegiatan Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengelola sampah , penangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta	**Jumlah rekomendasi jasa pengelolaan sampah dan Pros penaatan pengelolaan sampah (jumlah jasa usaha sampah yang memiliki rekomendasi/ijin dibagi jumlah jasa usaha sampah yang terdata x 100%)**	**%**	**100**	**130.000.000**	**2**	**56.350.000**	**1**	**1,00**	**36.750.000**	**100**	**1**	0,50	50
Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/kota	laporan	**10**	**130.000.000**	**2**	**56.350.000**	**1**	**1**	**36.750.000**	**100**	**1**	0,5	50
JUMLAH			**1257468,1**	**284.622.745.888**	**154983,06**	**99.937.667.186**	**1.225.643**	**80.889**	**30.398.558.086**	**4.796**			

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan yakni:

Pada tahun anggaran 2023 ada program dan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan ada juga yang belum di laksanakan, dan pada tahun 2024 ada anggaran yang diluncurkan.

- Untuk IKU IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang tidak tercapai di karenakan:

1. Jumlah sampel air dan udara dari kegiatan pemantauan kualitas air dan udara tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk membiayai kegiatan pengadaan sistem/peralatan pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (ONLIMO) akibatnya frekuansi kegiatan pengambilan sampel air dan udara menjadi berkurang. Perencanaan kegiatan agar disusun lebih komprehensif dan meningkatkan efesiensi realisasi anggaran.
2 Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indekas Kualitas Udara (IKU) tidak memenuhi target dikarenakan makin meningkatnya potensi beban pencemaran akibat meningkatnya aktivitas manusia di wilayah Kabupaten Serang. Koordinasi antar seksi dan bidang di Dinas Lingkungan Hidup harus ditingkatkan agar target indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) tercapai karena pencapaian nilai IKA dan IKU sangat dipengaruhi oleh kinerja seksi dan bidang yang ada di DLH Kabupaten Serang. Kegiatan sejenis coffe morning diharapkan dapat dilakukan secara rutin di tahun yang akan datang.

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. **28.142.415.000,-** anggaran tersebut yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 12.404.665.000,- dan program penunjang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan DLH sebelsar Rp. 15.673.566.400,-, dan belanja Modal sebesar Rp. 64.183.600 dan untuk Pendapatan Daerah PAD sebesar Rp. 2.542.300.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2014 ada beberapa perubahan jenis SPM, salah satunya yaitu jenis SPM lingkungan hidup tidak termasuk kedalam jenis pelayanan SPM. Oleh karena itu, Dinas lingkungan hidup kabupaten serang tidak terdapat data mengenai SPM atau standar pelayanan minimal. Untuk capaian kinerja pelayanan DLH dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah DLH Kab. Serang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra DLH				realisasi capaian		proyeksi		catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kualitas Air (IKA)			50,25	50,75	51,25	51,75	47,28	52,35	47,50	47,67	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			82,75	83	83,25	83,5	80,26	68,35	81,43	81,87	
3	Indeks Tutupan Vegetasi/Lahan (IKV/L)			69,99	69,995	70	70,005	70,41	33,97	70,59	70,72	
4	Prosentase penanganan sampah (%)			17,44	19,85	22,27	24,68	14,7	39,71	15,5	16,2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Isu mengenai kualitas lingkungan hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu totlok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) , Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Nilai indeks berkisar antara 0-100 dengan kategori nilai ;

Rentang Status IKLH Terbaru

Rentang	Klasifikasi
IKLH > 80	Sangat Baik
70 < IKLH ≤ 80	Baik
60 < IKLH ≤ 70	Cukup Baik
50 ≤ IKLH ≤ 60	Kurang Baik
40 ≤ IKLH > 50	Sangat Kurang Baik
30 ≤ IKLH > 40	Waspada

Sumber : Buku IKLH Nasional 2016

Beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu diantaranya:

Isu perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup permasalahan :

- Belum maksimalnya pelayanan persampahan di Kabupaten serang
- Belum terbangunnya TPS3R atau Transfer Depo di Kabupaten Serang untuk mendukung pelayanan persampahan
- Belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan dan pengendalian lingkungan hidup
- Belum tersusunnya dokumen RDTR beberapa wilayah sesuai dengan yang diamanatkan oleh RTRW Kabupaten Serang
- Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan tata ruang

Faktor Penghambat

- Perilaku sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

  Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat terbesar dalam pelayanan DLH dimasa mendatang. Beberapa upaya perlu segera dilakukan sehingga perilaku negatif tersebut bisa dikurangi bahkan jika bisa dihilangkan.

- Kuantitas dan kualitas aparatur masih kurang dalam menyelenggarakan pelayanan prima.

  Kondisi ini juga merupakan faktor penghambat dari pelayanan di lingkungan DLH. Dengan kurangnya kuantitas dan kualitas personil yang menyelenggarakan pelayanan dapat menyebabkan kurang optimalnya pencapaian target kinerja dll.

- Politik anggaran atas urusan wajib Bidang LH masih kurang mendukung.
- Komitmen OPD terkait terhadap urusan wajib Bidang LH masih lemah.
- Komitmen masyarakat, pelaku usaha & *stake holder* LH lainnya terhadap permasalahan LH masih rendah.

Faktor Pendorong

- Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan LH Kab.Serang.

  Kondisi tersebut merupakan faktor pendorong yang besar bagi penyelesaian permasala han pelayanan dimasa men datang. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan masukan yang relatif besar akan dapat dipenuhi atau membutuh kan koordinasi dan kerjasama dengan inter atau lintas sektor lebih mudah dilaksanakan.

- Dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di Bidang LH.

  Kondisi ini juga merupakan faktor pendorong penyelesaian permasalahan pelayanan yang akan dihadapi DLH seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kerjasama dll.

2.4. Review terhadap RKPD Final

Pada RKPD Final Kabupaten Serang tahun 2025, pagu indikatif DLH adalah sebesar Rp. **37.742.200.000,-** dengan komposisi sebagai berikut :

No	Perangkat daerah	Kegiatan (output)	Gaji tunjangan	RKPD Final 2025					
				Hibah/ bansos /banke	Prioritas	Penunjang	Belanja Modal	Jumlah	TAG
1	Sekretariat	Gaji dan tunjangan	11.827.200.000						
		Gaji Non PNS	505.290.000						
		Belanja kesekretariatan dan publikasi pembangunan daerah				2.203.506.785			
2	Bidang Perencanaan dan penataan LH	Program kegiatan penunjang lainya				596.859.400			
3	Bidang penataan dan peningkatan dan peningkatan kapasitas LH	Pohon puspemkab			500.000.000				
		Program kegiatan penunjang lainya				1.104.214.900			
4	Bidang pengendalian dan pemeliharaan LH	Pemantauan pengawasan LH			500.000.000				
		Program kegiatan penunjang lainya				971.712.836			
5	Bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3	Operasional persampahan			7.785.840.000				
		BOP pengelolaan TPST Incenarator			3.310.657.479	3.310.657.479			

		Gaji Non PNS	4.244.760.000						
		Program kegiatan penunjang lainya				277.530.000	2.470.000		
Jumlah			**16.577.250.000**		**12.096.497.479**	**8.992.481.921**	**75.970.600**	**37.742.200.000**	

Adanya perbedaan pagu rancangan awal dengan rancangan awal Renja 2025. Adapun rincian perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Final Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

Kode					Rancangan awal RKPD 2025					Hasil analisis Kebutuhan (final)				
					Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	02	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2,01	0006	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Serang	jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun	1 dok	100.000.000	Penyusunan RPPLH kab/kota	Kab. Serang	Jumlah dok RPPLH di kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota	2 dok	218.684.000

2	11	02	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2,02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah dokKLHS KRP Kab/kota yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup yang disusun	1 dok	100.000.000	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah dokKLHS KRP Kab/kota yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup yang disusun		111.316.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2,01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Serang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	124 SPA, 60 SPU	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Serang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dok (124 SPA, 60 SPU)	200.000.000

2	11	03	2,01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang di laksanakan	2 desa	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang di laksanakan	1 dok	50.000.000
2	11	03	2,01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Serang	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	500 sampel	342.477.036	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Serang	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dok (500 Sampel)	481.981.836
2	11	03	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2,03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan restorasi	1 dok	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan restorasi	1 keg	53.520.000
2	11	03	2,03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dok	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 keg	250.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				

2	11	04	2,01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Serang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 lokasi	100.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Serang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun		350.660.000
2	11	04	2,01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Serang	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	2 Ha	700.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Serang	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten		700.000.000
2	11	04	2,01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Serang	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	3 kelompok tani	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Serang	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati		36.298.900
2	11	04	2,01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Serang	Luas tamah kehati lainnya yang di kelola lingkup kewenangan Kabupaten	1 dok	50.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Serang	Luas tamah kehati lainnya yang di kelola lingkup kewenangan Kabupaten	1 unit	63.736.000
2	11	04	2,01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Serang	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	1 lokasi	50.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Serang	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	1 unit	50.000.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	11	05	2,01		Penyimpanan sementara Limbah B3					Penyimpanan sementara Limbah B3				

2	11	05	2,01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang di laksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5 dokumen reincian terkait PLB3 untuk kegoiatan penyimpangan uang diintegrasikan kedalam persetujuan lingkiungan	20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang di laksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dok	20.000.000
2	11	05	2,01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Serang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan /izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	5 dokumen BA	30.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Serang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan /izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 lap	30.000.000
2	11	05	2,02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				

2	11	05	2,02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 dokumen persetujuan teknis dan SLO PLB3	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dok	25.000.000
2	11	05	2,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan propinsi dalam rangka penangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penimpnanan sementara limbha B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan propinsi dalam rangka penangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penimpnanan sementara limbha B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dok	25.000.000

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang			
2	11	06	2,01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Serang	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di benarkan	15 dokumen persetujuan teknis dan SLO air limbah dan emisi	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Serang	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di benarkan	15 dokumen persetujuan teknis dan SLO air limbah dan emisi	100.000.000
2	11	06	2,01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang di awasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabuoaten/kota	200 BA	250.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang di awasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabuoaten/kota	200 BA	250.000.000

2	11	06	2,01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetjuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di berikan	3 personil	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetjuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di berikan	10 orang	30.000.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	08	2,01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan poduli dan berbudaya lingkungan hidup yang di laksanakan	2 dokumen	70.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan poduli dan berbudaya lingkungan hidup yang di laksanakan	10 dok	70.000.000
2	11	08	2,01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	5 orang	30.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	30 orang	27.907.000

2	11	08	2,01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Serang	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat /institusi yang terdaftar yang menigkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 lembaga	70.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Kab. Serang	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat /institusi yang terdaftar yang menigkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 lembaga	68.951.800
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	09	2,01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 kegiatan	100.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Serang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 keg	100.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				

										Kabupaten/Kota				
2	11	10	2,01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang di tindaklanjuti/ditangani	200 monitoring pengaduan	200.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang di tindaklanjuti/ditangani	220 pengaduan	199.841.000
2	11	10	2,01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkrinisasi penerapan sanksi adminstrasi , penyelesaian sengketa, dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 kegiatan	30.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkrinisasi penerapan sanksi adminstrasi , penyelesaian sengketa, dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		59.890.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah					Pengelolaan Sampah				
2	11	11	2,01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Serang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	30.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Serang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	230.072.000

2	11	11	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, propinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabuoaten/kota pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	12 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, propinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabuoaten/kota pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	12 dokumen	142.830 000
2	11	11	2,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemlahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pmprosesan akhir	1 unit	40.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemlahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pmprosesan akhir		40.000.000

2	11	11	2,01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Serang, Waringinkurung	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPST/SPA/Kabupaten kota	2 BOP encinerator	2.000.000.000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Serang, Waringin kurung	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPST/SPA/Kabupaten kota		7.005.022.000
2	11	11	2,01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Serang	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA Kabupaten kota	1217903, 07 ton	12.000.000.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Serang	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA Kabupaten kota		12.195.492.079
2	11	11	2,02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta					Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				
2	11	11	2,02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Serang			

2	11	11	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
2	11	11	2,03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Serang	Jumlah laporan hasil pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/kota	12 laporan	20.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Serang	Jumlah laporan hasil pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/kota		20.000.000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	11	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2	11	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	70.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	78.052.400

2	11	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dok	10.000.000
2	11	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	2 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Serang	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	2 dok	10.000.000
2	11	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	3 dok	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	3 dok	80.130.000
2	11	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dok	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dok	25.000.000
2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	*Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN*	85 orang	11.827.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	*Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN*	85 orang	11.827.200.000

2	11	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksaan tugas ASN	2 dok	130.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Serang	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksaan tugas ASN		150.000.000
2	11	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Serang				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Serang			
2	11	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 laporan	60.000.000
2	11	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan keuangan bulanan , triwulanan/semesteran skpd dsan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan keuangan bulanan , triwulanan/semesteran skpd dsan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	4 laporan	10.000.000

2	11	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Serang	Jumlah dokumen pelpaoran dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Serang	Jumlah dokumen pelpaoran dan analisis prognosis realisasi anggaran		10.000.000
2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Serang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	90 orang	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Serang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		40.000.000
2	11	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Serang				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Serang			
2	11	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang			-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang			-
2	11	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang			-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Serang			-
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Serang	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Serang	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan		4.999.601

2	11	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		124.708.000
2	11	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan	1 paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan		79.966.100
2	11	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		80.000.000
2	11	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 paket	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		22.680.000
2	11	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		246.000.000
2	11	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Serang	Jumlah paket mebeul yang di sediakan	1 paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Serang	Jumlah paket mebeul yang di sediakan		19.970.000

2	11	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah unit saran prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 paket	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah unit saran prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		35.756.000
2	11	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	184.121.424	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		184.121.096
					Gaji Non PNS				314.727.576	Gaji Non PNS				314.727.576
2	11	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber fdaya air dan listrik yang di sediakan	1 laporan	426.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber fdaya air dan listrik yang di sediakan		426.500.000
2	11	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		29.999.968
2	11	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	62.583.504	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		62.575.584
					Gaji Non PNS					Gaji Non PNS				

									227.261.472					227.261.472
2	11	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	1 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya		329.020.000
2	11	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 laporan	47.328.988	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		47.328.988
Jumlah									**31.342.200.000**					**37.742.200.000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan yang disampaikan melalui rapat dengan pimpinan untuk tahun 2025 ditujukan kepada seluruh OPD untuk dilakukan proses tindak lanjut. Pada dinas LH diusulkan pengadaan mesin encinerator pada Kecamatan Anyer dan waringin kurung. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yang sudah terangkum pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Hasil Musrenbang Kecamatan

NO.	BIDANG URUSAN/ USULAN DARI/ NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Tempat pengolahan sampah 3R /TPST3R	Cikande permai	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA Kabupaten kota	600 m2	
2	Pembinaan bidang pengelolahan sampah	12 desa (Ds.Anyer, bandulu, banjarsari, bunihana, cikoneng, grogol indah, kosambiroyok, mekarsasri, sindangmandi, sindangkaraya, tambangayam, tanjung manis)	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	12 desa	
3	Pelatihan untuk pemberdayaan dan banguan pengelolaan sampah	Kec, Baros	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat		
4	Bak Sampah dan motor sampah	Kec. Ciomas	Jumlh sampah yang di pilah, di kumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA Kabupaten kota	11 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 bertitiktolak dari RPJMN tahun 2020 – 2025. Pada RPJMN 2020 – 2025 terdapat 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. *Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.*
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Salah satu dari 7 agenda pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Agenda pembangunan ini pun menjadi Program Nasional (PN) pada RKP Tahun 2025 yang memiliki tema:

“Peningkatan produktifitas untuk transfromasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan “ selain memeperhatikan tema pembangunan juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah propinsi Banten yang tercantum pada RKPD Propinsi Banten tahun 2025, yaitu “Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor unggulan “

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 adalah : ***“Pertumbuhan ekonomi wujudkan infrasntruktur mantap, masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera “***

2020-2025 pun sejalan dengan tema tersebut, yaitu: Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dengan menggunakan Skema reguler yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DLH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dijadikan sebagai visi Kabupaten serang sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026, adalah **" Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis "**

Berdasarkan Visi tersebut dijabarkan menjadi 6 (enam) misi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, dimana misi yang terkait dengan tugas dan fungsi lingkungan hidup yang diemban oleh DLH adalah misi kedua yaitu:

Misi KeTiga : ***Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Permukiman yang memadai dan berkualitas*** (hal ini berkaitan dengan kinerja dan fungsi pencegahan dan pengendalian konservasi SDA dan Persamapahn dan pertamanan yang harus dilakukan dalam upaya menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Serang)

Adapun misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kabupaten serang terkait lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Misi KeTiga : ***Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Permukiman yang memadai dan berkualitas***

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pemefrataan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam

Kebijakan	Program
1. Pengambangan aplikasi pemantauan kondisi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjsama engan kominfo) 2. Pengawasan Lingkungan sampai dengan tingkat Kecamatan 3. Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah 4. Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan 5. Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif 6. Memellihara, merehabilitasi dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas persampahan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan 8. Meningkatkan perlidungan, konservasi , rehabilitasi dan pemulihan SDA LH 9. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infromasi SDA LH dan sarana pengelolaan Lingkungan hidup 10. Meingaktkan penataan dan kualitas pemeliharan ruang terbuka hijau	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 3. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian bahan berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlidnungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan pemdidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Program Penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat 8. Program Penanaganan pengaduan lingkungan hidup 9. Program Pengelolaan sampah

Misi dan program inilah yang dijadikan dasar bagi DLH Kabupaten Serang untuk penyusunan visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan DLH sebagai renstra DLH 2021 - 2026, yang secara detail sebagaimana uraian di bab IV.

Tujuan strategis yang ingin dicapai DLH Kabupaten Serang di Tahun 2021 - 2026 sesuai Visi **"Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis "**

Misi : " ***Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Permukiman yang memadai dan berkualitas"***

Adapun **Sasaran** yang ingin di capai Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam, serta tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya. Mencermati tema dan prioritas daerah pada tahun 2025 maka Renja Dinas Lingkungan Hidup 2025 disusun dan ditetapkan dengan tujuan perencanaan daerah, dengan sasaran tercapainya target prioritas untuk tahun 2025.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan berjalan dengan baik diperlukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi pelaksanaan kinerja lingkungan hidup baik pada instansi di tingkat pusat yang berada di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENLH RI) dan instansi di tingkat propinsi yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLHD) Provinsi Banten.

Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 Visi " ***" Terwujudnya keberlanjutan Sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat "*** untuk mendukung " ***terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***

Misi nya adalah:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelnjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dan telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran umum yang hendak diwujudkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk kurun waktu 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, menigkatkan ketahana bencana dan perubahan iklim, sedangkan sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
b. Peningkatan Ketahanan bencana dan iklim
c. Pembangunan rendah karbon

Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut meliputi:

- Pengembangan tata ruang yang terintegrasi
- Mitigasi perubahan iklim
- Penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan

3.3 Program dan Kegiatan DLH

Indikasi Program dan Kegiatan serta rencana pendanaan Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.**37.742.200.000, (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*),** berdasarkan pagu final yang diperoleh dari RKPD Final Kab. Serang tahun 2025. Program kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2025 ini berdasarkan pada target Renstra 2021-2026 dan didasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun yang sudah berjalan. Rencana kerja program dan kegiatan DLH tahun 2025 dan prakiraan rencana tahun 2026 dirumuskan kedalam Tabel 3.1 di bawah ini.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Serang

Tabel. 3.1 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025
Dan prakiraan maju tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup kabupaten serang

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan penting	prakiraan maju rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)			
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**37.742.200.000**				**39.592.610.472**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan , barang milik daerah dan tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**14.535.996.785**				**15.442.610.472**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**203.182.400**				**195.000.000**
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Serang	2	Dokumen	78.052.400	APBD		1 dok	70.000.000
2.11.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Serang	2	Dokumen	10.000.000	APBD		1 dok	10.000.000
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	2	Dokumen	10.000.000	APBD		1 dok	10.000.000

2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Kab. Serang	3	dokumen	80.130.000	APBD		1 laporan	70.000.000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Serang	1	dokumen	25.000.000	APBD		1 laporan	35.000.000
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen pelaporan keuangan (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**12.057.200.000**				**12.230.000.000**
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Serang	85	Orang	11.827.200.000	APBD		12 bulan	12.000.000.000
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksaan tugas ASN	Kab. Serang	2	dokumen	150.000.000	APDB		1 dok	200.000.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kab. Serang	1	laporan	60.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
2.11.01.2.02.0007	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan , triwulanan /semesteran skpd dsan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran skpd	Kab. Serang	4	Laporan	10.000.000	APBD		4 laporan	10000000
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelpaoran dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Serang	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1 dok	10000000

2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**40.000.000**				**165.000.000**
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Serang	90	paket	40.000.000	APBD		90 paket	40000000
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Serang	5	Orang	0	APBD		5 org	0
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Serang	50	Orang	0	APBD		50 org	25000000
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengukuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Serang	100	Orang	0	APBD		100 org	100.000.000
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**Persentase administrasi kebutuhan kantor tepat waktu (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**558.353.701**				**630.000.000**
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	4.999.601	APBD		1 paket	10.000.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	124.708.000	APBD		1 paket	50.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	Kab. Serang	1	paket	79.966.100	APBD		1 paket	100000000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Serang	1	paket	80.000.000	APBD		1 paket	100000000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	Kab. Serang	1	dokumen	0	APBD		1 dok	0

	undangan	perundang-undangan yang disediakan								
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Serang	1	laporan	246.000.000	APBD		1 laporan	350.000.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Serang	1	laporan	22.680.000	APBD		10 laporan	20.000.000
2.11.01.2.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**55.726.000**				**100.000.000**
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan meubel	Jumlah paket mebeul yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	19.970.000	APBD		1 paket	50000000
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit saran prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Serang	1	paket	35.756.000	APBD		1 paket	50000000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.245.185.696**				**1.272.610.472**
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Serang	1	Laporan	498.848.672	APBD		1 laporan	498.849.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Kab. Serang	1	Laporan	426.500.000	APBD		1 laporan	426.500.000
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Laporan	29.999.968	APBD		1 laporan	50000000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasapelayanan umum kantor yang	Kab. Serang	1	Laporan	289.837.056	APBD		1 laporan	297.261.472

		disediakan								
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**376.348.988**				**850.000.000**
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	Kab. Serang	30	Unit	329.020.000	APBD		30 unit	350.000.000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Serang	1	Unit	47.328.988	APBD		1 unit	500.000.000
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tingkat ketersediaaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses Persentase perencanaan dan penganggaran peayanan administrasi keuangan, dan barang milik daerah**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**330.000.000**				**500.000.000**
2.11.02.2.01	**Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/kota**	**Persentase dokumen/aturan yang dibuat (jumlah dok/aturan yang dibuat dibagi jumlah dok/aturan yang direncanakan x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**218.684.000**				**250000000**
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kab/kota	jumlah dokumen RPPLH di kab/kota yang berisi	Kab. Serang	2	Dokumen	218.684.000	APBD		1 dok	250000000

		arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi								
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase dok lingkungan yang di proses (jumlah dok lingkungan yang diproses dibagi jumlah kegiatan wajib x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**111.316.000**				**250000000**
2.11.02.2.02.0006	penyelenggaran KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Kab. Serang	1	Dokumen	111.316.000	APBD		1 dok	250000000
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP**	**Tingkat ketersediaan untuk perhitungan ITV/L (sampel)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.035.501.836**				**1.300.000.000**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase parameter inti memenuhi BMa (jumlah parameter inti yang memenuhi dibagi jumlah parameter inti yang diukur x 100%) [persentase sampel uji yang memenuhi BM (jumlah sampel yang memenuhi dibagi jumlah sampel uji x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**736.981.836**				**900000000**

2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, danLaut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Kab. Serang	124 60	SPASPU	200.000.000	APBD		124 SPA, 60 SPU	250000000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang di laksanakan	Kab. Serang	5	Desa	50.000.000	APBD		5 desa	150000000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Kab. Serang	500	Sampel	481.981.836	APBD		300 sampel	500000000
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase lahan terpulihkan (jumlah atau luas lahan terpulihkan dibagi jumlah atau luas lahan pencemaran x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**303.520.000**				**400.000.0000**
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Serang	1	Dokumen	53.520.000	APBD			50.000.000
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Kab. Serang	1	Dokumen	250.000.000	APBD			350.000.000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN**	**Tingkat ketersediaan informasi untuk**	**Kab. Serang**	**1**	**Dok**	**1.200.694.900**				**1.000.000.000**

	HAYATI (KEHATI)	**perhitungan ITV/L (Ha) tingkat ketersediaan dok lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**								
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas lahan yang ditanami (lokasi)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.200.694.900**				**1.000.000.000**
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	Kab. Serang	1	Dokumen	350.660.000	APBD		1 dok	100.000.000
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di LuarKawasan Hutan	Luas taman kehati di luar Kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Kab. Serang	1	lokasi	50.000.000	APBD		1 ha	50.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	Kab. Serang	2	Ha	700.000.000	APBD		2 ha	700.000.000
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas tamah kehati lainnya yang di kelola lingkup kewenangan Kabupaten	Kab. Serang	1	dok	63.736.000	APBD		1 ha	50.000.000
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Serang	3	Kelompok	36.298.900	APBD		3 kelompok	100.000.000
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase penaatan B3 dan limbah B3 kegiatan/usaha (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**100.000.000**				**220.000.000**

2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara limbah B3**	**Jumlah rekomendasi PSLB3 (kegiatan usaha)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**50.000.000**				**100.000.000**
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanansementara limbah B3 dilaksanakan melalui systempelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang di laksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Serang	5	Dokumen	20.000.000	APBD		10 dok	50.000.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan /izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Kab. Serang	5	Dokumen BA	30.000.000	APBD		10 dok BA	50.000.000
2.11.05.2.02	**Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kab/kota**	**Jumlah rekomendasi pengumpul LB3 skala Kabupaten (Kegiatan usaha)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**50.000.000**				**120.000.000**
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulanlimbah B3 dilaksanakan melalui system pelayananperizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Serang	2	dokumen persetujuan teknis dan SLO PLB3	25.000.000	APBD		3 dok	70.000.000
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan sinkronasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan Limbah B3	Kab. Serang	1	Laporan	25.000.000	APBD		2 laporan	50.000.000

	pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ataupenimbunan	dengan pemerintah dan propinsi dalam rangka penangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penimpnanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya								
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha Persentase penaatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada kegiatan/usaha (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**380.000.000**				**350.000.000**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi PLH dan persentase kegiatan/usaha yang diawasi (jumlah keg/usaha yang diawasi dibagi jumlah keg/usaha kewenangan kab x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**380.000.000**				**350.000.000**
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di benarkan	Kab. Serang	15	dokumen persetujuan teknis dan SLO air limbah dan emisi	100.000.000	APBD		15 dok	50.000.000

2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetjuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di berikan	Kab. Serang	3	Personil	30.000.000	APBD		10 personil	50.000.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan LH	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang di awasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabuoaten/kota	Kab. Serang	200	BA	250.000.000	APBD		180 BA	250.000.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Tingkat peran serta Lembaga masyarakatan/ Pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Serang**			**166.859.400**				**210.000.000**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina (jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi jumlah Lembaga kemasyarakatan yang terdata x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**166.859.400**				**210.000.000**
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat /institusi	Kab. Serang	10	kelompok	68.951.800	APBD		5 kelompok	10.000.000

	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	yang terdaftar yang menigkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH								
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan poduli dan berbudaya lingkungan hidup yang di laksanakan	Kab. Serang	2	Dokumen	70.000.000	APBD		10 dok	100.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Kab. Serang	5	Orang	27.907.600	APBD		30 org	100.000.000
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Tingkat kepedulian Masyarakat atau kelompok/Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan/dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Serang**			**100.000.000**				**250.000.000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penghargaan (kegiatan)**	**Kab. Serang**	**1**	**kegiatan**	**100.000.000**				**250.000.000**
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Serang	1	Kegiatan	100.000.000	APBD		1 keg	250.000.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten**	**Kab. serang**	**100**	**%**	**259.731.000**				**300.000.000**

	LINGKUNGAN HIDUP	**yang tertangani**								
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaduan kewenangan kabupaten (pengaduan)**	**Kab. serang**	**200**	**Pengaduan**	**259.731.000**				**300.000.000**
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakatterhadap PPLH kab/kota yang ditindak lanjuti/ditangani	Kab. Serang	200	Monitoring pengaduan	199.841.000	APBD		220 monitoring	250.000.000
2.11.10.2.01.0006	penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	Kab. Serang	1	Keg	59.890.000	APBD		2 dok	50.000.000
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**19.633.416.079**				**20.320.000.000**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah yang masuk TPA dan jumlah sampah yang dimanfaatkan (meter kubik)**	**Kab. Serang**	**1.217.903,07**	**m3**	**19.613.416.079**				**20.150.000.000**
2.11.11.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan strategi pengelolaan sampah yang di tetapkan	Kab. Serang	1	Dokumen	0	APBD		1 dok	100.000.000
2.11.11.2.01.0002	pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Serang	10	Dokumen	0			10 dok	100.000.000

2.11.11.2.01.0020	penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	Kab. Serang	1217903,07	Ton	12.195.492.079	APBD		1217903,07 ton	17.000.000.000
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kab. Serang	10	Kelompok	230.072.000	APBD		5 dok	100.000.000
2.11.11.2.01.0006	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPSY kabupaten /kota yang di tetapkan	Kab. Serang	1	Dokumen	0	APBD		1 dok	100.000.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan sinkroniasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, propinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabuoaten/kota pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	Kab. Serang	12	Dokumen	142.830.000	APBD		1 dok	150.000.000
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasrana pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemlahan, pengumpulan,	Kab. Serang	1	unit	40.000.000	APBD		bop	100.000.000

	/ kota	pengangkutan, pengolahan dan pmprosesan akhir								
2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Serang	2	BOP encinerator	7.005.022.000	APBD			2.500.000.000
2.11.11.2.02	**Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengelola sampah , penangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta**	**Jumlah rekomendasi jasa pengelolaan sampah dan persentase penaatan pengelolaan sampah (jumlah jasa usaha sampah yang memiliki rekomendasi/izin dibagi jumlah jasa usaha sampah yang terdata x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**0**				**100.000.000**
2.11.11.2.02.01	Pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik	Jumlah rekomendasi dari izin /persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik pengelolaan sampah yang di fasilitasi	Kab. Serang	40	rekomendasi	0	APBD		40 rekomendasi	100.000.000
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan pengawasan pengelolaan**	**Jumlah rekomendasi jasa pengelolaan**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**20.000.000**				**70.000.000**

	sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	**sampah dan persentase penaatan pengelolaan sampah (jumlah jasa usaha sampah yang memiliki rekomendasi/izin dibagi jumlah jasa usaha sampah yang terdata x 100%) (%)**								
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/kota	Kab. Serang	12	Laporan	20.000.000	APBD		12 laporan	70.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN DLH

Sejak tahun 2021, mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini mengubah semua nomenklatur nama-nama program dan kegiatan. Berikut adalah Tabel 4.1. daftar nama program dan kegiatan Renja DLH Tahun 2025:

4.1. Tabel Program Kerja DLH.

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN
1	Penunjang urusan pemerintah	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Perencanaan lingkungan hidup	- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota - Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) kabupaten/kota

3	Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
4	Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
5	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	- Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7	Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
10	Pengelolaan persampahan	- Pengelolaan Sampah - Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengelola sampah , penangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta

4.2. Rencana Pendanaan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan DLH tahun 2025 beserta pagu indikatif atau rencana pendanaan sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut. Uraian rencana pendanaan adalah:

Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan DLH Tahun 2025 beserta Pagu Indikatif atau Rencana Pendanaan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**37.742.200.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan , barang milik daerah dan tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**14.535.996.785**	APBD
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerjaperangkat daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**203.182.400**	APBD
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Serang	2	Dokumen	78.052.400	APBD
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Serang	2	Dokumen	10.000.000	APBD
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Serang	2	Dokumen	10.000.000	APBD
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Kab. Serang	3	dokumen	80.130.000	APBD

2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Serang	1	dokumen	25.000.000	APBD
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen pelaporan keuangan (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**12.057.200.000**	APBD
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Serang	85	Orang	11.827.200.000	APBD
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksaan tugas ASN	Kab. Serang	2	dokumen	150.000.000	APDB
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kab. Serang	1	laporan	60.000.000	APBD
2.11.01.2.02.0007	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan , triwulanan /semesteran skpd dsan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran skpd	Kab. Serang	4	Laporan	10.000.000	APBD
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelpaoran dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Serang	1	Dokumen	10.000.000	APBD
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**40.000.000**	APBD
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Serang	90	paket	40.000.000	APBD
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Serang	5	Orang	0	APBD
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Serang	50	Orang	0	APBD
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengukuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Serang	100	Orang	0	APBD

2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**Persentase administrasi kebutuhan kantor tepat waktu (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**558.353.701**	APBD
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	4.999.601	APBD
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	124.708.000	APBD
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	Kab. Serang	1	paket	79.966.100	APBD
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Serang	1	paket	80.000.000	APBD
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Serang	1	dokumen	0	APBD
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Serang	1	laporan	246.000.000	APBD
2.11.01.2.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Serang	1	laporan	22.680.000	APBD
2.11.01.2.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**55.726.000**	APBD
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan meubel	Jumlah paket mebeul yang disediakan	Kab. Serang	1	Paket	19.970.000	APBD
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit saran prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Serang	1	paket	35.756.000	APBD
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.245.185.696**	APBD
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Serang	1	Laporan	498.848.672	APBD
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Kab. Serang	1	Laporan	426.500.000	APBD

2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Laporan	29.999.968	APBD
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasapelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Serang	1	Laporan	289.837.056	APBD
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**376.348.988**	APBD
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	Kab. Serang	30	Unit	329.020.000	APBD
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Serang	1	Unit	47.328.988	APBD
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tingkat ketersediaaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses Persentase perencanaan dan penganggaran peayanan administrasi keuangan, dan barang milik daerah**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**330.000.000**	APBD
2.11.02.2.01	**Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/kota**	**Persentase dokumen/aturan yang dibuat (jumlah dok/aturan yang dibuat dibagi jumlah dok/aturan yang direncanakan x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**218.684.000**	APBD
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kab/kota	jumlah dokumen RPPLH di kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	Kab. Serang	2	Dokumen	218.684.000	APBD
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase dok lingkungan yang di proses (jumlah dok lingkungan yang diproses dibagi jumlah kegiatan wajib x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**111.316.000**	APBD
2.11.02.2.02.0006	penyelenggaran KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Kab. Serang	1	Dokumen	111.316.000	APBD

2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP**	**Tingkat ketersediaan untuk perhitungan ITV/L (sampel)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.035.501.836**	**APBD**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase parameter inti memenuhi BMa (jumlah parameter inti yang memenuhi dibagi jumlah parameter inti yang diukur x 100%) [persentase sampel uji yang memenuhi BM (jumlah sampel yang memenuhi dibagi jumlah sampel uji x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**736.981.836**	APBD
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Kab. Serang	124 60	SPASPU	200.000.000	APBD
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang di laksanakan	Kab. Serang	5	Desa	50.000.000	APBD
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan HidupKabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Kab. Serang	500	Sampel	481.981.836	APBD
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase lahan terpulihkan (jumlah atau luas lahan terpulihkan dibagi jumlah atau luas lahan pencemaran x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**303.520.000**	APBD
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Serang	1	Dokumen	53.520.000	APBD
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Kab. Serang	1	Dokumen	250.000.000	APBD
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Tingkat ketersediaan informasi untuk perhitungan ITV/L (Ha) tingkat ketersediaan dok lingkungan hidup yang dibuat dan diproses (dok)**	**Kab. Serang**	**1**	**Dok**	**1.200.694.900**	APBD

2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas lahan yang ditanami (lokasi)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**1.200.694.900**	APBD
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana PengelolaanKeanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	Kab. Serang	1	Dokumen	350.660.000	APBD
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di LuarKawasan Hutan	Luas taman kehati di luar Kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Kab. Serang	1	lokasi	50.000.000	APBD
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten	Kab. Serang	2	Ha	700.000.000	APBD
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas tamah kehati lainnya yang di kelola lingkup kewenangan Kabupaten	Kab. Serang	1	dok	63.736.000	APBD
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Serang	3	Kelompok	36.298.900	APBD
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase penaatan B3 dan limbah B3 kegiatan/usaha (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**100.000.000**	APBD
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara limbah B3**	**Jumlah rekomendasi PSLB3 (kegiatan usaha)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**50.000.000**	APBD
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanansementara limbah B3 dilaksanakan melalui systempelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang di laksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Serang	5	Dokumen	20.000.000	APBD
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhanpersyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan /izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Kab. Serang	5	Dokumen BA	30.000.000	APBD
2.11.05.2.02	**Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerahkab/kota**	**Jumlah rekomendasi pengumpul LB3 skala Kabupaten (Kegiatan usaha)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**50.000.000**	APBD

2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulanlimbah B3 dilaksanakan melalui system pelayananperizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Serang	2	dokumen persetujuan teknis dan SLO PLB3	25.000.000	APBD
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan sinkronasi pengelolaan limbah B3dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dan propinsi dalam rangka penangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penimpnanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	Kab. Serang	1	Laporan	25.000.000	APBD
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha** **Persentase penaatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada kegiatan/usaha (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**380.000.000**	APBD
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi PLH dan persentase kegiatan/usaha yang diawasi (jumlah keg/usaha yang diawasi dibagi jumlah keg/usaha kewenangan kab x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**380.000.000**	APBD
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di benarkan	Kab. Serang	15	dokumen persetujuan teknis dan SLO air limbah dan emisi	100.000.000	APBD
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat PengawasLingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetjuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang di berikan	Kab. Serang	3	Personil	30.000.000	APBD

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan LH	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang di awasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabuoaten/kota	Kab. Serang	200	BA	250.000.000	APBD
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Tingkat peran serta Lembaga masyarakatan/ Pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Serang**			**166.859.400**	APBD
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina (jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi jumlah Lembaga kemasyarakatan yang terdata x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**166.859.400**	APBD
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber DayaManusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat /institusi yang terdaftar yang menigkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kab. Serang	10	kelompok	68.951.800	APBD
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan poduli dan berbudaya lingkungan hidup yang di laksanakan	Kab. Serang	2	Dokumen	70.000.000	APBD
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Kab. Serang	5	Orang	27.907.600	APBD
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Tingkat kepedulian Masyarakat atau kelompok/Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan/dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Serang**			**100.000.000**	APBD
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penghargaan (kegiatan)**	**Kab. Serang**	**1**	**kegiatan**	**100.000.000**	APBD

2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Serang	1	Kegiatan	100.000.000	APBD
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani**	**Kab. serang**	**100**	**%**	**259.731.000**	**APBD**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengaduan kewenangan kabupaten (pengaduan)**	**Kab. serang**	**200**	**Pengaduan**	**259.731.000**	APBD
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakatterhadap PPLH kab/kota yangditindak lanjuti/ditangani	Kab. Serang	200	Monitoring pengaduan	199.841.000	APBD
2.11.10.2.01.0006	penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	Kab. Serang	1	Keg	59.890.000	APBD
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**19.633.416.079**	APBD
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah sampah yang masuk TPA dan jumlah sampah yang dimanfaatkan (meter kubik)**	**Kab. Serang**	**1.217.903,07**	**m3**	**19.613.416.079**	APBD
2.11.11.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi DaerahPengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan strategi pengelolaan sampah yang di tetapkan	Kab. Serang	1	Dokumen	0	
2.11.11.2.01.0002	pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Serang	10	Dokumen	0	
2.11.11.2.01.0020	penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST regional	Kab. Serang	1217903,07	Ton	12.195.492.079	APBD

2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kab. Serang	10	Kelompok	230.072.000	APBD
2.11.11.2.01.0006	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPSY kabupaten /kota yang di tetapkan	Kab. Serang	1	Dokumen	0	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan sinkroniasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, propinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabuoaten/kota pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	Kab. Serang	12	Dokumen	142.830.000	APBD
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasrana pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA kabupaten / kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemlahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pmprosesan akhir	Kab. Serang	1	unit	40.000.000	APBD
2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Serang	2	BOP encinerator	7.005.022.000	APBD
2.11.11.2.02	**Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengelola sampah , penangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta**	**Jumlah rekomendasi jasa pengelolaan sampah dan persentase penaatan pengelolaan sampah (jumlah jasa usaha sampah yang memiliki rekomendasi/izin dibagi jumlah jasa usaha sampah yang terdata x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**0**	
2.11.11.2.02.01	Pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik	Jumlah rekomendasi dari izin /persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Serang	40	rekomendasi	0	

		pengelolaan sampah yang di fasilitasi					
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta**	**Jumlah rekomendasi jasa pengelolaan sampah dan persentase penaatan pengelolaan sampah (jumlah jasa usaha sampah yang memiliki rekomendasi/izin dibagi jumlah jasa usaha sampah yang terdata x 100%) (%)**	**Kab. Serang**	**100**	**%**	**20.000.000**	APBD
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten/kota	Kab. Serang	12	Laporan	20.000.000	APBD

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disempurnakan berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dan berdasarkan analisa program kinerja tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan proses dinamis dan berkelanjutan dari siklus manajemen pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen rencana kerja ini hendaknya digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperbesar peluang keberhasilan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang diimplementasikan secara konsisten dalam penyusunan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Landasan awal untuk proses perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

Dalam rangka penyusunan rencana kerja ini sangat memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2025 kepada pihak-pihak yang terkait, baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang ikut berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Serang.

Serang, 02 Juli 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

H. PRAURI, S.H, S.Sos, M.Si
NIP. 19641226 199203 1 002

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM LINTAS PD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** telah dilaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG** yang di hadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan , mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi oleh Unsur Bappedalitbang dan Komisi 4
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Lintas PD terhadap materi yang di paparkan oleh masing-masing narasumber sebagaimana telah dirangkam menjadi hasil kesepakatan , maka pada :

   Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Pebruari 2024

   Jam : 08.00 Wib

   Tempat : Ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang

   Forum PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2024 :

   KESATU : Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja dan di sertai terget dan kebutuhan pendanaan , yang telah di selaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD di Kecamatan

   KEDUA : Rancangan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini

   KETIGA : Daftar usulan program dan kegiatan Lintas PD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

   KEEMPAT : Berita Acara Ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatua n dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara

   KELIMA : Berita Acara ini beserta Lampiranya di jadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025

Dipindai dengan CamScanner

...ikian berita acara ini kami buat dan di sahkan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20 Februari 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang

H. Prauri, SH, S.Sos, M.Si
NIP. 19641226 199203 1 002

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum PD Dinas Lingkungan Hidup Kab.Serang

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda tangan
1.	iman S	DLH		
2.	ARIF W	Bappeda lifbang		
3.	Ubaidillah	DKPP		
4.	Tati. Sukmawati	Kecamatan		
5.	Aep Soepudin	kecamatan		

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan samaun bakri telepon 0254 - 202521
SERANG 42112

Nomor : 500.14.2.1/8/DLH/2024 Serang, 16 Februari 2024
Lampiran :
Hal : Undangan Forum OPD

Yth. : (daftar terlampir)
di –
Tempat

Berkenaan dengan Surat Edaran Nomor. 01 tahun 2024, tanggal 16 Februari 2024, Perihal Pedoman dan jadwal penyelenggaran forum OPD Tahun 2024, bersama ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir dalam acaranya Forum Lintas PD penyusunan Rencana Kerja (Renja) TA. 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten serang pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 20 Februari 2024
Jam	: 09.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Serang Jl.Syama'un Bakri No.1 Serang -Banten
Acara	: Forum Lintas PD Penyusunan Renja TA. 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Serang
H. PRAURI, SH., S.Sos., M.Si.
NIP196412261992031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 500.14.2.1/8/DLH/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DIUNDANG

1.	Kepala DLH Kab. Serang	1 orang
2.	Komisi 4 DPRD Kab.Serang	1 orang
3.	Kepala Bappeda Kab.Serang	3 orang
4.	Kepala SatPolPP Kab.Serang	1 orang
5.	Kepala Dinas Pertanian	1 orang
6.	Kepala BPMPTSP Kab.Serang	1 orang
7.	Kepala DPUPR Kab.Serang	1 orang
8.	Kepala Dinas Perkim Kabupaten Serang	1 orang
9.	Kecamatan Kramatwatu	1 orang
10.	Kecamatan Waringin Kurung	1 orang
11.	Kecamatan Anyer	1 orang
12.	Kecamatan Ciruas	1 orang
13.	Kecamatan Kragilan	1 orang
14.	Kecamatan Pontang	1 orang
15.	Kecamatan Cikande	1 orang
16.	Kecamatan Ciomas	1 orang
17.	Kecamatan Padarincang	1 orang
18.	Kecamatan Cinangka	1 orang
19.	Kecamatan Baros	1 orang
20.	Kecamatan Tirtayasa	1 orang
21.	Kecamatan Kibin	1 orang
22.	Kecamatan Pabuaran	1 orang
23.	Kecamatan Tanara	1 orang
24.	Sekretaris DLH Kab. Serang	1 orang
25.	Kabid Perencanaan dan Penataan LH	1 orang
26.	Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penaatan LH	1 orang
27.	Kabid Pengendalian dan pemeliharaan LH	1 orang
28.	Kabid Persampahan dan Limbah B3	1 orang
29.	Kasubag Umum Kepegawaian	1 orang
30.	Analias Keuangan daerah dan pusat DLH	1 orang
31.	Kasubag Program dan Evaluasi DLH	1 orang
32.	Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda	3 orang
33.	Pengawas Lingkungan ahli muda	3 orang
34.	Penyuluh lingkungan ahli muda	3 orang
35.	Tehnis Penyehatan Lingkungan ahli muda	3 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

36.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH	1 orang
37.	Kasubag TU UPT Lab.Lingkungan DLH	1 orang
38.	Kepala UPT Persampahan DLH Kab.Serang	1 orang
39.	Kasubag TU UPT Persampahan DLH	1 orang
40.	Staf	6 orang
	Jumlah	55 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup
Pemimpin Rapat : Iman Saiman, S.Sos, M.Si
Peserta Rapat : Seluruh kabid, Kasi, Kasubag dan para undangan forum OPD
Agenda Rapat : Rapat Forum Renja OPD DLH 2025
Hasil Rapat :

- Isu strategis yang sedang dialami oleh DLH sekarang yaitu mengenai persampahan, yang mengakibatkan kabupaten serang mengalami darurat sampah.
- untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Kerjasama antar bidang di DLH dengan membuat SK Tim Zonasi Penanganan Sampah, para tim zonasi bermusyawarah dengan para camat setempat agar tau permasalahan apa saja yang dialami semua kecamatan, kemudian hasil dari monitoring tersebut dilaporkan ke Sekda untuk bahan evaluasi dan mencari Solusi Bersama.
- Anggaran tipping fee tahun 2025 direlokasikan untuk operasional di cigedong, untuk kebutuhan sarana dan prasarana operasional, dan biaya tenaga kerja.
- Wilayah kabupaten serang terdapat aliran Sungai yang melewati beberapa lokasi, maka diusulkan untuk mengikutsertakan pihak provinsi dalam pengelolaan air Sungai.
- Untuk kegiatan pada tahun 2025, jika ada keterlibatan dengan pihak lain diharapkan untuk berkolaborasi dengan baik dan efektif.
- Untuk pengelolaan taman Kehati diharapkan kelompok tani yang aktif ikut dilibatkan dalam pengelolaan taman kehati.
- Saran untuk tanaman di wilayah Puspemkab berjenis tanaman yang keras.

NOTULEN

INGGI DWI NOVIA, S.E.
NIP. 19961118 202012 2 008

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa , 20 februari 2024
Pukul : 08.00 wib sd selesai
Tempat : Ruang Rapat DLH Kab.Serang
Acara : Rapat Penysunan Renja 2025
Forum Lintas PD DLH Kab. Serang Tahun 2024

No	Nama	Bidang/Bagian	Tanda Tangan
1	Tap. Sukmawati	Kec Kramatwatu	
2	Tatang Sukaeler	DLH.	
3	Sukri	Kec. Kibasin	
4	Nawar	[illegible]	
5	LILI	Pematar	
6	JUMATRI	Kec Waringin	
7	Citra Iman M	PPKLH	
8	Agus [illegible]	PPLH	
9	Mimi	PPLH.	
10	Siti Mawaddah	AF	
11	YUSRI	Perikanan	
12	DANI RAMDANI	Pertanahan	
13	Ubaidillah	BKPP	
14	Elis Nisa	Bappedalitbang	
15	ARIF W	Bappeda Litbang	
16	SAHIDI	Bappeda Litbang	
17	Jamhari	PPLH	
18	Taharina	Umpeg	
19	Jas Jas S	Kec. Pamum.	
20	Ratu Yeti D	Kec. Kragilan	
21	Heti	UPT Pemampahan	
22	Istiarah	—	

Dipindai dengan CamScanner

23	Supian	Ar Barung	
24	Endis S	Kec. Cimanggis	
25	Arudin. S	Kec. Tanera	
26	Rosti	KEC. TANDR.	
27	Sudirman	Kec. Pontang	
28	Aep Saepudin	Kec. Ur. Kulung	
29	Tubi Guntara	Kec. Boros	
30	M. Camp	Ca. Anyar	
31	Rachmat Maulana	Kepala Bappeda	
32	Tri R	Kec	
33	Madmuji	Kec. Cerma	
34	Puesal	Lab. DLH	
35	Wiwi	Kecamatan	
36	Anindita	Kec	
37	Pep	PEP	
38	Inggi Dwi N	PEP	
39	Heru R8	DLH	
40	Diki. Dzulkifli	DLH	
41	Yogi	—	
42	Indra	DLH	
43	Yuni Jayani	PEP	
44	Kengas	DLH	
45	Iis Sugiarti	DLH	
46	Eha. R	DLH	
47	Yan	DLH	
48	Pepsi	DLH	
49	Ina Hajinah	DLH	
50	Mudik	DLH	

Dipindai dengan CamScanner

51	Endah	UPT	Endah
52	Depi	UPT	Depi
53	DESTA	UPT	Desta
54	Muas	pengend. pemel.	[illegible]
55	Didin Kuslain	UPT Lab DLH	[illegible]
56	Deni Herdiana	Pengend. pemel.	[illegible]
57	OMA SUWANDA	persamp & limbah	[illegible]
58	Mas Budi Haryono	"	[illegible]
59	Riantio	PPLH	Riantio
60	Assyifa	"	Assyifa

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

GOLIKETRIK.COM

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Empat Lima No.28 Kota Serang – Banten

@dkbpppa_serang

dkbpppa@serangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan kerja OPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa di setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan untuk jangka panjang 20 (*dua puluh*) tahun, jangka menengah 5 (*lima*) tahun, dan jangka pendek 1 (*satu*) tahun. Di tingkat OPD, rencana tahunan ini di sebut dengan RENJA OPD. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sistem perencanaan berkelanjutan yang dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Untuk itu perencanaan tingkat awal disusun untuk memudahkan perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan Renja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah, dengan mendorong partisipasi masyarakat selama satu tahun anggaran. Tahun 2025 adalah tahun Keempat pelaksanaan RPJMD Peralihan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan pada tahun 2025 merupakan program dan kegiatan baru yang disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

Dalam penyelesaian penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2025, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa bahan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan laporan penilaian kinerja dinas yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Kami menyadari, Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami menghargai semua saran dan masukan serta kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Serang, 03 Juli 2024

Kepala DKBPPPA Kab. Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Hj. ENCUP SUPLIKAH,SKM,.MM.Kes
NIP. 196804301988032003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL …….…….. **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum…..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …….. 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 33

2.5 Penelaahan Usulan Program danKegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG **50**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……. 50

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah …….. 52

3.3 Program dan Kegiatan ……..... 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **66**

BAB V PENUTUP **79**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA DKBPPPA Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
TABEL	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DKBPPPA
TABEL	2.3	Review Terhadap RKPD Tahun 2025
TABEL	2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
TABEL	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026
TABEL	3.2	Rencana Program dan Kegiatan DKBPPPA Kab. Serang Tahun 2025
TABEL	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DKBPPPA Kab. Serang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Secara umum keberadaan OPD dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tertentu untuk melayani masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Seperti halnya DKBPPPA yang secara spesifik menyelenggarakan urusan pada bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang urusan tersebut meliputi Pengendalian Penduduk, Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak.

Sebagai bagian dari keseluruhan perangkat struktur organisasi pemerintahan pada tingkat Pemerintahan Daerah dengan spesifikasi fungsi, tugas dan wewenang tersendiri, keberadaan DKBPPPA merupakan salah satu sub sistem penyelenggara urusan pemerintahan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun mengenai kebijakan, program,kegiatan, sasaran, target dan indicator merupakan suatu keharusan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan program pembangunan. Pada prinsipnya Renja DKBPPPA merupakan derivasi Rencana Stategis DKBPPPA Kabupaten Serang yang harus diadaptasi setiap tahun sesuai dengan indikator capaian dan perkembangan kebutuhan lingkungan sosial pembangunan daerah.

Rencana Kerja DKBPPPA selanjutnya dibahas dalam forum OPD untuk sinkronisasi, sinergitas dan kolaborasi program antara OPD yang akan ditetapkan dalam RKPD sebagai keseluruhan dalam sistem perencanan pembangunan nasional. Dokumen Renja DKBPPPA merupakan rangkaian Dokumen Perencanaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan untuk jangka panjang 20 (*Dua Puluh*) tahun, jangka menengah 5 (*Lima*) tahun, dan jangka pendek 1 (*Satu*) tahun.

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan OPD untuk 1 (*Satu*) tahun anggaran Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dan dokumen lainnya yang ada diatasnya.

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keterkaitan Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang dengan Dokumen lainnya sebagai berikut Penyusunan RENJA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2025 berpedoman pada RENSTRA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan Penyusunan RENJA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang mengacu pada Rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;

21. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 90 Tahun 2022, perubahan atas Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang;
22. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis atas Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis OPD Kab. Serang Tahun 2021-2026.
23. Rencana Strategis Dinas Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
24. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2025, adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi DKBPPPA dalam menjalankan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun yang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada dinas, sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menjabarkan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi OPD untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil analisis dari kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN .....
- 1.1 Latar Belakang .....
- 1.2 Landasan Hukum….....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …….
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah……...
3.3 Program dan Kegiatan …….....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP .....

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKBPPPA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra 2021-2026

Evaluasi pada dasarnya adalah kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam konteks menejemen organisasi, Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula cara membandingkan antara output dan input kegiatan, baik untuk rencana maupun realisasi dalam pencapaian kinerja di tahun sebelumnya. Pada dasarnya, Pelaksanaan kegiatan DKBPPPA Kabupaten Serang Tahun 2023 cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari rencana kegiatan dengan pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Realisasi kinerja kegiatan DKBPPPA tahun 2023 menunjukan hasil kinerja kegiatan sebagai berikut:

Pada Tahun 2023 DKBPPPA Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 30.445.613.080.- terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 29.934.370.980.- dan belanja modal sebesar Rp. 511.242.100,-. Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKBPPPA pada Tahun 2023 sebesar Rp. 28.772.197.395.- (94,50%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 28.322.672.344 (80%) dan belanja modal sebesar Rp. 449.525.051 (86%).

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2023
KABUPATEN SERANG

Nama Perangkat Daerah: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA)

KODE					URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT COME PROGRAM DAN OUT PUT KEGIATAN)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DKBPPPA Th.2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DKBPPPA Th.2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th.2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th.2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th.2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th.2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					URUSAN UMUM									
2	14	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**								
2	14	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja OPD**								
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**7 dok**	4 dok	1 dok	1 dok	**100%**	1 dok	5 dok	71%

					Daerah									
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6 dok%**	1 dok	1 dok	1 dok	**100%**	1 dok	3 dok	50%
2	14	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD**								
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**270 Orang**	84 Orang	42 Orang	42 Orang	100%	43 Orang	126 Orang	**47%**
2	14	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**6 Paket**	**2 Paket**	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	4 Paket	**67%**
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**6 Paket**	**1 Paket**	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	3 Paket	**50%**
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**6 Paket**	**2 Paket**	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	4 Paket	**67%**
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**6 Paket**	**2 Paket**	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	4 Paket	**67%**
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**6 dok**	**2 dok%**	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**

2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya Jasa Penunjang Urusan dkbpppa Kab. Serang**								
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa pramubakti dan pengemudi	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DKBPPPA Kab. Serang**								
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas perasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**1080 Unit**	360 Unit	180 Unit	180 Unit	**100%**	180 Unit	540 Unit	**50%**
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**330 Unit**	110 Unit	55 Unit	55 Unit	**100%**	55 Unit	220 Unit	**67%**

2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	**6 Unit**	2 Unit	1 Unit	1 Unit	**100%**	1 Unit	4 Unit	**67%**
2	14	1	2.09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**6 Unit**	2 Unit	1 Unit	1 Unit	**100%**	1 Unit	4 Unit	**67%**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	8				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2	8	2			**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Presentase perangkat daerah yang melaksanak an PPRG**								
2	8	2	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentasi Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								

2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssukPPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	**174 OPD**	58 dok	29 OPD	29 OPD	**100%**	29 OPD	116 dok	**67%**
2	8	2	2.03		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		-	-	-		-	-	
2	8	2	2.03	1	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	**6 Lembaga**	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	**100%**	1 Lembaga	4 Lembaga	**67%**

2	8	2	2.03	2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	**1200 Orang**	400 Orang	200 Orang	200 Orang	**100%**	200 Orang	800 Orang	**67%**
2	8	3			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai**								
2	8	3	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**	**Jumlah Kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**								
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	3	2.01	2	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**145 OPD**	58 OPD	18 OPD	18 OPD	**100%**	29 OPD	105	**72%**
2	8	4			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS**								

2	8	4	2.02		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilyah kerjanya dalam daerah kab/kota**	**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
2	8	4	2.02	3	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	5			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak**								
2	8	5	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Cakupan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**								
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	6			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang akti**								

2	8	6	2.01		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	6	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**								
2	8	6	2.02	1	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**174 Orang**	58 Orang	29 Orang	29 Orang	**100%**	29 Orang	116 Orang	**67%**
2	8	6	2.02	4	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	8	7			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS**	**Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan**								

					ANAK	**selesai**								
2	8	7	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat kabupaten/Kota**								
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1200 Orang**	400 Orang	200 Orang	200 Orang	**100%**	200 Orang	800 Orang	**67%**
2	8	7	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**								
2	8	7	2.03	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**									

					KELUARGA BERENCANA									
2	14	2			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga**								
2	14	2	2.01		**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/ota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk**	**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk**								
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	14	2	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**

2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	**6 Laporan**		1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	2 Laporan	**33%**
2	14	2	2.02	13	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	**6 Laporan**	-	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	2 Laporan	**33%**
2	14	2	2.02	8	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	**6 Unit**	2 Unit	1 Unit	1 Unit	**100%**	1 Unit	4 Unit	**67%**
2	14	3			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)**								
2	14	3	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**

2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	14	3	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**

2	14	3	2.01	14	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	**6 Organisasi**	2 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	**100%**	1 Organisasi	4 Organisasi	**67%**
2	14	3	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	**10662 Orang**	3554 Orang	1777 Orang	1777 Orang	**100%**	1781 Orang	7112 Orang	**67%**
2	14	3	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	**6 Organisasi**	2 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	**100%**	1 Organisasi	4 Organisasi	**67%**

2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	3	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**								
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**6 Laporan**	**2 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**28722 Orang**	9574 Orang	4787 Orang	4787 Orang	**100%**	4787 Orang	21488 Orang	**75%**
	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	**6 Unit**	1 Unit	1 Unit	1 Unit	**100%**	0	2 Unit	**33%**

2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	**50 Orang**	50 Orang	50 Orang	0	**0%**	50 Orang	35 Orang	**70%**
	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**6 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	3 Laporan	**50%**
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	**6 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	3 Laporan	**50%**
2	14	3	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan KesertaanBer-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan er-KB	**6 Organisasi**	2 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	**100%**	1 Organisasi	4 Organisasi	**67%**

2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	**6 dok**	2 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	4 dok	**67%**
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	**213 Kampung KB**	-	52 Kampung KB	52 Kampung KB	**100%**	52 Kampung KB	104 Kampung KB	**49%**
2	14	4			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB**								
2	14	4	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**								
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**150 Unit**	45 Unit	30 Unit	30 Unit	**100%**	25 Unit	100 Unit	**67%**
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan	**11250 Orang**	-	3750 Orang	3750 Orang		0	0	**33%**

					dan pelaksana (kader) ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**51 Kelompok**	-	51 Kelompok	51 Kelompok	**100%**	0	0	**100%**
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**6 Laporan**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	1 Laporan	4 Laporan	**67%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/kegiatan, dan sekaligus merupakan alat ukur yang sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja suatu lembaga/dinas dan lainnya.

Pengukuran Kinerja dan Evaluasi terhadap Kegiatan, Program dan Kebijakan serta pembobotan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang pada Tahun 2023 dapat dikategorikan rata-rata baik.

Penyelenggaraan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Indikator Kinerja urusan sebagaimana tersebut dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 serta Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang 2021-2026 adalah Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang merupakan hasil penjabaran dari Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serang Tahun 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 yang penyusunannya berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 seperti tertuang dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Dari visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis, dengan beberapa indikator kinerjanya masing-masing.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Analisa Pencapaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang dilaksanakan melalui dua urusan yaitu:

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG RENSTRA TH. 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN				REALISASI TAHUN		PROYEKSI TAHUN		CATATAN ANALISIS
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,24	2,21	2,19	2,1	2,18	2,21	2,19	2,1	Realisasi Kinerja tercapai sesuai target
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,10	92,14	92,18	92,20	91,98	92,14	92,18	92,20	Realisasi Kinerja tercapai sesuai target
3	Presentasi Penangan Kasus Kekerasan perempuan dan anak serta traficking	%	60	65	70	75	39,86	65	70	75	Realisasi Kinerja tercapai sesuai target

b. Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2023.

Perbandingan Pencapaian Kinerja 2022 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				2022	2023
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,24%	2,15	2,18
2.	Meningkatnya kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,10%	91,98	91,98
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Presentase Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta Traficking	60%	39,85	100

Perbandingan Pencapaian Kinerja Akhir Periode Renstra

Perbandingan Pencapaian Kinerja Akhir Periode Renstra pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel Berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	REALISASI s/d 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,24%	2,18%	105,11%
2.	Meningkatnya kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,10%	91,98%	99,91%
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Presentase Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta Traficking	60%	100%	72,47%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional Target Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2021. Target *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semua metode 62,16%, menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani/Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur (persen) 10,79 tahun 2022, menurunnya TFR dari 2,15 pada tahun 2022.

Adapun realiasi CPR pemerintah Kabupaten Serang sudah diatas rata-rata target nasional yaitu sampai 2022, sementara capaian pemerintah Kabupaten Serang sudah mencapai 72,35% atau tercapai 116,40%.

Capaian Unmeetneed dari **target 10 %** tercapai **10,79 % atau 89.13%**

Unmeetneed : 14.138 +15.655 (PUS IAT+PUS TIAL) = 10.79 %
276.093 (TOTAL PUS)

Capaian penurunan unmeetneed Tahun 2022 ini terjadi penurunan unmeetneed sebesar 89,13% dimana unmeetneed tercapai 10.79**%** dari target 2021 sebesar 10 %

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi factor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang.

Faktor–faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kerja dan factor lain yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam memecahkan masalah pelayanan SKPD dalam pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraaan urusan pemerintahan.

Di bab ini diuraikan permasalahan krusial layanan dasar SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target dalam RPJMD 2016-2021.

Permasalahan yang akan diuraikan adalah untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Adapun metode penentuan isu-isu stretegis DKBP3A Kabupaten Serang, yaitu:

1. Metode interaksi antara factor strategis dengan factor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi atar factor strengths dengan factor threaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi atar factor weaknesses dengan factor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara factor weaknesses dengan factor threaths dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibagi menjadi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Urusan keluarga berencana dan pengendalian penduduk

1. Masih rendahnya peserta KB MKJP disebabkan PUS masih memilih metode KB NMKJP
2. Masih minimnya jaminan perlindungan KB terhadap kegagalan dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi
3. Masih rendahnya partisipasi KB Pria
4. Masih minimnya kader poktan yang berkualitas dan terlatih
5. Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Kampung KB
6. Masih rendahnya kualitas KB dan sub Pos KB
7. Belum optimalnya Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dalam memasyarakatkan Program Bangga Kencana untuk menjaring partisipasi dan peran serta masyarakat

8. kurangnya jumlah PKB/PLKB PNS dan Non PNS dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di wilayah kabupaten Serang (1 PLKB Non PNS akan membina sebanyak 4- 5 desa)
9. Masih minimnya pembentukan dan pemenuhan dukungan sarana prasarana rumah data
10. Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan Grand Desain Kependudukan Kabupaten Serang

c. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Masih minimnya peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan
2) Belum optimalnya Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dalam mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender
3) Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD
4) Penguatan sistem data gender dan anakPenguatan sistem data gender dan anak
5) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan

d. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak:

1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Belum terpenuhinya Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak (rumah singgah, gedung UPT PPA)
3) Masih minimnya SDM Perlindungan Perempuan dan anak
4) Belum optimalnya Penguatan Gugus Tugas TPPO
5) Masih lemahnya peran Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6) Belum optimalnya Lembaga Perlindungan perempuan dan Anak tingkat Kecamatan dan desa (PATBM , PUSPAGA)
7) belum optimalnya pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
8) Belum optimalnya pembinaan Kelembagaan Forum Anak

e. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal

Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang
2. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
3. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi darurat menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
5. Hambatan ketersediaan data anak dan gender yang terpilah dalam rangka peningkatan kesetaraan gender
6. Peningkatan Komitmen masyarakat,dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi dalam rangka pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
2. Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemenuhan dan perlindungan khusus anak
3. Potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan, kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya
4. Adanya dukungan kebijakan dalam optimalisasi ketersediaan data gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak
5. Potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan perguruantinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengarusutamaan gender dan anak
6. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DKBPPPA Kabupaten Serang

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA KABUAPETN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA , BERKEADILAN DAN AGAMIS				
No.	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	Misi 4 : ***Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenagakerja dan penanggulangan kemiskinan*** dalam rangka mencapai **Visi** "*TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS*".	• Pelayanankesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah. • Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai. • Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai. • Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dankesejahteraan	▪Pemahaman sebagian mayarakat terhadap program Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak masih kurang Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat terbesar dalam pelayanan DKBPPPA dimasa mendatang. Beberapa upaya perlu segera dilakukan sehingga merubah pemahaman	▪Adanya komitmen Kepala Daerah terhadap permasalahan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab.Serang . Kondisi tersebut merupakan faktor pendorong yang besar bagi penyelesaian permasalahan pelayanan dimasa mendatang. Dengan

	Program : 1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pemenuhan Hak Anak 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	keluarga tidak optimal. • Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas. • Terbatasnya akses sumber daya danperan serta perempuan dalam pembangunan • Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan. • Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dananak. • Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan	masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program DKBPPPA. ▪Kuantitas dan kualitas aparatur masih kurang dalam menyeleng garakan pelayanan prima. Kondisi ini juga merupakan faktor penghambat dari pelayanan di lingkungan DKBPPPA. Dengan kurangnya kuantitas dan kualitas personil yang menyelenggarakan pelayanan dapat menyebabkan kurang optimalnya pencapaian target kinerja dll. ▪Politik anggaran atas urusan wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan	adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan masukan yang relatif besar akan dapat dipenuhi atau membutuh kan koordinasi dan kerjasama dengan inter atau lintas sektor lebih mudah dilaksanakan. ▪Dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat Kondisi ini juga merupakan faktor pendorong penyelesaian permasalahan pelayanan yang akan dihadapi DKBPPPA seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya ketaatan thd per aturan perundang-undangan,

	10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal. • Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya OPD dalam penyusunan PPRG	Perlindungan anak masih kurang mendukung.	kerjasama dll.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan system pengganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), maka dokumen Rencana Kerja (Renja) dilengkapi dengan indicator kinerja utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Berdasarkan analisa kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Serang, serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026, Secara ringkas subtansi Renja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penyelenggara 2 (dua) urusan wajib non urusan, yaitu Urusan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang menetapkan Misi yang dilaksanakan secara berkesinambungan yaitu :

"MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDAYA".

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2026

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL;
2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDAYA;
3. PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN DASAR;
4. PENINGKATAN KUALITAS, PEMERATAAN DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN
5. PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN RUANG, PERMUKIMAN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA
6. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang pada RKPD tahun 2025 sudah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang

dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Secara rinci berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan juga analisis kebutuhan pagu anggaran tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DKBPPPA KABUPATEN SERANG

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN UMUM				**9.905.920.000**	**URUSAN UMUM**				**10.527.086.560**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**		**9.905.920.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**10.527.086.560**	
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD**		**60.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100.000.000**	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DKBPPPA**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DKBPPPA**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	50.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DKBPPPA**	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD**		**8.210.620.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8.170.166.560**	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**DKBPPPA**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	8.210.620.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**DKBPPPA**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	8.170.166.560	Memenuhi Gaji & Tunjangan ASN

03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**370.300.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**577.000.000**	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**DKBPPPA**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**DKBPPPA**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000.000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**DKBPPPA**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**DKBPPPA**	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**DKBPPPA**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**DKBPPPA**	tersedianya Alat Tulis Kantor DKBPPPA, UPT dan Balai Penyuluh KB	1 Paket	55.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**DKBPPPA**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**DKBPPPA**	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**DKBPPPA**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**DKBPPPA**	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Dokumen	18.000.000	
9	Fasilitasi kunjungan tamu	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	**DKBPPPA**	tersedianya makan minum tamu	1 Laporan	12.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	241.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DKBPPPA**	Tersedianya makan dan minum DKBPPPA , terselengaranya Kegiatan Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	1 Laporan	400.000.000	-
04	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan dkbpppa Kab. Serang**		**930.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.249.920.000**	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	310.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**DKBPPPA**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	543.000.000	

12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa pramubakti dan pengemudi	4 Laporan	620.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**DKBPPPA**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	706.920.000	-
05	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DKBPPPA Kab. Serang**		**335.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**430.000.000**	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**DKBPPPA**	Jumlah Kendaraan Dinas perasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	230.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**DKBPPPA**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110 Unit	300.000.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**DKBPPPA**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**DKBPPPA**	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55 Unit	65.000.000	
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**DKBPPPA**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**DKBPPPA**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	32.500.000	
16	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	**DKBPPPA**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	**DKBPPPA**	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	32.500.000	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**1.478.419.050**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.478.479.050**	-

II	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai**		**110.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**110.000.000**	**-**
06	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**		**Jumlah Kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**		**110.000.000**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**				**110.000.000**	**-**
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000	
18	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**kecamatan**	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Kecamatan	55.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**Kecamatan**	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Kecamatan	55.000.000	
III	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif**		**290.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**290.000.000**	**-**
07	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**		**Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**45.000.000**	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**				**45.000.000**	

19	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	**Kecamatan**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	**Kecamatan**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000	
08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**		**245.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**245.000.000**	-
20	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	**DKBPPPA**	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	200.000.000	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	**DKBPPPA**	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	200.000.000	-
21	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	**DKBPPPA**	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	**DKBPPPA**	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000	
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai**		**454.700.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**454.760.000**	
09	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat kabupaten/Kota**		**404.700.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**404.760.000**	

22	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**UPT PPA**	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	404.700.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**UPT PPA**	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	404.760.000	Pemenuhan Honor Non PNS UPT PPA
10	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**		**50.000.000**	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**50.000.000**	
23	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	**Kecamatan**	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	50.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	**Kecamatan**	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	1 kegiatan	50.000.000	
V	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Presentase perangkat daerah yang melaksanak an PPRG**		**540.000.000**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**540.000.000**	**-**
11	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentasi Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**90.000.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**90.000.000**	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	**OPD , kecamatan**	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan	**OPD , kecamatan**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	1 Dokumen	30.000.000	

	Pelaksanaan PUG		Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			PUG		Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	**OPD , kecamatan**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	**OPD , kecamatan**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	30.000.000	-
26	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	**OPD , kecamatan**	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	29 OPD	30.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	**OPD , kecamatan**	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	29 OPD	30.000.000	
12	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**		**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**450.000.000**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**				**450.000.000**	-
27	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**kecamatan , RS, Perusahaan**	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	45.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**kecamatan , RS, Perusahaan**	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	45.000.000	

28	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**DWP Kabupaten**	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	405.000.000	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	**DWP Kabupaten**	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	405.000.000	Fasilitasi DWP dan GOW
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak**		**10.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**10.000.000**	
13	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**		**Cakupan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**		**10.000.000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**				**10.000.000**	**-**
29	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	**OPD**	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	29 OPD	10.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	**OPD**	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	29 OPD	10.000.000	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS**		**73.719.050**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**73.719.050**	**-**

14	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilyah kerjanya dalam daerah kab/kota**		**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**73.719.050**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilyah kerjanya dalam daerah kab/kota**				**73.719.050**	
30	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk kab/kota	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	73.719.050	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk kab/kota	Kecamatan	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73.719.050	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**4.200.952.650**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.049.000.000**	
VIII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga**		**155.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**115.000.000**	**-**
15	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk**		**85.000.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**55.000.000**	
31	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	**DKBPPPA**	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	40.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	**DKBPPPA**	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	30.000.000	**-**

32	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	**kecamatan**	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	1 Rumah Data	45.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	**Kecamatan**	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	1 Rumah Data	25.000.000	
16	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/ota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk**		**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk**		**70.000.000**	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/ota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk**				**60.000.000**	
33	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	**Kecamatan**	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	Penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	
IX	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**		**Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)**		**3.950.952.650**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**				**3.879.000.000**	

17	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**346.647.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**350.000.000**	
34	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	**Balai Penyuluh KB**	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	296.650.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	**Balai Penyuluh KB**	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		300.000.000	**Pemenuhan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KB**
35	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Kecamatan**	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	49.997.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Kecamatan**	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	50.000.000	
18	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**84.999.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**65.000.000**	

36	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**kecamatan**	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	34.999.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Kecamatan**	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	35.000.000	
37	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di KampungKB	**DKBPPPA**	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	50.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di KampungKB	**DKBPPPA**	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	30.000.000	-
19	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**3.239.206.600**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**3.194.000.000**	
38	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	**kecamatan**	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1.351.331.600	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	**Kecamatan**	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1.350.000.000	Pagu Prioritas digunakan untuk honor tenaga lapangan dan kader (2 sub kegiatan)

39	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	**Kecamatan**	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	I Laporan	35.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	**Kecamatan**	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	I Laporan	35.000.000	
40	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	**orang**	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1781	1.852.875.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	**Orang**	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1781	1.809.000.000	Honor Kader tidak mencukupi untuk 12 Bulan
20	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**		**280.100.050**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**				**270.000.000**	**-**
41	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**DKBPPPA**	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	30.463.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**DKBPPPA**	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	35.000.000	

42	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**Akseptor**	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	300	149.537.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**Akseptor**	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	300	135.000.000	
43	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	**Kecamatan**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 Orang	35.100.050	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	**Kecamatan**	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 Orang	35.000.000	-
44	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	**Daerah Galcitas**	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	65.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	**Daerah Galcitas**	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	65.000.000	-
X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB**		**95.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**55.000.000**	
21	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**		**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**95.000.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**				**55.000.000**	
45	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**laporan**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**Laporan**	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	25.000.000	-

46	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**kecamatan**	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	45.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Kecamatan**	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	30.000.000	
					15.585.291.700					**16.054.565.610**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Serang.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Serang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Sosialisasi Konseling Remaja	Kecamatan Tunjung Teja	Terselenggaranya Sosialisasi Konseling Remaja	40 Orang	Bisa Terakomodir
2	Sosialisasi Bullying dan Perundungan Anak	Kecamatan Tunjung Teja	Terselenggaranya Sosialisasi Bullying dan Perundungan Anak	40 Orang	Bisa Terakomodir
3	Sosialisasi Stunting dan Pernikahan Dini	Kecamatan Tunjung Teja	Terselenggaranya Sosialisasi Stunting dan Pernikahan Dini	40 Orang	Bisa Terakomodir
4	Intensitas Sosialisasi UPT PPA ke Tiap Desa	Kecamatan Tunjung Teja	Terselenggaranya Intensitas Sosialisasi UPT PPA ke Tiap Desa	40 Orang	Bisa Terakomodir
5	Pembentukan Kampung KB oleh Desa yang belum dibentuk	Desa Panunggulan, Tunjung Teja, Kemuning, Malanggah, Bojong Catang, Bojong Pandan, Bojong Menteng, Pancaregang	Terbentuknya Kampung KB yang belum dibentuk	8 Desa	Bisa Terakomodir (Pembinaan Kampung KB)
6	Pelayanan KB MKJP	Kecamatan Tunjung Teja	Tereselenggaranya Pelayanan KB MKJP	100 Orang	Bisa Terakomodir

Dari beberapa usulan Musrenbang diatas, fokus lokasi berada di Kecamatan Tunjung Teja, dan kegiatan yang telah diusulkan bisa terakomodir oleh bidang pengampu di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan nasional bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut ;

1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan karaktersejak dini melalui keluarga
3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga dengan sasaaran khusus keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOW dan MOP serta peserta KB mandiri di wilayah kampung KB
5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan
6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7dimensi lansiatangguh dan pendampingan perawatan jangka panjangbagi lansia
7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
8. Pengembangan Grand design pembangunan kependudukan (GDPK)
9. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
11. Peningkatan sinkronisas dan pemanfaatan data.informasi kependudukan
12. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
13. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
14. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus
15. Peningkatan KB pria
16. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB pasca persalinan (KBPP)
17. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber KB
18. Peningkatan penyebarluasan materi KIE program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan sementasi sasaran dan wilayah
19. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB /PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/sub PPKBD
20. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi program bangga kencana berbasis teknologi /smart program untuk pengelolaan program bangga kencana

Adapun prioritas nasional bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Peningkatan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PP PA;
4. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO;
5. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak;

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DKBPPPA Kabupaten Serang Tahun 2025

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai yang rumusannya harus dapat menunjukkan kondisi yang hendak dicapai di masa datang. DKBPPPA seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun memiliki orientasi pada upaya "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat"

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Menurunnya angka kelahiran total
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DKBPPPA KABUPATEN SERANG

TAHUN 2021–2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN AWAL (2020)	TARGET PENCAPAIAN TAHUN (2021-2026)					Target Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,29	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,14	92,02	92,06	92,10	92,14	92,18	92,22
		Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaikan	56,17%	50%	55%	60	65	70	75

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Visi dan Misi daerah tahun 2021-2021. Visi dan Misi dimaksud merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap penyusunan rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Dinas KBPPPA mempunyai peran didalam mewujudkan misi ke 2, 4 dan ke 5 yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional, Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penaggulangan kemiskinan. Serta meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten dan profesional.

TABEL 3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

NO	URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENANGGUNG JAWAB
A.	**URUSAN UMUM**			
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			
		1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT
		1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEKRETARIAT
		2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SEKRETARIAT
		2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	SEKRETARIAT
		3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
		3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEKRETARIAT
		3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT
		3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SEKRETARIAT
		3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SEKRETARIAT
		3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT
		3.6	Fasilitasi kunjungan tamu	SEKRETARIAT
		3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEKRETARIAT
		4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
		4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEKRETARIAT
		4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEKRETARIAT

		5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
		5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEKRETARIAT
		5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEKRETARIAT
		5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SEKRETARIAT
		5.4	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	SEKRETARIAT
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
II.	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			
		1	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**	
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BIDANG PPA
		1.2	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota	BIDANG PPA
III.	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			
		1	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**	

		1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	BIDANG PPA
		2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	
		2.1	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	BIDANG PPA
		2.2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	BIDANG PPA
IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			
		1	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
		1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPTD PPA
		1.2	peguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	BIDANG PPA
V.	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			
		1	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	
		1.1	sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	BIDANG PPUG
		1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	BIDANG PPUG
		1.3	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssukPPRG	BIDANG PPUG

		2	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	
		2.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	BIDANG PPUG
		2.2	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	BIDANG PPUG
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			
		1	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	
		1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di KewenanganKabupaten/Kota	BIDANG PPUG
VII.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			
		1	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilyah kerjanya dalam daerah kab/kota**	
		1.1	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk kab/kota	BIDANG PPUG
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
VIII.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			
		1	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
		1.1	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	BIDANG P4

			PelayananKB	
		1.2	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	BIDANG P4
		2	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/ota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk**	
		2.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	BIDANG P4
		3	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	
		3.1	sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	BIDANG P4
		3.2	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	UPTD KB
IX.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**			
		1	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	
		1.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di KampungKB	BIDANG P4
		2	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	
		2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan olehPKB/PLKB	
		2.2	Penguatan pelaksanaan penyuluhan , penggerakan , pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas KB/ PLKB	
		2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	
		3	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	

			Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
		3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	BIDANG KB
		3.2	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	BIDANG KB
		3.3	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	BIDANG KB
		3.4	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	BIDANG KB
		4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	
		4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan KesertaanBer-KB	BIDANG KB
X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			
		1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**	
		1.1	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	BIDANG KB

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Serang diharapkan dapat mendukung keberhasilan dari Program Unggulan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DKBPPPA KABUPATEN SERANG

Indikator Program dan Kegiatan Rencana Pendanaan Satuan Kerja DKBPPPA Kabupaten Serang pada Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Pada bab sebelumnya telah dibahas, bahwa program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, diantaranya terdiri dari 10 (sepuluh) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan rencana pendanaan sebesar Rp. 15.585.291.700,- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Adapun rumusan rencana program dan kegiatan dimaksud secara rinci dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT COME PROGRAM DAN OUT PUT KEGIATAN)	RENCANA TAHUN 2025		Sumber Dana	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
	URUSAN UMUM			**9,905,920,000**				**10,527,086,560**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**		**9,905,920,000**				**10,527,086,560**
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD**		**60,000,000**				**100,000,000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30,000,000	APBD KAB SERANG		2 dokumen	50,000,000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	50,000,000
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD**		**8,210,620,000**				**8,170,166,560**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	8,210,620,000	APBD KAB SERANG		45 Orang	8,170,166,560
03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**370,300,000**				**577,000,000**
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	APBD KAB SERANG		1 Paket	12,000,000

5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Paket	50,000,000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	APBD KAB SERANG		1 Paket	55,000,000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	APBD KAB SERANG		1 Paket	30,000,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	18,000,000
9	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	12,000,000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	241,300,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	400,000,000
04	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**930,000,000**				**1,249,920,000**
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	310,000,000	APBD KAB SERANG		4 Laporan	543,000,000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa pramubakti dan pengemudi	4 Laporan	620,000,000	APBD KAB SERANG		4 Laporan	706,920,000
05	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**335,000,000**	APBD KAB SERANG			**430,000,000**
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas perasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	230,000,000	APBD KAB SERANG		110 Unit	300,000,000

14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	45,000,000	APBD KAB SERANG		55 Unit	65,000,000
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Unit	32,500,000
16	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Unit	32,500,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**1,478,419,050**	APBD KAB SERANG			**1,478,479,050**
II	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai**		**110,000,000**				**110,000,000**
06	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten /kota**	**Jumlah Kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**		**110,000,000**				**110,000,000**
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55,000,000			1 Dokumen	55,000,000
18	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Kecamatan	55,000,000	APBD KAB SERANG		29 Kecamatan	55,000,000
III	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif**		**290,000,000**				**290,000,000**

07	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**45,000,000**				**45,000,000**
19	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	45,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	45,000,000
08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**		**245,000,000**				**245,000,000**
20	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	200,000,000	APBD KAB SERANG		290 Orang	200,000,000
21	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	45,000,000
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai**		**454,700,000**				**454,760,000**
09	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat kabupaten/Kota**		**404,700,000**				**404,760,000**
22	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	404,700,000	APBD KAB SERANG		200 Orang	404,760,000
10	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota**		**50,000,000**				**50,000,000**

23	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	50,000,000	APBD KAB SERANG		1 kegiatan	50,000,000
V	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG**		**540,000,000**				**540,000,000**
11	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentasi Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**90,000,000**				**90,000,000**
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	30,000,000
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	30,000,000
26	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	29 OPD	30,000,000	APBD KAB SERANG		29 OPD	30,000,000
12	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**450,000,000**				**450,000,000**
27	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	45,000,000	APBD KAB SERANG		3 Lembaga	45,000,000

28	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	405,000,000	APBD KAB SERANG		200 Orang	405,000,000
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak**		**10,000,000**				**10,000,000**
13	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Cakupan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**		**10,000,000**				**10,000,000**
29	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	29 OPD	10,000,000	APBD KAB SERANG		29 OPD	10,000,000
VII	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS**		**73,719,050**				**73,719,050**
14	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilyah kerjanya dalam daerah kab/kota**	**Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**73,719,050**				**73,719,050**
30	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	73,719,050	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	73,719,050
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**4,200,952,650**	APBD KAB SERANG			**4,049,000,000**
VIII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga**		**155,000,000**				**115,000,000**

15	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk**		**85,000,000**				**55,000,000**
31	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	40,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	30,000,000
32	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	1 Rumah Data	45,000,000	APBD KAB SERANG		1 Rumah Data	25,000,000
16	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kab/ota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk**	**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk**		**70,000,000**				**60,000,000**
33	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	60,000,000
IX	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR)**		**3,950,952,650**				**3,879,000,000**
17	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**346,647,000**				**350,000,000**
34	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	296,650,000			1 Laporan	300,000,000

35	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	49,997,000			1 Dokumen	50,000,000
18	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**84,999,000**				**65,000,000**
36	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	34,999,000	APBD KAB SERANG		1 Organisasi	35,000,000
37	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	50,000,000	APBD KAB SERANG		1 Dokumen	30,000,000
19	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**3,239,206,600**				**3,194,000,000**
38	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1,351,331,600	APBD KAB SERANG		1 Organisasi	1,350,000,000

39	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	35,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	35,000,000
40	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1777	1,852,875,000	APBD KAB SERANG		1777	1,809,000,000
20	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**		**280,100,050**				**270,000,000**
41	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	30,463,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	35,000,000
42	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	300	149,537,000	APBD KAB SERANG		300	135,000,000
43	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 Orang	35,100,050	APBD KAB SERANG		50 Orang	35,000,000
44	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	65,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	65,000,000
X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB**		**95,000,000**				**55,000,000**
21	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**95,000,000**				**55,000,000**

45	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	50,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	25,000,000
46	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	45,000,000	APBD KAB SERANG		1 Laporan	30,000,000
				15,585,291,700				**16,054,565,610**

BAB V
PENUTUP

Buku Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang adalah merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (*satu*) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Tahun 2025 tergantung pada semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di lingkungan dinas, bagaimana sekretariat dan masing-masing bidang melaksanakan semua program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggaraan pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan di sektor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang muaranya kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Serang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang perlu diatur sebagai berikut:

- Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renja dengan sebaik-baiknya;
- Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
- Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-terget Perangkat Daerah, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala;

Tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang sebagai berikut :

- Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya Manusia;
- Melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder terkait.
- Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kinerja sehingga ketercapaian indikator kinerja yang sudah direncakanan dapat tercapai.

Namun demikian itu semua akan sangat bergantung pada ketersedian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja yang disesuaikan dengan skala prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DKBPPPA Kabupaten Serang Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Terciptanya Landasan Kepemerintahan yang baik dan bersih.

Serang, 03 Juli 2024

KEPALA DKBPPPA KAB. SERANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Hj. ENCUP SUPLIKAH,SKM.,MM.Kes

NIP. 196804301988032003

Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang

RANCANGAN AKHIR RENJA

Tahun 2025

Tim Renja 2025

KATA PENGANTAR

Kami Panjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 ini kami berharap dapat menjadi pedoman bagi landasan operasional seluruh Program/Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada tahun 2025.

Penyusunan Renja ini juga memperhatikan kondisi fiktual yang berkembang untuk dijadikan issu strategis agar dapat segera ditangani. Selain itu juga dengan memperhatikan hasil capaian evaluasi kinerja Dinas perhubungan pada tahun lalu dan kinerja Dinas perhubungan yang sedang berjalan sebagai dasar pertimbangan perumusan kebijakan kegiatan tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini merupakan landasan operasional sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten serang. Selain itu juga memuat kebijkan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dengan memperhatikan Aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Serang, Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERANG

BENNY YUANSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

DAFTAR ISI

HAL :

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2025 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.3.1 Maksud 6

1.3.2 Tujuan 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU **8**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG 27

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG 29

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 29

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan di Bidang Perhubungan 30

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 33

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 42

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **43**

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 43

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan 43

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD 45

3.2.1 Tujuan 46

3.2.2 Sasaran 46

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 46

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 52

BAB V. PENUTUP..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISHUB s/d Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra DISHUB Periode 2021-2026 Kabupaten Serang 10

Tabel 2. Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang... 27

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 28

Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 32

Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Serang 34

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Serang 42

Tabel 7. Identifikasi Kebijakan Nasional 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah 3

Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan Renja PD 4

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi serta pelaksanaan Forum PD. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Serang dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025.
4. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kabupaten Serang yang ke-3 yaitu Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Proses Penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar berikut ini:

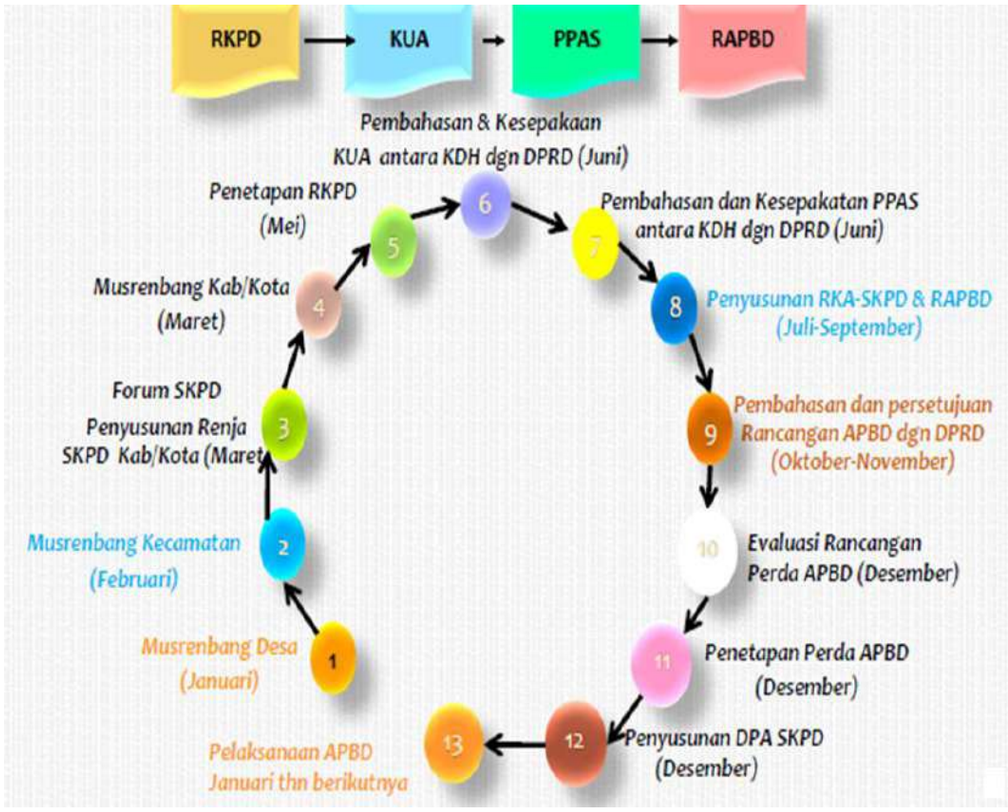

Gambar 1. Siklus Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Tahapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten serang adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja

c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

d. Perumusan Rancangan Akhir Renja

e. Penetapan Renja.

Bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja PD (Renja PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah sebagimana tercantum dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan Renja PD

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2025

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5859 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 -2026;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten serang nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
21. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025
22. Berita Acara hasil Forum SKPD Tanggal 22 Februari tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain:

a. Menterjemahkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam dokumen perencanaan tahunan.
b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk pelaksanaan tahun 2025

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah :

a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;

c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023, Analisis kinerja pelayanan, isu isu penting penyelenggaran menurut tugas dan fungsi OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaah Terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran OPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rumusan rencana kerja Program kegiatan serta pendanaan Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023 belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022, total pagu belanja dinas perhubungan kabupaten serang sebesar Rp. 41.073.226.396,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp. 33.508.075.578,-
2. Belanja Modal : Rp. 7.565.150.818,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 38.732.195.822,- atau mencapai 94,30%% dari Pagu anggaran Belanja Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 41.073.226.396,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari :

1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 31.575.415.172,- atau 94,23%% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 33.508.075.578,- Jumlah realisasi belanja Operasi tersebut terdiri dari :
   - Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 9.585.284.384,- atau 94,32% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 10.162.908.300,-
   - Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 21.990.130.788,- atau 94,20% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 23.345.167.278,-
2) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 7.156.780.650,- atau 94,60% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 7.565.150.818,-. Jumlah realisasi belanja langsung tersebut terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 258.120.000,- atau 90,73% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 284.488.500,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 9.416.650,- atau 100% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 9.416.650,- dan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 6.889.244.000,- atau 94,75% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 7.271.245.668,- .

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dishub Kabupaten Serang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISHUB s/d Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra DISHUB Periode 2021-2026 Kabupaten Serang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tingkat kapasitas kelembagaan dan tata kelola Perangkat daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD	24	Dok	8	Dok	4	Dok	4	Dok	100,00	69,63	4	Dok	16	66,67
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	12	Dok	3	Dok	1	Dok	1	Dok	100,00	87,46	4	Dok	8	66,67
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kierja SKPD	20	Dok	4	Dok	3	Dok	3	Dok	100,00	99,28	3	Dok	10	50,00
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi Keuangan perangkat daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	72	bln	24	Bln	12	bln	12	Bln	100,00	94,32	12	Bln	48	66,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas	60	bln	24	Bln	12	bln	12	Bln	100,00	77,64	12	Bln	48	80,00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya pelaporan keuangan SKPD	18	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	90,00	3	Laporan	12	66,67
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Asuransi BMD dan Tenaga Keamanan Kantor	72	bln	24	Bln	12	Bln	12	Bln	100,00	91,67	12	Bln	48	66,67
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	3000	Stell	1.000	Stell	296	Stell	296	Stell	100,00	99,82	500	Stell	1.796	59,87
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	23	Org	23	Org		Org	0	Org	0,00	0,00	0	Org	23	**100,00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	72	bln	12	Bln	12	bln	12	Bln	100,00	76,16	12	Bln	36	50,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bln	24	bln	0	Bln	0	bln	0,00	0,00	12	bln	36	50,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor	72	bln	24	Bln	12	bln	12	Bln	100,00	96,08	12	Bln	48	66,67
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	72	bln	24	Bln	12	bln	12	Bln	100,00	95,94	12	Bln	48	66,67
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	72	bln	12	Bln	0	bln	-	Bln	-	0,00	12	Bln	24	33,33
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minum untuk rapat dan tamu	72	bln	21	Bln		bln	-	Bln	-	0,00	12	Bln	33	45,83
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Thn	2	Thn	1	Thn	1	Thn	100,00	87,99	1	Thn	4	66,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**					**100**	**%**	**300**	**50,00**
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional/lapangan	2	unit		Unit				Unit				Unit	-	-
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	96	unit	24	unit		unit	-	unit	-	0,00	24	unit	48	50,00
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pendukung sarana prasarana gedung kantor	36	unit	6	unit			-	unit	-	0,00	6	unit	12	33,33
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat dan Tenaga Pramubakti	72	bln	12	Org	6	Org	6	Org	100,00	91,67	6	Org	24	33,33
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, Advetorial dan PABX Gedung kantor	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	93,81	12	bln	48	66,67

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Umum	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	91,67	12	bln	48	66,67
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	90,18	12	bln	48	**66,67**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	91,32	12	bln	48	**66,67**
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	96,88	12	bln	48	**66,67**
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	72	bln	24	bln	12	bln	12	bln	100,00	94,01	12	bln	48	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**	**82**	**%**	**28**	**%**	**13**	**%**	**14**	**%**	**107,69**		**14**	**%**	**56**	**68,29**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**600**	**%**	**200**	**%**							**100**	**%**	**300**	**50,00**
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	Keg/dok	1	Keg	-	Keg	0	Keg	0,00	0,00	1	Keg	2	**100,00**
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Sosialisasi yang dilaksanakan	2	Keg		Keg		Keg		Keg				Keg	-	**-**
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya forum lalulintas	5	Keg	1	Keg		Keg	0	Keg	0,00	0,00	0	Keg	1	**20,00**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) yang terbangun	2700	Unit	1.064	Unit	450	Unit	424	Unit	94,22	93,07	450	Unit	1.938	**71,78**
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan terpelihara	100	Unit											-	**-**
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah unit perlengkapan jalan (PJU) terpelihara	4800	Unit	1.527	Unit	800	Unit	800	Unit	100,00	99,27	800	Unit	3.127	**65,15**
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana teminal yang terbangun	5	Unit											-	**-**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional	24	Terminal	8	Lokasi	4	Lokasi	4	Lokasi	100,00	92,49	4	Lokasi	16	**66,67**
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah tempat parkir yang tersedia	51	Lokasi											-	-
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah petugas parkir yang terbina	792	Org	232	Org	116	Org	116	Org	100,00	86,95	116	Org	464	**58,59**
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Angkutan yang lulus Uji	69000	Kendaraan	24.686	Kendaraan	9000	Kendaraan	10345	Kendaraan	114,94	88,10	12000	Kendaraan	47.031	**68,16**
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji yang tersedia	75000	Buah	26.000	Buah	12000	Buah	5000	Buah	41,67	67,16	12000	Buah	43.000	**57,33**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	54	Unit	16	Unit	8	Unit	8	Unit	100,00	90,94	8	Unit	32	**59,26**
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**19**	**Kegiatan**	**4**	**Keg**	**2**	**Keg**	**2**	**Keg**	**100,00**		**2**	**Keg**	**8**	**42,11**
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah simpang tertib lalu lintas yang tertangani	126	Titik lokasi	42	Titik lokasi	21	Titik lokasi	21	Titik lokasi	100,00	98,27	21	Titik lokasi	84	**66,67**
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan	30	Jenis	10	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	100,00	95,76	5	Jenis	20	**66,67**
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan uji coba dan sosialisasi yang dilaksanakan	3	Keg											**-**	**-**
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	4	Keg											**-**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah SDM yang bersertifikasi penilai andalalin	3	Org											-	-
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin	30	Rekomendasi											-	-
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rekomendasi andallalin	60	Laporan		Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	74,25	12	Laporan	24	**40,00**
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pengembangan Personil LLAJ	6	Keg	1	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	0,00	1	Kegiatan	2	**33,33**
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	6	Keg	2	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	82,75	1	Kegiatan	4	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya kegiatan pemantauan terminal	5	Keg		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan				Kegiatan	-	-
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sistem manajemen keselamatan lalu lintas	15	Kali		Kali		Kali		Kali				Kali	-	-
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Perintis pedesaan yang beroperasi	36	Unit	12	Unit	6	Unit	6	Unit	100,00	44,83	6	Unit	24	**66,67**
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban angkutan umum dijalan	1008	Kali	314	Kali	168	Kali	168	Kali	100,00	90,82	168	Kali	650	**64,48**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Kegiatan**											**-**	**-**
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kali	-	Kali	0	Kali	0	Kali	0,00	0,00	-	Kali	**-**	**-**
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi izin	600	Rekomendasi	406	Rekomendasi	100	Rekomendasi	314	Rekomendasi	314,00	92,86	100	Rekomendasi	820	**136,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.02.2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**400**	**%**											**-**	**-**
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	-	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	0,00	0	Kegiatan	**-**	**-**
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	0	Dokumen	**-**	**-**
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	-	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	0	Laporan	**-**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut**	**150**	**%**	**50**	**%**	**25**	**%**	**25**	**%**	**100,00**		**25**	**%**	**100**	**66,67**
2.15.03.2.07	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan & Analisis Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	Keg	2	Keg	1	Keg	1	Keg	100,00	90,22	1	Keg	4	**66,67**
2.15.03.2.10	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal/Dermaga	15	Dermaga/ Pelabuhan	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	93,37	3	Unit	9	**60,00**
2.15.03.2.11	**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**
2.15.03.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan/Pengumpan Lokal yang berfungsi/beroperasi	15	Lokasi	4	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100,00	85,16	1	Lokasi	6	**40,00**
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**600**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**		**100**	**%**	**400**	**66,67**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terbangun	1	Unit											-	-
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terpelihara	15	Dermaga	2	Dermaga		Dermaga	0	Dermaga	0,00	0,00	2	Dermaga	4	**26,67**
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	berfungsinya kapal patroli unruk pengawasan dan pengoperasian pelabuhan/dermaga	12	Unit	4	Unit	2	Unit	2	Unit	100,00	81,31	2	Unit	8	**66,67**
2.15.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	**Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helicopter yang memiliki Izin**	**100**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**20**	**%**	**100,00**		**20**	**%**	**60**	**60,00**
2.15.04.2.01	**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**	**5**	**Kegiatan**	**1**	**Keg**	**1**	**Keg**	**1**	**Keg**	**100,00**		**1**	**Keg**	**3**	**60,00**
2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	4	Dokumen			1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	50,00	1	Dokumen	1	**25,00**
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin**	**250**	**%**	**50**	**%**	**50**	**%**	**50**	**%**	**100,00**		**50**	**%**	**150**	**60,00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)x100%		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2.15.05.2.02	**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Kegiatan**	**1**	**Keg**	**1**	**Keg**	**1**	**Keg**	**100,00**		**1**	**Keg**	**3**	**60,00**
2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	60	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100,00	86,73	12	Laporan	24	**40,00**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten serang merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten serang dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten serang disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kabupaten Serang. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 telah disusun Indikator Kinerja Utama/IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan DISHUB Kabupaten Serang dapat dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi DISHUB yang telah tertuang dalam Renstra DISHUB, yaitu leading sector penyelenggaraan pelayanan Urusan Bidang Perhubungan.

Jenis indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang dikaji berdasarkan RPJMD/Renstra adalah:

Tabel 2. Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT),	SATUAN	RUMUS/FORMULA INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	
2.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan				
2.1.2		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah			
1			Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi publik / panjang jalan kabupaten X 100%

Hasil capaian indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						REALISASI / CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	4						5						6
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah															
1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah			96,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator Kinerja Utama yaitu Cakupan aksesibilitas antar wilayah dengan target 100% realisasi 100% sehingga Presentase capaian kinerja 100%. Sesuai dengan target yang direncanakan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis yang menangani pelayanan di bidang perhubungan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana dan pelaksana pelayanan bidang transportasi dan keselamatan lalu lintas yang profesional, handal dan berdaya saing, misalnya Pelayanan pengujian Kendaraan bermotor serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan benar. Serta Pelayanan kepada masyarakat untuk keselamatan dan perlengkapan jalan.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten serang melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Pelayanan bidang perhubungan disini adalah memberikan pelayanan jasa transportasi darat yang aman, lancar dan terjangkau untuk mewujudkan suatu kondisi lalu lintas yang tertib disertai dengan sarana prasarana transportasi yang memadai. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan profesional.
2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Pelayanan Rekomendasi ijin trayek angkutan.
4. Pelayanan Kepelabuhanan.
5. Pelayanan Perparkiran.
6. Pengatuaran, Pengawalan, penegakan disiplin melalui kegiatan PAM Lalu lintas, PAM lebaran, natal dan tahun baru, pelayanan pengawalan bupati.
7. Pemeliharaan rambu-rambu guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas.
8. Pengadaan perlengkapan keselamatan jalan, melalui pengadaan rambu-rambu, marka jalan, traffic light dan warning light.

9. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi Perparkiran, Pengujian Kendaraan bermotor, Terminal dan Kepelabuhanan.
10. Pelayanan memberikan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
11. Pelayanan keselamatan dan perlengkapan jalan (Pemasangan, Pemeliaharaan Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum/PJU).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan di Bidang Perhubungan

Penyusunan Rencana Kerja, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
2. Penyediaan perlengkapan jalan belum menjangkau seluruh kawasan prioritas yang wajib dipasangkan.
3. Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dimana Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan

Pengujian sehingga diperlukan peremajaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
5. Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal. faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal pada setiap kecamatan.
6. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
7. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai danau dan Penyebrangan sebagai salah satu angkutan umum sungai dan Penyebrangan diwilayah Kabupaten Serang.
8. Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi, serta berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan jumlah angkutan umum di Kabupaten Serang semakin berkurang, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari permasalahan angkutan perdesaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
9. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di wilayah Kabupaten serang sehingga mengakibatkan kemacetan Arus lalin terutama pada persimpangan dan pada jam jam sibuk.
10. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
11. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Insfrastruktur Transportasi masih belum optimal	1.1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	1.1.1 Belum adanya master plan transportasi yang yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.2 Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.3 Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor. 1.1.4 Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran. 1.1.5 Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal dan ASDP
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas 2.1.2 Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan 2.1.3 Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal 2.1.4 Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.1.5 berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum

Mencermati Permasalahan dan hambatan di bidang transportasi yang sedang mengemuka berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yaitu :

- Peningkatan SDM di Bidang Perhubungan
- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Transportasi
- Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana jalan
- Peningkatan mobilitas penduduk diwilayah Kabupaten Serang
- Peningkatan manajemen kebutuhan lalu-lintas
- Peningkatan keselamatan berlalu-lintas

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Serang dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan.

Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumusan program/kegiatan/sub kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Rancangan akhir RENJA Dinas Perhubungan yang diusulkan pada tahun 2023 merujuk pada nomenklatur. Pada Tabel 5 juga memperlihatkan adanya perubahan besaran kebutuhan dana dari pagu indikatif Ranwal RKPD. Perubahan ini diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: munculnya usulan kegiatan/sub kegiatan baru, bertambahnya volume kegiatan/sub kegiatan, dan penyesuaian besaran anggaran yang didasarkan pada alokasi anggaran yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Serang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 Review Renja Dinas Perhubungan terhadap Ranwal RKPD.

Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Serang

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.15	**2.15.01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**%**		**100**		**100**		
		2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	150.000.000	4	100.000.000	
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dishub	12	200.000.000	12	30.000.000	
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	150.000.000	4	76.887.500	
		2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dishub	2	350.000.000	2	140.000.000	
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Dishub	3	50.000.000	3	10.000.000	
		2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	6	450.000.000	6	243.709.056	
		2.04		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
			01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Dishub	2	400.000.000			
		2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Dishub	1	30.000.000	1	30.000.000	
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Dishub	1	615.360.037			
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Dishub	1	550.000.000	1	100.000.000	
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	Dishub	1	500.000.000	1	150.000.000	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Dishub	2	100.000.000			
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	Dishub	3	100.000.000			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	150	1.210.000.000	150	250.000.000	
		2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Dishub	16	630.850.000	2	80.000.000	
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Dishub	6	550.070.000			
		2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	2000	250.000.000	2000	167.661.792	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Dishub	12	940.000.000	12	550.113.188	
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Dishub	12	200.000.000	12	195.605.424	
		2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Dishub	21	807.426.560	21	180.000.000	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Dishub	63	1.701.450.840	63	580.000.000	
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Dishub	200	720.700.265	200	60.000.000	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Dishub	5	1.460.550.840	5	400.000.000	
2.15	**2.15.02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**%**		**14%**		**14%**		
		2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**							

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	450.000.000	1	200.000.000	Prioritas pembangunan
			02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub					
			03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	50.000.000			
		2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							
			01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Halte/ Perlintasan	Dishub	5 Halte	500.000.000			
			02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	Dishub	450	13.341.081.000	450	1.000.000.000	Prioritas pembangunan PJU hanya untuk 75 Unit masih perlu 375 unit lagi untuk mencapai target pembangunan PJU
			03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Halte/ Perlintasan	Dishub	20	695.080.000			
			04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	Dishub	800	15.000.000.000	800	12.500.000.000	Untuk operasional Pemeliharaan PJU belum tercover
		2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**							
			01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	Dishub	1	200.000.000			
			02	Pembangunan Gedung Terminal	Unit	Dishub	2 Lokasi Lahan Terminal	9.000.000.000			
			03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Unit	Dishub	1	300.000.000			
			04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Unit	Dishub	4	1.258.450.000	4	950.000.000	Pemeliharaan 2 Unit terminal dari 4 Unit terminal yang seharusnya terpelihara

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**							
			01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	Kab. Serang	4	72.930.000			
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Serang	12	801.000.000	12	200.000.000	
		2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							
			01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit		1	600.000.000			
			02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang	Dishub	1	100.000.000			
			03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	Dishub	12000	325.000.000	13000	167.661.792	
			04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dishub	13000	575.000.000	14000	338.304.792	
			05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	1	100.000.000			
			06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	1	100.000.000			
			07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	Dishub	8	750.000.000	8	304.992.424	
			08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	12	120.000.000			
			09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub		-			

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	1	10.000.000			
		2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							
			01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Titik Lokasi	Kab. Serang	12	1.665.326.300	12	700.000.000	
			02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jenis	Kab. Serang	5	5.500.000.000	5	1.000.000.000	Prioritas pembangunan
			04	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	50.000.000	1	50.000.000	
		2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**							
			03	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan	Dishub	12	30.000.000	12	50.000.000	
		2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							
			01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Orang	Kab. Serang	3	413.993.000			
			02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Kab. Serang	11	227.577.000	11	110.000.000	
			03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	Kab. Serang	11	119.750.000			
			05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	Kab. Serang	3	501.955.000			
		2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Dishub	53	1.202.475.105	53	100.000.000	Anggaran untuk operasional angkutan perintis belum terakomodir
			02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	11	1.436.884.400	11	800.000.000	Anggaran untuk wasdal angkutan Umum belum terakomodir
		2.12		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
			02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	300.000.000	1		
		2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
			01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan	Dishub	100	128.282.400	100	83.574.252	
		2.16		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
			03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	30.000.000	1		
2.15	**2.15.03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**%**		**25**		25		
		2.07		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**							

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	12	220.000.000	12	106.380.896	
		2.10		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**							
			03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Kab. Serang	12	628.859.000	12	254.050.592	
		2.11		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**							
			09	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Kab. Serang	12	650.000.000	12	363.267.216	
		2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**							
			02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	Kab. Serang	1 Lahan				
			03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	Kab. Serang	3	350.000.000	3		Belum tersedianya anggaran untuk pemeliharaan dermaga
			04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Kab. Serang	12	800.000.000	12	582.076.632	
2.15	**2.15.04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	**%**		**20**		**20**		
		2.01		**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**							

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
			01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Dokumen	Dishub	1	100.000.000	1	50.000.000	
2.15	**2.15.05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**%**		**50**		**50**		
		2.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**							
			01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	Dishub	1	550.000.000			
		2.02		**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Serang	12	1.613.440.000	12	2.598.757.776	Anggaran untuk Reaktivasi pintu perlintasan yang baru belum terakomodir, anggaran hanya untuk petugas perlintasan 93 orang
Jumlah 1								72.983.491.747		25.853.043.332	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								**11.497.746.750**		**10.901.200.000**	
Jumlah 2								**11.497.746.750**		**10.901.200.000**	
JUMLAH TOTAL (Jumlah 1 + Jumlah 2)								**84.481.238.497**		**36.754.243.332**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Melalui Pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan masuk terlalu banyak dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Pada Umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa : Permintaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Utama (PJU), Fasiltas Pendukung keselamatan jalan dan Pelayanan bidang perhubungan (Pengujian Kendaraan Bermotor, Perparkiran, Angkutan, Kepelabuhanan dan Keterminalan)

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Serang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Desa Mekarsari, Kab. Serang	Jumlah PJU Terbangun	15 Titik	Penerangan Jalan Umum (PJU)
		desa pabuaran Kab. Serang	Jumlah PJU Terbangun	15 Titik	Penerangan Jalan Umum (PJU)
		desa sangiang Kab. Serang	Jumlah PJU Terbangun	15 Titik	Penerangan Jalan Umum (PJU)
		desa sukarena Kab. Serang	Jumlah PJU Terbangun	15 Titik	Penerangan Jalan Umum (PJU)
		desa tanjungmanis Kab. Serang	Jumlah PJU Terbangun	15 Titik	Penerangan Jalan Umum (PJU)
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Desa Citaman Kab. Serang	Jumlah Fasilitas LLAJ Terpasang	3 Titik	RPPJ menuju Musium Golok
		Kp. Marapit Desa Tamiang Kab. Serang	Jumlah Fasilitas LLAJ Terpasang	2 Titik	Rambu - rambu jalan
		Desa Pelawad Kab. Serang	Jumlah Fasilitas LLAJ Terpasang	1 Paket	Marka Jalan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran Kab/kota, fungsi Kab/kota, dan hirarkhi fungsional Kab/kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
A.	Keselamatan dan Keamanan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B.	Pelayanan Transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah	

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
	kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
	5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi	
	6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
	7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah	
C.	Kapasitas Transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,	
	2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia	

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
	3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu	
	4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien.

Kementrian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni pembangunan konektivitas trasnportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota yang direncanakan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Serang serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Banten, Telaahaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Serang sebagaimana dituangkan pada Bab III, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk periode tahun 2021-2026.

Rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021–2026 adalah :

"Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan"

3.2.2 Sasaran

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah :

"Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah"

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025 disesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Juga mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kabupaten Serang.

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada Tahun 2025

dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 sebanyak 5 Program Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari :
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari :

1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
   - Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
   - Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

4) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
   - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
8) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

9) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

11) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12) Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari :

1) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

- Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

3) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
   - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
4) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
   - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

4. Program Pengelolaan Penerbangan dengan kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari :
   1) Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter

5. Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari :
   1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
   2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang merencanakan 5 program, 27 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar **Rp. 84.481.238.497,- (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah),** Dalam rangka efektifitas pencapaian target kinerja di Konversi menjadi 5 Program, 24 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar **Rp. 36.754.243.332,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** yang Pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Serang.

Adapun Rencana Kerja dan kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berikut ini :

RENCANA KERJA KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
TERLAMPIR

BAB V. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas dengan prioritas pembangunan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025 juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;

b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan diajukan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2025 memuat penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan yang perumusannya berdasarkan evaluasi kinerja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta target target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja DISHUB ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa mendatang sehingga kinerja DISHUB semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Serang, Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERANG

BENNY YUARSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

-LAMPIRAN -

Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.15	**2.15.01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat kapasitas kelembagaan dan tata kelola Perangkat daerah**		**%**		**100**			**100**	
		2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	150.000.000		4	150.000.000
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dishub	12	200.000.000		12	200.000.000
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	150.000.000		4	150.000.000
		2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dishub	2	350.000.000		2	350.000.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Dishub	3	50.000.000		3	50.000.000
		2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	6	450.000.000		6	450.000.000
		2.04		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
			01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	2	400.000.000		2	400.000.000
		2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	1	30.000.000		1	30.000.000
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	1	615.360.037		1	615.360.037
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	1	550.000.000		1	550.000.000
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	Dishub	1	500.000.000		1	500.000.000
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	2	100.000.000		2	100.000.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	Dishub	3	100.000.000		3	615.360.037
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Dishub	150	1.210.000.000		150	1.210.000.000
		2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	16	630.850.000		16	630.850.000
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	6	550.070.000		6	550.070.000
		2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	2000	250.000.000		2000	250.000.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	12	940.000.000		12	940.000.000
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	12	200.000.000		12	200.000.000
		2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	21	807.426.560		21	807.426.560

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	63	1.701.450.840		63	1.701.450.840
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dishub	200	720.700.265		200	720.700.265
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dishub	5	1.460.550.840		5	1.460.550.840
2.15	**2.15.02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**		**%**		**14%**			**14%**	
		2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**									
			01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	450.000.000	Prioritas pembangunan		
			02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen	Dishub				1	50.000.000
			03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	50.000.000		1	50.000.000
		2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**									
			01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Halte/ Perlintasan	Dishub	5 Halte	500.000.000		5	500.000.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	450	13.341.081.000	Prioritas pembangunan	450	13.341.081.000
			03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Halte/ Perlintasan	Dishub	20	695.080.000		23	695.080.000
			04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	800	15.000.000.000	Prioritas pembangunan	800	15.000.000.000
		2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**									
			01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	1	200.000.000	Prioritas pembangunan		
			02	Pembangunan Gedung Terminal		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	Dishub	2 Lokasi Lahan Terminal	9.000.000.000	Prioritas pembangunan	1	5.000.000.000
			03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	Dishub	1	300.000.000	Prioritas pembangunan	1	350.000.000
			04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Dishub	4	1.258.450.000	Prioritas pembangunan	4	1.258.450.000
		2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**									

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Kab. Serang	4	72.930.000		4	76.570.000
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Serang	12	801.000.000		12	841.000.000
		2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**									
			01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia	Unit		1	600.000.000		1	800.000.000
			02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah tenaga penguji yang tersedia	Orang	Dishub	1	100.000.000		1	100.000.000
			03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	12000	325.000.000		13000	350.000.000
			04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dishub	13000	575.000.000		14000	600.000.000
			05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	1	100.000.000		1	100.000.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	1	100.000.000		1	100.000.000
			07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	8	750.000.000		8	800.000.000
			08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	12	120.000.000		12	120.000.000
			09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub		-		1	-
			10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	1	10.000.000		1	10.000.000
		2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**									
			01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Titik Lokasi	Kab. Serang	12	1.665.326.300		12	1.725.326.300
			02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan	Jenis	Kab. Serang	5	5.500.000.000	Prioritas pembangunan	5	5.750.000.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			04	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	50.000.000		1	50.000.000
		2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**									
			03	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	12 Laporan dan 1 set alat uji retroreflektif marka	30.000.000		12	30.000.000
		2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**									
			01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Kab. Serang	3	413.993.000		3	434.692.000
			02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Kab. Serang	11	227.577.000		11	273.093.000
			03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	Kab. Serang	11	119.750.000		11	143.700.000
			05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Serang	3	501.955.000		3	602.346.000

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
			01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	53	1.202.475.105		53	1.623.341.391
			02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	11	1.436.884.400		11	1.564.684.400
		2.12		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
			02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	300.000.000		1	300.000.000
		2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Dishub	100	128.282.400		100	154.003.200
		2.16		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
			03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	30.000.000		1	30.000.000
2.15	**2.15.03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut**		**%**		**25**			25	
		2.07		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**									

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	12	220.000.000		12	250.000.000
		2.10		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**									
			03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Kab. Serang	12	628.859.000		12	628.859.000
		2.11		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**									
			09	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Kab. Serang	12	650.000.000		12	675.000.000
		2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**									

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terbangun	Unit	Kab. Serang	1 Lahan		Prioritas pembangunan	1	
			03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Kab. Serang	3	350.000.000		3	350.000.000
			04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Kab. Serang	12	800.000.000		12	850.000.000
2.15	**2.15.04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	**Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helicopter yang memiliki Izin**		**%**		**20**		**20**		
		2.01		**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**									
			01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter		Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen	Dishub	1	100.000.000		1	100.000.000
2.15	**2.15.05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin**		**%**		**50**				
		2.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**									
			01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	Dishub	1	550.000.000			

No				Urusan / Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Indikator	Rencana 2025			Catatan Penting	Perkiraan 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.02		**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Kab. Serang	12	1.613.440.000	Petugas perlintasan	12	1.613.440.000
									Jumlah 1	72.983.491.747			69.922.434.870
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**11.497.746.750**			**11.497.746.750**
									Jumlah 2	**11.497.746.750**			**11.497.746.750**
									JUMLAH TOTAL (Jumlah 1 + Jumlah 2)	**84.481.238.497**			**81.420.181.620**

Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERANG

DENNY YUDARSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

MPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KAB. SERANG

DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD/PD

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SKPD/PD PENANGGUNGJAWAB	ALASAN
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Serang	1 Kegiatan	Dishub Kab. Serang	Penanggulangan titik kemacetan memerlukan unsur selain Dinas Perhubungan
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Serang	1 Kegiatan	Dishub Kab. Serang	Mengurangi tindak pelanggaran lalulintas Angkutan Darat di jalan raya akibat tidak terpenuhinya persyaratan baik teknis maupun kelengkapan surat surat kendaraan dimana Penanganannya diperlukan unsur selain Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang

BENNY YUARSA, ATD, M.Si
NIP. 19670909 199103 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

Jl. Raya Cilegon KM. 2 No. 22 Serang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana kerja tahun anggaran 2025 disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman persiapan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran selama satu tahun. Kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang digunakan untuk mendukung kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks dan tuntutan pelayanan yang prima. Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang berkualitas dan kompeten diharapkan akan terpenuhi pada tahun anggaran 2025. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta informasi tentang analisis kinerja pelayanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen rancangan Renja tahun 2025 masih terdapat kekurangan, Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Serang, 3 Juli 2024
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WARNERRY POETRY, SH., M.Si
NIP 19800224 201001 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penyusunan Renja 9

BAB II HASIL EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang 20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41
3.3 Program dan Kegiatan 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

2.1 Indikator Kinerja Utama 2021-2026 11

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Tahun 2024..... 12

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang..... 18

2.4 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023..... 19

2.5 Analisis SWOT..... 25

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Serang..... 27

2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Serang..... 38

3.1 Target dan Indikator SDG's 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025. 41

3.3 Target Indikator Kinerja Tahun 2025..... 42

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2025 43

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2025 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas, kolaborasi dan efektivitas pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen seluruh pihak maka setiap perangkat daerah harus menyusun rancangan rencana kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam rencana strategis kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Akhir, selain itu juga Penyusunan Rencana kerja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Serang Nomor52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Rencana kerja Tahun 2025 berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Akhir ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Serang.

Penyusunan Rencana kerja disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahu 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil masuk dalam urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar yang artinya urusan pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi daerah.

Berdasarkan data konsolidasi bersih Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Serang Tahun 2024 semester 1 adalah sebesar 1.756.816 jiwa yang tersebar di 29 kecamatan dan 326 desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 harus mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran secara akurat dan kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang.

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025, Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memberikan hak kependudukan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Serang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
40. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelayanan Adminduk;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
45. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Serang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
47. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun untuk memberikan arah dan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan *mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.*

Adapun tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025;

3. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil atau kinerja;
4. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan* Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 *Program dan Kegiatan*

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematika berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasisnya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja sub kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target indikato sasaran terdapat 2 indikator kinerja utama, yaitu:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Informasi Publik yang didukung Kemajuan TI	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6

Berikut merupakan tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja s/d tahun 2024 dan pencapaian renstra 2021-2026:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s/s Tahun 2024

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Periode 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2024 (%)
1			2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2.12			**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
XX	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	5	5	5	100	5	20	80
XX	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	-	1	1	100	1	2	50

XX	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	1	1	1	100	2	4	80
XX	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/Bln	72	72	72	100	72	72	100
XX	01	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dok	1	1	1	100	1	4	80
XX	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok	-	-	-	-	1	1	20
XX	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Pernagkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	72	-	-	-	-	72	100
XX	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1	1	1	100	1	4	80
XX	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1	-	-	-	1	2	60
XX	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1	1	1	100	1	4	80
XX	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1	1	1	100	1	4	80

XX	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	-	-	-	-	1	1	20
XX	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
XX	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
XX	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediaannya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12	12	12	100	12	48	80
XX	01	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
XX	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
XX	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dukcapil Kab. Serang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
XX	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20	20	20	100	20	20	100
XX	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Gedung	1	-	-	-	1	3	80

				Dipelihara/Direhabilitasi								
12	**02**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	**02**	**2.01**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**87%**	**100%**	**100%**
12	02	2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
12	02	2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
12	**02**	**2.03**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
12	02	2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	-	-	-	-	-	1	-
12	**03**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	**03**	**2.01**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	03	2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	13 Layanan	13	13	13	100%	13	13	100
12	**03**	**2.02**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terselenggaranya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**
12	03	2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25
12	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI INFORMASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat Upt ataupun di Tingkat Dinas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

12	**04**	**2.01**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	**04**	**2.01.02**	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	56 PKS	8	10	5	50%	10	29	51,79
12	**04**	**2.01.03**	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	5 Laporan	1	1	1	100	1	4	80
12	**04**	**2.03**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	**04**	**2.03.03**	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30 Laporan	30	30	30	100	30	30	100
12	**04**	**2.03.07**	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	-	1	1	100	1	2	40
12	**04**	**2.04**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
12	**04**	**2.04.03**	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	10 Laporan	2	2	2	100	2	6	60
12	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

			PROFIL KEPENDUDUKAN	**Perkembangan Kab. Serang**								
12	**05**	**2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Tersusunnya Data profil kependudukan**	**5 Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**40**
12	05	2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	4	80

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Rencana Strategis maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis dilakukan melalui pemetaan hubungan antara tiap kegiatan yang berada didalam kelompok indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan pendukung, sehingga evaluasi dan analisis yang dilakukan lebih logis. Pada perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama yang terbagi kedalam 5 (lima) program. Adapun gambaran pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja dan persentasenya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip OPD	-	Nilai Sakip OPD	A	A	A	A	BB	A	A	A	
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	-	1. Kartu Keluarga	90%	92%	94%	96%	108,71%	92%	94%	96%	-
			2. KTP Elektronik	99%	99%	99%	99%	99,77%	99%	99%	99%	-
			3. Akta Kelahiran	98%	98%	98%	98%	94,47%	98%	98%	98%	Akta Kelahiran terkendala rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya akta kelahiran
			4. KIA	50%	60%	70%	80%	46,01%	60%	70%	80%	KIA terkendala rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA
			5. Meningkatnya Cakupan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			6. Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 PKS	10 PKS	10 PKS	10 PKS	5 PKS	10 PKS	10 PKS	10 PKS	Kerjasama pemanfaatan data terkendala terbitnya permendagri 17/2023 yang mengharuskan adanya verifikasi oleh Sekjen dan Irjen Kemendagri terkait hak akses pemanfaatan data
			7. Penambahan UPT di 29 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Nilai SAKIP OPD

Target nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2025 yaitu nilai A dan pada tahun 2021 target berhasil tercapai nilai A tetapi pada tahun 2022 dan 2023, target tersebut gagal tercapai dengan penilaian Sakip dari Inspektorat dan Sekretariat Daerah hanya mencapai nilai BB sehingga menjadi catatan dan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk bekerja lebih baik lagi.

b. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Target tahun 2023 cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 87,4% dan mencapai target sebesar 89,74% yang terbagi ke dalam beberapa indikator kinerja seperti tabel berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Kartu Keluarga	90%	108,71%
2	KTP Elektronik	99%	99,77%
3	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98%	94,47%
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	46,01%
5	Cakupan Pelayanan Akta Kematian	100%	100%
		87,4%	89,79%

c. Pemanfaatan Data Kependudukan

Target tahun 2023, pemanfataan data kependudukan target 10 PKS pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target, pada akhir tahun 2023 terealisasi sebanyak 5 PKS yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kemendagri berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Nomor: 400.8.1.2/15687/Dukcapil. 5 (Lima) OPD yang telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan PKS dengan Dinas Dukcapil pada tahun 2023 yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup,

Inspektorat dan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Selain itu, dengan adanya perkembangan dinamika dalam penyusunan regulasi di jajaran Kemendagri terdapat perubahan dalam tahapan dan tata cara pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia *international organization fo standardization/international electrotechnical commission* (SNI ISO/IEC 27001) dan dalam hal proses verifikasi permohonan hak akses dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal terlebih dahulu sebelum izin dari Menteri Dalam Negeri, hal ini yang mendasari tidak tercapainya target Kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Serang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen pengguna layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang memiliki tugas pokok yaitu:

1. Unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi isu utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang paling dominan pada pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain:

1. Pasca Pandemi Covid-19 yang masih berpengaruh terhadap perekonomian dan kehidupan sosial sehingga perlu dikembangkan pelayanan secara daring/*online*.
2. Masih ada penduduk Kabupaten Serang yang belum terdaftar dalam *database* kependudukan.
3. Masih tidak sesuainya data/identitas antara *database* kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, Akta Kelahiran serta data berbagai lintas instansi seperti BPJS Kesehatan, perbankan dan lain-lain.
4. Pengendalian mobilitas penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian penduduk non permanen dan pengendalian mobilitas kependudukan orang asing.
5. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian.

Di samping permasalahan yang dihadapi, terdapat hambatan yang masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Kualitas sarana dan prasarana yang sudah kurang layak pakai.
2. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai.
4. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan hambatan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk Tahun 2025, difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama:

1. Peningkatan layanan kependudukan secara *online*.
2. Peningkatan cakupan dan kualitas *database* kependudukan.

3. Peningkatan kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
7. Terwujudnya tata kelola dokumen kependudukan.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Serang Tahun 2021-2026 yang ingin diwujudkan adalah:

VISI: "Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis"

MISI:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah Masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang dan Permukiman yang membadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.

Mengacu pada misi yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah misi kelima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional yang dituangkan dalam rencana strategis secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai Upaya mencapai keberhasilan kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung misi kelima tersebut agar tercipta tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima maka Peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dan digitalisasi pelayanan publik menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kerja akhir tahun 2025. Fokus tersebut diharapkan berdampak secara signifikan dalam mendukung capaian visi misi kepala daerah dan capaian program nasional yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan Analisa yang terdiri dari analisa internal dan ekternal, analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesess*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treats*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang

berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut:

Tabel 2.5
Analisis SWOT

Kekuatan (*Strenght*)	**Kelemahan (*Weakness*)**
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat	Jumlah sumber daya aparatur terbatas
Koordinasi antar OPD Cukup Baik	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan kurang baik
Ada 17 UPT Pelayanan di kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
Kesempatan (*Opportunity*)	**Ancaman (*Treats*)**
Kemudahan akses pelayanan melalui digitalisasi pelayanan	Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan
Terdapat peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan oleh Kemendagri	Peretasan sistem pelayanan

Berdasarakan uraian tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang menindaklanjuti dengan rekomendasi dalam penyusunan rencana kerja akhir sebagai berikut:

1. Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti alat perekaman KTP-El, kendaraan dinas dan operasional kantor, komputer, laptop, printer, mebelair dan lainnya.
2. Pemenuhan jumlah pegawai aparatur baik ASN dan Non ASN untuk menunjang pelayanan.
3. Sosialisasi pentingnya dokumen administrasi kependudukan kepada Masyarakat.
4. Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi.
5. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, dengan demikian, pennyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahn dan isu-isu pembangunan mutakhir.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 yang telah disusun untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2021-2026 yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada Rancangan awal RKPD Kabupaten Serang dan Rencana Strategis maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Masyarakat. Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Serang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Kab. Serang**		**100%**	**18.997.804.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**		**100%**	**26.605.000.000**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Serang**	**Persentase perencanaan dan penganggaran . pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**18.097.804.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Serang**	**Persentase perencanaan dan penganggaran. pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**25.155.000.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**200.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**250.000.000**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	120.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	150.000.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan

b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	30.000.000	-
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	70.000.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.137.100.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**15.895.000.000**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/Bln	13.027.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/Bln	14.285.000.000	Penyesuaian perhitungan gaji dan tunjangan bagi 72 orang pegawai ASN di Dinas Dukcapil
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1.100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1.600.000.000	-Gaji dan BPJS operator sebanyak 40 org - Tagihan Listrik di 17 UPT - Internet untuk pelayanan di UPT

c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.000.000	-
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**10.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100.000.000**	
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	100.000.000	Asuransi untuk10 Kendaraan Dinas
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Serang**	**Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**10.000.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	10.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.640.704.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**7.720.000.000**	
a	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Serang	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Serang	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	40.000.000	Penambahan jumlah pembelian

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			komponen peralatan Listrik kantor
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.100.000.000	- Pembelian alat perekaman 22 set - Pembelian Laptop - Pembelian Printer - Pembelian AC -Pembelian Fillinf Cabinet
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.485.704.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Serang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000.000	- Pembelian Ribbon KTP-El - Pembelian Tinta Printer
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Serang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	- Pengadaan Formulir Adminduk - Pembelian Blangko KIA
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	40.000.000	Pembelian Surat kabar dan majalah
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	40.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Lap	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Lap	400.000.000	

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Serang**	**Tersediaannya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang**	**100%**	**850.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Serang**	**Tersediaannya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang**	**100%**	**930.000.000**	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	380.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	380.000.000	
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	70.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	150.000.000	Penambahan anggaran untuk servis peralatan dan perlengkapan kantor
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Serang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	400.000.000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Serang**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	**250.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Serang**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100%**	**250.000.000**	

			Urusan Pemerintahan Daerah					**Urusan Pemerintahan Daerah**			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.000.000	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
II	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**200.000.000**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**400.000.000**	
1	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**150.000.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**250.000.000**	
a	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dok	30.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dok	50.000.000	Intensifikasi pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk

b	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Lap	120.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Lap	200.000.000	- Jemput Bola pelayanan perekaman
2	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**50.000.000**	
a	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Lap	25.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Lap	50.000.000	Pelaksanaan sosialisasi layanan dan persyaratan pengurusan adminduk
3	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**25.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**100.000.000**	
a	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Lap	25.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Lap	100.000.000	Untuk mencakup pelaksanaan Blmtek 2 kali dalam setahun
III	**Program Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil**	**100%**	**200.000.000**	**Program Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil**	**100%**	**250.000.000**	
1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**150.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100%**	**200.000.000**	
a	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Serang	Jumlah Layanan	13 Layanan	150.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Serang	Jumlah Layanan	13 Layanan	200.000.000	Jemput bola pelayanan adminduk

			Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
2	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil**	**100%**	**50.000.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil**	**100%**	**50.000.000**	
a	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Lap	50.000.000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Lap	50.000.000	
IV	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependuduka n di tingkat UPT ataupun Tingkat Dinas**	**100%**	**455.000.000**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependuduka n di tingkat UPT ataupun Tingkat Dinas**	**100%**	**650.000.000**	
1	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n**	**100%**	**225.000.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n**	**100%**	**200.000.000**	
a	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dok	75.000.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dok	100.000.000	Optimalisasi pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
b	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Lap	150.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Lap	100.000.000	Pelaksanaan fumigasi yang lebih luas terhadap arsip adminduk
2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Pengelolaan**	**100%**	**175.000.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi**	**Kab. Serang**	**Terselenggara nya Pengelolaan**	**100%**	**250.000.000**	

	Administrasi Kependudukan		**Informasi Administrasi Kependudukan**			**Administrasi Kependudukan**		**Informasi Administrasi Kependudukan**			
a	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30 Lap	100.000.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30 Lap	150.000.000	Pembaharuan secara berkala *software* dan *hardware* pelayanan
b	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dok	75.000.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dok	100.000.000	Sosialisasi Kerjasama layanan adminduk dengan *stakeholders*
3	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**55.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**200.000.000**	
a	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Lap	55.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Lap	200.000.000	Pelaksanaan bimtek bagi operator
V	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil**	**100%**	**45.000.000**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil**	**100%**	**150.000.000**	

			Perkembangan Kab. Serang					**Perkembangan Kab. Serang**			
1	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**	**1 Dok**	**45.000.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Serang**	**Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**	**1 Dok**	**150.000.000**	
a	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dok	45.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dok	150.000.000	Penambahan cetak buku profil kependudukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan rencana kerja tentunya dinas wajib menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum resmi maupun melalui aduan yang kemudian ditindak lanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelayanan. Berikut merupakan usulan kegiatan yang disampaikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Serang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Alat Perekaman KTP di Kecamatan Baros	Kec. Baros	Optimalnya Pelayanan Adminduk Terhadap Masyarakat	1 Paket	Usulan musrenbang kecamatan terkait layanan adminduk di Baros yang belum optimal disebabkan terbatasnya peralatan kerja.
2	Pembangunan Kantor UPT Disdukcapil	Kec. Baros	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Unit	Usulan musrenbang kecamatan terkait layanan adminduk di Baros yang belum optimal disebabkan terbatasnya peralatan kerja.
3	Pengadaan Buku Induk Kependudukan	Kec. Cikeusal	Meningkatkan Minat Baca untuk Masyarakat dan pada khususnya mahasiswa atau pelajar	1 Dokumen	Kebutuhan mengenai data profil kependudukan setiap wilayah di Kab. Serang
4	Perekaman E-KTP (Desa Harundang)	Kec. Cikeusal			Masih banyak warga desa Harundang yang belum ter*cover* perekaman
5	Rehab Keramik Kantor UPT	Kec. Ciruas	Meningkatkan pelayanan yang optimal	10m x 5m	
6	Gudang Berkas/Arsip	Kec. Ciruas	Tersedianya Prasarana Kantor	1 Lokal	
7	Kursi Tunggu	Kec. Ciruas	Tersedianya Prasarana Kantor	3 Unit	
8	AC	Kec. Ciruas	Tersedianya Prasarana Kantor	2 Unit	
9	Lemari Besi	Kec. Ciruas	Tersedianya Sarana tempat menyimpan dokumen	4 Unit	

10	Isbat Nikah	Kec. Lebakwangi	Memberi legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara	70 Pasangan	Aspirasi warga di Lebakwangi yang pernikahannya belum tercata oleh negara sehingga diperlukan Isbat Nikah
11	Update Data Kependudukan diberikan akses bagi desa dalam sinkronisasi data kependudukan di wilayahnya	Kec. Cikande	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Paket	Akses update data kependudukan hanya bisa dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Disediakannya aplikasi terkait penduduk yang meninggal dunia (kematian)	Kec. Cikande	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Paket	Aplikasi kependudukan hanya disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Perekaman E-KTP (Perumahan Bumi Nagara Lestari Desa Nagara)	Kec. Kibin			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs:

Dinas Dukcapil memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Dua tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 1, 16 dan 17:

Nomor 1 : Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat

Nomor 16 : Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level

Nomor 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari dua tujuan yang terkait dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, target dan indikatornya antara lain terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Indikator SDG's

Kode Indikator	Tujuan	Target/Indikator
1.4.1 (j)	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimana pun	persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
16.9.1	Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang *kelahirannya dicatat oleh* lembaga pencatatan sipil, menurut umur
16.9.1 (b)	Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	persentase anak yang memiliki akta kelahiran
17.19.2 (b)	Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (vital statistics register)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025 merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip OPD	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	92,2%

Tujuan dan indikator sasaran yang tercantum pada tabel sebelumnya kemudian dijabarkan menjadi indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target
1	Kartu Keluarga (KK)	94%
2	*KTP Elektronik*	99%
3	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98%
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	70%
5	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Akta Kematian	100%
6	Menambahkan UPT di 29 Kecamatan	29 UPT
7	Pemanfataan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 PKS

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tabel 3.2 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, maka prioritas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada Tahun 2025 antara lain:

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Serang

Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100%	18.997.804.000	APBD	-	100%	23.625.927.837
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan penganggaran . pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Serang	100%	18.177.804.000	APBD	-	100%	20.488.696.203
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan,	Kab. Serang	100%	200.000.000	APBD	-	100%	264.314.170

						penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	5 Dok	120.000.000	**APBD**	-	5 Dok	169.088.909
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Serang	1 Lap	30.000.000	**APBD**	-	1 Lap	10.000.000
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Lap	50.000.000	**APBD**	--	1 Lap	85.225.261
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggara nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**100%**	**15.098.380.000**	**APBD**	-	**100%**	**16.244.811.832**
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kab. Serang	72 Org/Bln	13.998.380.000	**APBD**	Penyesuaian perhitungan gaji dan tunjangan bagi 72 orang	72 Org/Bln	8.654.111.774

						Tunjangan ASN					pegawai ASN di Dinas Dukcapil		
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Serang	1 Dok	1.100.000.000	**APBD**	-Gaji dan BPJS operator sebanyak 40 org - Tagihan Listrik di 17 UPT - Internet untuk pelayanan di UPT	1 Dok	7.590.700.058
X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**100%**	**10.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**56.367.850**
X	XX	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Serang	1 Dok	10.000.000	**APBD**	Asuransi untuk10 Kendaraan Dinas	1 Dok	56.367.850
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Serang**	**100%**	**1.819.424.000**	**APBD**	-	**100%**	**1.925.642.885**
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	25.000.000	**APBD**	-	1 Paket	37.883.588
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	409.424.000	**APBD**	- Pembelian alat perekaman 22 set - Pembelian Laptop - Pembelian Printer - Pembelian AC -Pembelian Fillinf Cabinet	1 Paket	464.500.366

X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	880.000.000	**APBD**	- Pembelian Ribbon KTP-El - Pembelian Tinta Printer	1 Paket	504.777.757
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	50.000.000	**APBD**	- Pengadaan Formulir Adminduk - Pembelian Blangko KIA	1 Paket	143.547.685
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Dok	15.000.000	**APBD**	-	1 Dok	33.967.120
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 Lap	40.000.000	**APBD**	-	1 Lap	95.137.218
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 Lap	400.000.000	**APBD**	-	1 Lap	645.829.151
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediaannya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang**	**Kab. Serang**	**100%**	**850.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**1.300.325.764**
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	Kab. Serang	12 Lap	380.000.000	**APBD**	-	12 Lap	555.040.310

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Lap	70.000.000	**APBD**	Penambahan anggaran untuk servis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Lap	80.862.243
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Lap	400.000.000	**APBD**	-	1 Lap	664.423.211
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksanany a Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Serang**	**100%**	**200.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**697.233.702**
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang	20 Unit	150.000.000	**APBD**	-	20 Unit	488.423.760

X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Serang	1 Unit	50.000.000	**APBD**	-	1 Unit	208.809.942
2	**12**				**Program Pendaftaran Penduduk**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**200.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**1.343.521.622**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**150.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**1.343.521.622**
2	**12**	**02**	**2.01**	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	2 Dok	30.000.000	**APBD**	-	2 Dok	129.151.189
2	**12**	**02**	**2.01**	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	1 Lap	120.000.000	**APBD**	- Jemput Bola pelayanan perekaman	1 Lap	1.114.370.433
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**25.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**50.000.000**

2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	1 Lap	25.000.000	**APBD**	-	1 Lap	50.000.000
2	12	02	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependuduka n**	**Kab. Serang**	**100%**	**25.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**50.000.000**
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Serang	1 Lap	25.000.000	**APBD**	-	1 Lap	50.000.000
2	12	03			**Program Pencatatan Sipil**	**Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**100%**	**170.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**400.000.000**
2	12	03	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**100%**	**120.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**350.000.000**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Serang	13 Layanan	120.000.000	**APBD**	Jemput bola pelayanan adminduk	13 Layanan	350.000.000
2	12	03	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terselenggara nya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil**	**Kab. Serang**	**100%**	**50.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**50.000.000**
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Kab. Serang	1 Lap	50.000.000	**APBD**	-	1 Lap	50.000.000

						Pencatatan Sipil							
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat UPT ataupun Tingkat Dinas**	**Kab. Serang**	**100%**	**405.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**1.243.710.012**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**175.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**269.687.220**
2	**12**	**04**	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Serang	10 Dok	75.000.000	**APBD**	-	10 Dok	105.049.175
2	**12**	**04**	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Serang	1 Lap	100.000.000	**APBD**	-	1 Lap	164.638.045
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**175.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**575.172.670**
2	**12**	**04**	2.03	0007	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Serang	30 Lap	100.000.000	**APBD**	-	30 Lap	525.172.670

2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Serang	1 Dok	75.000.000	**APBD**	-	1 Dok	50.000.000
2	12	04	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Serang**	**100%**	**55.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**398.850.122**
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Serang	2 Lap	55.000.000	**APBD**	Pelaksanaan bimtek bagi operator	2 Lap	398.850.122
2	12	05			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang**	**Kab. Serang**	**100%**	**45.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**150.000.000**
2	12	05	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi**	**Kab. Serang**	**1 Dok**	**45.000.000**	**APBD**	-	**1 Dok**	**150.000.000**

						Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain							
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kab. Serang	1 Dok	45.000.000	**APBD**	Penambahan cetak buku profl kependudukan	1 Dok	150.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk tahun 2025 sebesar Rp. 18.997.804.000 yang di dalamnya terdapat *mandatory spending* sebesar Rp. 200.000.000 dan di alokasikan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, secara rinci rencana kerja dan pendanaan termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Serang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**Disdukcapil**	**100%**	**18.997.804.000**	**APBD**	-	**100%**	**23.755.000.000**
XX. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perencanaan dan penganggaran. pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**17.937.804.000**	**APBD**	-	**100%**	**19.900.000.000**
XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	100%	200.000.000	**APBD**	-	100%	400.000.000
XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	5 Dokumen	120.000.000	**APBD**	-	5 Dokumen	200.000.000
XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil	1 Laporan	30.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	50.000.000

XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	**APBD**	--	1 Laporan	100.000.000
XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil	100%	15.098.380.000	**APBD**	-	100%	15.895.000.000
XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	72 Org/Bln	13.998.380.000	**APBD**	Penyesuaian perhitungan gaji dan tunjangan bagi 72 orang pegawai ASN di Dinas Dukcapil	72 Org/Bln	14.285.000.000
XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdukcapil	1 Dokumen	1.100.000.000	**APBD**	-Gaji dan BPJS operator sebanyak 40 org - Tagihan Listrik di 17 UPT - Internet untuk pelayanan di UPT	1 Dokumen	1.600.000.000
XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disdukcapil	100%	10.000.000	**APBD**	-	100%	100.000.000
XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disdukcapil	1 Dokumen	10.000.000	**APBD**	Asuransi untuk10 Kendaraan Dinas	1 Dokumen	100.000.000
XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil	100%	1.819.424.000	**APBD**	-	100%	3.170.000.000
XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1 Paket	25.000.000	**APBD**	-	1 Paket	40.000.000
XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1 Paket	409.424.000	**APBD**	- Pembelian alat perekaman 22 set - Pembelian Laptop - Pembelian Printer - Pembelian AC -Pembelian Fillinf Cabinet	1 Paket	2.100.000.000
XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1 Paket	880.000.000	**APBD**	- Pembelian Ribbon KTP-El - Pembelian Tinta Printer	1 Paket	1.800.000.000
XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapil	1 Paket	50.000.000	**APBD**	- Pengadaan Formulir Adminduk	1 Paket	300.000.000

							- Pembelian Blangko KIA		
XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disdukcapil	1 Dokumen	15.000.000	**APBD**	-	1 Dokumen	40.000.000
XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil	1 Laporan	40.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	40.000.000
XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	1 Laporan	400.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	400.000.000
XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaannya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang	Disdukcapil	100%	850.000.000	**APBD**	-	100%	930.000.000
XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdukcapil	12 Laporan	380.000.000	**APBD**	-	12 Laporan	380.000.000
XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1 Laporan	70.000.000	**APBD**	Penambahan anggaran untuk servis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	150.000.000
XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	1 Laporan	400.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	400.000.000
XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dukcapil Kab. Serang	Disdukcapil	100%	200.000.000	**APBD**	-	100%	250.000.000
XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disdukcapil	20 Unit	150.000.000	**APBD**	-	20 Unit	150.000.000
XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disdukcapil	1 Unit	50.000.000	**APBD**	-	1 Unit	100.000.000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**Disdukcapil**	**100%**	**200.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**400.000.000**
12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Disdukcapil	100%	150.000.000	**APBD**	-	100%	250.000.000
12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	2 Dokumen	30.000.000	**APBD**	-	2 Dokumen	50.000.000

12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	120.000.000	**APBD**	- Jemput Bola pelayanan perekaman	1 Laporan	200.000.000
2.12.02.04	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	100%	25.000.000	**APBD**	-	100%	50.000.000
2.12.02.04.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	25.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	50.000.000
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	100%	25.000.000	**APBD**	-	100%	100.000.000
2.12.02.2.04.01	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	25.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	100.000.000
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil**	Disdukcapil	100%	170.000.000	**APBD**	-	100%	250.000.000
12.03.02.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100%	120.000.000	**APBD**	-	100%	200.000.000
12.03.02.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Disdukcapil	13 Layanan	120.000.000	**APBD**	Jemput bola pelayanan adminduk	13 Layanan	200.000.000
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100%	50.000.000	**APBD**	-	100%	50.000.000
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	50.000.000
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat UPT ataupun di Tingkat Dinas**	Disdukcapil	**100%**	**405.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**650.000.000**
12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Disdukcapil	100%	175.000.000	**APBD**	-	100%	200.000.000
12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	10 Dokumen	75.000.000	**APBD**	-	10 Dokumen	100.000.000
12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Disdukcapil	1 Laporan	100.000.000	**APBD**	-	1 Laporan	100.000.000
12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Disdukcapil	100%	175.000.000	**APBD**	-	100%	250.000.000
12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	30 Laporan	100.000.000	**APBD**	-	30 Laporan	150.000.000
12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	Disdukcapil	1 Dokumen	75.000.000	**APBD**	-	1 Dokumen	100.000.000

	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kepentingan dan Masyarakat							
12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Disdukcapil	100%	55.000.000	**APBD**	-	100%	200.000.000
12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependuduka	Disdukcapil	2 Laporan	55.000.000	**APBD**	Pelaksanaan bimtek bagi operator	2 Laporan	200.000.000
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang**	**Disdukcapil**	**100%**	**45.000.000**	**APBD**	-	**100%**	**150.000.000**
12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan	Disdukcapil	1 Dokumen	45.000.000	**APBD**	-	1 Dokumen	150.000.000
12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Disdukcapil	1 Dokumen	45.000.000	**APBD**	Penambahan cetak buku profl kependudukan	1 Dokumen	150.000.000
Jumlah					**18.997.804.000**				**23.755.000.000**

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Program administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,Pemanfaatan data Inovasi Pelayanan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Peran strategis administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

Pada RKPD tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mendapat pagu anggaran senilai Rp. 18.997.804.000 yang terdiri atas belanja wajib senilai Rp. 200.000.000, belanja prioritas Rp. 900.000.000, belanja gaji dan tunjangan pegawai senilai Rp.

13.998.380.000 dan senilai Rp. 4.999.424.000 untuk kebutuhan belanja rutin operasional dinas, maka berdasarkan hasil telaahan dan Analisa yang telah dilakukan berkaitan dengan kebutuhan dan prioritas pelaksanaan kinerja, pagu tersebut belum memenuhi kebutuhan minimal yang diharapkan. Sesuai hasil Analisa, kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk tahun 2025 membutuhkan anggaran senilai Rp. 23.755.000.000

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berdasar dinamika tuntutan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang melaksanakan kegiatan pelayanan keliling secara rutin untuk lokasi yang jauh dari pelayanan seperti sekolah, pondok pesantren, desa dan tempat lainnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut, sarana dan prasarana peralatan pendukung kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya harus memiliki kualitas dan kondisi yang prima yang mana sarana dan prasarana yang sekarang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas seperti perangkat alat perekaman KTP-El, komputer, printer, kamera, dan lain-lain. Pada rencana kerja tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengajuan penambahan alat perekaman KTP El, komputer dan printer melalui sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak masing-masing 10 set unit serta pengajuan penambahan kendaraan dinas bagi operasional dinas karena kendaraan yang sekarang dimiliki sudah berusia lebih dari 10 tahun dan sudah kurang menunjang mobilitas para pegawai.

Demikian Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025 yang dapat kami susun dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berbasis SIAK *online* di Tahun 2025.

Serang, 3 Juli 2024
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

WARNERRY POETRI, SH., M.Si
NIP 19800224 201001 2 004

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Veteran No. 1 Serang – Provinsi Banten
Telp. (0254) 200953-200737-200252. Fax. (0254) 201952
e-mail: diskominfosatik@serangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG

NOMOR : 700/005-Diskominfosatik/Sekret/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat satu (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
b. Bahwa untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, yang terdiri dari unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Instansi yang menangani Perencanaan Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kominfosatik Kab. Serang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025.

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor I Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati No. 316 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Serang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kominfosatik Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025.

KESATU...

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, terdiri dari:
- Tim Sekretariat
- Kelompok Kerja

KETIGA : Ketua Tim Sekretariat dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, mempunyai tugas:
- Memberikan pengarahan dan masukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025, agar penyusunan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025;
- Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- Mengkoordinir tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025;
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025.

KEEMPAT : Tim Sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 ini mempunyai tugas:
- Mengkoordinir Pembentukan tim penyusun Renja Diskominfosatik dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025;

Mempersiapkan...

- Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025;
- Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan nota dinas penyusunan Renja hingga verifikasi rancangan Renja Diskominfosatik.

KELIMA : Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan ini mempunyai Tugas:

- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025;
- Mengumpulkan/menghimpun data dan menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan RKPD 2025;
- Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
- Koordinator Kelompok Kerja melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah sesuai dengan bidang tugas didalam Tim I, II, dan Tim III;
- Mengkoordinir penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja Diskominfosatik;
- Mengkoordinir penyusunan dan perumusan rancangan Renja Diskominfosatik yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mencakup:
  1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Perangkat Daerah;

2. Renja Perangkat...

  2. Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan Perangkat Daerah dan perkiraan tingkat capaian target Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan;
  3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
  4. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Perangkat Daerah dan Informasi lain yang terkait pelayanan Perangkat Daerah.

KEENAM : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas:

- Menyiapkan dokumen Renja di Bidangnya;
- Menguasai substansi fungsi dan tugas Bidangnya;
- Anggota Kelompok Kerja yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG

Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
NIP. 19800620 200604 1 016

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 700/005-Diskominfosatik/Sekret/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Pengarah
2	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	Kasubag Keuangan, Program dan Evaluasi	Sekretaris Tim
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Esti Pitarawasti, A.Md.	Anggota
6	Hendra, SE.	Anggota
7	Siskawati.	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG

Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si
NIP. 19800620 200604 1 016

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 700/005 -Diskominfosatik/Sekret/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

1. KELOMPOK KERJA I BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Komunikasi Informasi Publik	Koordinator Kelompok Kerja
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
4	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 yang terkait dengan Bidang Komunikasi Informasi Publik.

2. KELOMPOK KERJA II BIDANG APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Aplikasi dan Teknologi Informatika	Koordinator Kelompok Kerja
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 yang terkait dengan Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika.

3. KELOMPOK KERJA III BIDANG PERSANDIAN DAN DATA STATISTIK

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Persandian dan Data Statistik	Koordinator Kelompok Kerja
2	Statistisi Ahli Muda	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
4	Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota

Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 yang terkait dengan Bidang Persandian dan Statistik.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG

Dr. H. Heeroflatna, S.Kom., M.Si
NIP. 19800520 200604 1 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfosatik Kabupaten Serang Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Diskominfosatik Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang.

Serang, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Dr. H. Nagarudin, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800620 200604 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 26

2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

Bab III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 37

3.3. Program dan Kegiatan 38

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

Bab V PENUTUP 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Surat Edaran Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman dan Jadwal Penyelenggaraan Forum OPD TA. 2025, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

Bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025 terkait kewenangan urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukkan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis

gambaran pelayanan, mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Renja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Banten.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Serang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Serang yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional.

Renja PD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan teknologi informatika;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan teknologi informasi; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang

Bab V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang baru terbentuk pada tahun 2019 dan merupakan pemisahan dari Bagian Komunikasi dan Informatika pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan maupun realisasi. Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang melaksanakan 9 program, 36 kegiatan. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Kegiatan:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyediaan Bahan / Material
   h. Fasilistas Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, dengan Kegiatan:
   1) Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
c. Pelayanan Informasi Publik
d. Layanan Hubungan Media
e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. **Program Aplikasi Informatika**, dengan Kegiatan:
   1) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      a. Pendaftaraan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
      b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   2) Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
      b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
      c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, dengan Kegiatan:
   1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
      b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang Terintegrasi
      c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
      d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
      e. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, dengan Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Diskominfosatik Kabupaten Serang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	**16**				**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	**16**	**1**	**2.01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**									
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1	1
2	**16**	**1**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**									
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	100%	30 Orang/Bulan	88	2,933333333
2	**16**	**1**	**2.03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3
2	**16**	**1**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**									
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	1 Orang	-	-	-	-	-	-
2	**16**	**1**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**									
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	3
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	3
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	3
2	**16**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1	0,05
2	**16**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	3
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	-	-
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	3
2	**16**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	0,230769231
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	0,041666667
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	3
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**									
2	**16**	**2**	**2.01**		**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	18 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	355 Komunitas	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	18 Permohonan	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
						publik								
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daaerah yang Dikelola maupun pemanfatatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1220 Konten	-	-	-	-	-	-	-
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	9 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**									
2	**16**	**3**	**2.01**		**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	**16**	**3**	**2.02**		**PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	16	3	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	20 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang Diusulkan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun ddan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubungn dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	20 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerh di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	1 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	15 Layanan	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen gfasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	28	Koordinasi dan fasilitasi, promosi, literasi, SPBE dan/ atau kolaborasi penyelenggaraaan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	1 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2	**20**				**STATISTIK**									
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	**20**	**2**	**2.01**		**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	20	2	2.01	7	Peningkatan kapasitas kelembaagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatakan pelatihan di bidang statistik	29 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	20	2	2.01	8	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitroring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	95%	-	-	-	-	-	-	-
2	20	2	2.01	9	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Presentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	95%	-	-	-	-	-	-	-
2	**21**				**PERSANDIAN**									
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**									
2	**21**	**2**	**2.01**		**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6	3
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6	3
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	29 Perangkat Daerah	58	2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100%	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) x 100%
2	**21**	**2**	**2.02**		**PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	58 Perangkat Daerah	58	1
											38,46%		**269**	**58,26**

Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfosatik
Kabupaten Serang

NO	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)			70%	75%	80%	85%	92.55%		80%	85%	
3	Indeks Kematangan Penerapan SPBE			2,98	2,98	2,99	3,00	2,64	3,23	2,99	3,00	
4	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)			120	140	160	170	240		160	170	
5	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan			60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	C	B	B	B	
7			• Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo					96,67%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo					96,67%	100%	100%	100%	

			• Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah					Ya	Ya	Ya	Ya	
8			• Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan					320%	122,41%	100%	100%	
			• Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik					42,8%	71,42%	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah					100%	100%	100%	100%	

			• Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah					26,67%	13,79%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah					26,67%	13,79%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)					96,67%	50%	100%	100%	
			• Persentase data yang dapat berbagi pakai					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city					96,67%	100%	100%	100%	
			• Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo					10,34%	100%	100%	100%	
			• Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government					Ada	Ada	Ada	Ada	
9			• Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)					100%	100%	100%	100%	
			• Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan					100%	100%	100%	100%	
10			• Tersedianya buku profil daerah					Ada	Ada	Ada	Ada	
			• Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan					Tidak ada	Ada	100%	100%	

			• Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan					Tidak ada	Ada	100%	100%	
			• Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS					Tidak ada	Tidak ada	100%	100%	
			• Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS					Tidak ada	Tidak ada	100%	100%	
			• Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral					Tidak ada	Tidak ada	100%	100%	
			• Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral					Tidak ada	Tidak ada	100%	100%	
11			• Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan					100%	Tidak ada	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah					84%	100%	100%	100%	
			• Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah					20%	100%	100%	100%	
			• Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan					16,67%	Tidak ada	100%	100%	

Tabel 2.2.

Dari tabel di atas tergambar bahwa capaian kinerja dari semua target indikator kinerja utama (IKU) Diskominfosatik hingga tahun 2023 bisa tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negative bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan disemua bidang.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Serang Smart City melalui strategi pelayanan berbasis Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan Informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasamaa pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dalam bidang e-Government atau SPBE, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Lembaga Kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Visi dan Misi Kabupaten Serang

A. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS"

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 yaitu: **"Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis"**. Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, **visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026** merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian **visi pembangunan Provinsi Banten** dan **visi pembangunan nasional**.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

SEMAKIN MAJU :

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA :

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah

(agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang.

Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN :

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS :

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang.

Memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

B. MISI

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 maka **misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026** adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DISETIAP JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN SERTA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN TRADISI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL YANG TUMBUH DAN HIDUP DITENGAH MASYARAKAT.
2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL.

3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS.

4. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT, UNTUK OPTIMALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN DAN PROFESIONAL DENGAN DILANDASI OLEH KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER.

6. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan peran serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Tindakan nyata tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas komunikasi dan informatika melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Mewujudkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi dalam satu sistem dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, menciptakan efisiensi anggaran yang dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan;
4. Mengelola seluruh sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga menciptakan kesatuan sistem yang benar-benar terintegrasi seluruh fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja aparatur yang tentunya dalam

upaya mewujudkan kemudahan layanan publik sebagai wujud terselenggaranya e-Government.

Tantangan dan Peluang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah serta mengunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan layanan publik.

Tantangan:

1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arusinformasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan security system;
2. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Serang;
3. Belum tersedianya pusat data (data center) daerah yang tentunya mengakibatkan terciptanya pulau-pulau informasi dengan data yang berbeda antara satu instansi dengan yang lainnya;
4. Kurangnya komitmen para aparatur untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peluang :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan disemua bidang;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik;

3. Reformasi birokrasi dengan e-Government mendukung terciptanya Good Government and Clean Governance;
4. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas efektivitas dan azas efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik;
5. Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Serang dengan penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan adanya tantangan dan peluang, program-program nasional/ internasional serta mendukung Visi Kabupaten Serang, beberapa langkah atau strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mengembangkan situs web yang berisi informasi yang diperlukan publik, baik yang bersifat statis maupun dinamis;
2. Menampilkan informasi APBD, pengadaan barang/jasa di situs web Pemerintah Kabupaten Serang;
3. Semakin mengintensifkan penggunaan TI dalam operasional aparatur menuju paperless office;
4. Semakin memantapkan e-Government;
5. Mengajukan rancangan produk hukum ketatalaksanaan e-Government di Pemerintah Kabupaten Serang;
6. Melaksanakan sosialisasi blue-print atau master-plan e-Government/ SPBE;
7. Mengajukan anggaran untuk peremajaan mainframe server;
8. Mengajukan anggaran untuk biaya maintenance infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak;
9. Revitalisasi pusat data (data center);
10. Mengintensifkan penggunaan workshop untuk in-house training;
11. Turut serta dalam mewujudkan responsive gender;
12. Membuat inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Berikut adalah hasil review atau telaahan terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD Tahun 2025
Kabupaten Serang

Kode					Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Serang	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	**8.396.280.528**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Serang	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	**9.132.231.373**	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar Rp. 735.950.845 dengan rincian Rp. 434.500.000 untuk gaji pns, Rp. 61.450.845 untuk gaji non pns dan Rp. 240.000.000 untuk Biaya Listrik Gedung Baru di Puspemkab selama 1 tahun.
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kab. Serang	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	**2.701.328.244**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kab. Serang	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100%	**3.128.833.572**	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 427.505.328 untuk gaji non pns, dewan direksi radio, dan koordinator bidang.

Kode					Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kab. Serang	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90%	**5 .762.680.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kab. Serang	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90%	**6.991.924.528**	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 1.229.244.528 untuk bandwith 29 kecamatan (6 bulan) sebesar 1.200.000.000 dan gaji non pns sebesar 29.244.528.
							Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	80%				Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	80%		
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kab. Serang	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	55%	**683.545.367**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kab. Serang	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	55%	**696.090.167**	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 12.544.800 honor non pns (tenaga ahli).
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kab. Serang	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	65	**609.134.633**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kab. Serang	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	65	**615.045.593**	Hasil Analisis Kebutuhan : Penambahan pagu sebesar 5.901.960 honor non pns.
TOTAL									**18.152.968.772**					**20.564.125.233**	

Tabel 2.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Dari usulan hasil kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan melalui tahapan awal Musrenbang Desa kemudian naik ke Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten, pada tahun 2024 Diskominfosatik tidak menerima Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimasikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal, dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berupaya memasukkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas bandwith layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet;
2. Meningkatkan pemberian informasi pada masyarakat dengan Pemerintah secara transparan dan efisien;
3. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar tercipta proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses;
4. Mengoptimalkan sumber daya Telematika untuk peningkatan kelompok informasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain;

1. Terwujudnya Kabupaten Serang Smart City melalui strategi pelayanan berbasis Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi 5 RPJMD, perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Infromatika, Persandian dan Statistik seperti tertuang dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah meningkatkan kapasitas bandwith layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan dengan indikator utama persentase wilayah yang terlayani.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Serang, sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Diskominfosatik Kabupaten Serang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**16**				**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Kab. Serang	100%	**8.396.280.528**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**10.075.536.634**
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Dokumen	**34.936.132**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	**41.923.358**
2	16	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Dokumen	34.936.132	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	41.923.358
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Serang	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0

2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Serang	30 Orang/ Bulan	**5.205.500.000**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Orang/ Bulan	**6.246.600.000**
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Serang	30 Orang/ Bulan	5.205.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Orang/ Bulan	6.246.600.000
2	**16**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Serang	100%	**50.772.720**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**60.927.264**
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Serang	1 Dokumen	50.772.720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.927.264
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Serang	100%	**2.093.786.662**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**2.512.543.994**
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	24.768.196	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	29.721.835
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	772.961.980	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	927.554.376

2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	22.004.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	26.404.800
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	56.973.455	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	68.368.146
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Paket	460.020.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Paket	552.024.120
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang Disediakan	Kab. Serang	1 Dokumen	23.958.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	28.749.600
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Serang	1 Dokumen	53.100.931	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	63.721.117
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Serang	1 Laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	48.000.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Serang	1 Laporan	640.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	768.000.000

2	**16**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Serang	100%	**150.000.000**			100%	**180.000.000**
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Serang	1 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	180.000.000
2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Serang	100%	**458.010.009**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**549.612.011**
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Serang	1 Laporan	140.071.849	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	168.086.219
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Serang	12 Laporan	92.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	110.880.000
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Serang	1 Laporan	225.538.160	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	270.645.792
2	**16**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Serang	100%	**403.275.005**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**483.930.006**

2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Serang	1 Unit	232.532.355	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	279.038.826
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Serang	1 Unit	70.742.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	84.891.180
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Serang	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	120.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	Kab. Serang	100%	**2.701.328.244**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**3.241.593.893**
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**2.701.328.244**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**3.241.593.893**
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Serang	18 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 Laporan	6.000.000

2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Serang	355 komunitas	16.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		355 komunitas	19.200.000
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Serang	12 Laporan	52.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	62.400.000
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Serang	18 Permohonan	37.171.356	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 Permohonan	44.605.627
2	16	2	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kab. Serang	100%	102.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	122.400.000
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Serang	1 Rekomendasi	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	60.000.000
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Serang	100%	47.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	56.400.000

2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daaerah yang Dikelola maupun pemanfatatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Serang	4 Media	1.411.313.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Media	1.693.576.320
2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Kab. Serang	2 Dokumen	620.355.358	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	744.426.430
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Serang	1220 Konten	15.959.080	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1220 Konten	19.150.896
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Serang	9 Orang	344.528.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		9 Orang	413.434.620
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Serang	90%	**5.762.680.000**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90%	**6.915.216.000**
						Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah		80%				80%	

2	**16**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**32.800.000**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**39.360.000**
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	Kab. Serang	1 Dokumen	32.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			39.360.000
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**5.729.880.000**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**6.875.856.000**
2	16	3	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	Kab. Serang	20 Aplikasi	Rp146.148.736	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Aplikasi	175.378.483
2	16	3	2.02	14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Kab. Serang	1 Dokumen	Rp23.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	28.200.000
2	16	3	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	Kab. Serang	1 Dokumen	Rp100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000

2	16	3	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang Diusulkan	Kab. Serang	2 Dokumen	Rp225.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	270.000.000
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun ddan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Serang	1 Aplikasi	Rp470.231.264	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Aplikasi	564.277.517
2	16	3	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubungn dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kab. Serang	20 Aplikasi	Rp150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20 Aplikasi	180.000.000
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Kab. Serang	1 Perangkat Daerah	Rp350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Perangkat Daerah	420.000.000
2	16	3	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	Kab. Serang	15 Layanan	Rp250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Layanan	300.000.000

2	16	3	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen gfasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	Kab. Serang	1 Dokumen	Rp75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	90.000.000
2	16	3	2.02	28	Koordinasi dan fasilitasi, promosi, literasi, SPBE dan/ atau kolaborasi penyelenggaraaan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Serang	1 Dokumen	Rp100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	Kab. Serang	1 Perangkat Daerah	Rp3.840.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Perangkat Daerah	4.608.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup Daerah	Kab. Serang	55%	**683.545.367**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		55%	**820.254.440**
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**683.545.367**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**820.254.440**
2	20	2	2.01	7	Peningkatan kapasitas kelembaagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatakan pelatihan di bidang statistik	Kab. Serang	29 Orang	269.514.550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Orang	323.417.460

2	20	2	2.01	8	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitroring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Kab. Serang	95%	191.388.316	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	229.665.979
2	20	2	2.01	9	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Presentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	Kab. Serang	95%	222.642.501	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	267.171.001
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Kab. Serang	65	**609.134.633**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		65	**730.961.560**
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**531.216.300**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**637.459.560**
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Serang	1 Dokumen	142.738.333	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	171.286.000

2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	2 Laporan	75.818.333	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	90.982.000
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Serang	2 Laporan	171.176.301	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	205.411.561
2	21	2	2.01	4	Penyediaaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Serang	29 Perangkat Daerah	141.483.333	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		29 Perangkat Daerah	169.780.000
2	**21**	**2**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Serang	100%	**77.918.333**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	**93.501.200**
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Serang	58 Perangkat Daerah	77.918.333	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		58 Perangkat Daerah	93.501.200
TOTAL									**18.152.968.772**				**21.783.562.526**

Tabel 3.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang sesuai Tugas pokok dan fungsi akan melaksanaka Rencana Kerja dan pendanaan dalam program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi (sosialisasi e-office, e-budgeting, e-harga dan pengembangan Command Center). Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih, berintegritas, professional dan berkinerja tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang tahun 2025.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yaitu Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi dan ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Sasaran KESATU adalah : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan indikator sasaran:

1) Jumlah Aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh OPD

Sasaran KEDUA adalah : Pemeliharaan dan pengelolaan Website dengan indikator sasaran :

1) Jumlah kunjungan Website

4.2. Program dan Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan Sumberdaya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SERANG

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**8.396.280.528**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	**%**	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**8.396.280.528**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**34.936.132**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.936.132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**5.205.500.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.205.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**50.772.720**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.772.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua	**2.093.786.662**	Dana Transfer Umum-Dana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Daerah			Kelurahan		Alokasi Umum
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.768.196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	772.961.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.004.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.973.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460.020.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.958.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1 Paket	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.100.931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	640.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**150.000.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	20 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**458.010.009**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.071.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.538.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**403.275.005**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	13 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232.532.355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	72 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.742.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL 1	**8.396.280.528**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**2.701.328.244**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**2.701.328.244**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**2.701.328.244**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	18 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	355 Komunitas	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	12 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	18 Permohonan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.171.356	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						komunikasi publik			Kelurahan		
2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	20	Diseminasi Informasi	Presentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daaerah yang Dikelola maupun pemanfatatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4 Media	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.411.313.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	620.355.358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1220 Konten	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.959.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	02	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	9 Orang	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	344.528.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL 2	**2.701.328.244**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**5.762.680.000**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	90%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**5.762.680.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	80%			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**%**	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**32.800.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.01	04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**5.729.880.000**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional	Aplikasi	20 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.148.736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang Diusulkan	Dokumen	2 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun ddan/atau dikembangkan	Aplikasi	1 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	470.231.264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					Umum
2	16	03	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubungn dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Aplikasi	20 Aplikasi	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi, yaitu portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan dan/ atau portal data nasional	Layanan	15 Layanan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen gfasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas kominfo	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	28	Koordinasi dan fasilitasi, promosi, literasi, SPBE dan/ atau kolaborasi penyelenggaraaa n SPBE	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas	Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.840.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL 3	**5.762.680.000**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**683.545.367**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK**	Tingkat Ketersediaan Statistik Sektoral Di lingkup	%	55%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua	**683.545.367**	Dana Transfer Umum-Dana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					SEKTORAL	Daerah			Kelurahan		Alokasi Umum
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**683.545.367**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	02	2.01	07	Peningkatan kapasitas kelembaagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatakan pelatihan di bidang statistik	Orang	29 Orang	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269.514.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	02	2.01	08	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitroring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	%	95%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191.388.316	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	20	02	2.01	09	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Presentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	%	95%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.642.501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**609.134.633**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	65%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**609.134.633**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**609.134.633**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142.738.333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Tahun 2025	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.818.333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2 Laporan	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171.176.301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.483.333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**					**77.918.333**	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.918.333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL 4	**1.292.680.000**	
									TOTAL 1+2+3+4	**18.152.968.772**	

Tabel 4.1.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik bidang komunikasi dan informasi Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian untuk dilaksanakan.

Serang, Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Dr. H. Haerofiatna, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800620 200604 1 016

RENCANA KERJA (RENJA)
DPMPTSP TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang
2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Isi Rencana Kerja ini merupakan rangkuman evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Penjabaran Program dan Indikasi Kegiatan yang termuat pada RENSTRA dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun mengacu pada RENJA, RENSTRA DPMTPSP, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang di hadapi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat

Akhirnya mudah-mudahan Rencana Kerja ini, dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Masyarakat pada umumnya.

Serang, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026..... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP 18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi DPMPTSP..... 20

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP..... 21

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21
3.2. Tujuan Dan Sasaran Ranwal Renja DPMPTSP..... 22
3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP..... 23

BAB IV. RENCANA KERJA PROGRAM DAN

PENDANAAN DPMPTSP..... 33

4.1. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan 2025..... 33

BAB V. P E N U T U P 45

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1 Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023..... 7
2. Tabel 2.2 Belanja Daerah..... 11
3. Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan..... 11
4. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2023..... 17
5. Tabel 2.5 Capaian Indikator DPMPTSP 2021 dan 2026..... 21
6. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 24
7. Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2025..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang yaitu pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan satu Dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu Dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja DPMPTSP adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RENJA, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang menyusun suatu Dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Kerja (RENJA-DPMPTSP) Tahun 2023. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut disusun berdasarkan visi Kabupaten Serang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang hendak diwujudkan yaitu "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra DPMPTSP 2021-2026 yaitu Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa
2. Sasaran Renstra DPMPTSP 2021-2026 yaitu Meningkatnya investasi Daerah

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatab Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 11 ahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

13. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati Serang periode 2021-2026.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah di identifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang berorientasi pada hasil.
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di

Kabupaten Serang dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

4. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2024 disusun dalam Empat BAB.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi DPMPTSP

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja DPMPTSP

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2023), mengacu pada kegiatan tahun berjalan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu, dan realisasi Renstra DPMPTSP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMPTSP dan/atau realisasi APBD untuk DPMPTSP.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 yang disusun pada awal tahun 2022. Renja tahun 2023 memuat target kinerja tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagai upaya mewujudkan sasaran dan tujuan utamanya kearah peningkatan pendapatan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam pelaksanaanya di dukung dengan pengalokasian anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN atau sumber dana lainnya yang terkoordinasi secara legal.

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang mendapat Alokasi Anggaran Perubahan sebesar : 11.597.119.966,-yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi : Rp 11.462.987.566,-

b. Belanja Modal : Rp 134.132.400,-

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**10,320,566,466.00**	**9,221,689,628.00**	**89.35**
1	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH**	128,261,022.00	120,363,765.00	93.84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	39,063,900.00	36,967,365.00	94.63
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9,560,400.00	9,546,000.00	99.85
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,636,722.00	6,600,000.00	99.45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,000,000.00	8,700,000.00	96.67
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,000,000.00	58,550,400.00	91.48
2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	7,907,580,000.00	7,106,209,971.00	89.87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,893,000,000.00	7,093,492,971.00	89.87
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,800,000.00	9,000,000.00	83.33

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3,780,000.00	3,717,000.00	98.33
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37,974,600.00	29,930,000.00	78.82
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	37,974,600.00	29,930,000.00	78.82
3	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	865,034,244.00	744,886,400.00	86.11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13,145,500.00	13,089,500.00	99.57
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,984,200.00	0.00	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155,249,600.00	117,353,100.00	75.59
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107,243,500.00	87,040,000.00	81.16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45,326,000.00	43,708,000.00	96.43
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120,206,100.00	88,200,300.00	73.37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,879,344.00	395,495,500.00	99.90
4	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH**	1,159,785,900.00	1,045,174,548.00	90.12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55,828,800.00	51,170,196.00	91.66
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202,592,000.00	195,000,000.00	96.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	901,365,100.00	799,004,352.00	88.64
5	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	221,930,700.00	175,124,944.00	78.91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142,347,000.00	134,569,144.00	94.54
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,270,600.00	15,000,000.00	29.84

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,313,100.00	25,555,800.00	87.18
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**66,744,000.00**	**20,828,500.00**	**31.21**
6	**PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN / KOTA**	66,744,000.00	20,828,500.00	31.21
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	33,944,000.00	10,932,500.00	32.21
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	32,800,000.00	9,896,000.00	30.17
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**109,007,500.00**	**104,950,000.00**	**96.28**
7	**PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	109,007,500.00	104,950,000.00	96.28
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	109,007,500.00	104,950,000.00	96.28
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**171,300,000.00**	**163,966,550.00**	**95.72**
8	**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	171,300,000.00	163,966,550.00	95.72
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	131,300,000.00	124,372,800.00	94.72
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	15,000,000.00	14,750,000.00	98.33
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	25,000,000.00	24,843,750.00	99.38

	Perizinan dan Non Perizinan			
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**526,071,800.00**	**435,252,065.00**	**82.74**
9	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	526,071,800.00	435,252,065.00	82.74
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24,500,000.00	17,250,000.00	70.41
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	316,811,800.00	298,865,740.00	94.34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	184,760,000.00	119,136,325.00	64.48
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**403,430,200.00**	**347,441,350.00**	**86.12**
10	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	403,430,200.00	347,441,350.00	86.12
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	403,430,200.00	347,441,350.00	86.12
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**11,597,119,966.00**	**10,294,128,093.00**	**88.76**

Tabel 2.2
Belanja Daerah

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	BELANJA DAERAH			
1	**BELANJA OPERASI**	11.462.987.566	10.188.928.093	88,89
	Belanja Pegawai	7.893.000.000	7.093.492.971	89,87
	Belanja Barang dan Jasa	3569987566	3095435122	86,71
2	**BELANJA MODAL**	134.132.400	105.200.000	78,43
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.132.400	105.200.000	78,43
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**11.597.119.966**	**10.294.128.093**	**88,76**

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2022	
			Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.500.000,-	5.100.000,-	68,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,-	0,-	0
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	12.250.000.000	10.760.458.931,-	87,84
	Jumlah	**12.258.500.000,-**	**10.765.558.931,-**	**87,82**

Pada tabel diatas terlihat bahwa Target Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 12.200.000.000,- dengan realisasi Realisasi Rp. 10.760.458.931,-

atau sekitar 87,84 %. Dan pencapaiannya dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan (Izin Laik Sehat) Rp. 5.100.000,- dari target Rp. 7.500.000,- atau sekitar 68,00 %. Realisasi Retribusi Izin Trayek angkutan Penumpang umum 0,- dari target 1.000.000,- atau sekitar 0 %

1. Uraian Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023

Program pada urusan penanaman modal tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   2. Administrasi keuangan perangkat daerah
   3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   4. Administrasi umum perangkat daerah
   5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

b. Program pengembangan iklim penanaman modal
   1. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota

c. Program promosi penanaman modal
   1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

d. Program pelayanan penanaman modal
   1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

e. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
   1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

1. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.774.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.828.500,- (31,32 %) . Dalam Pelaksanaannya Program di tunjukan sebagai upaya meningkatkan investor menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain:

   2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 66.774.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.828.500,- (31,32 %) dimaksudkan sebagai bentuk awal dalam menyusun kegiatan yang berhubungan dengan Rencana penanaman modal sampai dengan ke Peta penanaman modal output yang dihasilkan adalah 2 (dua) Dokumen.

b. Program Program Promosi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.007.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.950.000,- (96,28 %) . Dalam Pelaksanaannya Program di tunjukan sebagai upaya menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

   1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 109.007.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.950.000,- (96,28 %) , dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Serang baik dari ketersediaan Sumber Daya Alam maupun penawaran terhadap ketersediaan infrastruktur dan kemudahan investasi di Kabupaten Serang dengan output yang di hasilkan adalah 3 (satu) kegiatan penyebaran informasi investasi.

c. Program Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran Rp. 171.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.966.550,- (95,72 %) . Dalam Pelaksanaannya Program Pelayanan Penanaman Modal ditunjukan sebagai upaya meningkatkan Pelayanan Perizinan Tertentu dan non Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) yaitu :

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 171.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 163.966.550,- (95,72 %), dimaksudkan untuk memberikan segala bentuk pelayanan Perizinan Tertentu dan non Perizinan dalam bentuk menerima berkas permohonan perizinan , konsultasi perizinan, layanan pengaduan dengan output yang di hasilkan adalah persentase pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2023 sebesar 100%.

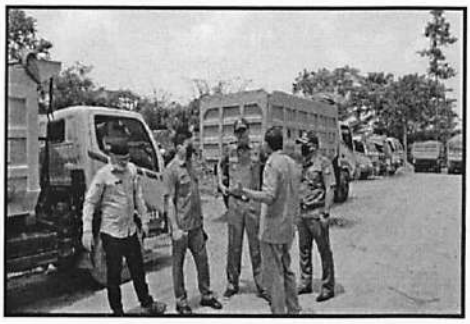

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK), dengan pagu anggaran Rp. 526.071.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 435.252.065,- (82,74%) . Dalam Pelaksanaannya Program Pelaksanaan Pengendalian ditunjukan sebagai upaya meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DAK), pagu anggaran Rp. 526.071.800,- realisasi anggaran 435.252.065,- (82,74%) dimaksudkan sebagai bentuk kegiatan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Output yang dihasilkan adalah pengendalian sudah dilaksanakan 100 %.

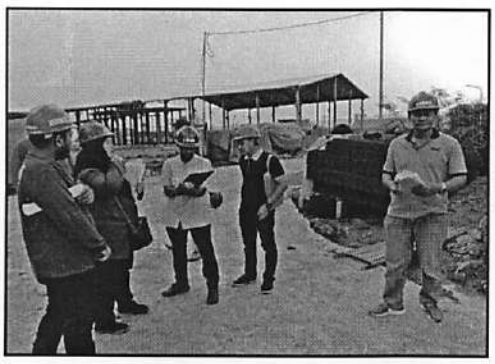

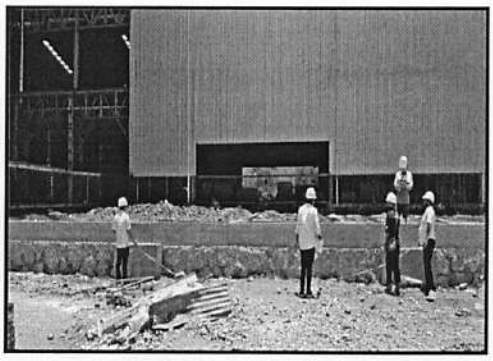

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran Rp. 403.430.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 347.441.350,- (86,12 %) . Dalam Pelaksanaannya Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal ditunjukan sebagai upaya meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Serang. Pada program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

1) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 403.430.200,- realisasi anggaran Rp. 347.441.350,- (86,12 %) dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas/ mutu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dipandang perlu guna memudahkan dalam pengadministrasian pengelolaan perizinan dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan perizinan secara online. Output yang dihasilkan adalah Aplikasi sistem informasi yang sudah di miliki DPMPTSP pada tahun 2023 yaitu updating website 100%

Demikian secara keseluruhan belanja pelaksanaan urusan Penanaman Modal yang direalisasi dalam Dokumenumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Serang tahun anggaran 2022 dengan kinerja yang dihasilkan antara lain :

1. Tersusunnya Perubahan Renstra 2021-2026 dan Renja DPMPTSP Tahun 2024
2. Terselenggaranya Updating Perizinan Online
3. Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Perizinan Tahun 2023
4. Terselenggaranya pameran investasi baik dalam maupun luar daerah
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 2.5
Tabel Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	**Meningkatnya investasi dan perekonomian masyarakat**	Nilai Investasi		
		PMA	2,62	Rp (T)
		PMDN	3,15	Rp (T)
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
		Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%
		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100	%
		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100	%
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
2	**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Nilai Sakip	B	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dari hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program-program tahun 2021-2026 tersebut, capaian indikator kinerja DPMPTSP sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra						Realisasi Renstra					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Investasi													
	PMA	Rp Trilyun	2.47	2.54	2.62	2.70	2.78	2.86	3.29	4.81	5,26			
	PMDN	Rp Trilyun	2.97	3.06	3.15	3.25	3.34	3.43	2.44	1.90	2,07			
2	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
3	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

6	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
7	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dalam RPJMD yaitu Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal yang dapat di jabarkan sebagai berikut sebagai :

1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan Pengembangan Promosi yang Berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan membangun Mal Pelayanan Publik;
3. Peningkatan pengembangan sistem data informasi terupdate dan terintegrasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2020-2024, Visi BKPM tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II yaitu: "**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**"

Misi BKPM RI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Arah Kebijakan

1. Peningkatan inovasi penanaman modal dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

DPMPTSP dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagai unsur pembantu Bupati telah menetapkan Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Serang, maka telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan

a. Meningkatkan Investasi.
b. Meningkatkan kualitas layanan publik.
c. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
d. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur.
e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
b. Meningkatkan pencapaian hasil penyelenggaraan pelayanan.
c. Meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat.
d. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur dengan pengetahuan pelayanan.
e. Meningkatnya investasi di Kabupaten Serang.

3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP

Berikut ini adalah penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Renja Tahun 2025				Perkiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Serang	1 dok	40,000,000	APBD	1 dok	40,000,000
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab Serang	2 dokumen	6,000,000	APBD	5 kegiatan usaha	6,000,000

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 dok	170,000,000	APBD	1 dok	170,000,000
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 peta	280,000,000	APBD	1 peta	280,000,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 dok	50,000,000	APBD	1 dok	50,000,000
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanakannya promosi penanaman modal	Kab Serang	3 kali	350,000,000	APBD	3 kali	350,000,000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Serang	3750 pelaku usaha	250,000,000	APBD	100 %	250,000,000

				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Serang	30 keg. Usaha	150,000,000	APBD	30 pelaku usaha	150,000,000
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab Serang	75 orang	100,000,000	APBD	25 pengaduan terselesaikan	100,000,000
				koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Serang	2 pelaku usaha	50,000,000		10 pelaku usaha	50,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang di selesaikan	Kab Serang	10 kegiatan usaha	75,000,000	APBD	100 pelaku usaha	75,000,000

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	272 pelaku usaha	100,000,000	APBD	2 keg (Bintek dan sosialisasi LKPM dan OSS)	100,000,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PenanamanModal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab Serang	100 kegiatan usaha	100,000,000	APBD	150 Pelaku usaha	100,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Serang	6250 dokumen	1,000,000,000	APBD	2 aplikasi, 1 aupdating sistem	1,000,000,000
	URUSAN UMUM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 dokumen	80,000,000	APBD	2 dok	80,000,000

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP MPT SP	2 dokumen	20,000,000	APBD	2 dokumen	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DP MPT SP	2 dokumen	20,000,000	APBD	2 dokumen	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP MPT SP	1 Laporan	50,000,000	APBD	1 dokumen	50,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP MPT SP	1 Laporan	80,000,000	APBD	1 dokumen	80,000,000

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DP MPT SP	43 orang/bulan	8,300,000,000	APBD	12 bulan	8,300,000,000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP MPT SP	1 dok	25,000,000	APBD	1 dok	25,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	DP MPT SP	4 laporan	10,000,000	APBD	2 dokumen	10,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DP MPT SP	72 set	60,000,000	APBD	72 set	60,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DP MPT SP	1 paket	50,000,000	APBD	12 bulan	50,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP MPT SP	1 paket	200,000,000	APBD	12 bulan	200,000,000

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP MPT SP	1 paket	250,000,000	APBD	12 bulan	250,000,000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP MPT SP	1 paket	300,000,000	APBD	12 bulan	300,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP MPT SP	4 dokumen	50,000,000	APBD	12 bulan	50,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP MPT SP	12 Laporan	200,000,000	APBD	12 bulan	200,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP MPT SP	12 Laporan	500,000,000	APBD	12 bulan	500,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP MPT SP	12 Laporan	30,000,000	APBD	12 bulan	30,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP MPT SP	12 Laporan	1,163,030,000	APBD	12 bulan	1,163,030,000

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP MPT SP	12 Laporan	1,752,215,468	APBD	12 bulan	1,752,215,468
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP MPT SP	27 unit	400,000,000	APBD	27 unit	400,000,000
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DP MPT SP	50 unit	230,000,000	APBD	3 Jenis	230,000,000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DP MPT SP	40 unit	100,000,000	APBD	40 unit	100,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP MPT SP	1 unit	100,000,000	APBD	12 bulan	100,000,000

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP MPTSP	1 unit	135,000,000	APBD	4 Jenis	135,000,000
								16,826,245,468			**16,826,245,468**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program Dan Kegiatan 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang membuat Program dan Kegiatan hasil dari RKPD pada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Adapun usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus menjadi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja 2025 DPMPTSP

Gaji dan Tunjangan	: Rp. 8.365.600.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 8.324.771.442,-
Total	: Rp.16.690.371.442,-

Tabel. 4.1
Rencana Kerja TA. 2025

Urusan pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Renja Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Serang	1 dok	22,000,000	APBD
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab Serang	2 dokumen	20,000,000	

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 dok	53,022,000	APBD
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 dok	161,400,000	APBD
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Serang	1 dok	50,000,000	APBD
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanakannya promosi penanaman modal	Kab Serang	3 kali	250,000,000	APBD

		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Serang	3750 pelaku usaha	150,000,000	APBD
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan	Kab Serang	30 keg. Usaha	110,000,000	APBD
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab Serang	75 orang	100,000,000	APBD

				koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Serang	2 pelaku usaha	40,000,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang di selesaikan	Kab Serang	10 kegiatan usaha	187,752,000	APBD
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Serang	272 pelaku usaha	265,292,000	APBD

				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha diawasi	Kab Serang	100 kegiatan usaha	285,600,000	APBD
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Serang	6250 dokumen	500,000,000	APBD
	URUSAN UMUM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 dokumen	40,000,000	APBD

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	2 dokumen	15,000,000	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	2 dokumen	15,000,000	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	40,000,000	APBD

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	1 Laporan	150,000,000	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DPMPTSP	43 orang/ bulan	8,365,600,000	APBD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	1 dok	12,500,000	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	4 laporan	6,000,000	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPTSP	72 set	30,450,000	APBD

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	97,076,000	APBD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	553,202,500	APBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	284,717,000	APBD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	280,040,400	APBD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	4 dokumen	72,000,000	APBD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	12 Laporan	200,870,000	APBD

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	728,298,242	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	30,000,000	APBD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	1,163,030,000	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	1,479,575,600	APBD

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	27 unit	524,360,000	APBD
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	50 unit	230,040,000	APBD
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	40 unit		APBD
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 unit	79,080,000	APBD

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1 unit	98,465,700	APBD
				Jumlah				**16,690,371,442**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun satu tahun sebagai tolok ukur indikator kinerja untuk pencapaian target atau sasaran yang telah direncanakan melalui kebijakan dan program kerja yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Selanjutnya agar program-program yang tertuang didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka diharapkan adanya peran serta dari semua stakeholders, demikian pula dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu, sehingga oleh semua pihak sehingga diperoleh umpan balik yang positif untuk pelaksanaan program-program tahun berikutnya.

Demikian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek bidang Penanaman Modal. Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang. Amin.

Serang, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang

H. SYAMSUDDIN, SH., MSi
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

RENCANA KERJA

DPMD

KABUPATEN SERANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadhirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindungan-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa Tahun Anggaran 2025.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihakdan semoga dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

Serang, 3 Juli 2024
Kepala DPMD Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

H. HARYADI, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19670616 198610 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan..... 6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas..... 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas..... 22
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas..... 48
3.3 Program dan Kegiatan 50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS..... 54
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan..... 54
BAB V PENUTUP 63
5.1 Catatan Penting 63
5.2 Kaidah Pelaksanaan 64
5.3 Rencana Tindak Lanjut 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan capaian Renstra 2021-2026 …… 15
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas …… 21
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2025 …… 30
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025. 41
Tabel 3.1 Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Serang…….. 49
Table 3.2 Rakapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan …….. 51
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 … 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selain berpedoman pada Renstra juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program–program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kab. Serang Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
30. Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Serang selama 1 (satu) tahun anggaran pada Tahun 2025 yang dituangkan dalam program/kegiatan dan sub kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai tolok ukur yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang didalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DPMD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPMD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra DPMD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja DPMD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan DPMD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi, dan misi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulas iisu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangakat Daerah

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan,prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi DPMD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2025.

Bab V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; da
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja DPMD tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah.

Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja DPMD Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penataan Desa

Program ini terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu :

a. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :

1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program kerja ini terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa, dengan sub kegiatan :

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program kerja ini terdiri dari satu kegiatan dan beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
5) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.
6) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
7) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
8) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program kerja ini terdiri dari satu kegiatan dan beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
   2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
   3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
   4) Fasilitasi Pemerintaha dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna.
   5) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
   6) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
   7) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET/OUPUT	REALISASI
A	**Program Penataan Desa**	**Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa**	**100 %**
I	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terselenggaranya Penataan Desa**	**100 %**
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Terlaksananya Penguatan Para Pendamping Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa dan melakukan monitoring dan evalusi pembangunan fisik	100 %
B	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Presentase Kerjasama Desa yang terfasilitasi**	**100 %**
II	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa**	**100 %**
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi mengenai Potensi Desa	100 %
C	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Tingkat tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**99 %**
III	**Kegiatan Pembinaan dan Pengaasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa**	**99 %**
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya RPJMDes di 326 Desa dan RKPDes di 326 Desa	100 %
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SISKREUDES Online di 326 Desa	100 %
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di 29 Kecamatan	100 %
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMDes. Di 30 Bumdes	100 %
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Profil Desa di 326 Desa dan sampai tahun ini ada 326 desa yang sudah membuat profil desa.	100 %

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET/OUPUT	REALISASI
8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Aset Desa , dan tersusunnya Laporan Aset Desa 314 Desa dari 326 Desa	99%
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD sebanyak 200 orang anggota BPD	100 %
10	Fasiitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa, melalui aplikasi Epdeskel Bina Pemdes oleh 326 desa	100 %
D	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	**100 %**
IV	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah/Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)**	**100 %**
11	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui pembinaan Peran LKD dalam menurunkan stunting di kab. Serang dan studi peran LKD dalam menurunkan, dan menghadiri undangan acara kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu untuk Konvergensi Stunting.	100 %
12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 6 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) melalui	100 %

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET/OUPUT	REALISASI
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sosialisasi Perbup No. 133 Tahun 2022 tentang Posyandu Kab. Serang, Monitoring dan Evaluasi dan Pendataan kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	
13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Memonitoring Pelaksanaan Musyawarah antar desa berkenaan dengan Bumdesma 1 dokumen	100 %
14	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	melalui menghadiri gelar TTG tingkat nasional di kabupaten Lampung 1 dokumen	100 %
15	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) 1 laporan	100 %
16	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Monev Satlinmas di 29 Kecamatan	100 %
17	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya kegiatan Pokja – pokja di 29 kecamatan.	100 %

Berkaitan dengan Renstra DPMD tahun 2021 - 2026, karena dokumen perencanaan ini ditetapkan pada tahun 2024, maka dalam mengevaluasi capaian Renstra DPMD, maka yang masuk dalam koridor evaluasi adalah capaian (perkiraan capaian) Renstra mulai tahun anggaran 2022, dan realisasi tahun 2023 merupakan bagian dari realisasi Renstra DPMD sebelumnya. Pencapaian kinerja DPMD sampai dengan saat disusunnya Rancangan Renja DPMD 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) x 100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4 x 100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah**	**1354**	**391**	**184**	**184**	**100**	**185**	**13**	**68,42**
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**19**	**7**	**3**	**3**	**100**	**3**	**13**	**68,42**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3	1	1	100	2	6	85,71
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	2	2	100	1	7	58,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan**	**303**	**39**	**34**	**34**	**100**	**37**	**110**	**36,30**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	284	32	32	32	100	35	99	34,86
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	0	0	0,00	0	1	55,56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18	6	2	2	0,00	2	10	**55,56**
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan barang milik daerah**	**72**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**33,33**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72	24	0	0	0	0	24	33,33

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**239**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**10,46**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	239	25	0	0	0	0	25	10,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**564**	**180**	**84**	**84**	**100**	**96**	**360**	**63,83**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	36	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	24	0	0	0	12	36	60,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah		**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasinal	16	0	0	0	0	-	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusn Pemerintahan Daerah**	**150**	**50**	**24**	**24**	**100**	**24**	**98**	**65,33**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2	0	0	0	0	2	33,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	48	66,67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**246**	**66**	**39**	**39**	**100**	**25**	**130**	**52,85**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	16	8	8	100	12	36	46,15
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162	50	30	30	100	12	92	56,79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	0	1	1	100	1	2	33,33
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Tingkat Tertib Penyelenggaraan Penataan Desa**	**2282**	**652**	**326**	**326**	**100**	**426**	**1404**	**61,52**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Terselenggaranya Penataan Desa**	**2282**	**652**	**326**	**326**	**100**	**426**	**1404**	**61,52**
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pentaan Kewenangannya	326	0	0	0	0	100	100	30,67
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1956	652	326	326	100	326	1304	66,67

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Kerjasama antar desa yang terfasilitasi**	**15**	**2**	**1**	**1**	**100**	**3**	**2**	**13,33**
	Fasilitasi Kerjasama antar desa	**Terfasilitasi Kerjasama antar Desa**	**15**	**2**	**1**	**1**	**100**	**3**	**6**	**40,00**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9	0	0	0	0	2	2	22,22
	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**12351**	**3311**	**1963**	**1951**	**99,39**	**2302**	**7564**	**61,24**
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa**	**12351**	**3311**	**1963**	**1951**	**99,39**	**2302**	**7564**	**61,24**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	326	0	0	0	0	326	326	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	9	0	0	0	0	3	3	33,33
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	174	58	29	29	100	29	116	66,67
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1956	652	326	326	100	326	1304	66,67
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2282	413	400	400	100	400	1213	53,16
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	210	30	30	30	100	40	100	47,62
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	326	144	0	0	0	0	144	44,17
	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1956	652	326	326	100	326	1304	66,67

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1956	652	326	314	96,32	326	1292	66,05
	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1200	58	200	200	100	200	458	38,17
	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1956	652	326	326	100	326	1304	66,67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**546**	**179**	**91**	**91**	**100**	**91**	**361**	**66,12**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terbinannya lembaga Kemasyarakatan Desa**	**546**	**179**	**91**	**91**	**100**	**91**	**361**	**66,12**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6	1	1	1	100	1	3	50,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) DPMD Th. 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMD Th. 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Th. 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2024(%)
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	174	58	29	29	100	29	116	66,67
	Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6	2	1	1	100	1	4	66,67
	Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6	0	1	1	100	1	2	33,33
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6	2	1	1	100	1	4	66,67
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	174	58	29	29	100	29	116	66,67
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	174	58	29	29	100	29	116	66,67
			16.803	**4.535**	**2.565**	**2.553**	**99,53**	**3.007**	**10.095**	**60,08**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang pada tahun 2023 memiliki 4 (Empat) Program Prioritas yaitu :

1. Program Penataan Desa.
2. Program Kerjasama antar Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Untuk mencapai Program–program tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki Indikator Utama yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Serang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM			16,87	17,79	18,71	19,63	24,54	30,06	32.82	35.58	
2	Tingkat Tertib Penyelenggaraan Penataan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kerjasama antar desa yang terfasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Serang tahun 2023 yang mendukung langsung terhadap Misi Bupati Serang "Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk mengoptimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan" dengan Tujuan Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa, Sasaran Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa dengan Indikator Prosentase desa maju dan mandiri didasarkan dari IDM mencapai 24,54% dari target 16,87%.

Dari keberhasilan tersebut dapat digambarkan melalui Indek Desa Membangun Kabupaten Serang bahwa desa dengan status desa tertinggal hanya tinggal 1 desa lagi dari sebelumnya 4 desa, sementara status desa mandiri menjadi 12 desa di tahun 2023 yang pada tahun 2022 hanya 4 desa mandiri.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta memantapkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat yang dapat dioperasionalkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana dan Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur;
2. Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan;
3. Sering berubahnya dan terlambatnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya regulasi berkenaan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa dari pusat (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri , dan Kementrian Desa sering terlambat.
4. Lemahnya koordinasi antar sektor;
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia ditingkat desa yang masih terbatas;
7. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2021– 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan optimal;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien;
2. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Mewujudkan perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana program kegiatan di bidang :

1. Perencanaan Keuangan dan Aset Desa meliputi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa;
2. Pemerintahan Desa meliputi Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Fasilitasi Administrasi Desa, dan fasilitasi penataan kewenangan desa;
3. Pemberdayaan meliputi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pembentukan dan Pembinaan Bumdes, Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta serta Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan

pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa, serta kegiatan gotong royong;

4. Pembangunan dan Kemasyarakatan meliputi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat Desa, penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa, serta Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui PKK.

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indek Desa Membangun, bahawa klasifikasi desa merdasarkan IDM sampai tahun 2023 dari jumlah 326 Desa sebagai berikut :

1.	Desa Mandiri	:	12	desa
2.	Desa Maju	:	68	desa
3.	Desa Berkembang	:	245	desa
4.	Desa Tertinggal	:	1	desa
5.	Desa Sangat Tertinggal	:	0	desa

Dari data IDM tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang merupakan isu penting untuk mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan lebih banyak lagi desa mandiri.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsive terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Banten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten).

Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi keharusan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD maupun dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan agenda prioritas RPJMD Tahun 2025 melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengukur kinerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi/ goodwill dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi didalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis.

Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi
   1) Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Serang dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan, melalui pembangunan desa;
   2) Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi (SOTK) yang baru (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Serang), telah membawa perubahan pada sistem pemberdayaan masyarakat dan desa, dimana pada organisasi seksi telah berubah menjadi pejabat fungsional pada bidang masing masing, sehingga penugasan dalam melaksanakan kegiatan bisa lebih fleksibel tidak lagi tersekat per seksi.

3) Adanya pegawai dengan jabatan fungsional yang mengisi formasi jabatan dibidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga lebih leluasa dalam mendukung dan melaksanakan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya kemandirian desa dan keswadayaan masyarakat.

4) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten maupun Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
2) Rendahnya kinerja (etos kerja,budaya kerja, pengetahuan) Pegawai;
3) Terbatasnya anggaran yang tersedia;
4) Kemampuan, ketrampilan, beban pekerjaan pegawai belum merata;
5) Pengelolaan database (metadata) yang belum terintegrasi/ tertata secara baik;
6) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (output, outcome, benefit, impact) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);

2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
3) Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4) Apresiasi positif dari pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga adat, lembaga kerja sama antar desa, dan elemen masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya;
5) Potensi desa dan Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan;
6) Adanya pendamping desa dan perguruan tinggi/ akademisi yang siap bersinergi;
7) Adanya potensi semangat gotong royong, kerja sama, dan partisipasi masyarakat perdesaan.
8) Berkembangnya arus teknologi informasi yang memengaruhi orientasi dan keputusan masyarakat dengan cepat.
9) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
10) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif Negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/ swasta;
2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga

kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;

3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
6) Lemahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
7) Lemahnya partisipasi masyarakat;
8) Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan dan kemampuan ekonomi masyarakat;
9) Lemahnya SDM masyarakat/ rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
10) Lemahnya penguasaan asset di desa;
11) Lemahnya jejaring antar desa.

Dari situasi dan kondisi (internal dan eksternal) di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang menentukan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan;
4. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Penerapan TTG;
6. Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat.

Isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2025 sebanyak 186 desa yang kepala desanya habis masa jabatannya.

2. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa dan Pendamping Desa) dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
3. Regulasi pemerintah pusat yang sering berubah dan terlambat sehingga pemerintahan desa sulit mengimplementasikannya.
4. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RRKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
I	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa**	**100%**	**558.133.300**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa**	**100%**	**558.133.300**	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		**Terselenggaranya Penataan Desa**	**100%**	**558.133.300**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Terselenggaranya Penataan Desa**	**100%**	**558.133.300**	
1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Serang	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pentaan Kewenangan Desa	100 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Serang	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pentaan Kewenangan Desa	100 Desa	50.000.000	
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Serang	Jumlah sarana dan prasarana desa	326 Unit	508.133.300	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Serang	Jumlah sarana dan prasarana desa	326 Unit	508.133.300	
II	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		**Presentase Kerjas Sama antar Desa yang Terfasiitasi**	**100%**	**200.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**		**Presentase Kerjas Sama antar Desa yang Terfasiitasi**	**100%**	**200.000.000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa		**Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa**	**100%**	**200.000.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**		**Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa**	**100%**	**200.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
3	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 dokumen	150.950.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 dokumen	150.950.000	
4	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	49.050.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	49.050.000	
III	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**13.194.670.256**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**15.994.670.256**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa		**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara Administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**13.194.670.256**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa**		**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara Administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**15.994.670.256**	
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Dokumen	50.000.000	
6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	326 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	326 Dokumen	50.000.000	
7	Fasilitasi Penyusunan Perencanan Pembangunan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	29 Dokumen	325.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanan Pembangunan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	29 Dokumen	325.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	326 Dokumen	375.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	326 Dokumen	375.000.000	
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Serang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	400 orang	6.517.392.256	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Serang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	400 orang	6.517.392.256	
10	Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	244.278.000	Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	244.278.000	Peningktan Kapasits Pengurus Bumdes Kurang 77.810.000
11	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	46 Laporan	5.000.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	46 Laporan	7.800.000.000	Kurang Rp.2.800.000.000,- untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa
12	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Profil Desa	326 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Profil Desa	326 Dokumen	80.000.000	
13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	326 Dokumen	175.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	326 Dokumen	175.000.000	
14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Serang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	250 Orang	278.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Serang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	250 Orang	278.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan keluarahan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	326 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan keluarahan	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	326 Dokuemn	100.000.000	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	**100%**	**2.855.722.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	**100%**	**2.855.722.000**	
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.		**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.**	**100%**	**2.855.722.000**	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.**		**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.**	**100%**	**2.855.722.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
16	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	358.573.400	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	358.573.400	
17	Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Kab. Serang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	29 Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Kab. Serang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	29 Lembaga	125.000.000	
18	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	1 Dokumen	107.304.600	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	2 Dokumen	107.304.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Pendapatan Asli Desa					Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
19	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	189.844.000	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	189.844.000	
20	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1.500.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Serang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1.500.000.000	
21	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	29 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	29 Dokumen	75.000.000	
22	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	29 Dokumen	500.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Serang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	29 Dokumen	500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.473.363.584**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.116.847.204**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**91.436.800**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**91.436.800**	
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	38.056.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	38.056.800	
24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	53.380.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	53.380.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**6.345.519.600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.989.003.220**	
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	6.333.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	6.976.483.620	Kurang 643.483.620
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.519.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.519.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**918.273.365**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**918.273.365**	
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	8.942.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	8.942.000	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	124.050.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	124.050.000	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	26.930.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	26.930.200	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	219.853.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	219.853.600	
31	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	26.311.165	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	26.311.165	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	12 Dokumen	18.000.000	
33	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.163.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.163.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	461.023.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	461.023.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**762.956.319**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**762.956.319**	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	325.457.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	325.457.600	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	437.498.719	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	437.498.719	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**355.177.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**355.177.500**	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	12 Laporan	208.617.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	12 Laporan	208.617.500	
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Laporan	46.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Laporan	46.560.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	TOTAL RENCANA ANGGARAN				**25.281.889.140**	**TOTAL RENCANA ANGGARAN**				**28.725.372.760**	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan/Sub Kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025, telah sesuai, dan dapat mengakomodir program/ kegiatan/Sub Kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran DPMD Kabupaten Serang Tahun 2025 dalam menjalankan visi dan misi Bupati Serang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Namun dari kebutuhan anggaran masih ada sub kegiatan yang kebutuhan anggrannya belum terpenuhi/mencukupi dengan total kekurangan sebesar Rp. 3.443.483.620,- dengan rincian :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, sub kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

      Bahwa pada tahun 2025 ada 46 kepala desa yang habis masa jabatannya, sehingga perlu melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa di desa-desa tersebut, sehingga memerlukan biaya pelaksanaannya Sekitar Rp. 7.800.000.000,- untuk kebutuhan :

      - Kepanitiaan tingkat Kabupaten dan Kecamatan
      - Bantuan Pengamanan
      - Bantuan Keuangan ke Desa

      Baru teralokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- kurang Rp. 2.800.000.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Teralokasikan Sebesar Rp, 6.333.000.000,- seharusnya Rp. 6.976.483.620,- Kurang Rp.643.483.620,- untuk 35 ASN.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dan Pokok Pikiran (Pokir) hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2024. Kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

1. Usulan Musrenbang Kecamatan

Dari Usulan hasil musrenbang kecamatan Kabupaten Serang yang masuk melalui aplikasi SIPDRI Tahun 2025 terdapat 89 sembilan usulan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serng berupa :

- 26 Usulan Pembangunan Kantor Desa
- 4 Usulan rehab sedang / berat gedung Kantor Desa
- 59 Usulan pengadaan Ambulance Desa

2. Usulan dari Pokir DPRD Kabupaten Serang

Terdapat usulan dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Serang untuk tahun anggaran 2025 berupa pengadaaan ambulan desa sebanyak 9 unit .

Berkenaan dengan kebijakan penggunaan Koring Belanja/bantuan keuangan untuk pemerintah desa dialihkan ke BPKAD Kabupaten Serang, sehingga DPMD tidak lagi menganggarkan kegiatan menggunakan koring belanja bantuan keuangan (DD, ADD, BHPRD, dan Bantuan Keuangan).

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang

1. Usulan dari Musrenbang Kecamatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PENATAAN DESA				Kewenangan penggangaran ada di BPKAD
	Penyelenggaraan Penataan Desa				
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				
1	Pembangunan Kantor Desa	desa mekarsari	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
2	Pembangunan Kantor Desa	desa batu kuwung	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
3	Pembangunan Kantor Desa	desa binuang	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
4	Pembangunan Kantor Desa	desa sukanegara	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
5	Pembangunan Kantor Desa	desa bojong menteng	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
6	Pembangunan Kantor Desa	desa mander	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
7	Pembangunan Kantor Desa	desa bakung	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
8	Pembangunan Kantor Desa	desa pontang	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
9	Pembangunan Kantor Desa	desa pasauran	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
10	Pembangunan Kantor Desa	desa cirangkong	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
11	Pembangunan Kantor Desa	desa pagintungan	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
12	Pembangunan Kantor Desa	desa bojot	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
13	Pembangunan Kantor Desa	desa pabuaran	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
14	Pembangunan Kantor Desa	desa pedaleman	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
15	Pembangunan Kantor Desa	desa sukacai	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
16	Pembangunan Kantor Desa	desa sukadana	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
17	Pembangunan Kantor Desa	desa wanakarta	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
18	Pembangunan Kantor Desa	desa karangkepuh	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
19	Pembangunan Kantor Desa	desa bugel	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
20	Pembangunan Kantor Desa	desa sukabares	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
21	Pembangunan Kantor Desa	desa kencana harapan	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
22	Pembangunan Kantor Desa	desa bugel	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
23	Pembangunan Kantor Desa	desa sukamenak	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
24	Pembangunan Kantor Desa	desa panyaunganjaya	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
25	Pembangunan Kantor Desa	desa suka bares	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
26	Pembangunan Kantor Desa	desa namboilir	Terbangunnya Kantor Desa	1 Unit	
27	rehab sedang / berat gedung Kantor Desa	desa lebak kepuh	Terehabnya kantor desa	1 Unit	
28	rehab sedang / berat gedung Kantor Desa	desa harundang	Terehabnya kantor desa	1 Unit	
29	rehab sedang / berat gedung Kantor Desa	desa puser	Terehabnya kantor desa	1 Unit	
30	rehab sedang / berat gedung Kantor Desa	desa cemplang	Terehabnya kantor desa	1 Unit	
1	pengadaan Ambulance Desa	desa sukarame	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
2	pengadaan Ambulance Desa	desa lebak kepuh	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
3	pengadaan Ambulance Desa	desa argawana	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
4	pengadaan Ambulance Desa	desa kebon	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
5	pengadaan Ambulance Desa	desa pamanuk	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
6	pengadaan Ambulance Desa	desa gosara	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
7	pengadaan Ambulance Desa	desa jawilan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
8	pengadaan Ambulance Desa	desa sukamampir	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
9	pengadaan Ambulance Desa	desa sukamenak	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
10	pengadaan Ambulance Desa	des ajulang	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
11	pengadaan Ambulance Desa	desa curug sulanjana	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
12	pengadaan Ambulance Desa	desa bojong menteng	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
13	pengadaan Ambulance Desa	desa bakung	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
14	pengadaan Ambulance Desa	desa pontang	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
15	pengadaan Ambulance Desa	desa tejamari	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
16	pengadaan Ambulance Desa	desa tirem	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
17	pengadaan Ambulance Desa	desa majasari	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
18	pengadaan Ambulance Desa	desa melati	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
19	pengadaan Ambulance Desa	desa bojot	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
20	pengadaan Ambulance Desa	desa margagiri	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
21	pengadaan Ambulance Desa	desa pulo panjang	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
22	pengadaan Ambulance Desa	desa sukaraja	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
23	pengadaan Ambulance Desa	desa pudar	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
24	pengadaan Ambulance Desa	desa gembor udik	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
25	pengadaan Ambulance Desa	desa lambangsari	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
26	pengadaan Ambulance Desa	desa kramatjati	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
27	pengadaan Ambulance Desa	desa dahu	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
28	pengadaan Ambulance Desa	desa katulisan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
29	pengadaan Ambulance Desa	desa panyirapan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
30	pengadaan Ambulance Desa	desa umbultanjung	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
31	pengadaan Ambulance Desa	desa curugagung	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
32	pengadaan Ambulance Desa	desa wargasara	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
33	pengadaan Ambulance Desa	desa purwadadi	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
34	pengadaan Ambulance Desa	desa kebon ratu	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
35	pengadaan Ambulance Desa	desa lebakwana	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
36	pengadaan Ambulance Desa	desa suka indah	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
37	pengadaan Ambulance Desa	desa pamong	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
38	pengadaan Ambulance Desa	desa margasana	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
39	pengadaan Ambulance Desa	desa teluk terate	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
40	pengadaan Ambulance Desa	desa pontang legon	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
41	pengadaan Ambulance Desa	desa susukan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
42	pengadaan Ambulance Desa	desa sukacai	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
43	pengadaan Ambulance Desa	desa tamansari	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
44	pengadaan Ambulance Desa	desa wanakarta	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
45	pengadaan Ambulance Desa	desa baros jaya	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
46	pengadaan Ambulance Desa	desa karangkepuh	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
47	pengadaan Ambulance Desa	desa kramatwatu	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
48	pengadaan Ambulance Desa	desa sukabares	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
49	pengadaan Ambulance Desa	desa sujung	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
50	pengadaan Ambulance Desa	desa malabar	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
51	pengadaan Ambulance Desa	desa kertasana	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
52	pengadaan Ambulance Desa	desa kadu kempong	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
53	pengadaan Ambulance Desa	desa mongpok	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
54	pengadaan Ambulance Desa	desa ciagel	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
55	pengadaan Ambulance Desa	desa panunggulan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
56	pengadaan Ambulance Desa	desa panosogan	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
57	pengadaan Ambulance Desa	desa sukamaju	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
58	pengadaan Ambulance Desa	desa anyar	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	
59	pengadaan Ambulance Desa	desa barengkok	Terfasilitasinya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	

2. Daftar Usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	MADJUNI	Pengadaan Ambulance	BELUM ADA AMBULANCE	DESA JAWILAN, Kab. Serang	1	UNIT
2	AGUS WAHYUDIONO	Pengadaan Ambulance	BELUM ADAAMBULANCE	DESA SONGGOM JAYA KECAMATAN CIKANDE, Kab. Serang	1	UNIT
3	RIKY SUHENDRA	Pengadaan Ambulance	DS TALAGA KECAMATAN MANCAK	DS TALAGA KECAMATAN MANCAK, Kab. Serang	1	UNIT
4	RIKY SUHENDRA	Pengadaan Ambulance	DS BATU KUDA KECAMATAN MANCAK AMBULANCE	DS BATU KUDA KECAMATAN MANCAK, Kab. Serang	1	UNIT
5	RIKY SUHENDRA	Pengadaan Ambulance	DS GEROGOL KECAMATAN ANYER AMBULANCE	DS GEROGOL KECAMATAN ANYER, Kab. Serang	1	UNIT
6	YAYAT SUPRIYATNA	Pengadaan Ambulance	BELUM ADANYA AMBULANCE DESA	DESA SUKARAJA KECAMATAN CIKEUSAL, Kab. Serang	1	UNIT
7	H.BAHRUL.ULUM	Pengadaan Ambulance	KARNA SERING KEBANYAKAN ORANG SAKIT, RUMAH SAKIT KARNA JAUH	DESA CAKUNG KECAMATAN BINUANG , Kab. Serang	1	UNIT

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
8	H.BAHRUL.ULUM	Pengadaan Ambulance	KARNA SERING KEBANYAKAN ORANG SAKIT, RUMAH SAKIT KARNA JAUH	DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA, Kab. Serang	1	UNIT
9	ADHADI ROMLI	Pengadaan Ambulance	Mohon ada ambulance Desa Pelayanan BPJS di rumah sakit belum maksimal dan masih banyak kendala	Desa Ciomas, Kab. Serang	1	UNIT

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Presiden RI telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Bahwa, ada tiga hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, penyusunan RPJPN 2025-2045 yang berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan tersebut telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 telah merumuskan 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

Semua rencana kerja pemerinth daerah (RKPD) harus mengacu pada RPJPN tersebut sehingga arah pembangunan di daerah dapat mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintahan pusat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah **"Meningkatkan Daya Dukung Kemandirian Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat dan Desa".**

B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya Kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	%	15,03	15,95	16,87	17,79	18,71	19,63
		Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
		Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100

Jika dilihat dari hasil capaian kinerja IKU Prosentasi Desa Maju dan Mandiri di dasarkan dari IDM Tahun 2022 : 20,86% dan Tahun 2023 : 24,50% .

Ditahun 2024 : 30.06% untuk Tahun 2025 diproyeksikan 32.82%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Visi Misi Kabupaten Serang

   "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis".

2. Misi Ke-4

   "Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan".

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	1. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
			2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
2	Peningkatan Kerja sama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	3. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
			4. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			6. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			7. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			8. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			9. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
			10. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
			11. Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
			12. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
			13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota	16. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga masyarakat desa
			17. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat
			18. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	dalam meningkatkan pendapatan asli desa
			19. Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan tekhnologi tepat guna
			20. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
			21. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
			22. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaran gerakan pemberdayaan masyarakat dan ksejahteraan keluarga
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			24. Evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah	25. Penyedian gaji dan Tunjangan ASN
			26. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir SKPD
		Administrasi umum perangkat daerah	27. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			28. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			29. Penyediaan peralatan rumah tangga
			30. Penyediaan bahan logistik kantor
			31. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			32. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			33. Fasilitasi kunjungan tamu
			34. Penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	35. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			36. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			38. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			39. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2025 adalah dokumen yang menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatifnya.

Pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Bahwa untuk penganggaran Bantuan Keuangan Desa, berupa Anggaran Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Bantuan Keuangan untuk pengadaan Ambulan Desa dan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa tidak lagi di anggaran di DPMD namun dialihkan ke BPKAD.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2025 yang mengacu pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebesar Rp. 25.281.889.140,- (Dua puluh lima milyar dua ratus delapan satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 termuat dalam tabel Rencana Kerja dan Pendanaan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa**	**Kab. Serang**	**100%**	**558.133.300**				**560.000.000**
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terselenggaranya Penataan Desa**	**Kab. Serang**	**100%**	**558.133.300**				**560.000.000**
2.13.01.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pentaan Kewenangan Desa	Kab. Serang	326 Desa	50.000.000	APBD	Sosialisasi dan monev	100 Desa	50.000.000
2.13.01.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa	Kab. Serang	326 Unit	508.133.300		Bintek pelatihan aplikasi EHDEWE Bagi KPM Bintek terkait infrastruktur bagi Kasi ekbang Kec. Sosialiasasi stunting bagi aparatur desa Sosialisai Bantuan Keuangan Monev atas kegiatan	326 Unit	510.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Presentase Kerjas Sama antar Desa yang Terfasiitasi**	**Kab. Serang**	**100%**	**200.000.000**				**275.000.000**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa**	**Kab. Serang**	**100%**	**200.000.000**				**275.000.000**
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Serang	3 dokumen	150.950.000	APBD	Sosialisasi, monitoring dan konsultasi desa yang akan melaksanakan Kerjasama antar desa	3 Dokumen	175.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Serang	1 dokumen	49.050.000	APBD	Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan khususnya wisata di Kab.Serang	1 Dokumen	100.000.000
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Serang**	**100%**	**13.194.670.256**	**APBD**		**100%**	**8.666.512.256**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara Administrasi pemerintahan desa**	**Kab. Serang**	**100%**	**13.194.670.256**	**APBD**		**100%**	**8.666.512.256**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Serang	100 Dokumen	50.000.000	APBD	sosialisasi, pembinaan administrasi di Kecamatan dan monev	100 Dokumen	50.000.000
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Serang	3 Dokumen	50.000.000	APBD	sosialisasi dan monev	326 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Serang	29 Dokumen	325.000.000	APBD	Fasilitasi, pembinaan, bimtek dan sosialisasi perencanaan pembangunan Desa	326 Dokumen	500.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	326 Dokumen	375.000.000	APBD	Pembinaan/Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Server Siskeudes	326 Dokumen	400.000.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Serang	400 orang	6.517.392.256	DAU	bimtek,pembinaan ke kecamatan dan monev Iuran BPJS Kesehatan 5.709.517.056 BPJS Ketenagakerjaan 506.995.200	326 Desa	6.616.512.256
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab Serang	50 Dokumen	244.278.000	APBD	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan LKD	40 dokumen	200.000.000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Serang	46 Laporan	5.000.000.000	APBD	Pelaksanaan Pilkades bagi 46 Desa : Kepanitiaan Tingkat Kabupaten Kepanitiaan Tingkat Kecamatan Pengamanan Bantuan Keuangan Desa		-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Serang	326 Dokumen	80.000.000	APBD	Sosialisasi, Pembinaan Updating data Prodeskel	326 Dokumen	100.000.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Desa	326 Dokumen	175.000.000	APBD	Fasilitasi, pembinaan, bimtek dan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa	326 Dokumen	250.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13..04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Serang	250 Orang	278.000.000	APBD	Bintek/Pembinaan/Monev bagi anggota BPD tidak	250 Orang	400.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan keluarahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Serang	326 Dokuemn	100.000.000	APBD	Sosialisasi/Monev input EPDESKEL Pembinaan Lomba Desa	326 Dokuemn	100.000.000
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	**Kab. Serang**	**100%**	**2.855.722.000**	**APBD**		**100%**	**3.164.609.200**
2 13 05 2.01	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.**	**Kab. Serang**	**100%**	**2.855.722.000**	**APBD**		**100%**	**3.164.609.200**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Serang	2 Dokumen	358.573.400	APBD	- Peningkatan Kapasitas KPM - Peningkatan Desa Maju ke Mandiri	4 Dokumen	400.000.000
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / kelurahan dan masyarakat hukum adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Serang	29 Lembaga	125.000.000	APBD	sosialisasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa tentang Peraturan Bupati terkait Lembaga kemasyarakatan desa Monev Kelembagaan Kemasyarakatan Desa	29 Lembaga	150.000.000
2.13.05.01.05	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Serang	2 Dokumen	107.304.600	APBD	Pembinaan SPP, KPSPAM dan KP SPAL	1 Dokumen	114.609.200
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Serang	2 Laporan	189.844.000	APBD	Lomba Cipta Inovasi TTG dan Gelar Pameran TTG Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional	1 Laporan	200.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Serang	1 Laporan	1.500.000.000	APBD	Kegiatan LKBA di 326 Desa	1 Laporan	1.550.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 13 05.2.01 08	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab.Serang	29 Dokumen	75.000.000	APBD	Monev Linmas	29 Dokumen	150.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Serang	29 Dokumen	500.000.000	APBD	Bintek Pokja PKK Pembinaan, pendampingan penilaian lomba	29 Dokumen	600.000.000
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.473.363.584**				**9.401.140.020**
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**91.436.800**				**91.436.800**
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	3 Dokumen	38.056.800	APBD		3 Dokumen	38.056.800
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	6 Dokumen	53.380.000	APBD		6 Dokumen	53.380.000
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.345.519.600**				**6.989.003.220**
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	35 Orang	6.333.000.000	APBD		35 Orang	6.976.483.620
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	3 Laporan	12.519.600	APBD		2 Laporan	12.519.600

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**918.273.365**				**1.093.100.000**
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMD	12 Paket	8.942.000	APBD		12 Paket	10.700.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMD	15 Paket	124.050.000	APBD		15 Paket	283.000.000
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DPMD	12 Paket	26.930.200	APBD		12 Paket	30.000.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPMD	12 Paket	219.853.600	APBD		12 Paket	220.000.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPMD	12 Paket	26.311.165	APBD		12 Paket	26.400.000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	DPMD	12 Dokumen	18.000.000	APBD		12 Dokumen	19.000.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	12 Laporan	33.163.400	APBD		12 Laporan	34.000.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	12 laporan	461.023.000	APBD		12 laporan	470.000.000
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**762.956.319**				**766.000.000**
2.13.01.2.08..02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	12 Laporan	325.457.600	APBD		12 Laporan	326.000.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	12 Laporan	437.498.719	APBD	Honor Pramubakti/Non ASN	12 Laporan	440.000.000
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**355.177.500**				**461.600.000**
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	DPMD	13 Unit	208.617.500	APBD		12 laporan	211.600.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	12 Unit	46.560.000	APBD		12 laporan	50.000.000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	DPMD	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	200.000.000
	TOTAL RENCANA ANGGARAN				**25.281.889.140**				**22.067.261.476**

BAB V

PENUTUP

Rancangan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Perangkat Daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

5.1. Catatan Penting

Bahwa berdasarkan hasil analisis kebutuhan, antara pagu yang diberikan sebagaimana pagu dalam RKPD Tahun 2025 dengan kebutuhan angaran untuk mendukung program/kegiatan masih ada beberapa program dalam hal ini sub kegiatan yang masih membutuhkan anggaran.

Pagu Anggran berdasarkan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 25.281.889.140,- sementara berdasarkan hasil analisis kebutuhan Rp. 28.725.372.760,- sehingga kurang sebesar Rp. 3.443.483.620,- dengan rincin kekurangan pada :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, sub kegiatan :
   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

      Bahwa pada tahun 2025 ada 186 kepala desa yang habis masa jabatannya, namun dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga setelah dilakukan verifiksi hanya terdapat 46 Desa yng perlu melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa, sehingga memerlukan biaya pelaksanaannya Rp. 7.800.000.000,- untuk kebutuhan Kepanitiaan tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pengamanan.

      Dalam pagu RKPD Tahun 2025 baru mengakomodir sebesesar Rp, 5.000.000.000,- Masih kurang sebesar Rp.2.800.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Penambahan anggaran dalam sub kegiatan ini adalah kekurangan untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 643.483.620,-

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang tahun 2025, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, yang nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Berkenaan pada saat pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan masih terdapat pagu yang ternyata masih kurang atau ternyata terdapat kelebihan maka dapat disesuaikan, dan mengenai ketersediaan anggaran jika pagu anggaran tidak mencukupi tentunya sesuai aturan kegiatan akan diurutkan pelaksanaannya sesuai skala prioritas melalui mekanisme Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) tahun anggaran 2025 yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sasaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Seluruh unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ke dalam rencana strategis lingkup kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang tahun 2025, organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	JABATAN PELAKSANA	KEDUDUKAN	KET.
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program	
3	Para Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan	
4	Kepala Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi/Pejabat Fungsional	Pelaksana Kegiatan	
5	Para JFU atau Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelaksana Input Kegiatan dan Operasional Penyelenggara Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja	

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana TIndak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berkenaan dengan keterbatasan SDM dan Sarana prasarana penunjang serta untuk terlaksananya recana kerja maka perlu ditindaklanjuti dengan :

1. Pengajuan penambahan SDM aparatur atas masih kurangnya Pegawai pada Dinas Pembaerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;

2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
3. Pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana yang masih kurang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi dengan Perangkat Daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Serang yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS" sesuai dengan RPJMD 2021 – 2026.

Serang, 3 Juli 2024
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

H. HARYADI, S.Sos. M.Si
Pembina TK. 1
NIP. 19670616 198610 1 001

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang untuk periode 1 (satu) tahun yang sudah melalui revisi dari dokumen Rancangan Renja, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2021-2026 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja 2025 yang direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai yang dirumuskan pada Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja (renja) tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, Tujuan, Sasaran, yang menggambarkan pencapaian strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun anggaran 2025 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) pula diharapkan dapat memberikan kejelasan danmanfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Serang, Juli 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Serang

ABER NURHADI
NIP. 19661216 199003 1 005

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang……. 1
1.2 Landasan Hukum……. 4
1.3 Maksud dan Tujuan…….. 7
1.4 Sistematika Penulisan……... 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKD..... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Serta Capaian Renstra 9
2.2 Analisis Terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 26
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 29
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPKD 39
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPKD 40
3.3 Program dan Kegiatan..... 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPKD..... 51
BAB V PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2019 tetang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.

Keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan fungsinya untuk menciptakan tertib arsip dan budaya baca di masyarakat kabupaten serang, oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreativitas dan lebih responsif terhadap kepentingan publik. Dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang

memungkinkan kinerja pelayanan kepada masyarakat *(public services)* khususnya di bidang lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dapat dikerjakan secara pararel dengan penyusunan rancangan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya kepala perangkat daerah menetapkan renja perangkat daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran 2025. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan renja meliputi

   Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

   a. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

   b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan

   c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mencakup:

   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ; dan

   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan Rencana Kerja (Renja) RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDALITBANG Kabupaten Serang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancanganperaturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.
11. Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati No 52 Tahun 2024 tentang rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Serang tahun 2024
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas Kepmendagri 050-5889
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 tentang perbup No. 52 tahun 2024 tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten serang tahun 2024

a. Maksud dan Tujuan

i. Maksud

Maksud Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Serang dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi Bupati.

ii. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Serang adalah sebagai berikut:

1. Mengatur strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021- 2026.
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perpustakaan dan kearsipan yang berorientasi pada hasil.
3. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Serang dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

b. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKD

1. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Tahun 2023**

   1. **Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota:**
      a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 80.164.215,- realisasi Rp. 58.424.750,- atau (72,88 %)
      b. Administrasi keuangan perangkat daerah anggaran Rp. 4.556.849.299,- realisasi Rp. 3.989.282.648,- (87,54 %)
      c. Adminstrasi umum perangkat daerah anggaran Rp. 310.437.714,- realisasi Rp. 306.154.430 (98.62 %)
      d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah anggaran Rp. 709.799.214 realisasi Rp. 596.283.494 (84,01 %)
      e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan anggaran Rp. 189.747.800 realisasi Rp. 111.345.800 (58,68 %)
   2. **Program pembinaan perpustakaan**
      a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran 427.428.465,- realisasi Rp. 420.219.400 (98,31 %)
      b. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 122.724.600,- realisasi Rp. 120.650.200,- (98,31%)
   3. **Program Pengelolaan arsip :**
      a. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 67.398.111,- realisasi Rp. 35.914.200,- (53,29 %)
      b. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 43.786.463,- realisasi Rp. 28.614.000,- (65,35 %)

c. Pengelolaan simpul jaringan infromasi kearsipan nasyonaltingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran 45.558.082,- Realisasi Rp. 36.310.500,- (79,70 %)

4. Program perlindungan dan penyelamatan arsip :

a. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 15.878.439,- dengan serapan anggaran Rp. 3.070.000,- (19,33 %)

CAPAIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

TAHUN 2023

	DINAS PERPUSTAKAAN DAN	KEARSIPAN DAERAH								
NO	Program	Kegiatan	CAPAIAN KINERJA					Ket	Permasalahan	Solusi
			Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%			
1	2	3	4		5	6	7	8		
1	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	80.160.215	58.424.750	72,88			
			Op	forum opd dan survai kepuasan Masyarakat	2 dokumen					
			Oc	Terlaksananya kegiatan forum opd	100%	100%				
			Op	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capkin	3 Laporan					
			Oc	Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capkin	100%	100%				

		Administrasi keuangan perangkat daerah	Ip	tersedianya dana	4.556.849.299	3.989.282.648	87,54			
			Op	gajih dan tunjangan ASN	12 bulan					
			Oc	terpenuhinya gajih dan tunjangan ASN	100%	100%				
			Op	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					
			Oc	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%				
		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Ip	tersedianya dana						
			Op	Pelaksanaan sosialisasi Hukum						
			Oc	Terlaksananya sosialisasi hukum						
		Administrasi umum perangkat daerah	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	310.437.714	306.154.430	98,62			
			Op	ATK, Cetak, Listrik serta makmin	12 bulan					
			Oc	Terlaksananya ATK, Cetak, Listrik serta makmin	100%	100%				
		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Ip	Tersedianya dana	709.799.214	596.283.494	84,01			
			Op	pembayaran pembayaran tagihan telpon/internet,Listrik, iklan/reklame, serta pembayaran pramubakti , pengemudi, TKK	12 bulan					

			Oc	terlaksananya terpenuhinya pembayaran tagihan telpon/internet,Listrik, iklan/reklame, pembayaran pramubakti , pengemudi, TKK	100%	100%				
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Ip	Tersedianya dana	189.747.800	111.345.800	58,68			
			Op	belanja pajak dan pemeliharaan kendaraan kantor	12					
			Oc	terpenuhinya pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan kantor selama 1 tahun	100%	100%				
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	427.428.465	420.219.400	98,31			
			Op	Penataan bahan pustaka dan dak	12 bulan					
			Oc	terlaksananya penataan bahan pustaka selama 1 tahun	100%	100%				
		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota		Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	122.724.600	120.650.200	98,31			
				Lomba perpustakaan, gpmb	1 tahun					

				terlaksananya lomba perpustakaan dan gerakan pemasyarakatan minat dan budaya baca Masyarakat	100%	100%				
3	**Program Pengelolaan Arsip**	**Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota**	Ip	Tersedianya dana	67.398.111	35.914.200	53,29		.	
			Op	pembinaan dan sosialisasi arsip	12 bulan					
			Oc	terlaksananya pembinaan dan sosialisasi arsip	100%	100%				
		Pengelolaan arsip ststis daerah kabupaten/kota	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	43.786.463	28.614.000	65,35			
			Op	pameran kearsipan	1 paket					
			Oc	terlaksananya pameran kearsipan	100%	100%				
		Pengelolaan sampul jaringan infromasi kearsipan nasyonal tingkat kabupaten/kota	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	45.558.082	36.310.500	79,70		.	

			Op	lomba kearsipan	1 tahun					
			Oc	terlaksananya lomba kearsipan	100%	100%				
4	**Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota**	Ip	Tersedianya dana dalam APBD Kab. Serang	15.878.439	3.070.000	19,33			
			Op	tertelusurinya penelusuran arsip bersejarah kabupaten serang	1 tahun					
			Oc	terlaksananya penelusuran arsip bersejarah kabupaten serang	100%					

Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang ada serta pengalokasiannya;

b) Tujuan – tujuan yang dikehendaki;

c) Sasaran – sasaran dan prioritas yang akan diwujudkan;

d) Kebijakan – kebijakan yang akan diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan.

Penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 juga memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

b) Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang sebagai berikut:

TABEL T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG S/D TAHUN 2025 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2021 - 2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Satuan	Target	satuan	Target	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terselengaranya penyusunan renja serta survai kepuasan masyarakat	6	Kegiatan	3	Kegiatan	1	1	100%	1	5	83%

				Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6	Tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6	Tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makmin dan atk kantor	6	Tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				Penyediaan barang cetakan danpenggandaan	Tingkat pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	Tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tingkat ketersediaan bahan bacaan perundang-undangan	6	tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Tingkat pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6	tahun	3	Tahun	1	1	100%	1	5	83%
				Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya pembayaran 6 orang pramubakti, 3 supir dan 3 TKK	6	kegiatan	3	Kegiatan	1	1	100%	1	5	83%
				penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, lsitrik serta pelaksanaan pembangunan prioritas melalui media cetak elketronik dan media Online	72	bulan	48	Bulan	12	12	100%	12	24	33%
				Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tingkat penyediaan jasa kpemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	72	bulan	48	Bulan	12	12	100%	12	24	33%
				pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	72	bulan	48	Bulan	12	12	100%	12	24	33%

				Pemeliharaan aset tetap lainnya	tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	bulan	48	Bulan	12	12	100%	12	24	33%
				penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 tahun serta	6	tahun	4	Tahun	1	1	100%	1	2	33%
					tersedianya Dukungan penyelenggaraan MTQ , Hari Besar nasyonal dan hari jadi kabupaten serang	72	bulan	48	Bulan	12	12	100%	12	24	33%
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
				Pengembangan Perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota	-Tersedinya pelayanan perpustakaan kelililing - Tersedianya dana pendamping gedung perpusda kab. Serang	6	kegiatan	4	Kegiatan	2	2	100%	2	4	67%
				pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	terlaksananya Pembinaan perpustakaan husus (desa,opd,dan sekolah)	6	kegiatan	4	Kegiatan	2	2	100%	2	4	67%
				Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat darah kabupaten / kota	terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	-terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka - terlaksananya pengadaan buku pustaka - pemeliharaan bahan pustaka	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%

				Penyusunan data dan informasi perpustakaa, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota											
				Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khususu masyarakat	terlaksananya Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khususu masyarakat	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	terlaksananya promosi perpustakaan	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial											
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
				Kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	terlaksanaya pembinaan arsip ke desa – desa	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				Kegiatan Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Tersedinya pendataan dan penataan arsip	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				KegiatanAkuisisi,pengolahan,preservasi danakses arsip statis	terlaksananya fumigasi arsip di 2 depo dan terlaksananya pameran kearsipan	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%

				Kegiatan penyediaan infromasi,akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui jikn	terlaksananya digitalisasi arsip	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				Kegiatan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten kota	Te rlaksananya lomba sadar arsip	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%
				Program perlindungan dan pnyelamatan arsip											
				penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	terlaksananya penelusuran arsip bersejarah	6	kegiatan	4	Kegiatan	1	1	100%	1	2	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Dari **Tabel 2.2.1** dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang dalam tahun terakhir dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang

TABEL T.C.30

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten

NO	Indikator kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi (%)		Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024			
1	Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan	2,43%	2,25%	2,80%	2,80%	0,49	2,25%	2,80%		
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	62,50	71,43	80,36	100	55,17	71,43	80,36		

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Serang di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik. Lingkungan yang strategik yang dimaksud adalah faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :

1 **Faktor internal yang terdiri dari 2 Faktor, yaitu kekuatan *(strenght)* dan kelemahan *(weakness)*.**

Keberadaan Perpustakaan dan Kearsipan makin kuat dengan adanya peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di samping itu masih ada peraturan perundangan lain yang turut mempengaruhi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, seperti :

a. Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke 2, pasal 28 F, tentang Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memperoleh informasi.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14, tentang Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan informasi.
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik.
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik.
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang, Perpustakaan.
f. Undang-Undang No.43 Tahun 2009, tentang Kearsipan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
h. Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2018 tentang tugas pokok,fungsi dan uraian tugas pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah kabupaten serang

Keberadaan peraturan perundangan ini tidak cukup mendukung kearsipan dan perpustakaan menjadi lebih kuat. Beberapa kelemahan justru tampak dari dalam organisasi, seperti :

- **Perhatian para pengambil keputusan terhadap masalah perpustakaan dan kearsipan masih bervariasi** dalam arti sebagian sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan , namun ada sebagian yang masih belum begitu memahami arti pentingnya pengelolaan kearsipan maupun keberadaan perpustakaan sebagai wahana informasi yang mencerdaskan bangsa.
- ***Masih minimnya minat untuk menjadi fungional arsiparis dan pustakawan***, karena sebagian belum memahami bagaimana pentingnya posisi arsiparis dan pustakawan sebagai tenaga profesional yang wajib menyajikan informasi yang akurat dan menjadi kunci keberhasilan organisasi.
- SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang sudah terdidik masih belum merata di seluruh instansi /OPD se Kabupaten Serang;
- ***Tingginya rotasi dan mutasi pegawai*** mengakibatkan tidak meningkatnya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan karena pegawai yang sudah di didik

kemudian mutasi dan yang mengelola Perpustakaan dan Kearsipan mulai dari nol

- Pedoman teknis pengelolaan perpustakaan dan pearsipan masih sangat terbatas.
- Sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan belum maksimal .
- Pembinaan terhadap SDM perpustakaan dan kearsipan belum merata, untuk itu diperlukan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan.

2. **Faktor eksternal yang terdiri dari 2 faktor, yaitu peluang *(opportunity)* dan ancaman *(treath)*.**

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi ditengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga kearsipan dan perpustakaan untuk mengumpulkan arsip dari OPD - OPD , arsip perorangan , penelusuran arsip sejarah serta mengembangkan dan membina perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Serang. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi yang penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintah sudah semakin pesat. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis dimasing-masing OPD. Demikian pula dengan banyaknya jumlah perpustakaan, taman bacaan masyarakat yang dibuka, ini berarti sangat membutuhkan lebih banyak lagi bahan pustaka, baik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluang-peluang yang ada, sebaiknya juga muncul sejumlah ancaman, seperti :

- Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan, juga banyaknya jasa ***commercial records center*** yang dikelola pihak swasta, sehingga mengurangi peran penting lembaga kearsipan.
- Kemiskinan ,pengangguran dan tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik.
- Pemahaman masyarakat terutama daerah pinggiran kota dimana untuk mengakes buku sangat dibutuhkan biaya yang besar sehingga rata rata masyarakat mengganggap buku bukan menjadi kebutuhan pokok dan tidak akan menunjang dalam peningkatan taraf hidup.

Disisi lain, banyaknya bencana alam di Negara kita menimbulkan tantangan baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam,tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi masa, serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia ***(human error)***. Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari Ahir. Kita harus menghadapi dan mencari solusi, dimana lebih mengedepankan kebijakan, pada kebijakan yang berpihak pada ***penyelamatan budaya dan asset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang***

Dari analisa berbagai permasalahan di dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten serang maka dapat disimpulkan isu isu strategis dalam hubungungannya dengan tupoksi sebagai berikut :

1. Bidang Kearsipan Perlunya Pameran Kearsipan dan Mobil Pelayanan Kearsipan sehingga Masyarakat Sadar Arsip dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran utuh kepada masyarakat tentang arsip termasuk kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan demikian arsip dalam berbagai jenis dan medianya akan diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga, bukan hanya sebagai tumpukan sampah belaka.
2. Bidang Perpustakaan Perlunya Pameran Perpustakaan Serta Gedung Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran minat dan budaya baca masayarakat dikabupaten serang.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 mengacu pada Kabupaten Serang Tahun 2025. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu :

TABEL T.C.31
REVIUW TERHADAP RENCANA KINERJA 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NO	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Kebutuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	DPKD	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%	**7.915.598.990**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	DPKD	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%	**7.837.000.000**	
3	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	DPKD	**Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang tersusun**	100%	**189.256.988**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	DPKD	**Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang tersusun**	100%	**145.000.000**	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	55.976.988	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)	DPKD	Jumlah dokumen Perubahan -SKPD	100%	14.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)	DPKD	Jumlah dokumen Perubahan -SKPD	100%	17.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	DPKD	Jumlah dokumen Perubahan dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan	100%	109.160.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	DPKD	Jumlah dokumen Perubahan dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan	100%	13.000.000	

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat daerah	100%	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat daerah	100%	15.000.000	
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPKD		100%	**4.823.130.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPKD		100%	**5.025.000.000**	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKD	Jumlah Penyediaan gajih dan tunjangan bagi ASN	100%	4.802.900.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKD	Jumlah Penyediaan gajih dan tunjangan bagi ASN	100%	5.000.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.230.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100%	17.000.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	100%	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPKD	Jumlah Dokumen keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	100%	8.000.000	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPKD		100%	**1.170.781.874**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPKD		100%	**1.087.000.000**	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	15.000.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKD	Jumlah paket peralatan yang disediakan	100%	492.815.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKD	Jumlah paket peralatan yang disediakan	100%	450.000.000	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPKD	Jumlah paket peralatan yang disediakan	100%	20.001.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPKD	Jumlah paket peralatan yang disediakan	100%	30.000.000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPKD	jumlah paket logistik kantor yg disedikan	100%	194.899.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPKD	jumlah paket logistik kantor yg disedikan	100%	220.000.000	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKD	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	100%	49.019.290	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKD	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	100%	52.000.000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPKD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	100%	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPKD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	100%	20.000.000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100%	384.046.984	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100%	300.000.000	
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPKD		100%	**407.970.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPKD		100%	**250.000.000**	

21	Pengadaan Mebel	DPKD		100%	407.970.000	Pengadaan Mebel	DPKD		100%	250.000.000	
22	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPKD		100%	**639.113.632**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPKD		100%	**680.000.000**	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	262.313.632	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	280.000.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPKD	Tersedianya pembayaran gaji pramubakti, Pengemudi, dan TKK	100%	376.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPKD	Tersedianya pembayaran gaji pramubakti, Pengemudi, dan TKK	100%	400.000.000	
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPKD		100%	**685.346.496**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPKD		100%	**650.000.000**	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPKD	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPKD	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	200.000.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKD	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	38.365.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKD	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	40.000.000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	43.282.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	30.000.000	
29	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPKD	Jumlah aset tetap lainnya yg dipelihara	100%	27.001.800	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPKD	Jumlah aset tetap lainnya yg dipelihara	100%	30.000.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPKD		100%	396.697.696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPKD		100%	350.000.000	
31	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	DPKD		100%	**1.399.890.850**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	DPKD		100%	**1.600.000.000**	
32	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	Jumlah Bahan Koleksi Perpustakaan	100%	**1.056.066.050**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	Jumlah Bahan Koleksi Perpustakaan	100%	**1.200.000.000**	
33	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPKD	Jumlah layanan elektronik yang dikembangkan dengan managemen layanan TIK berbasis ISO 20000	100%	241.738.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPKD	Jumlah layanan elektronik yang dikembangkan dengan managemen layanan TIK berbasis ISO 20000	100%	300.000.000	

34	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	DPKD	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100%	34.409.950	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	DPKD	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100%	50.000.000	
35	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPKD	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	100%	136.633.600	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPKD	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	100%	170.000.000	
36	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPKD		100%	50.000.050	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPKD		100%	70.000.000	
37	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPKD	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	100%	295.119.450	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPKD	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	100%	350.000.000	
38	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten kab/Kota	DPKD		100%	59.165.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten kab/Kota	DPKD		100%	60.000.000	
39	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPKD	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	100%	239.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPKD	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	100%	200.000.000	
40	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD		100%	**343.824.800**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD		100%	**400.000.000**	
41	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DPKD	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran mebaca pada literasi satuan pendidikan	100%	136.299.400	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DPKD	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran mebaca pada literasi satuan pendidikan	100%	160.000.000	
42	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DPKD		100%	106.109.500	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DPKD		100%	140.000.000	

43	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DPKD	Jumlah orang yang mendaptakan pengharagaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	100%	101.415.900	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DPKD	Jumlah orang yang mendaptakan pengharagaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	100%	100.000.000	
44	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	DPKD		100%	**536.798.760**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	DPKD		100%	**660.000.000**	
45	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	DPKD	**tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah / kecamatan /desa**	100%	**490.718.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	DPKD	**tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah / kecamatan /desa**	100%	**560.000.000**	
46	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	**persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip**	100%	**282.541.500**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	**persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip**	100%	**310.000.000**	
47	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPKD	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	100%	130.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPKD	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	100%	150.000.000	
48	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPKD	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan	100%	52.860.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPKD	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan	100%	60.000.000	
49	pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	DPKD	jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip baku	100%	99.681.500	pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	DPKD	jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip baku	100%	100.000.000	
50	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	**persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip**	100%	**72.840.000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	DPKD	**persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip**	100%	**120.000.000**	
51	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DPKD	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	100%	72.840.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DPKD	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	100%	120.000.000	
52	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	DPKD	**prosentase arsip yang telah terinput dalam SIKN**	100%	**135.336.600**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	DPKD	**prosentase arsip yang telah terinput dalam SIKN**	100%	**130.000.000**	

53	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)		Jumlah layanan penyediaan infromasi akses dan layanan Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/Kota	100%	111.176.600	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)		Jumlah layanan penyediaan infromasi akses dan layanan Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/Kota	100%	80.000.000	
54	Pemberdayaan kapasitas unit dan lembaga kearsipan daerah kabupaten lota	DPKD		100%	24.160.000	Pemberdayaan kapasitas unit dan lembaga kearsipan daerah kabupaten lota	DPKD		100%	50.000.000	
55	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	DPKD		100%	**46.080.660**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	DPKD		100%	**100.000.000**	
56	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	DPKD	**prosentase arsip alih citra yang yang telah dilakukan autentifikasi**	100%	**46.080.660**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	DPKD	**prosentase arsip alih citra yang yang telah dilakukan autentifikasi**	100%	**100.000.000**	
57	penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyarakatan penjaminan keabsahan arsip		jumlah arsip hasil alih media yang telah dinilai dan ditetapkan keabsahannya	100%	46.080.660	penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyarakatan penjaminan keabsahan arsip		jumlah arsip hasil alih media yang telah dinilai dan ditetapkan keabsahannya	100%	100.000.000	
JUMLAH					**9.852.288.600**	**JUMLAH**				**10.097.000.000**	

2.5 Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan manampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dan hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2025. Kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 202.

TABEL TC. 32

DAFTAR USULAN, RESES DEWAN ,MUSREMBANG KECAMATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	desa kebon ratu			Pengadaan Buku
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	desa pedaleman			Pembangunan Pusat Literasi Masyarakat / Perpustakaan Desa
		desa sukarena			Pembangunan Pusat Literasi Masyarakat / Perpustakaan Desa
		desa kertasana			Pembangunan Pusat Literasi Masyarakat / Perpustakaan Desa
		desa pabuaran			Pembangunan Pusat Literasi Masyarakat / Perpustakaan Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional di bidang Perpustakaan dan Kearsipan tertuang pada VISI, MISI dan Tujuan sasaran Sebagai berikut

TABEL 3.1

Visi	Misi
TERWUJUDNYA ARSIP SEBAGAI SIMPUL PEMERSATU BANGSA DAN TERDEPAN DALAM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENUJU INDONESIA GEMAR MEMBACA	Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung managemen pemerintahan dan pembangunan
	Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
	Memberikan akses arsip kepada Publik untuk kepentingan pemerintahan , pembangunan , penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejateraan rakyat
	Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis TIK
	Mengembangkan infra struktur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM
	Mengembangkan koleksi perpustakaan

Adapun Tujuan sasaran Sebagai berikut

Tujuan	Sasaran
Menjamin keselamatan bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan Terwujudnya Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan rujukan nasional yang lengkap dan muthakir	Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab
	Terlindunginya dokumen Negara sebagai alat bukti sah
	Optimalisasi dan pengembangan E -Government dan pemanfaatan dokumen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
	Meningkatnya minat baca dan budaya baca
	Meningkatnya layanan berbasis TIK

	Melestarikan dan mendayagunakan karya tulis, cetak dan rekam untuk pengembangan ilmu pengetahuan

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Serang tahun 2025. didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan Misi Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten serang Tahun 2021 – 2026 yaitu : Meningkatkan perluasan danpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat. dari misi tersebut Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten serang memiliki tujuan **"Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat"** Meningkatkatnya minat baca masyarakat melalui layanan perpustakaan dan kegiatan literasi , Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

A. Meningkatkatnya minat baca masyarakat melalui layanan perpustakaan dan kegiatan literasi
B. Meningkatkannya kualitas pengeolaan arsip daerah melalui digitalisasi arsip

Indikator Kinerja SKPD yang mengaju pada Tujuan dan
Sasaran Renstra 2021 - 2026

No	Indikator Sasaran / Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					kondisi kinerja pada Final RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Masyarakat yang melakukan Kunjungan	2,37%	2,43%	2,25%	2,80%	2,80%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara Digital	53,57%	62,5%	71,43%	80,36%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan Program dan Kegiatan di Renja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Tahun 2025 yaitu :

1. **Visi Misi Kabupaten Serang**

   Visi“ Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, BerkeadilanDan Agamis”.

2. MISI

   “Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjangpendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.”

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sesuai pagu indikatif dan pagu Prakiraan maju di Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan. Padasaat pengisian pagu prakiraan maju Tahun 2025 RKPD di aplikasi SIPD nilai yang di isi belum sesuai dengan pagu kebutuhan sehingga perlu ada penyesuaian kembali pada saat pengisian Pagu Perkiraan maju Tahun 2025 pada aplikasi SIPD.berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 dan Pagu Prakiraan maju Tahun 2025 yang disajikan padatabel 3.3:

1. Urusan 2, Program sebanyak 4 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program antara lain meliputi :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten / Kota
   - Program Pembinaan Perpustakaan
   - Program Pengelolaan Arsip
   - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

BAB IV

TABEL TC.33

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SERANGTAHUN ANGGARAN 2025 PERKIRAAN MAJU 2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah			**7.915.598.990**				**7.837.000.000**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang tersusun**	DPKD	100%	**189.256.988**			100%	**145.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DPKD	100%	55.976.988			100%	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)	Jumlah dokumen Perubahan - SKPD	DPKD	100%	14.120.000			100%	17.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan	DPKD	100%	109.160.000			100%	13.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat daerah	DPKD	100%	10.000.000			100%	15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DPKD	100%	**4.823.130.000**			100%	**5.025.000.000**

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gajih dan tunjangan bagi ASN	DPKD	100%	4.802.900.000			100%	5.000.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	DPKD	100%	14.230.000			100%	17.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun	DPKD	100%	6.000.000			100%	8.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPKD	100%	**1.170.781.874**			100%	**1.087.000.000**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DPKD	100%	12.000.000			100%	15.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan yang disediakan	DPKD	100%	492.815.100			100%	450.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan yang disediakan	DPKD	100%	20.001.000			100%	30.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket logistik kantor yg disedikan	DPKD	100%	194.899.500			100%	220.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	DPKD	100%	49.019.290			100%	52.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang2an yang disediakan	DPKD	100%	18.000.000			100%	20.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	DPKD	100%	384.046.984			100%	300.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DPKD	100%	**407.970.000**			100%	**250.000.000**
				Pengadaan Mebel		DPKD	100%	407.970.000			100%	250.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPKD	100%	**639.113.632**	**-**	**-**	100%	**680.000.000**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPKD	100%	262.313.632			100%	280.000.000

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran gaji pramubakti, Pengemudi, dan TKK	DPKD	100%	376.800.000			100%	400.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPKD	100%	**685.346.496**			100%	**650.000.000**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPKD	100%	180.000.000			100%	200.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan,dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPKD	100%	38.365.000			100%	40.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPKD	100%	43.282.000			100%	30.000.000
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yg dipelihara	DPKD	100%	27.001.800			100%	30.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		DPKD	100%	396.697.696			100%	350.000.000
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		DPKD	100%	**1.399.890.850**			100%	**1.600.000.000**
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Koleksi Perpustakaan	DPKD	100%	**1.056.066.050**			100%	**1.200.000.000**
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan elektronik yang dikembangkan dengan managemen layanan TIK berbasis ISO 20000	DPKD	100%	241.738.000			100%	300.000.000
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	DPKD	100%	34.409.950			100%	50.000.000
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	DPKD	100%	136.633.600			100%	170.000.000

				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DPKD	100%	50.000.050			100%	70.000.000
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	DPKD	100%	295.119.450			100%	350.000.000
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten kab/Kota		DPKD	100%	59.165.000			100%	60.000.000
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	DPKD	100%	239.000.000			100%	200.000.000
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DPKD	100%	**343.824.800**			100%	**400.000.000**
				Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran mebaca pada literasi satuan pendidikan	DPKD	100%	136.299.400			100%	160.000.000
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		DPKD	100%	106.109.500			100%	140.000.000
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendaptakan pengharagaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	DPKD	100%	101.415.900			100%	100.000.000
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		DPKD	100%	**536.798.760**	**-**	**-**	100%	**660.000.000**
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah / kecamatan /desa**	DPKD	100%	**490.718.100**			100%	**560.000.000**
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip**	DPKD	100%	**282.541.500**			100%	**310.000.000**
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	DPKD	100%	130.000.000			100%	150.000.000
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan	DPKD	100%	52.860.000			100%	60.000.000
				pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip baku	DPKD	100%	99.681.500			100%	100.000.000

				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip**	DPKD	100%	**72.840.000**			100%	**120.000.000**
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	DPKD	100%	72.840.000			100%	120.000.000
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**prosentase arsip yang telah terinput dalam SIKN**	DPKD	100%	**135.336.600**			100%	**130.000.000**
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	Jumlah layanan penyediaan infromasi akses dan layanan Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/Kota	DPKD	100%	111.176.600			100%	80.000.000
				Pemberdayaan kapasitas unit dan lembaga kearsipan daerah kabupaten lota				24.160.000				50.000.000
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		DPKD	100%	**46.080.660**			100%	**100.000.000**
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**prosentase arsip alih citra yang yang telah dilakukan autentifikasi**	DPKD	100%	**46.080.660**			100%	**100.000.000**
				penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyarakatan penjaminan keabsahan arsip	jumlah arsip hasil alih media yang telah dinilai dan ditetapkan keabsahannya	DPKD	100%	46.080.660			100%	100.000.000
JUMLAH								**9.852.288.600**				**10.097.000.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang.

Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2025 agar sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dankegiatan yang ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang diharapkan akan lebih terkoordinir, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan. Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagimana mestinya.

Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap pegawai yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan intropeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkanpelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab .

Demikian semoga menjadi pedoman selanjutnya.

Serang, Juli 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Serang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

ABER NURHADI

NIP. 19661216 199003 1 005